PEREKONOMIAN INDONESIA

DALAM KONTEKS MULTISEKTOR

Muhammad Sajidin, Hamidin Rasulu, Noor Fahmi Pramuji
La Parasit, Munir, Osu Oheoputra Husen, Milla Naeruz, Rini Nur
Doddy Ismunandar Bahari, Ranno Marlany Rachman
Nafia Ilhama Qurratu'aini, Muhammad Assagaf
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa
Muhammad Jurhadi Kadir, Andy Kurniawan, Aqshan Shadikin Nurdin

Editor
Laode Muhammad Arsal
Waode Munaeni

Perekonomian Indonesia Dalam Konteks Multisektor

Penulis

Muhammad Sajidin, Hamidin Rasulu, Noor Fahmi Pramuji,
La Parasit, Munir, Osu Oheoputra Husen, Milla Naeruz, Rini Nur,
Doddy Ismunandar Bahari, Ranno Marlany Rachman,
Nafia Ilhama Qurratu'aini, Muhammad Assagaf,
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa,
Muhammad Juhardi Kadir, Andi Kurniawan,
Aqsan Shadikin Nurdin

Editor

Laode Muhammad Arsal
Waode Munaeni

PENERBIT

PT. KAMIYA JAYA AQUATIC

Perekonomian Indonesia
Dalam Konteks Multisektor

Penulis : Muhammad Sajidin, Hamidin Rasulu, Noor Fahmi Pramuji, La Parasit, Munir, Osu Oheoputra Husen, Milla Naeruz, Rini Nur, Doddy Ismunandar Bahari, Ranno Marlany Rachman, Nafia Ilhama Qurratu'aini, Muhammad Assagaf, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Muhammad Juhardi Kadir, Andi Kurniawan, Aqsan Shadikin Nurdin

Editor : Laode Muhammad Arsal, Waode Munaeni

ISBN : 978-623-09-9327-5 (PDF)

Desain Sampul dan Tata Letak :
Faisal Alimaturahim

Penerbit :
PT. Kamiya Jaya Aquatic

Anggota IKAPI No. 001/MALUKUUTARA/2024

Redaksi :
RT 008 RW 003 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan,
Kota Ternate, Maluku Utara
Telp. : 0812-2279-3284
Email : kamiyajayaaquatic@gmail.com
Website : https://kjaquatic.com/

Distributor :
PT. Kamiya Jaya Aquatic

Cetakan Pertama : April 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Kehadiran pandemi Covid-19 telah mengguncang fondasi ekonomi global, termasuk Indonesia. Buku ini menjadi sebuah upaya untuk merangkum beragam aspek yang terkait dengan dinamika perekonomian Indonesia di tengah tantangan yang kompleks. Setiap bab dalam buku ini mengupas secara mendalam dampak, peran, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh sektor-sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Buku ini juga membahas peran penting sektor industri, pertanian, peternakan, kesehatan, transportasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perekonomian Indonesia, serta peran strategis sektor keuangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam era digitalisasi, tantangan dan peluang sektor e-commerce juga menjadi perhatian utama, sejalan dengan peran sektor pendidikan dalam mengembangkan SDM yang mampu bersaing di era global. Buku ini bukanlah sekadar kumpulan tulisan, melainkan sebuah narasi yang menggambarkan dinamika ekonomi Indonesia secara holistik. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi para pembaca untuk memahami dan menghadapi perubahan-perubahan penting dalam perekonomian Indonesia.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah memberikan dukungan. Semoga buku ini memberikan wawasan yang berharga dan mendorong diskusi yang membangun mengenai masa depan ekonomi Indonesia.

Salam,

Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....i
HALAMAN PENERBIT.....ii
PRAKATA.....iii
DAFTAR ISI.....iv
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR GAMBAR.....xi

Bab 1. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh : Muhammad Sajidin
1.1 Pandemi Covid-19.....1
1.2 Dampak Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Global.....3
1.3 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia5
1.4 Sektor-Sektor Ekonomi Di Indonesia Yang Terdampak Pandemi Covid-19.....11
Daftar Pustaka.....16

Bab 2. PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh : Hamidin Rasulu
2.1 Dasar Pemikiran Sektor Pertanian.....18
2.2 Pembangunan Sektor Pertanian.....22
2.3 Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian.....25
2.4 Nilai Investasi Di Sektor Pertanian.....27
2.5 Nilai Tukar Petani (NTP).....29
Daftar Pustaka.....32

Bab 3. TANTANGAN DAN PELUANG PARIWISATA DI INDONESIA
Oleh : Noor Fahmi Pramuji
3.1 Tantangan Sektor Pariwisata di Indonesia.....36
3.2 Peluang Sektor Pariwista Di Indonesia.....40

Bab 4. PERAN SEKTOR INDUSTRI DALAM MENGGERAKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: La Parasit

4.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri.....48
4.2 Inisiatif Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri.....49
4.3 Program Pemberdayaan Industri Lokal.....51
4.4 Stimulus Investasi Dalam Sektor Industri 52
4.5 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Industri 53
4.6 Promosi Ekspor Dan Perdagangan.....54
4.7 Industri Kreatif: Mesin Penggerak Ekonomi Indonesia.....56
Daftar Pustaka.....58

Bab 5. PERAN SEKTOR PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Munir

5.1 Peran Dan Potensi Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.....61
5.2 Dasar Perwujudan Jenis Potensi desa 62
5.3 Perlunya Pengenalan Potensi Desa Di Setiap Kabupaten Kota 63
5.4 Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Penghasilan Nasional 64
5.5 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Dalam Perluasan Lapangan Kerja 66
5.6 Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Sektor Peternakan 67
5.7 Keberlanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial 67
5.8 Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pengembangan Peternakan 68
5.9 Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Diversifikasi Produk.....68
5.10 Penutup.....69
Daftar Pustaka.....70

Bab 6. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Osu Oheoputra Husen
6.1 Sektor Pertanian....72
6.2 Sektor Perikanan....75
6.3 Peningkatan Risiko Bencana Alam....76
6.4 Pariwisata....79
6.5 Kesehatan Masyarakat....80
6.6 Infrastruktur dan Energi....81
Daftar Pustaka....83

Bab 7. PERAN SEKTOR KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Milla Naeruz
7.1 Sektor Keuangan....85
7.2 Industri Sektor Keuangan Di Indonesia....87
Daftar Pustaka....98

Bab 8. TANTANGAN DAN PELUANG SEKTOR *E-COMMERCE* DI INDONESIA
Oleh: Rini Nur
8.1 Pendahuluan....99
8.2 Perbedaan E-commerce dengan Marketplace....100
8.3 Kelebihan Berdagang Melalui E-commerce....101
8.4 Tipe-tipe E-commerce....102
8.5 Peluang E-commerce di Indonesia....103
8.6 Tantangan E-commerce di Indonesia....106
8.7 Pengiriman Yang Tertunda Dan Lambat....106
8.8 Biaya Pengiriman Yang Tinggi....107
8.9 Tidak Ada Jaminan Kualitas Produk....108
8.10 Layanan Purna Jual....109
8.11 Masalah Keamanan....110
8.12 Kepercayaan dalam pembayaran....112
8.13 Iklan yang menipu....114
8.14 Kurangnya Kebijakan Bagi Pelanggan....115
8.15 Pelanggaran Data Pribadi....117

8.16 Produk Terbatas Pada *e-commerce* 118
Daftar Pustaka 121

Bab 9. PERAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Doddy Ismunandar Bahari
9.1 Konteks dan Tantangan Hubungan Pendidikan dan Ekonomi di Indonesia 123
9.2 Keterkaitan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 126
9.3 Masalah penting yang harus diperbaiki dalam capaian pendidikan untuk mendukung perekonomian 134
Daftar Pustaka 137

Bab 10. PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Ranno Marlany Rachman
10.1 Pengantar 140
10.2 Peran Sektor Kesehatan Dalam Meningkatkan Produktivitas 143
10.3 Sektor Kesehatan Sebagai Penyerap Tenaga Kerja 146
10.4 Kontribusi Sektor Kesehatan Terhadap Ekonomi 149
10.5 Kebijakan Dan Strategi Meningkatkan Peran Sektor Kesehatan 153
Daftar Pustaka 157

Bab 11. TANTANGAN DAN PELUANG SEKTOR TRANSPORTASI DI INDONESIA
Oleh: Nafia Ilhama Qurratu'aini
11.1 Transportasi Dan Perekonomian 161
11.2 Peran Transportasi 161
11.3 Tantangan Transportasi Di Indonesia 162
11.4 Peluang Transportasi di Indonesia 163
11.5 Kemajuan teknologi transportasi 165
11.6 Sistem Integrasi Transportasi 166
11.7 Sistem Transportasi Berkelanjutan 167

Daftar Pustaka.....171

Bab 12. PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Muhammad Assagaf
12.1 Peran Bank Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi.....175
12.2 Peran Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Indonesia 177
12.3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 189
12.4 Peran aktif dalam perdagangan internasional 189
12.5 Peran Ekonomi Syariah Indonesia Dalam Perekonomian Global 190
12.6 Peran Keuangan Syariah Indonesia Dalam Keuangan Syariah Global 192
Daftar Pustaka.....194

Bab 13. SOSIOLOGI EKONOMI INDONESIA
Oleh: La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa
13.1 Pengenalan tentang Sosiologi Ekonomi 199
13.2 Konteks Sosiologi Ekonomi Indonesia 200
13.3 Konsep Dasar Sosiologi Ekonomi 201
13.4 Tokoh dan Pendekatan Utama dalam Sosiologi Ekonomi.....202
13.5 Relevansi Teori Sosiologi Ekonomi dengan Konteks Indonesia.....203
13.6 Struktur Sosial Durkheim dan Ekonomi Indonesia.....204
13.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Sosial-Ekonomi 205
13.8 Peran Institusi dalam Sosiologi Ekonomi 206
13.9 Dampak Institusi dan Organisasi terhadap Masyarakat 207
13.10 Analisis Organisasi Ekonomi di Indonesia.....209
13.11Analisis Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia.....210
13.12 Dampak Kesenjangan terhadap Masyarakat dan Ekonomi .211
13.13 Potensi dan Peluang untuk Pembangunan Sosial-Ekonomi Indonesia.....212
13.14 Penutup.....214
Daftar Pustaka.....215

Bab 14. PERAN EKOWISATA DI PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Andy Kurniawan
14.1 Pulau-Pulau Kecil Indonesia 221
14.2 Pulau-Pulau Kecil Terluar 223
14.3 Potensi Kawasan Pulau-Pulau Kecil 224
14.4 Jasa Lingkungan Ekonomi Tinggi 226
14.5 Permasalahan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil 227
14.6 Strategi Pegelolaan Pulau-Pulau Kecil 230
14.7 Ekowisata Penopang Ekonomi Masyarakat 234
14.8 Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional 235
Daftar Pustaka 238

Bab 15. HILIRISASI HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Aqshan Shadikin Nurdin
15.1 Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu 241
15.2 Pemanfaatan HHBK 249
15.3 Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 250
15.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan HHBK 252
15.5 Prioritas pada Pengembangan HHBK 254
15.6 Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu 255
15.7 Multi Usaha Kehutanan 257
15.8 Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak 259
15.9 Kelembagaan HHBK 260
Daftar Pustaka 262

BIODATA PENULIS 266

DAFTAR TABEL

2.1 Pengembangan Sektor Pertanian dan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 23
5.1 Proyeksi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan menurut 3 skenario 64
5.2 Proyeksi konsumsi dan produksi daging, 1999/2001-2050 66
6.1 Produktifitas Tanaman terhadap Iklim ekstrim Ket: nilai (-) penurunan produksi. 74
6.2 Indikator Ekonomi Makro yang dipengaruhi Bencana 78

DAFTAR GAMBAR

1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2020 6
1.2 Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Menangani Covid-19 .. 8
1.3 PERPPU No.1 Tahun 2020 9
1.4 Perkembangan Langkah Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Extraordinary dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 10
1.5 Hasil Survey BPS Dampak Covid Ke Sektor Usaha 12
1.6 Tren Pertumbuhan Industri Farmasi & obattradisional Tahun 2020 14
2.1 Menciptakan sistem pertanian terpadu menggunakan Pendekatan Subsektor atau Pendekatan Kawasan 21
2.2 Nilai Investasi Pertanian Indonesia Tahun 2009-2024 28
2.3 Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian 29
2.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di Indonesia 30
5.1 Tren Data Pertumbuhan Industri Peternakan, 2011 – 2023 65
6.1 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertaninan 72
6.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) 73
6.3 Perubahan pola hujan sebagai indikator perubahan iklim 74
6.4 Kenaikan suhu muka laut antara tahun 1950 sampai 2005 di Indonesia 76
6.5 Dampak Ekonomi Makro Bencana Alam 77
7.1 Siklus Perkembangan Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi 87
7.2 Jenis Bank dan Produknya 87
7.3 Lembaga Keuangan Non Bank 92
7.4 Produk Lembaga Keuangan non bank 92
8.1 Negara-negara terkemuka berdasarkan pertumbuhan penjualan e-commerce ritel pada Tahun 2023 104
8.2 Tantangan utama belanja online di Indonesia per Januari 2023 106
8.3 Tampilan Penilaian Produk pada Platform E-commerce Shopee 109
9.1 Sebaran Rata-rata Tingkat Pendidikan Antar Negara Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 127
9.2 Perkembangan Rata-rata Tingkat Pendidikan di Indonesia 128
9.3 Peningkatan Pendidikan pada Perekonomian 133

9.4 Sebaran Persentase Jumlah Penduduk pada Berbagai Strata Pendidikan Tahun 2016 135
12.1. Porsi Aset Perbankan Syariah Tahun 2022 175
12.2 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Tahun 2018-2022 176
14.1. Pendapatan Sektor Pariwisata Nasional 236
15.1. Produksi HHBK dan Provisi Sumber Daya Hutan 2018-2022 244
15.2 Produksi HHBK berdasarkan pengelompokan jenis (2018-2022) .. 246
15.3 Pelaku usaha HHBK berdasarkan PSDH tertinggi 248

Bab 1

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Muhammad Sajidin

1.1. Pandemi Covid-19

Meningkatnya kasus COVID-19 telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara global, yang dapat mempengaruhi stabilitas Indonesia. Dampak COVID-19 pada ekonomi bersifat global dan melibatkan sektor-sektor yang luas. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pandemi ini telah menyebabkan beberapa dampak ekonomi signifikan, dalam konteks pertumbuhan ekonomi Pandemi COVID-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Aktivitas ekonomi mengalami kontraksi karena penurunan produksi, penutupan bisnis, dan penurunan permintaan.

Virus SARS-CoV-2, atau virus corona jenis baru, menyebabkan pandemi COVID-19. "Pandemi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana penyakit menyebar di seluruh dunia dan mempengaruhi banyak negara dan populasi. Setelah pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir tahun 2019, virus COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke berbagai tempat di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari ringan hingga berat, termasuk demam, batuk, sesak napas, kelelahan, dan gejala lainnya. Beberapa individu

dapat mengalami komplikasi serius, terutama bagi mereka yang sudah ada sebelumnya atau yang berisiko tinggi. Pandemi COVID-19 telah memicu respons kesehatan global yang masif, termasuk langkah-langkah seperti lockdown, pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan perubahan besar dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Upaya untuk mengatasi pandemi melibatkan vaksinasi massal, tes COVID-19, isolasi dan karantina, serta promosi langkah-langkah kebersihan dan protokol kesehatan masyarakat.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus corona (Cov) menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Hingga saat ini, 188 negara mengklaim telah terinfeksi virus Corona. Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan, investasi, dan pariwisata setelah virus Corona menyebar ke seluruh dunia. Jutaan orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus corona 2019 atau COVID-19 . Diperkirakan akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan dapat menyebabkan perekonomian suatu negara runtuh. Karena kurangnya permintaan, yang dapat mendorong produksi, beberapa bisnis akan terhenti, menyebabkan jutaan orang menjadi kemiskinan (Fahrika & Roy, 2020).

Pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pengangguran meningkat. Banyak sektor, terutama yang terkait dengan pariwisata, perhotelan, dan transportasi, mengalami pemutusan hubungan kerja atau pemangkasan gaji. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola situasi ini melalui kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. Upaya vaksinasi dan implementasi protokol kesehatan tetap menjadi fokus dalam rangka menangani dampak COVID-19. Tidak terkecuali pada bidang ekonomi Sektor ekonomi, terutama pariwisata, perhotelan, dan transportasi, mengalami dampak signifikan akibat pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis selama pandemi.

1.2. Dampak Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Global

Pandemi Covid-19 Memiliki dampak yang sangat signifikan pada tatanan hidup masyarakat di seluruh negara, terutama pada sektor perekonomian tidak terkecuali di indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam rantai pasokan global yang menyebabkan penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat dari perlambatan pertumbungan ekonomi global, yang turun drastis dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi 2,87% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan di berbagai negara, yang meningkat dari 5,28 % pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020.

Dampak COVID-19 pada ekonomi bersifat global dan melibatkan sektor-sektor yang luas. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pandemi ini telah menyebabkan beberapa dampak ekonomi signifikan, dalam konteks pertumbuhan ekonomi Pandemi COVID-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Untuk membahas pandemi COVID-19, pertemuan G20 yang diadakan di Arab Saudi pada tanggal 22 dan 23 Februari 2020 terdiri dari Indonesia, Argentina, Australia, Brasil, Amerika Serikat, China, Perancis, Jerman, India, Uni Eropa, Arab Saudi, Inggris, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Italia, Turki, Jepang, dan Kanada. Pertemuan G20 fokus pada pandemi COVID-19. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyampaikan rasa empati mereka kepada negara dan penduduknya yang terkena dampaknya (Spagnuolo, 2020). G20 negara-negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama internasional sebagai akibat dari tekanan global terhadap COVID-19. Selain itu, dunia harus mulai memperhatikan berbagai potensi risiko dan komitmen untuk menerapkan kebijakan struktural moneter dan fiskal (Hua, 2020).

Aktivitas ekonomi mengalami kontraksi karena penurunan produksi, penutupan bisnis, dan penurunan permintaan. Pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pengangguran meningkat. Banyak sektor, terutama yang terkait dengan pariwisata, perhotelan, dan transportasi, mengalami pemutusan hubungan kerja atau pemangkasan gaji

adanya pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada Pelaku usaha kecil dan menengah, yang seringkali lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, terdampak secara signifikan. Karena penyebaran COVID-19 yang terus meningkat di dalam dan luar negeri, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan sebesar 2,1%. Selain itu, bank Indonesia (BI) telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%, atau hanya sekitar 2,5%. Pandemi COVID-19 akan berdampak negatif terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, karena menurunnya harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan.

Beberapa perusahaan kesulitan memenuhi pesanan dan memproduksi barang penurunan permintaan energi global mengakibatkan penurunan harga minyak. Industri minyak dan gas menghadapi tantangan ekonomi akibat penurunan pendapatan dan investasi. Toko-toko fisik menghadapi penurunan penjualan karena pembatasan pergerakan dan ketidaknyamanan konsumen untuk berbelanja secara langsung. Banyak bisnis ritel beralih ke model e-commerce untuk bertahan. Pasar keuangan dan investasi mengalami volatilitas tinggi, dan beberapa sektor keuangan tertentu mengalami tekanan ekonomi. Penurunan investasi dan aktivitas perdagangan dapat terjadi sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi.

Ekonomi merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi faktor terpenting dalam kehidupan manusia, perekonomian juga mendukung pembangunan nasional karena pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara harus menetapkan kebijakan yang mengatur perekonomian Indonesia dan menjamin perekonomian masyarakatnya (Hanoatubun, 2020). Antara dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi Indonesia adalah banyaknya PHK yang terjadi, penurunan PMI manufaktur Indonesia yang mencapai 45,3% pada Maret 2020, penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I, inflasi yang mencapai 2,96% per tahun (yoy) yang disebabkan oleh harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020, dan keterbatasan penerbangan yang menyebabkan penurunan pendapatan. Ada kerugian sebesar Rp 207 miliar yang dirasakan. Antara Januari dan Maret 2020, 12.703 penerbangan dibatalkan dari 15 bandara, dan 6 ribu hotel mengalami penurunan

penempatan (okupansi) sebesar 50 %. Hal ini dapat menyebabkan kerugian devisa pariwisata (Hanoatubun, 2020).

Pandemi COVID-19 menyebabkan sentimen investor menjadi lebih rendah, yang menyebabkan pergerakan pasar ke arah yang cenderung negatif. Untuk mendorong perekonomian, langkah-langkah strategi terkait fiskal dan moneter sangat diperlukan. Seiring berkembangnya kasus COVID-19, pasar mengalami lonjakan yang lebih negatif. Selain itu, tertundanya ekspor Indonesia ke Tiongkok berdampak besar pada perekonomian Indonesia (Nasution, Erlina, & Muda, 2020).

Selain menjadi masalah kesehatan internasional, pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam situasi terburuk, Indonesia memiliki peluang pertumbuhan negatif sebesar 0,4%. COVID-19 paling berdampak pada sektor rumah tangga. Penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), suku bunga fasilitas deposito dan pinjamanan, serta kemajuan ekonomi Indonesia di tingkat internasional dan domestik dievaluasi untuk menjaga inflasi dan stabilitas (Hamzah, Syukur, Salam, & Junaidi, 2021).

1.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia

Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai masalah utama tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan banyak kerugian bagi perekonomian Indonesia. Setelah kasus COVID-19 meningkat dengan cepat, pemerintah membuat kebijakan untuk menangani pandemi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Semua aktivitas biasa dihentikan karena adanya PSBB. Semua operasi industri dan kantor terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Sektor pendidikan, layanan publik, semua tempat beribadah, pusat perbelanjaan, restoran, dan lokasi wisata juga mengalami hal yang sama. Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi menurun akibat dari aktivitas sosial atau fisik ini (Iskandar, 2020).

Di Indonesia, pandemi COVID-19 menyebabkan PHK, PMI manufaktur Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga, dan penurunan okupansi pariwisata (Zulkipli & Muharir, 2021). Dampak COVID-19 di Indonesia masih terus dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola situasi ini

melalui kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. Upaya vaksinasi dan implementasi protokol kesehatan tetap menjadi fokus dalam rangka menangani dampak COVID-19. Tidak terkecuali pada Sektor ekonomi, terutama pariwisata, perhotelan, dan transportasi, mengalami dampak signifikan akibat pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis selama pandemi.

Akibat dari pandemi ini Banyak pelaku usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan ekonomi, bahkan beberapa di antaranya harus menutup usahanya. Menurut Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), sekitar 30 juta UMKM di Indonesia bangkrut pada tahun 2020 karena Covid-19. Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 64,7 juta, tetapi setelah pandemi Covid-19 selesai, jumlah UMKM di Indonesia naik menjadi 34 juta pada tahun 2020.

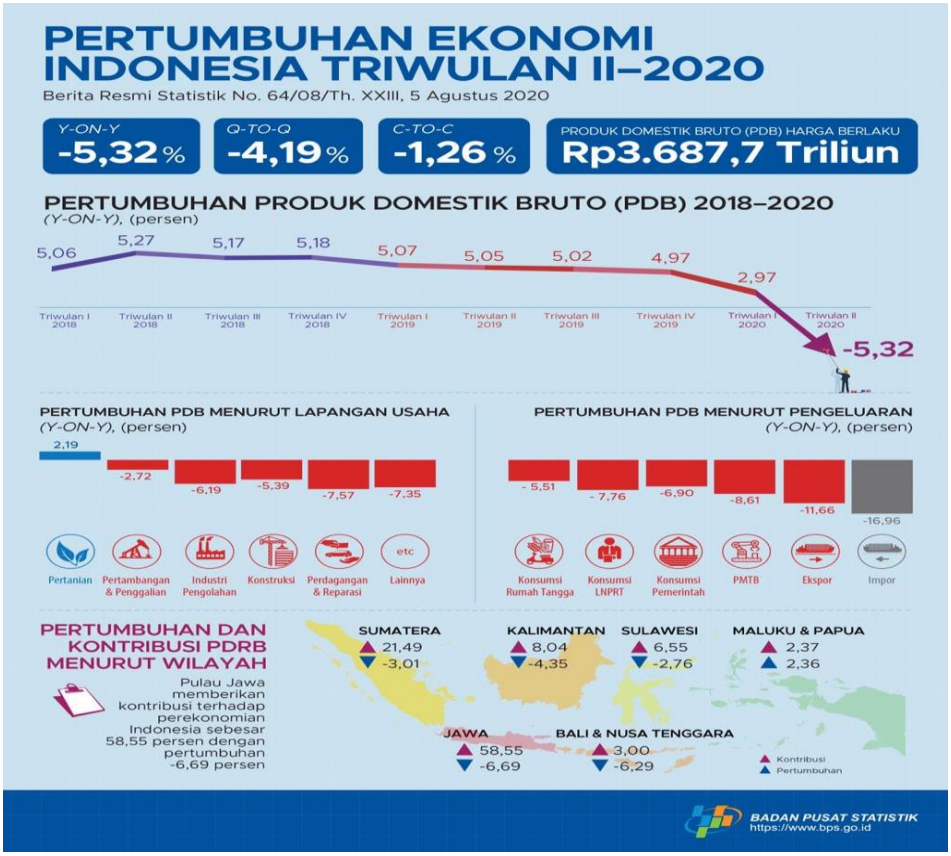

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2020 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Pandemi Covid-19 terus di hadapi pemerintah indonesia dalam upaya menguatkan ekonomi ditengah badai inflasi global yang mempengaruhi berbagai sektor. Berdasarkan survei yang dilakukan bank Indonesia, Bank Indonesia mengatakan sebanyak 87,5 persen UMKM terkena dampak pandemi Covid-19, dengan sekitar 93,2 persen di antaranya mengalami dampak negatif terhadap penjualan. Dari enam sektor UMKM, hanya usaha masyarakat pertanian yang terus tumbuh sebesar 16,7% pada Desember 2020. Industri pengolahan hanya tumbuh sebesar 1,5%, konstruksi turun 17,9%, perdagangan turun 3,2%, real estate naik 13%, dan jasa masyarakat naik 2% (Indonesia, 2021).

Menurut data BPS (2021), perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di bawah ini: Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 15,04% dari sisi produksi; dari sisi pengeluaran, Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami pengurangan terkontraksi sebesar 14,71 persen (Statistik, 2021).

Pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang ekonomi, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan PDB di tingkat nasional dan PDRB di tingkat wilayah dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi, tidak peduli apakah ada perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan di Indonesia adalah ukuran yang mengukur perubahan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu ekonomi tertentu. Ini menggambarkan nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama suatu periode waktu, biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, serta kondisi ekonomi global.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa daya beli masyarakat, atau tingkat konsumsi rumah tangga yang menurun, disebabkan oleh kebijakan kebijakan sosial skala besar (PSBB). Daya beli masyarakat turun drastis dari 5,02% pada kuartal I-2019 menjadi 2,84%

yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ada beberapa bagian konsumsi rumah tangga yang terus meningkat, seperti yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlengkapan rumah tangga. Namun, penurunan konsumsi pakaian, bahan makanan, perawatan kesehatan, transportasi, dan komunikasi tidak dapat diimbangi oleh semua ini (Santosa, 2020).

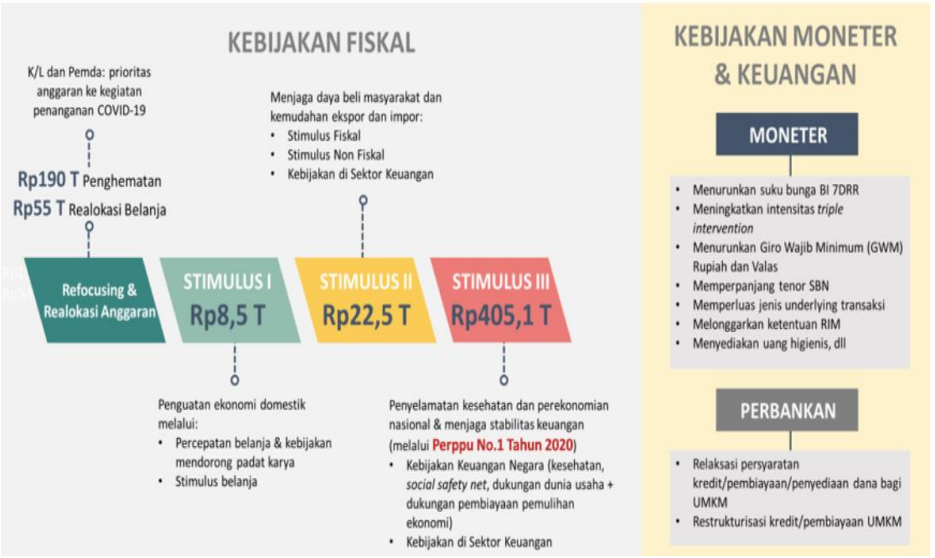

Gambar 1.2 Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Menangani Covid-19 (Sumber: Kementerian Keuangan, 2020)

Dalam situasi seperti ini, pemerintah mengambil tindakan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang dirasakan oleh warga negara Indonesia. Salah satu langkah yang diambil untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini berdampak langsung pada sektor rekreasi alam dan bidang lainnya, yang mengalami penurunan yang signifikan (Tambunan & Fauziyah, 2023). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan/atau untuk stabilitas sistem keuangan.

Perppu tersebut mencakup kebijakan fiskal dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Gambar 1.3 PERPPU No.1 Tahun 2020
(Sumber: Kementerian Keuangan, 2020)

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dibuat untuk memberi Pemerintah dan otoritas keuangan landasan hukum untuk melakukan kebijakan dan tindakan luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Langkah-langkah luar biasa ini untuk menjaga masyarakat, perekonomian, dan keuangan termasuk menerima pelebaran defisit yang melebihi 3% dari PDB dan mengambil tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Selain itu, inflasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pemerintah Indonesia mampu menjaga inflasi di bawah 10% atau dalam kategori ringan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Ramadhani, 2023). Selama tahun 2019 dan 2020, inflasi rata-rata 0,18 persen. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang kompleks, sehingga memerlukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam, termasuk cara impuls inflasi mengalir ke perekonomian riil.

Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk stimulus fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan alokasi, distribusi, dan stabilisasi didasarkan pada sembilan undang-undang pemerintah.

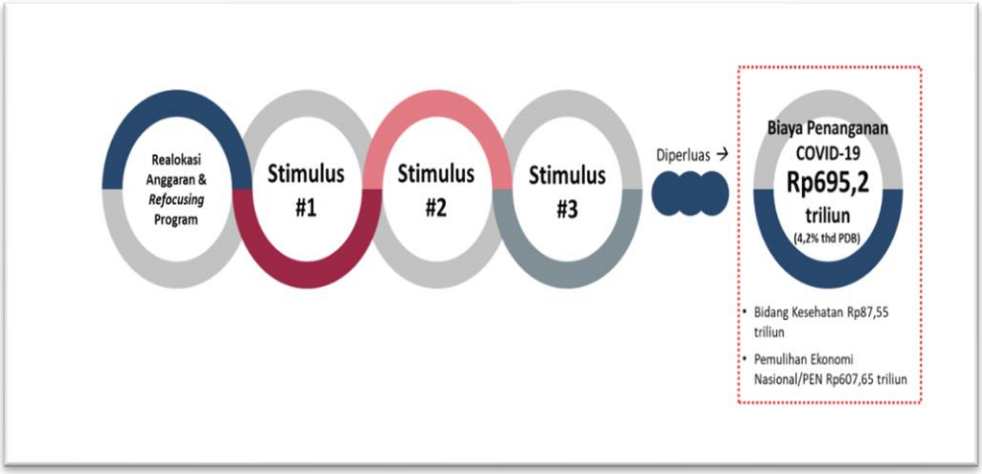

Gambar 1.4 Perkembangan Langkah Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Extraordinary dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
(Sumber: Kementerian Keuangan, 2020)

Langkah pertama adalah pemerintah harus memberikan masukan dan sumber daya yang memadai untuk mengarahkan kebijakannya kepada kelompok rentan baru yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kelompok-kelompok ini termasuk usaha yang membutuhkan massa, pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, buruh yang terkena PHK, petani, masyarakat miskin, dan lainnya.

Untuk membuat kebijakan yang paling cocok untuk menghadapi kondisi yang berubah-ubah, pemerintah Indonesia terus beradaptasi dan memperkuat tindakan yang telah diambil. Kebijakan stimulus dan pendanaan penanganan COVID-19 yang telah ditetapkan sebelumnya telah diubah oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap pandemi yang semakin meluas dan berdampak semakin besar pada perekonomian. Stimulus Paket Ketiga yang dimulai pada bulan Februari hingga April 2020 terus diperkuat untuk memastikan bahwa program dan anggaran mereka menjadi alat yang optimal untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi (Kemenkeu, 2020).

Dari sektor fiskal Pemerintah Indonesia meluncurkan sejumlah paket stimulus fiskal untuk mendukung sektor-sektor terdampak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan Paket stimulus ini mencakup bantuan sosial, subsidi gaji, insentif pajak, dan program-program lainnya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi ketenagakerjaan, dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak. Pemerintah terus mengkaji dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan pandemi dan kondisi ekonomi.

Selain itu Pemerintah Indonesia memberikan subsidi gaji kepada pekerja dan pelaku usaha agar dapat mempertahankan pekerjaan. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja dan meminimalkan dampak pada ketenagakerjaan. Program bantuan sosial diperkuat untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak, termasuk pekerja informal dan keluarga miskin. Bantuan sembako dan tunai diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan relaksasi fiskal dan pajak untuk meringankan beban pelaku usaha. Ini termasuk penundaan pembayaran pajak, keringanan pajak, dan insentif-insetif pajak lainnyaBank Indonesia (BI), otoritas moneter Indonesia, telah menerapkan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini termasuk penurunan suku bunga dan kebijakan likuiditas. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibuat oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap dampak ekonomi COVID-19. Program ini mencakup sejumlah stimulus dan insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah tetap fokus pada program pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi jangka panjang.

1.4. Sektor-Sektor Ekonomi Di Indonesia Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Sejumlah sektor industri mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi COVID-19, terutama karena pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, dan perubahan perilaku konsumen. dampak pada setiap sektor dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah,

tingkat ketergantungan pada pertemuan fisik, dan seberapa cepat industri tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi. Beberapa sektor mungkin juga menunjukkan ketahanan lebih baik atau bahkan pertumbuhan sebagai hasil dari perubahan tren dan perilaku konsumen.

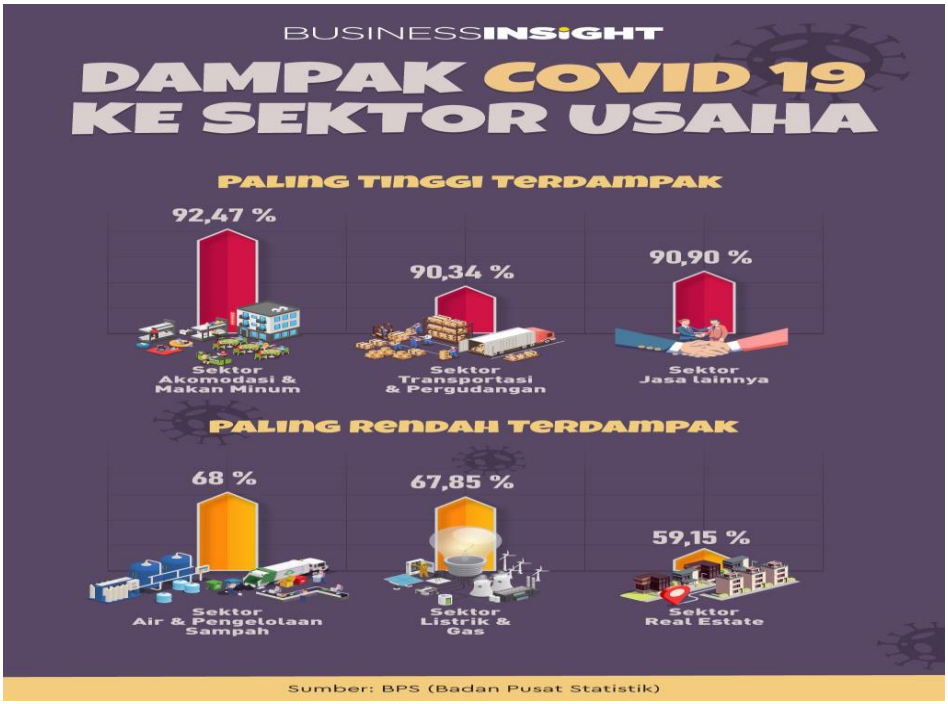

Gambar 1.5 Hasil Survey BPS Dampak Covid Ke Sektor Usaha
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Sektor pariwisata dan perdagangan adalah salah satu yang paling terdampak, dengan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan, penutupan hotel, dan penurunan aktivitas perdagangan, selain itu Gangguan pada rantai pasokan global terjadi akibat penutupan pabrik, pembatasan pergerakan barang, dan penurunan produksi. Hal ini mempengaruhi sektor manufaktur dan distribusi, Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan kebijakan stimulus dan pemulihan ekonomi untuk mengatasi dampak COVID-19. Kebijakan ini mencakup dukungan finansial langsung kepada individu, pelaku usaha, dan sektor-sektor terdampak Di sisi lain, pandemi juga mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Bisnis dan konsumen mulai mengadopsi lebih banyak teknologi digital untuk menjaga

kelangsungan operasional, selain itu Sektor perjalanan juga merupakan salah satu yang paling terdampak. Pembatasan perjalanan, penutupan bandara menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan dan pendapatan industri ini. Bisnis perhotelan dan restoran terpukul keras karena penurunan pesanan dan penutupan sementara tempat-tempat makan. Kebijakan pembatasan kapasitas dan protokol kesehatan juga mempengaruhi operasional mereka.

Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 82,85% dunia usaha yang terkena dampak pandemi virus corona Covid -19 mengalami penurunan pendapatan. Sektor akomodasi dan makan/minum mencatat penurunan pendapatan terbesar, sebesar 92,47%, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan (Statistik, 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, Untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM), kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta sangat penting. Upaya untuk meningkatkan akses modal, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi transformasi digital dapat membantu UMKM beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang baru. Karena pada saat pandemi Pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah pelanggan dan penjualan bagi banyak UMKM.

Hal ini berdampak langsung pada pendapatan dan omset mereka, UMKM sering menghadapi kesulitan dalam mengakses modal untuk menjalankan operasional dan memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Pandemi memperumit situasi ini karena banyak lembaga keuangan menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Beberapa UMKM terpaksa melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional dan bertahan selama masa sulit. UMKM yang belum beralih ke model bisnis digital menghadapi kendala dalam mencapai pelanggan selama periode pembatasan fisik. Kurangnya kehadiran online dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual produk atau jasa UMKM memerlukan modal kerja untuk melanjutkan operasional mereka.

Ketidakpastian ekonomi dan perubahan perilaku konsumen selama pandemi membuat sulit bagi UMKM untuk merencanakan dan mengelola modal kerja mereka. Beberapa UMKM berhasil mengatasi

dampak dengan berinovasi dan menyesuaikan model bisnis mereka. Beberapa di antaranya mulai memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Pemerintah Indonesia merespons dampak pada UMKM dengan meluncurkan berbagai program stimulus dan bantuan, termasuk subsidi bunga kredit, penundaan pembayaran pinjaman, dan insentif pajak untuk membantu UMKM bertahan. Dampak COVID-19 mendorong peningkatan kesadaran digital di kalangan UMKM. Banyak yang beralih ke pembelajaran digital untuk meningkatkan daya saing dalam Usaha mereka.

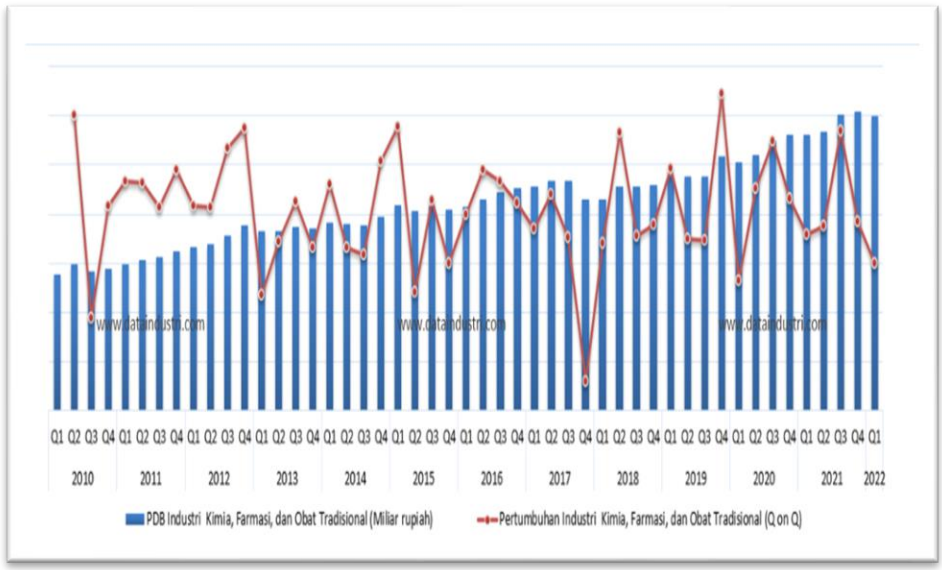

Gambar 1.6 Tren Pertumbuhan Industri Farmasi & obattradisional Tahun 2020 (Sumber: dataindustri.com)

Sektor industri penerbangan dan transportasi menghadapi penurunan signifikan dalam jumlah penumpang. Penutupan rute penerbangan, penurunan permintaan, dan perubahan kebijakan perjalanan internasional mempengaruhi bisnis ini. Industri hiburan, seperti konser, pertunjukan, dan acara langsung, mengalami pemutusan atau penundaan. Pada awal Februari, sebaran kasus baru COVID-19 mulai menurun, mengakibatkan penurunan drastis pada jumlah pelanggan transportasi (Nasution, Erlina, & Muda, 2020).

Terlepas dari kenyataan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif secara umum, beberapa sektor industri juga mengalami pertumbuhan atau keuntungan sebagai respons terhadap perubahan perilaku dan kebutuhan selama masa pandemi, Industri teknologi dan e-commerce mengalami pertumbuhan yang signifikan selama pandemi. keuntungan ini seringkali bersifat kontekstual dan terkait dengan evolusi perilaku konsumen selama pandemi. Selain itu, perubahan keuntungan ini tidak merata di seluruh sektor dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal dan global. Permintaan untuk perangkat elektronik, layanan online, dan e-commerce meningkat karena orang lebih banyak berbelanja secara daring dan bekerja dari rumah.

Industri kesehatan dan farmasi mengalami peningkatan permintaan. Perusahaan farmasi, produsen alat kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan online mendapatkan perhatian yang lebih besar selama pandemi. Layanan pengiriman makanan, e-commerce, dan penyedia layanan online lainnya mengalami pertumbuhan pesat karena lebih banyak orang memilih untuk berbelanja dan memesan secara daring. Platform komunikasi dan kolaborasi online, seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Slack, mengalami lonjakan penggunaan seiring dengan peningkatan pekerjaan dari rumah dan pembatasan pergerakan, Layanan streaming video, platform gaming, dan industri hiburan online lainnya mengalami peningkatan penggunaan karena lebih banyak orang menghabiskan waktu di rumah, sektor pendidikan daring dan teknologi pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih besar dengan adanya kebutuhan untuk pembelajaran jarak jauh dan solusi edukasi online. Beberapa sektor energi terbarukan mengalami pertumbuhan karena perhatian yang meningkat terhadap isu lingkungan dan upaya untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Beberapa bagian industri pertanian, terutama yang berkaitan dengan produksi dan distribusi makanan segar, tetap stabil atau bahkan mengalami pertumbuhan karena kebutuhan akan pasokan pangan.

Daftar Pustaka

Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia. *I N O V A S I*, 206-213.

Hamzah, M., Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 382-388.

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 146-153.

Hua, J. &. (2020). Corona Virus (COVID-19) "Infodemic" and Emerging Issues through a Data Lens: The Case of China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 212-224.

Indonesia, B. (2021, Maret 19). *Bisnis.com*. Diambil kembali dari Bisnis.cpm: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19

Iskandar, A. P. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid -19. *Jurnal Sosial &*, 625-638.

Kemenkeu. (2020, Agustus 15). *pen kemenkeu*. Diambil kembali dari pen kemenkeu: https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantangancovid

Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 212-224.

Ramadhani, Y. C. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 200-212.

Santosa. (2020). Analisis dampak pandemi covid 19 terhadap perekonomian lokal dari sudut pandang jenis pekerjaan dan pendapatan terhadap tingkat daya beli masyarakat di jawa tengah. *prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 253-267.

Spagnuolo, G. D. (2020). Covid-19 Outbreak: An Overview on Dentistry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 212-224.

Statistik, B. P. (2021, Februari 5). *bps.go.id*. Diambil kembali dari bps.go.id: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen-c-to-c.html

Tambunan, N., & Fauziyah, S. (2023). Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 719-726.

Zulkipli, & Muharir. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jimesha*, 7-12.

Bab 2

PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Hamidin Rasulu

2.1. Dasar Pemikiran Sektor Pertanian

Pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan aspek keunggulan bangsa merupakan basis pembangunan sebagaimana tertuang pada arah kebijakan dan tujuan Pembangunan Nasional, yang harus dipedomani daerah dalam melaksanakan pembangunan. Eskalasi kebijakan pembangunan, dengan demikian harus sejalan dengan pembangunan sector unggulan khususnya komoditas penting yang menjadi basis kehidupan mayoritas Masyarakat Indonesia, dengan luaran (*out-put*) bercirikan pro-poor, pro-growth dan sustainable. Potensi sektor pertanian cukup besar dengan keberadaan faktor pendukung yang merupakan sektor unggulan dalam bentuk tenaga kerja yang terserap, kepemilikan modal usaha, dan kemajuan aspek teknologi. Sektor unggulan daerah berperan penting dalam penciptaan peluang investasi apabila pemerintah fokus memberdayakan potensi sektor dimaksud. Sampai saat ini, problem pembangunan daerah adalah dalam hal penetapan prioritas berdasarkan pendekatan sektoral, atau berdasarkan pendekatan regional yaitu menentukan sektor prioritas daerah menggunakan pendekatan holistik berbasis kebutuhan masyarakat, dalam konteks hajat hidup yang mampu menguatkan taraf hidup masyarakat daerah secara berkelanjutan.

Karena menyediakan makanan, pakan ternak, dan bioenergi, sektor pertanian memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Perekonomian nasional didukung secara strategis oleh sektor pertanian, terutama dengan memastikan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, meningkatkan devisa negara melalui pengembangan agroindusti hilir dan ekspor produk pertanian. Sebaliknya, ada tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Diperkirakan Tahun 2050, bahwa Jumlah penduduk Indonesia dapat mencapai 322 juta, sebagai negara terbesar kelima di dunia setelah Negara Tiongkok, Negara India, Negara Nigeria, dan Negara Amerika Serikat.

Sektor pertanian diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kualitas terbaik yang merupakan bagian dari unsur ketahanan pangan Indonesia yang telah ditetapkan melalui Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan peraturan lain yaitu Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat di angka 5,7 dan 6,0% per tahun, didorong terjadinya peningkatan produktivitas, nilai investasi yang berkelanjutan, adanya lapangan kerja yang memadai, serta mutu SDM yang berdaya saing. Indikator makro ekonomi Indonesia yang meningkat pada tahun 2024 akan menunjukkan peningkatan kualitas ekonomi, termasuk stabilisasi inflasi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan rasio gini, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Salah satu komponen RPJMN 2020–2024 adalah pembangunan pertanian. Ini adalah tahapan keempat dan merupakan kelanjutannya melalui RPJPN 2005–2025. Tujuan dari RPJMN (2020–2024) adalah terciptanya warga negara Indonesia menjadi tumbuh secara mandiri, adil, maju, dan makmur dengan percepatan pembangunan disemua lini pembangunan, termasuk didalamnya sektor pertanian. Ketercapaian pembangunan melalui struktur perekonomian yang kuat dan didukung oleh adanya keunggulan kompetitif disemua wilayah dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar domestik maupun mancanegara. Sehingga pembangunan di sektor pertanian dapat

menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan mencukupi kebutuhan rakyat.

Sektor ekonomi dan sektor pertanian akan menjadi kunci pengembangan suatu wilayah dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama diwilayah kepulauan yang membutuhkan akses transportasi yang memadai dalam mencukupi ketersediaan pangan. Dalam menciptakan lapangan usaha baru disektor pertanian, maka pemerintah bersama masyarakat dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk mengolah sumberdaya alam secara kemitraan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan warga negara.

Keberadaan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA di Indonesia terutama disubsektor perkebunan, terdapat lima komoditas utama: kelapa (*Cocos nucifera* L.), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), pala (*Myristica* spp.), kakao (*Theobroma cacao* L) dan jambu mete (*Anacardium occidentale*). Dari kelima komoditas tersebut, kelapa menduduki peringkat pertama dengan 213.053 ha pertanian dengan sekitar 50.000 kepala keluarga.

Masyarakat Indonesia terus menghadapi ketakutan pangan. Sebagai informasi yang dikumpulkan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dari 100 kabupaten yang ada di Indonesia dianggap berpotensi mengalami masalah pangan. Meskipun kebutuhan pangan di daerah tersebut tinggi, ada masalah dengan dukungan dari sektor pertanian serta rendahnya akses masyarakat di wilayah tertentu terhadap kebutuhan makanan (Ashari dan Purwantini, 2012). Ketahanan pangan keluarga erat terkait dengan kerawanan pangan. Kerawanan pangan, menurut Saliem dan Marisa (2006), adalah adanya ketidak tercapaian kebutuhan pangan di dalam rumah tangga yang terjadi di tingkat wilayah.

Terjaminnya aksestabilitas komoditas pangan bagi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, sehat dan aman untuk dikonsumsi baik pada kondisi normal maupun dalam kondisi rawan bencana (Ariningsih dan Rachman 2008). Jika makanan yang tersedia bagi keluarga, baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitas dari makanan yang disediakan, murah, aman, dapat dijumpai dengan mudah serta mudah dijangkau sesuai dengan yang tercantum dalam UU RI No. 7 Tahun 1996, kondisi tersebut akan terpenuhi. Disajikan pada

Gambar 2.1 Menciptakan sistem pertanian terpadu menggunakan Pendekatan Subsektor atau Pendekatan Kawasan.

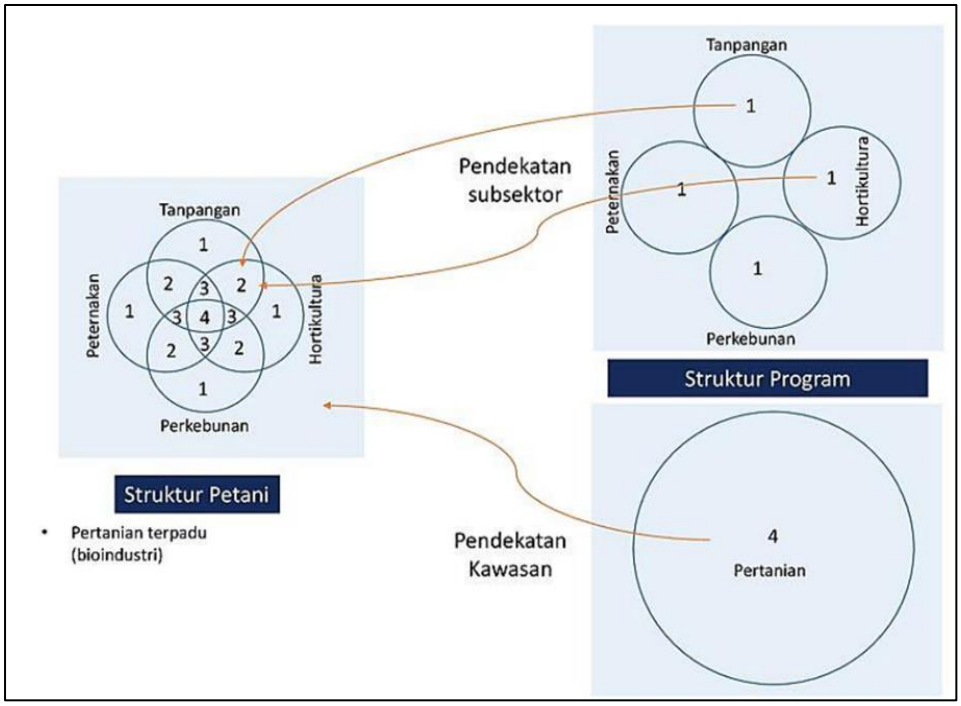

Gambar 2.1 Menciptakan sistem pertanian terpadu menggunakan Pendekatan Subsektor atau Pendekatan Kawasan
(Sumber: Siregar, 2023)

Lahan pekarangan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Salah satu kekuatan untuk mewujudkan kebutuhan pangan keluarga yaitu pemanfaatan lahan pekarangan dengan menerapkan konsep urban farming serta konsep pertanian terpadu. Menurut Siswati (2012), Sistem pertanian terpadu merupakan kombinasi dari sistem pertanian yang dilakukan secara tradisional dan secara moderen dibidang pertanian yang dewasan ini terus berkembang. Dalam sistem pertanian terpadu, dengan pemanfaatan lahan yang baik akan menghasilkan usaha tani yang mampu berkembang baik di sektor pertanian maupun sektor peternakan. Namun, sistem pertanian terpadu pada lahan terbatas biasanya memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan yang tersedia yang tidak dimanafaatkan namun memiliki nilai ekonomi tinggi.

2.2. Pembangunan Sektor Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan komponen penting untuk pembangunan nasional dan mempunya peran utama dalam membangun pondasi yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menjadi kunci penyerapan tenaga kerja bagi suatu negara, karena kebutuhan pangan menjadi prioritas utama. Berdasarkan hasil sensus pertanian di tahun 2009, bahwa 45,3% dari 237 juta penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Selain sumber daya minyak dan gas bumi, pertanian, sebagai penyedia atau sumber bahan baku industri, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanaman pangan dan hortikultura adalah tanaman yang bernilai ekonomis di sektor pertanian. Komoditas pertanian seperti palawija, padi kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, serta tanaman obat (Toga). Selain itu sistem distribusi berupa tataniaga agribisnis komoditas hasil pertanian dapat membuka lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan petani (Rachmawati dan Gunawan, 2020).

Konsep embangunan pertanian dewasa ini menjadi komponen penting dari kondisi pembangunan nasional dan mempunyai peran penting dalam membangun fondasi ekonomi negara. Ini ditunjukkan oleh banyaknya orang yang bekerja di sektor pertanian, sehingga mampu meningkatkan perekonomian serta menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat besar terutama di wilayah pedesaan (Dewi dkk, 2016).

Menurut teori pembangunan, bahwa kontribusi di sektor pertanian dalam mengukur Produk Domestic Bruto (PDB) suatu Negara berkorelasi negatif dengan perkembangan ekonominya. Namun, semakin besar pemasukan di sektor pertanian suatu Negara bukan berarti bahwa suatu negara tersebut lebih terbelakang di mata masyarakat internasional. Dalam mewujudkan tranformasi yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan melalui bidang agribisnis dan pengelolaan sistem agroindustri dapat menyumbang perekonomian suatu negara. Namun demikian bahwa pembangunan di sektor pertanian masih difokuskan pada kegiatan usahatani (*on farm agribusiness*) dengan mengacu pada peningkatan nilai produksi dan lemahnya sistem agribisnis (Nurif, 2010). Pengembangan Sektor Pertanian dan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Pengembangan Sektor Pertanian dan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	SDGs	Keterangan
1		Pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan akan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan adanya lapangan kerja yang semakin banyak dan mampu menyerap SDM.
2		Dengan meningkatkan kemandirian pangan lokal melalui pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan, sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
3		Pertanian hortikultura diharapkan dapat menyediakan produk hortikultura yang aman, bergizi, dan murah bagi masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.
4		Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, pengembangan sektor pertanian yang lebih luas mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.
5		Untuk meningkatkan luas panen dan jumlah produk pertanian yang diproduksi, pengembangan pertanian diharapkan menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai.

Produk tanaman pangan, hortikultura, dan palawija menjadi bagian penting dari biaya hidup di Indonesia karena fungsinya sebagai bahan pokok (Purwantini, 2012). Mayoritas penduduk Indonesia bergerak di sektor pertanian dan menjadi kunci penting dalam pembangunan nasional. Akibatnya, dalam mendorong adanya pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah akan melakukan pengembangan agribisnis melalui program pembangunan nasional untuk mendapatkan produk pertanian yang berdaya saing, termasuk produk hasil hutan bukan kayu yang merupakan komoditi kehutanan

dan peternakan serta perkebunan, yang kompetitif dan mampu meningkatkan pendapatan bagi petani.

Tidak diragukan lagi bahwa sektor pertanian mampu menjadi kunci utama pembangunan di seluruh kawasan di Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat secara langsung maupun kebutuhan di sektor industri pengolahan yang berada di wilayah Indonesia dapat menghasilkan produk industri yang bisa dijual dipasar domestik maupun berimbas pada kebutuhan ekspor komoditas pertanian, Selanjutnya dapat memperluas akses pasar, serta adanya ketersedian lapangan kerja yang memadai, dan adanya pembangunan pertanian (Rachmawati dan Gunawan, 2020).

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan harus difokuskan pada masyarakat pedesaan di Indonesia, terutama mereka yang bergantung pada pekerjaan pertanian (Yusdja dan Ilham, 2006). Ada sejumlah alasan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, pertanian bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, yang membuatnya sangat penting (Kusumaningrum, 2019). Kedua, pertanian juga bertanggung jawab untuk menyediakan agroindustri dengan raw material, atau bahan baku, sehingga industri dapat terus menghasilkan produk. Ketiga, sektor pertanian berkontribusi pada peningkatan devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian; keempat, sektor pertanian menawarkan kesempatan kerja bagi pekerja pedesaan, menyumbang 51% dari seluruh tenaga kerja Indonesia (Parmadi dkk, 2018).

Lebih dari separuh pendapatan nasional dihasilkan oleh pertanian, yang merupakan mata pencaharian utama di negara terbelakang. Namun demikian, pertanian masih stagnan dan merupakan bagian yang tidak sebanding dari pendapatan nasional. Sebagai contoh, pertanian menyumbang 50% dari pendapatan nasional di India dan sekitar 70% penduduknya bekerja di dalamnya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian ialah pemilikan tanah yang tidak ekonomis, pembagian pemilikan lahan, sistem pengolahan tanah yang buruk, yang ditunjukkan oleh sewa tinggi dan pengolahan tanah yang tidak aman, kurangnya fasilitas kredit yang memadai, utang, ketergantungan pada turunnya hujan, penggunaan metode produksi

yang usang, dan tekanan penduduk yang besar pada tanah (Suryani dan Dariah, 2012).

Sebagian besar ahli setuju dengan gagasan bahwa pembangunan sektor pertanian adalah pilihan terbaik untuk dikembangkan di Indonesia. Namun, mengingat kondisi sektor pertanian saat ini, mungkin masih ada waktu yang sangat lama untuk mencapainya. Menurut Hasan dan Yustika (2008), sektor pertanian Indonesia masih menghadapi setidaknya dua masalah penting. Pertama dan terpenting, luas lahan yang dimiliki sangat kecil.

Indonesia tidak hanya berfokus pada satu aspek pembangunan pertanian. Sebaliknya, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang saling terkait, seperti inovasi teknologi, perbaikan prasarana, pembangunan sistem logistik nasional, dan monetisasi sektor pedesaan, yang merupakan taktik ekonomi paling penting (Arifin, 2005).

Dalam konteks pembangunan nasional, analisis kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia menjadi topik yang sangat strategis dan penting. Selain itu, karena pertanian masih mencerminkan "mayoritas" (Subejo, 2007), pertanian juga memiliki prospek yang sangat besar dan juga memiliki potensi ancaman yang sangat besar jika berbagai kebijakan yang terkait tidak dikelola dan dirumuskan dengan baik.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian

Pengaruh sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: (i) menyediakan pasokan pangan yang terus meningkat kepada populasi yang semakin meningkat; (ii) meningkatkan permintaan akan produk industri, yang mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan tersier. (iii) memungkinkan ekspor hasil pertanian terus-menerus untuk menghasilkan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal untuk pembangunan; (iv) meningkatkan pendapatan desa yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah; dan (v) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Muta'ali, 2019).

Produksi pangan adalah bagian terbesar dari sektor pertanian di negara terbelakang. Jika output meningkat sebagai akibat dari peningkatan produktivitas, maka pendapatan petani akan meningkat,

dan peningkatan pendapatan per kapita akan sangat meningkatkan permintaan pangan. Namun, jika kenaikan produksi komoditi pertanian tertinggal di belakang pertumbuhan permintaannya, maka harga bahan makanan akan naik. Bahan pangan dapat diimpor dari luar negeri untuk menutup kelangkaan dalam negeri dan mencegah harga membumbung, tetapi impor ini mungkin akan mengorbankan barang-barang modal yang diperlukan untuk pembangunan.

Peningkatan surplus pertanian meningkatkan daya beli perdesaan, mendorong pertumbuhan industri. Di negara terbelakang, pasar untuk barang manufaktur sangat kecil, dan para petani, perkeja ladang, dan keluarga mereka, yang merupakan dua pertiga atau empat per lima dari total penduduk, sangat miskin sehingga mereka tidak dapat membeli apa pun dari pabrik, kecuali sedikit yang mereka beli. Meningkatnya daya beli di daerah pedesaan sebagai akibat perluasan output dan produktivitas pertanian akan cenderung meningkatkan permintaan barang manufaktur dan memperluas ukuran pasar, yang akan menyebabkan perluasan sektor industri. Selanjutnya, permintaan akan input seperti pupuk dan peralata akan meningkat, menyebabkan perluasan sektor industri. Industrialisasi telah menggantikan peran pertanian dengan pembangunan ekonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah. Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan perekonomian sebuah wilayah.

Menurut teori basis ekonomi, besarnya kegiatan ekspor menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Dewi et al. (2022), hanya kegiatan ekonomi yang berbasis dan non-basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Teori basis ekonomi sangat sederhana. Menurut teori ini, perekonomian sebuah wilayah terdiri dari dua sektor: sektor basis (dikenal sebagai sektor ekspor) dan sektor bukan basis (dikenal sebagai sektor lokal). Struktur perekonomian didalam suatu wilayah dapat menggunakan teori tersebut dengan membedakan dua sektor:

1. Sektor unggulan yang terdiri dari kegiatan yang mencakup pasar lokal/domestik serta pasar internasional. Secara tidak langsung

daerah tersebut memiliki kemampuan untuk malakukan kegiatan ekspor baik berupa barang atau jasa dari satu pasar ke pasar lain.

2. Sektor non-unggulan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal.

Keunggulan kompetitif terhadap komoditi untuk yang dimiliki suatu daerah/negara dapat didefinisikan sebagai keunggulannya dibandingkan dengan komoditi lain di wilayah tersebut. Dengan keunggulan yang komperatif terhadap pengembangan suatu daerah dilihat dari kegiatan perekonomian daripada nilai tambah yang riil. Sektor unggulan yang dapat memberikan keuntungan besar yaitu sektor pertanian, dengan memberikan hasil produksi dan nilai tambah yang tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan produk dari sektor sejenis di sektor lain.

2.4. Nilai Investasi Di Sektor Pertanian

Proses pembangunan terkadang ditentukan oleh unsur-unsur ekonomi, hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada disuatu wilayah dan merupakan komponen utama dalam realitas pembangunan ekonomi regional. Sampai saat ini, rencana pembangunan suatu daerah dapat mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan secara bertahap melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Kemampuan daerah untuk berkembang tidak tergantung pada peran sektor-sektor yang ada dalam perekonomian. Nilai Investasi sektor Pertanian Indonesia antara Tahun 2009 – 2024 disajikan pada **Gambar 2.2.**

Gambar 2.2 Nilai Investasi Pertanian Indonesia Tahun 2009-2024 (Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2021)

Sembilan sektor ekonomi yang membentuk PDRB diklasifikasikan sebagai berikut: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) konstruksi; (6) perdagangan, hotel, dan restoran; (7) transportasi dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan (9) sektor jasa lainnya. Sangat penting untuk membentuk struktur ekonomi yang kuat jika ada sinergi antara berbagai sektor. Sinergi antara sektor pertanian, industri, dan jasa yang kuat akan menghasilkan perekonomian yang efisien, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Semakin besar kontribusi yang dibuat oleh setiap sektor ekonomi terhadap PDRB suatu wilayah, semakin baik pertumbuhan ekonomi akan berjalan. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian disajikan pada **Gambar 2.3**.

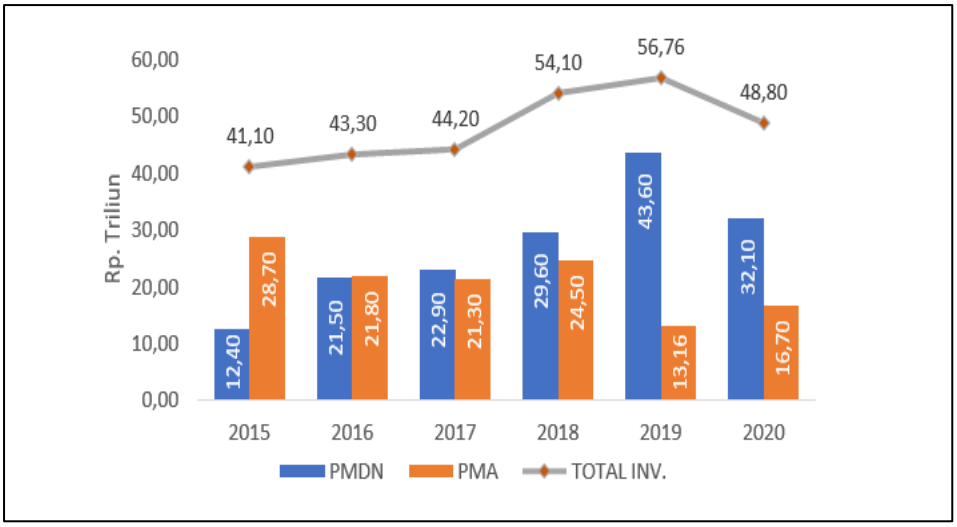

Gambar 2.3. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian (Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2021)

Struktur ekonomi Indonesia masih agraris, tetapi sekarang mulai berstruktur industri. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi tidak mendukung industrialisasi ini. Saat ini, satu-satunya sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi adalah pertanian, seperti yang dinyatakan oleh Jayanah (2015). Selain mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi, pertanian juga berfungsi sebagai input bagi industri dan penyedia bahan makanan.

2.5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) adalah merupakan indikator dalam mengukur kesejahteraan petani. NTP merupakan rasio antara indeks harga yang dibayarkan oleh petani dan indeks harga diterima oleh petani, yang diwakili dengan satuan persentase. Indeks harga yang diterima oleh petani (IT) merupakan indeks harga memperlihatkan perkembangan harga yang terdapat di produsen atas hasil produksi yang dilakukan petani. Badan Pusat Statistik RI melakukan tugasnya sebagai lembaga yang mengumpulkan data serta melakukan perhitungan nilai NTP secara berkala dan dilaporkan secara ril di akhir tahun. Harga produk petani dapat dilihat dari nilai IT. Selain itu, untuk menghitung pendapatan

petani dapat menggunakan perhitungan indeks IT ini sebagai data dukung yang akurat. Indeks IT dihitung dari nilai jual hasil pertanian yang dimiliki petani; komoditas pertanian diantaranya hasil palawija, padi, perkebunan rakyat, peternakan, buah, sayuran, dan komoditas perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya (BPS-Statistik Indonesia, 2021).

Nilai tukar petani dapat berubah seiring waktu dan bervariasi di setiap tempat. Nilai tukar petani dihitung secara lokal dan nasional. Indikator nilai tukar petani tidak termasuk dalam tujuan pembangunan karena cenderung mengabaikan kondisi pembangunan sektor pertanian di pedesaan, karena mengutamakan pendirian industri serta permodalan. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur daya beli dan tingkat kemampuan para petani. Demikian juga bahwa NTP adalah indikator daya tukar (*terms of trade*) atas produk pertanian berupa barang dan jasa yang dapat dikonsumsi serta menghitung biaya produksi. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia di sajikan pada **Gambar 2.4** berikut.

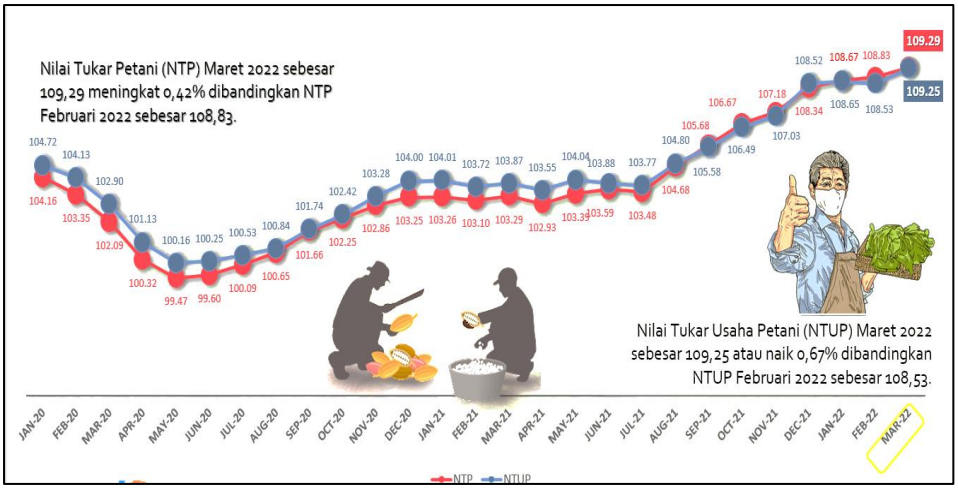

Gambar 2.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di Indonesia
(Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2021)

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), yang digunakan pemerintah selain NTP, sehingga indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian usaha di sektor pertanian. NTUP

didasarkan pada adanya pendapatan yang diperoleh dengan adanya kenaikan atau rendahnya harga produk pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan/penurunan harga suatu barang atau jasa yang dibeli dari proses produksi. Nilai NTUP (pertanian sempit tanpa perikanan) hanya sebesar 107,44 pada tahun 2015, meningkat signifikan hingga 112,17 pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa dalam hal perdagangan, daya tukar, atau istilah perdagangan, dari produk pertanian dengan biaya produksi, atau profitabilitas, meningkat.

Daftar Pustaka

Arifin, B. (2005). Pembangunan pertanian: paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi. Grasindo.

Ariningsih, E., & Rachman, H. P. (2008). Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, *6*(3), 239-255.

Ashari, S., & Purwantini, T. B. (2012, July). Potensi dan prospek pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan. In *Forum penelitian agro ekonomi* (Vol. 30, No. 1, 13-30).

BPS-Statistik Indonesia. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2021. *Www.Bps.Go.Id*, *13*, 12.

BPS-Statistik Indonesia. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2022. *Www.Bps.Go.Id*,

Dewi, R. F., Prihanto, P. H., & Edy, J. K. (2016). Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, *5*(1), 19-25.

Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). Analisis Peran Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Perekonomian Wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, *2*(2), 229-248.

Hasan, M. F., & Yustika, A. E. (2008). Situasi Pangan Kedepan dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *JURNAL PANGAN*, *17*(2), 3-16.

Jayanah, F. 2015. *Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pdb Sektor Pertanian Indonesia (Periode Januari 2015–Oktober 2018)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).

Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan sektor pertanian sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian indonesia. *Transaksi*, *11*(1), 80-89.

Muta'ali, L. (2019). *Dinamika peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di Indonesia*. UGM PRESS.

Nurif, M. (2010). Pembangunan ekonomi berbasis agribisnis sebagai wujud dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, *3*(2), 124-138.

Parmadi, P., Emilia, E., & Zulgani, Z. (2018). Daya saing produk unggulan sektor pertanian Indonesia dalam hubungannya dengan pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *13*(2), 77-86.

Purwantini, T. B. (2012). Potensi dan prospek pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan. In *Forum penelitian agro ekonomi* (Vol. 30, No. 1, pp. 13-30).

Rachmawati, R. R., & Gunawan, E. (2020). Peranan petani milenial mendukung ekspor hasil pertanian di Indonesia. In *Forum penelitian agro ekonomi* (Vol. 38, No. 1, pp. 67-87). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.

Saliem, H. P., Lakolo, E. M., Purwantini, T. B., Ariani, M., & Marisa, Y. (2001). Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional [Laporan Hasil Penelitian]. *Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*.

Saliem, H. P., & Marisa, Y. (2006). Prospek Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 1-13).

Siregar, M. A. R. (2023). Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Penerapan Sistem Pertanian Terpadu.

Siswati, L. (2012). Ekonomi Rumah Tangga Petani: Pola Pertanian Terpadu di Propinsi Riau (Household Economic Farmers: integrated farming in the province of Riau). *Jurnal Embrio*, *5*(01), 8-17.

Subejo, S. (2007). Memahami dan mengkritisi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia (comprehending and

perceiving to agriculture development policy in Indonesia). *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, *3*(1), 14.

Suryani, E., & Dariah, A. (2012). Peningkatan produktivitas tanah melalui sistem agroforestri. *J. Sumberd. Lahan*, *6*.

Yusdja, Y., & Ilham, N. (2006). Arah kebijakan pembangunan peternakan rakyat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, *4*(1), 18-38.

Bab 3

TANTANGAN DAN PELUANG PARIWISATA DI INDONESIA

Oleh : Noor Fahmi Pramuji

Salah satu sektor terdampak di Indonesia dari pandemi COVID-19 adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan beragam kebijakan dan program untuk membantu proses pemulihan ekonomi nasional termasuk sektor pariwisata. Proses pemulihan sektor pariwisata memperoleh momentumnya melalui kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada enam bulan pertama tahun 2022. Jumlah peningkatan mencapai 926 persen yaitu 743 ribu jumlah wisatawan mancanegara jika dibandingkan dengan tahun 2021 (Kemenparekraf, 2022).

Adanya kebijakan pembatasan sosial secara nasional dan internasional akibat pandemi COVID-19, telah mengubah landskap kepariwisataan nasional (baik destinasi, industri, kelembagaan, maupun pemasaran), serta perilaku wisatawan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi *new normal* hingga masa new normal selanjutnya pasca pandemi COVID-19. Mindset, pola berwisata hingga strategi kepariwisataan nasional perlu dikonsep kembali sehingga dapat bangkit dari keterpurukan dan dapat bersipa untuk menggeliat kembali. Tentunya tantangan dan peluang akan menyertai proses pemulihan Kembali ketahanan ekonomi nasional sektor pariwisata pasca COVID-19 yang dijabarkan sebagai berikut.

3.1 Tantangan Sektor Pariwisata di Indonesia

3.1.1 Proses pemulihan ekonomi nasional

Pemulihan ekonomi global dan nasional menjadi tantangan serius dalam pemulihan dan pembangunan ketahanan ekonomi nasional termasuk sektor pariwisata. Adapun pemulihan ekonomi ini sangatlah bergantung pada pencabutan kebijakan pembatasan sosia yang hampir diterapkan oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sehingga membatasi mobilitas global dan nasional juga pemulihan bergantung pada kecepatan dan ketepatan penanganan beragam varian baru virus COVID-19 tersebut. Kaitannya adalah jika penyebaran virus varian baru lebih cepat, sifatnya lebih menular dan mematikan maka pertumbuhan ekonomi global akan melambat sehingga proses pemulihan ekonomi pun ikut melambat.

Namun demikian, tantangan ini diatasi dengan cukup taktis oleh pemerintah secara global termasuk pemerintah Indonesia melalui kebijakan *herd immunity*. Langkah ini berdampak pada tren mobilitas masyarakat. Kebijakan pemberian vaksin booster hingga dosis ketiga menimbulkan opini public. Yaitu perasaan aman untuk melakukan beragam aktivitas di luar rumah seperti sedia kala termasuk melakukan rekreasi wisata.

Persepsi public pun semakin kuat sehingga public pun optimis akan Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan dampak dari pandemi COVID-19. Kepercayaan publik ini kemudian turut berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan ekonomi nasional. Diantaranya mendukung kebangkitan sektor pariwisata nasional.

3.1.2 Instabilitas ekonomi politik global

Ketidakstabilan situasi politik dan ekonomi internasional menjadi tantangan sendiri dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Krisis ekonomi serta perang yang terjadi di kawasan lain turut mempengaruhi tingkat pemulihan sektor pariwisata. Diantaranya, invasi Rusia terhadap Ukraina dan invasi Israel terhadap Gaza. Kedua kejadian invasi di tingkat global ini berpengaruh terhadapa pariwisata internasional, secara khusus

terhadap sektor penerbangan. Invasi ini mengakibatkan kenaikan harga minyak global sehingga berpengaruh langsung terhadap kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang atau harga avtur. Berdasarkan data IATA (2023) harga bahan bakar JET menembus kenaikan 80 persen dari tahun 2021. Adapun UNWTO (2023) menyebutkan harga minyak mengalami kenaikan secara konstan dan belum pernah stabil ke harga normal semenjak tanggal 24 Februari 2022. Pada akhirnya, ini berdampak terhadap inflasi negara-negara lain termasuk Indonesia serta berikutnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan bagi sektor pariwisata, ini mempengaruhi kenaikan harga tiket pesawat. Sehingga mempengaruhi pilihan untuk tidak bepergian atau berwisata lintas pulau atau wilayah dengan menggunakan jasa penerbangan. McKinsey (2022) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 hutang industri penerbangan melebihi 180 miliar dolar akibat pandemi COVID-19. Ini mengakibatkan kenaikan harga tiket pesawat terbang mencapai sekitar 3 persen.

Tantangan kenaikan harga tiket pesawat ini dapat ditaktisi dengan memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan domestic yang memanfaatkan sarana transportasi darat dan laut. Selain itu, juga dengan peningkatan kualitas layanan industri penerbangan dan digitalisasi. Sehingga konsumen pun tetap merasa puas meskipun harus membayar lebih dalam perjalanan wisatanya.

Salah satu isu lainnya terkait instabilitas ekonomi politik yaitu inflasi dan resesi. BBC (2022) menyebutkan bahwa salah satu negara yang terdaftar diantara 15 negara dunia yang terancam resesi global akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 yang hanya mencapai 3,6 persen adalah Indonesia. Inflasi global ini kembali memaksa bank sentral dunia mengambil langkah kebijakan moneter berupa pengetatan suku bunga. Kebijakan ini diprediksi dapat mempengaruhi resesi global.

Salah satu sektor terdampak dari situasi resesi dan kenaikan inflasi adalah sektor konsumsi non-primer. Masyarakat akan membatasi pengeluaran konsumsi non-primer termasuk biaya perjalanan wisata. Oleh karenanya, sektor pariwisata perlu memodifikasi layanan jasa yang ditawarkan untuk tetap bertahan. Upaya mengalihkan ke layanan paket wisata berbasis digital menjadi

strategi dalam mempertahankan permintaan jasa sektor wisata yang sudah ada.

3.1.3 Era *metaverse*

Tren metaverse turut mempenagruhi pertumbuhan sektor pariwisata global. Konsep aktivitas kehidupan manusia yang didominasi dengan aktivitas berbasis virtual. Kemampuan adaptasi mengikuti perkembangan tren digital dan virtual menjadi tantangan sendiri dalam dunia pariwisata Indonesia kedepan. Pelaku industri pariwisata harus mengikuti tren global yang tersedia untuk tetap *exist* dengan meningkatkan kapasitas teknolongi kearah pariwisata berbasis metaverse. Pola berwisata yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan sedari dini misalnya industri MICE Indonesia dapat mulai menawarkan jasa *in room entertainment* dengan menggunakan *virtual reality headset*. Destinasi wisata dapat dikemas dalam *video virtual reality*. Berwisata melalui *virtual reality* dapat dilakukan terlebih dahulu untuk memantik motivasi berwisata langsung di destinasi wisata nyata.

Fungsi *virtual reality* dan *avatar* adalah menggantikan bentuk fisik dan kehadiran manusia di dunia digital seperti di dunia nyata. Industri MICE sebagai industri pariwisata yang paling berpleuang dapat menghadirkan layanan video 2 Dimensi untuk menghadir konser di hall, berbelanja dan mencoba produk di pameran, partisipasi seminar atau *event* dalam format teknologi *metaverse.* Dengan menggunakan alat virtual reality, penonton dapat merasakan pengalaman *immersive* dan berinteraksi seperti avatar.

3.1.4 Perubahan Tren *Mass Tourism* menjadi *Green and Quality Tourism*

Pembatasan sosial selama masa pandemi, turut mengubah pola berwisata. Tren berwisata secara massal dengan memperhatikan pentingnya kuantitas dalam kunjungan wisatawan berubah drastis. Wisatawan perlahan mengubah paradigma berwisata dengan memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Perjalanan wisata tetap memperhatikan *social distancing* dan memenuhi standar CHSE.

Para penyedia layanan wisata perlu memperhatikan kualitas produk wisata yang ditawarkan. Pengalaman dalam berwisata menjadi perhatian dan prioritas dalam pola perilaku wisatawan pasca pandemi sehingga muncullah istilah *quality tourism*. Pentingnya keberlanjutan lingkungan, destinasi ekowisata juga menjadi prioritas dalam perjalanan wisata. Hal ini karena berkaitan dengan persoalan kesehatan wisatawan. Sehingga muncullah istilah green tourism. Yang kemudian berkembang memunculkan fenomena *voluntourism*.

Di mana wisatawan tidak sekedar menghabiskan waktu untuk berwisata dengan menikmati atraksi wisata konvensional, namun turut berkontribusi dalam menjaga alam dengan berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan peduli lingkungan. Aktivitas ini kemudian menjadi atraksi wisata baru dalam perjalanan wisata sehingga menghasilkan pengalaman baru dalam berwisata yang menjadi target para wisatawan *quality tourism*.

3.1.5 Ketersediaan sarana dan prasarana wisata berkelanjutan dan berbasis digital

Salah satu tantangan dalam pembangunan pariwisata Indoensia kedepan adalah ketersediaan fasilitas umum dan penunjang sektor wisata. Antara lain transportasi umum berstandar protocol kesehatan yang terjaga baik dan benar serta bersertifikat CHSE. Fasilitas transportasi umum yang dilengkapi tempat duduk nyaman dan terdapat handsanitizer. Pengalihan penggunaan transportasi umum, juga dapat membantu pengurangan polusi udara. Moda transportasi lainnya yaitu pemanfaatan kendaraan listrik. Kendaraan ini berbasis energi alternatif. Penggunaan moda transportasi di daerah wisata menjadi salah satu sumber penyumbang emisi karbon yang berisiko terhadap keindahan dan keasrian wisata berbasis alam di Indonesia.

Selain itu, digitalisasi bandara merupakan sarana penunjang prosedur kesehatan pasca pandemi. Penerapan sistem *smart airport* memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya secara *end to end*. Kemudahan ini mencakup sistem *self-check via barcode* pada layar monitor di bandara, penggunaan alat pendeteksi logam dan thermal scan untuk

memeriksa suhu tubuh wisatawan, dan layanan klaim bagasi mandiri, yang semuanya berbasis digital serta meminimalisir kontak fisik. Ini merupakan inovasi *contactless procedure* yang merangkum proses *pre-entry check*, *security check*, hingga *boarding* penumpang di bandara.

Di sektor industri resto, tantangan yang dapat berkembang diantaranya penyediaan *outdoor resto* dikarenakan sirkulasi udara lebih baik, ruang yang lebih luas dan terbuka. Selain itu, ketersediaan makanan sehat dan *plant-based food* juga menjadi salah satu tantangan. Adaptasi gaya hidup berbasis CHSE (*cleanliness, healthy, safety, dan environment*) meningkat pasca pandemi. Gaya hidup ini mengarahkan masyarakay untuk mengonsumsi makanan bergizi secara seimbang agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain menjadi tantangan, hal ini dapat menjadi peluang besar untuk wisata kuliner berbasis produk makanan sehat.

3.2 Peluang Sektor Pariwista Di Indonesia

3.2.1 Tren gaya hidup 'berkelanjutan'

Masyarakat menjadi lebih peduli dan sadar terhadap isu lingkungan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, masyarakat juga mulai perlahan mengubah paradigma berwisatanya menuju arah pariwisata berkelanjutan. Adanya pembatasan sosial mengurangi mobilitas sehingga berpengaruh terhadap lingkungan terutama kualitas udara dari polusi. Hasil studi Hukohodo Institute of Live and Living (HILL) ASEAN (2020) *dalam* Maulina (2021) menyebutkan bahwa kesadaran akan pentingnya dampak produk terhadap diri sendiri dan lingkungan mulai disadari oleh sekitar 86 persen masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan salah satu aspek dalam pariwisata berkelanjutan. Wisatawan berwisata dengan memperhatikan kelestarian alam, keamanan, kesehatan, kenyamanan, prinsip edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini untuk mencari pengalaman beriwisata yang otentik.

Data Nature Climate Change (2018) *dalam* Hendriyani (2021) memaparkan bahwa emisi global sebesar 8 persen disumbang oleh sektor pariwisata, dimana jasa transportasi menyumbang sekitar 49

persen. Olehnya, Kemenparekraf meluncurkan program *carbon footprint* pada tahun 2022. Program ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk menikmati perjalanan wisatanya sembari tetap sadar dan peduli terhadap lingkungan. Pasar pariwisata berkelanjutan pun meningkat pasca pandemi. Ketertarikan untuk mengetahui ekowisata menjadi faktor utama bagi sekitar 90 persen wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Adapun 89 persen meyakini pentingnya melakukan berjalanan wisata yang berkelanjutan. Selain itu, wisatawan yang berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dalam perjalanan wisatanya mencapai 69 persen, serta komitmen lainnya untuk pengurangan produk sekali pakai, penggunaan produk daur ulang, serta penggunaan energi alternatif dalam aktivitas wisatanya. Tren gaya hidup berkelanjutan ini kedepan dapat diubah menjadi potensi dalam pengembangan ekowisata dan produk serta layanan jasa wisata di Indonesia.

3.2.2 Fenomena wisatawan *hybrid working* dan *digital nomads*

Transformasi digital didukung dengan perkembangan *Internet of Things (IoT)* telah mengubah pola kerja dari konvensional menjadi bekerja tanpa Batasan ruangan kerja. Perubahan paradigma ini kemudian mendorong kemunculan fenomena pekerja *hybrid working* dan *digital nomads*. Fenomena ini menjadi popular pasca pandemi, dimana para pekerja kantoran harus membiasakan diri dengan skema kerja *work from anywhere*. Survei global yang diselenggarakan oleh GitHub (2021) menyatakan bahwa dari 3 perusahaan terdapat 1 perusahaan yang menerapkan 100% kebijakan kerja *remote* dan perusahaan yang menerapkan sistem *hybrid-remote working* sebanyak 42 persen.

Sebagai contoh, Berdasrkan data MBO Partner (2020) bahwa jumlah pekerja *digital nomad* di Amerika Serikat mengalami peningkatan mencapai 96 persen yakni dari 3,2 juta pekerja menjadi 6,3 juta pekerja. Adanya peningkatan tren ini tentu menjadi peluang bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. Laporan indeks *work from anywhere* menyebutkan bahwa Bali menduduki posisi 56 dari 75 negara lokasi para pekerja *remote*. Adapun kota Jakarta menempati posisi 13 sebagai kota pilihan teratas di Indonesia sebagai lokasi

bekerja secara remote. Kedua kota ini berpotensi menjadi destinasi baru masa depan bagi para pekerja *remote* dan *digital nomads* di dunia. Kedua kota ini menjadi pilihan dikarenakan kemudahan infrastruktur dan harga yang bersaing yang ditawarkan.

3.2.3 Kebangkitan ekonomi kreatif lokal

Fenomena kebangkitan industri ekonomi kreatif yang menghasilkan produk lokal menjadi salah satu peluang untuk mendukung pemulihan pariwisata nasional. Adanya inovasi produk lokal, serta peningkatan pengguna layanan e-commerce menjadi faktor pendukung. Adanya pembatasan sosial, menjadikan masyarakat mengubah pola belanja konvensional menjadi *e-commerce*. Ini kemudian dimanfaatkan oleh brand lokal untuk berinovasi. Program-program nasional untuk mendukung produk lokal dan belanja melalui *e-commerce* dengan tawaran diskon dan kemudahan lainnya bagi konsumen menjadi surga baru bagi konsumen nasional. Setiap pembelian produk dalam negeri yang mencapai Rp400 Triliun akan berdampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen (Humas Kemenperin 2022). Hal ini dapat dilihat menjadi peluang bahwa kehadiran tren produk lokal mendukung kebangkitan sektor wisata dengan menjadikan aktivitas belanja produk lokal menjadi daya tarik wisata.

3.2.4 Tren *revenge tourism*

Tren ini berkembang dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berwisata pasca pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kondisi ini menjadikan beberapa destinasi wisata perlahan kembali ramai oleh kunjungan wisatawan. tingkat pemesanan hotel berbintang di Indonesia juga kembali meningkat. Kenaikan tingkat hunian kamar mencapai 6,57 poin pada tahun 2022 45,15 persen dari 33,56 persen pada tahun 2021. Kehadiran tren ini dapat menjadi peluang untuk memulihkan kembali sektor wisata dengan tetap memperhatikan protokol

kesehatan selama berwisata dan menghindari praktik pariwisata tidak berkelanjutan.

3.2.5 *Wellness tourism*

Wisata ini merupakan wisata minat khusus untuk menjaga kebugaran. Konsep wisata ini menjadi pilihan setelah pandemi melanda mengingat masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam berwisata. Keinginan masyarakat untuk menyehatkan tubuh dan pikiran menjadi semakin meningkat jika dibandingkan sebelum pandemi terjadi (Widyawati, 2022).

Wisata *wellness* ini dimanfaatkan momentumnya oleh industri perhotelan dengan menyediakan layanan dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan wisata ini. Indonesia dapat berpeluang menjadi destinasi wisata herbal. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki beragam produk makanan dan minuman berbahan dasar alami. Diantaranya minuman herbal jamu, potensi aromaterapi berbahan alami, gaya hidup meditasi, makanan sehat berbahan alami, tradisi jelajah alam dan kota, tradisi pijat, terapi seni, layanan kecantikan dengan *skincare* alami, serta wisata olahraga khusus yoga.

3.2.6 *Life on board:* menjelajah pulau

Indonesia merupakan negara kepulauan denganpulau-pulau kecil menjadi peluang menghadirkan inovasi berwisata jelajah pulau. Keindahan bawah laut dengan ragam biodiversitas menjadi daya tarik wisata bahari kepulauan Indonesia. Cara menikmati keindahan lautan dan bawah laut Indonesia dapat dilakukan dengan aktivitas *life on board* atau disingkat LoB. Para wisatawan disuguhi perjalanan wisata keliling pulau-pulau kecil dengan menggunakan kapal layar/pinisi dan aktivitas menginap di kapal. Aktivitas ini merupakan inovasi dari aktivitas wisata kapal pesiar dengan durasi lebih singkat, biaya lebih terjangkau, menghindari kontak fisik dan kerumuman manusia dengan menawarkan kualitas dalam perjalanan wisata yang tidak kalah menarik, otentik, dan bersaing.

Wisata LoB juga merupakan bentuk dari *nomadic tourism*. Secara konseptual, wisata ini memiliki sifat sementara terkait ketersediaan akses dan amenitas. Selain itu, wisata ini juga menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi alam potensial di lokasi terpencil, seperti di kepulauan daerah timur Indonesia. Hal ini juga berpeluang untuk meningkatkan pemerataan destinasi wisata ke seluruh wilayah Indonesia.

3.2.7 Wisata *glamping*: inovasi baru penginapan

Pasca pandemi berakhir, pola berwisata para wisatawan cenderung ingin menyatu dengan alam dengan beragam aktivitas outdoor. Perilaku wisatawan cenderung mencari konsep liburan dengan tetap memperhatikan *social distancing*, yakni meminimalisir kontak fisik dan minim keramaian, serta mencari atraksi wisata berbasis alam, ekowisata, *wellness* dan petualangan. Aktivitas berkembah dengan nuansa mewah (glamping) mengakomodasi konsep tersebut. Wisata glamping sendiri mengkombinasikan rekreasi outdoor dengan akomodasi. Ini menjadi peluang baru inovasi produk dan layanan wisata di Indonesia.

Wisata glamping ini menjadi tawaran berwisata yang menawarkan akomodasi alternatif selain hotel untuk berekreasi. Sebelum pandemi, hotel hanya menjadi akomodasi tempat singgah sementara wisatawan untuk menjelajahi wilayah lokal. Namun, pasca pandemi wisatawan mencari akomodasi dengan tujuan tidak sekedar untuk menginap namun menjadi tempat berekreasi. Adanya *staycation* kemudian mendukung peluang pengembangan wisata *glamping* di Indonesia. Menjadikan akomodasi *glamping* sebagai tempat berlibur, mencari pengalaman baru berwisata. Dengan kata lain, akomodasi ini menawarkan beragam aktivitas dan fasilitas sehingga menjadi destinasi wisata baru yang tidak sekadar menjadi tempat beristirahat.

3.2.8 Primadona baru wisata: desa wisata Indonesia

Desa-desa di Indonesia menyuguhkan ragam potensi alam, tradisi, budaya, sosial dan kuliner yang beragam. Produk wisata

Indonesia merupakan wisata alam dan budaya yang mencapai 90 persen dan berada di daerah pedesaan. Pasca pandemi, kehadiran desa wisata memberikan solusi ekonomi inklusif dan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Sebelum pandemi, pada umumnya wisatawan monoton berkunjung ke destinasi popular di kota, namun pasca pandemi perjalanan wisata menjelajah destinasi wisata baru terdekat menjadi popular.

Menurut Survei Inventure Alvara (2021) *dalam* Nawir (2021), selama masa pandemi desa wisata merupakan destinasi yang paling diminati oleh wisatawan. Desa wisata kemudian menjadi primadona baru wisata dikarenakan memberikan pengalaman menikmati keindahan alam, lokasi wisata tidak jauh dari tempat tinggal, dan tidak ramai kerumunan wisatawan. Peluang ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah dengan menjadikan pengembangan desa wisata wisata sebagai program prioritas. Desa wisata memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menjelajahi beragam budaya dan kehidupan sehari-hari warga setempat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berwisata yang otentik dan unik. Pembangunan ketahanan pariwisata Indonesia terletak pada peran desa wisata. Dimana desa wisata sebagai simbol akar rumput kearifan lokal asli masyarakat Indonesia secara turun-temurun.

3.2.9 Wisata *sport event*

Pembangunan destinasi wisata super prioritas perlu dimaksimalkan potensinya dengan memanfaatkan momentum pagelaran event internasional di kawasan destinasi tersebut. Penyelenggaraan event skal internasional dapat menjadi strategi untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Ini sebagai metode untuk kembali memulihkan kepercayaan pasar (konsumen dan investor) internasional. Salah satunya, *sport event.*

Menurut Kemenparekraf (2022), penyelenggaraan *event* MotoGP Mandalika telah mendatangkan kunjungan 102.801 wisatawan pada awal tahun 2022 serta berdampak secara ekonomi dengan total Rp5,08 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pariwisata *sport event* dapat berdampak secara langsung terhadap sektor wisata di daerah.

Daftar Pustaka

IATA. (2023). Global Outlook for Air Transport: Highly Resilient, Less Robust. https://iata.org

Kemenparekraf. (2022). Tren Parwisata Indoensia di Tengah Pandemi. https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi

UNWTO. (2023). UNWTO *World Tourism Barometer*, May 2023. https://unwto.org

Maulina, Y. (2021). Menjalani Tren Sustainable Living di Masa Pandemi, Kenapa Tidak?. https://www.grid.id/read/042996425/menjalani-tren-sustainable-living-di-masa-pandemi-kenapa-tidak?page=all. Diakses 1 Januari 2024.

Hendriyani (2021). Siaran Pers: Wamenparekraf: Kemenparekraf Berkomitmen Turut Atasi Isu Iklim Melalui Ekowisata. https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-wamenparekraf-kemenparekraf-berkomitmen-turut-atasi-isu-iklim-melalui-ekowisata. Diakses 1 Januari 2024.

McKinsey (2022). COVID-19: Implications for business. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/covid-19-implications-for-business. Diakses 1 Januari 2024.

BBC (2022). Indonesia masuk 15 besar negara terancam resesi versi Bloomberg, IMF wanti-wanti prospek ekonomi global kian 'gelap'. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62161110. Diakses 1 Januari 2024.

GitHub (2021). https://github.com/betsysavage/RemoteWorkAnalysis. Diakses 5 Januari 2024.

MBO Partner. (2020). 2023 Digital Nomads Trends Report. https://www.mbopartners.com/state-of-independence/digital-nomads/. Diakses 1 Januari 2024.

Humas Kemenperin (2022). https://setkab.go.id/dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-pemerintah-dorong-peningkatan-penggunaan-produk-lokal/). Diakses 5 Januari 2024.

Widyawati. (2022). Pandemi COVID-19 Memperparah Kondisi Kesehatan Jiwa Masyarakat. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220513/2739835/pandemi-covid-19-memperparah-kondisi-kesehatan-jiwa-masyarakat/. Diakses 5 Januari 2024.

Nawir (2021). Selama Pandemi, Desa Wisata Jadi Primadona Lepas Penat. https://digitaldesa.id/artikel/selama-pandemi-desa-wisata-jadi-primadona-lepas-penat Diakses 5 Januari 2024.

Bab 4

PERAN SEKTOR INDUSTRI DALAM MENGGERAKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: La Parasit

4.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri memiliki peran penting dalam mengatur arah dan pertumbuhan sektor industri sebuah negara. Di Indonesia, kebijakan ini menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan sektor industri, yang pada gilirannya diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Salah satu aspek kunci dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri adalah penciptaan regulasi yang mendukung dan mendorong pertumbuhan sektor industri. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan investasi, perizinan usaha, dan pajak. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan memberikan insentif bagi investasi dalam industri, mempermudah proses berbisnis, dan menjaga keadilan serta keberlanjutan lingkungan (Maritim et al., 2024).

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan dukungan langsung kepada sektor industri melalui berbagai insentif dan stimulus. Ini bisa berupa berbagai jenis insentif fiskal seperti pemotongan pajak atau keringanan bea masuk untuk industri tertentu. Kemudian, pemerintah juga dapat memberikan bantuan finansial atau teknis kepada industri yang sedang berkembang atau dalam situasi tertentu yang

memerlukan dorongan tambahan. Pemerintah juga harus aktif dalam mempromosikan kemitraan antara sektor publik dan swasta serta mendorong investasi asing langsung. Kemitraan semacam itu dapat membantu meningkatkan akses terhadap teknologi dan modal, serta membuka pintu bagi ekspansi pasar internasional bagi industri dalam negeri. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kemitraan semacam ini berlangsung secara adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak serta tidak merugikan kepentingan nasional (Fadillah, 2023).

Selanjutnya, kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam pengembangan industri. Regulasi lingkungan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong industri untuk mengadopsi praktik-produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui insentif dan regulasi yang sesuai. Dalam menjalankan semua ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan industri sangat penting. Keterlibatan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat (Purna & Didin, 2022).

4.2 Inisiatif Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri

Inisiatif untuk mendorong pertumbuhan sektor industri memainkan peran penting dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah dan pemangku kepentingan terlibat dalam serangkaian langkah untuk merangsang pertumbuhan sektor industri yang beragam dan berpotensi. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Pemerintah telah bekerja sama dengan industri dan ahli kebijakan untuk merancang kebijakan yang berpihak pada investasi dan pengembangan industri. Ini

mencakup kebijakan fiskal yang menguntungkan, pemangkasan birokrasi yang berlebihan, dan penyediaan insentif bagi investasi dalam sektor-sektor strategis (Arifin, 2004).

Selain itu, pemerintah juga telah mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan teknologi dalam sektor industri. Ini dilakukan melalui dukungan finansial dan infrastruktur untuk riset dan pengembangan, serta melalui kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan industri untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan industri. Pemerintah juga telah mengadopsi berbagai program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan mempersiapkan mereka untuk memasuki sektor-sektor industri yang membutuhkan keterampilan khusus. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencerminkan kebutuhan industri saat ini dan masa depan (Neva Satyahadewi; Amriani Amir; El Hendrianto, 2023).

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi akses pasar global bagi produk-produk industri Indonesia. Ini termasuk negosiasi perjanjian perdagangan internasional yang menguntungkan dan kampanye promosi ekspor yang agresif. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan dukungan finansial dan teknis kepada pelaku industri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar internasional. Di samping itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Program-program bantuan dan pelatihan khusus telah diluncurkan untuk membantu IKM meningkatkan produktivitas, mutu produk, dan akses pasar. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kontribusi sektor IKM terhadap perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah (Hamid & Aris, 2017).

4.3 Program Pemberdayaan Industri Lokal

Program Pemberdayaan Industri Lokal merupakan strategi yang diadopsi pemerintah Indonesia untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada industri-industri kecil dan menengah (IKM) serta industri lokal lainnya agar mampu bersaing secara lebih efektif di pasar domestik maupun internasional (Hamid & Aris, 2017; Neva Satyahadewi; Amriani Amir; El Hendrianto, 2023).

Salah satu komponen utama dari Program Pemberdayaan Industri Lokal adalah penyediaan akses ke sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Ini termasuk akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga pengembangan industri untuk menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi IKM dan industri lokal lainnya. Selain itu, infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi juga ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan industri di tingkat lokal. Selain penyediaan akses ke sumber daya, Program Pemberdayaan Industri Lokal juga melibatkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku industri lokal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, teknis, dan pemasaran bagi pengusaha lokal sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka secara lebih efektif dan meningkatkan daya saing produk mereka. Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli dan konsultan industri yang berpengalaman untuk membantu pelaku industri dalam mengidentifikasi potensi dan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan usaha mereka (Akmalia, 2021).

Selanjutnya, Program Pemberdayaan Industri Lokal juga mencakup promosi dan pemasaran produk-produk lokal baik di pasar domestik maupun internasional. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga promosi perdagangan dan industri untuk mengadakan pameran, expo, dan acara promosi lainnya guna memperkenalkan produk-produk lokal kepada konsumen dalam dan luar negeri. Selain itu, dukungan juga diberikan dalam hal sertifikasi produk dan pemenuhan standar kualitas untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar

global. Selain dukungan langsung kepada industri, Program Pemberdayaan Industri Lokal juga mencakup berbagai kebijakan pengembangan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan industri lokal. Ini termasuk pengembangan kawasan industri, peningkatan aksesibilitas, dan pembangunan fasilitas umum lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal (Tamara et al., 2023).

4.4 Stimulus Investasi Dalam Sektor Industri

Stimulus investasi dalam sektor industri merupakan strategi yang penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong investasi dalam sektor industri guna menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Stimulus ini bertujuan untuk menarik investasi domestik maupun asing ke sektor-sektor industri yang dianggap strategis dan berpotensi untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia (Ngatikoh & Faqih, 2020).

Salah satu bentuk stimulus investasi yang diberikan oleh pemerintah adalah berbagai insentif fiskal, seperti pemotongan pajak dan keringanan bea masuk bagi industri tertentu. Langkah ini bertujuan untuk membuat lingkungan investasi di Indonesia menjadi lebih menarik dan kompetitif bagi investor. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) serta penggunaan teknologi ramah lingkungan guna mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas industri. Selain insentif fiskal, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan finansial bagi investor yang berencana untuk melakukan ekspansi atau mendirikan pabrik baru di Indonesia. Hal ini termasuk penyediaan akses ke sumber-sumber pendanaan seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan pembiayaan proyek. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi hambatan finansial yang sering dihadapi oleh investor dalam mengembangkan bisnis mereka di Indonesia (Fitriasari, 2017).

Pemerintah juga aktif dalam memfasilitasi investasi asing langsung (FDI) dengan menyediakan berbagai layanan dan dukungan bagi investor asing. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan

informasi tentang potensi investasi di Indonesia, bantuan dalam proses perizinan, serta bimbingan dan pendampingan selama tahap investasi. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menarik investor asing untuk melakukan investasi jangka panjang di sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain insentif dan dukungan finansial, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor industri. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan energi akan membantu mengurangi biaya produksi, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan aksesibilitas ke pasar. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri dan mendorong investasi lebih lanjut dalam sektor ini (Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, 2023).

4.5 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Industri

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam industri merupakan aspek yang sangat penting dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan sektor industri suatu negara. Di Indonesia, upaya pengembangan SDM dalam industri telah menjadi fokus utama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta memastikan bahwa industri dapat bersaing secara efektif di pasar global. Salah satu pendekatan utama dalam pengembangan SDM dalam industri adalah melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasional untuk mengembangkan program-program pelatihan yang relevan dengan tuntutan industri, baik dalam hal keterampilan teknis maupun manajerial (Julifan, 2017). Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia industri yang terus berkembang.

Selain pelatihan, pemerintah juga mendorong adopsi praktik pembelajaran berbasis kerja (on-the-job training) dan magang industri sebagai bagian dari upaya pengembangan SDM dalam industri. Program-

program ini memungkinkan para tenaga kerja untuk memperoleh pengalaman praktis di lingkungan kerja yang sesungguhnya, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Pengembangan SDM dalam industri juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkuat kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri serta meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi pelajar yang memilih jurusan dan program studi yang terkait dengan industri tertentu, seperti teknik, sains, dan manajemen (Syafaruddin, S., Asrul, A., Mesiono, M., Wijaya, C., & Usiono, 2012).

Selanjutnya, pengembangan SDM dalam industri juga melibatkan promosi budaya kerja yang produktif dan inovatif di kalangan tenaga kerja. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi perburuhan dan asosiasi industri untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kerjasama di tempat kerja. Ini mencakup pelatihan dalam manajemen waktu, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan kerja tim. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua tenaga kerja, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Pemerintah dan industri bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan program-program yang mendukung kesetaraan gender, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan di tempat kerja (Safitri, 2023).

4.6 Promosi Ekspor Dan Perdagangan

Promosi ekspor dan perdagangan memiliki peran yang tak terbantahkan dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Di Indonesia, dengan keberadaan beragam produk yang berkualitas, promosi ekspor menjadi strategi kunci untuk memperluas pangsa pasar di luar negeri dan meningkatkan pendapatan ekspor negara. Upaya promosi ekspor yang efektif tidak hanya membantu meningkatkan daya saing produk domestik, tetapi juga memperkenalkan citra positif tentang Indonesia sebagai produsen produk berkualitas di pasar internasional.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong promosi ekspor, salah satunya adalah melalui partisipasi aktif dalam pameran dagang internasional. Pameran seperti Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi platform penting bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada pasar global. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai misi perdagangan ke berbagai negara dengan tujuan untuk memperluas jaringan bisnis dan menjajaki peluang pasar baru (Anwar, 2022).

Selain kegiatan promosi ekspor, pemerintah juga terlibat dalam upaya meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia melalui perjanjian perdagangan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah aktif dalam bernegosiasi perjanjian perdagangan preferensial dan perjanjian bebas tarif dengan berbagai mitra dagangnya. Ini bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota impor, sehingga produk-produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional. Selain promosi ekspor, upaya pemerintah dalam meningkatkan perdagangan juga mencakup peningkatan fasilitas dan infrastruktur perdagangan. Infrastruktur logistik yang memadai sangat penting untuk mendukung arus barang ekspor dan impor. Oleh karena itu, pemerintah terus berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan, bandara, jalan raya, dan fasilitas transportasi lainnya guna memperbaiki efisiensi dan kehandalan rantai pasokan perdagangan (Firda Amaliyah; Ramdhan Muhaimin, 2023).

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk domestik agar dapat memenuhi standar internasional. Ini termasuk dukungan dalam pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kualitas dan keamanan produk melalui sertifikasi dan pengawasan mutu. Dengan cara ini, produk-produk Indonesia dapat lebih mudah diterima dan bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Tidak ketinggalan, promosi ekspor dan perdagangan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin banyak konsumen internasional yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dari produk yang mereka beli. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik-produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menjalankan program-program CSR yang

berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Leli Safitri; Muhammad Effendi, 2019).

4.7 Industri Kreatif: Mesin Penggerak Ekonomi Indonesia

Industri kreatif telah menjadi mesin penggerak ekonomi yang semakin penting bagi Indonesia. Dengan keragaman budaya, sumber daya alam, dan kreativitas yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kreatif sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian negara. Industri kreatif mencakup berbagai sektor, seperti seni pertunjukan, seni rupa, fashion, film, musik, permainan digital, desain grafis, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan industri kreatif sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mempromosikan citra positif Indonesia di kancah internasional. Salah satu aspek yang membuat industri kreatif menjadi mesin penggerak ekonomi adalah potensi kreasi dan inovasi yang tidak terbatas. Dengan menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dengan teknologi modern, pelaku industri kreatif mampu menciptakan produk-produk yang unik dan menarik bagi pasar lokal maupun internasional (Sari et al., 2020). Karya-karya seni, desain, dan kreatifitas lainnya dari Indonesia semakin dikenal dan dihargai di seluruh dunia, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata bagi negara.

Selain itu, industri kreatif juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan beragam. Dengan memperluas ekosistem industri kreatif, baik melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kreatif, maupun melalui pembangunan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang kondusif, Indonesia dapat menciptakan peluang kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk para seniman, desainer, animator, pembuat film, dan banyak lagi. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial bagi masyarakat. Selain sebagai penghasil lapangan kerja, industri kreatif juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Produk-produk kreatif seperti film, musik, fashion, dan karya seni lainnya dapat menjadi komoditas

ekspor yang menguntungkan bagi Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan global akan produk-produk kreatif, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor produk-produk kreatifnya dan memperkuat posisinya di pasar internasional (Ananda & Susilowati, 2019).

Selain itu, industri kreatif juga memiliki peran penting dalam mempromosikan identitas budaya dan citra positif Indonesia di mata dunia. Melalui karya-karya seni dan kreatif, Indonesia dapat mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan keindahan alamnya kepada dunia luar. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia, tetapi juga membantu memperkuat diplomasi budaya dan memperluas pengaruh budaya Indonesia di tingkat global ((ULS2C), 2022).

Daftar Pustaka

(ULS2C), U. L. S. U. M. (2022). *Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu*.

Akmalia. (2021). *PERAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU-KOPERASI ulee karaeng*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.

Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2019). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *X*(X), 120–142.

Anwar, A. (2022). Kerjasama Ekonomi Arab Saudi-Indonesia Dalam Bidang Investasi Dan Perdagangan. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA ANWAR.FISIP.pdf

Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Kompas.

Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 1–14.

Fadillah, N. F. (2023). Mempercepat pertumbuhan UMKM melalui model waralaba dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(03), 3891–3897. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10503%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/10503/4478

Firda Amaliyah; Ramdhan Muhaimin. (2023). Kepentingan Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) dalam Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Utara 2017-2022. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *6*(2), 31–41.

Fitriasari, F. (2017). Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 133–149.

Hamid, A., & Aris, A. (2017). Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *15*(1), 67–82. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426

Julifan, J. A. (2017). Efektivitas Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *12*(2). https://doi.org/10.17509/jap.v22i2.5382

Leli Safitri; Muhammad Effendi. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, *2*(4), 842–851. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA

Maritim, U., Ali, R., Daniel, B., Gukguk, R., Maritim, U., Ali, R., Maritim, U., & Ali, R. (2024). *Perbedaan Undang – Undang Ketenagakerjaan Dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji penciptaan lapangan kerja belum optimal . 1*.

Neva Satyahadewi; Amriani Amir; El Hendrianto. (2023). PROYEKSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI 2040. *Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, *6*(2), 715–725.

Ngatikoh, & Faqih. (2020). Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *4*(1), 68–93. http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/269

Purna, Z. A., & Didin, D. (2022). Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik? *Jurnal Arajang*, *5*(1), 76–98. https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2731

Safitri, R. L. (2023). PT Sukanda Djaya Strategi Perubahan di Era Society 5 . 0 dalam Perencanaan dan Pengembangan Karir Karyawan pada Bisnis Inklusif. *ResearchGate*, *May*, 3–9.

Sari, A. P., Pelu, M. F. A. R., Dewi, I. K., Ismail, M., Siregar, R. T., Mistriani, N., Marit, E. L., Killa, M. F., Purba, B., & Lifchatullaillah, E. (2020). *Ekonomi Kreatif*.

Syafaruddin, S., Asrul, A., Mesiono, M., Wijaya, C., & Usiono, U. (2012). *Inovasi pendidikan: suatu analisis terhadap kebijakan baru pendidikan*. Perdana Publishing.

Tamara, A. P., Rofi'I, I., & Sudrajat, A. S. E. (2023). Analisis Penetapan Kawasan Industri Di Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, *4*(2), 38. https://doi.org/10.26623/ijsp.v4i2.7359

BAB 5

PERAN SEKTOR PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Munir

5.1 Peran Dan Potensi Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program pemerintah dalam pembangunan pedesaan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena desa merupakan sumber produsen utama dalam penyediaan bahan makanan, yang memberikan sebagian besar memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah perkotaan. Kondisi alam yang masih stabil mampu memberikan sejumlah produk pertanian yang dibutuhkan baik berupa bahan pokok berupa beras maupun kebutuhan akan protein. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau masyarakat didaerah pedesaan menikmati hasil pertanian yang diusahakannya dan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dukungan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan sehingga hasil yang diperoleh masyarakat dapat lebih ditingkatkan dengan melakukan modernisasi di sektor pertanian. Seiring dengan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks diperlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menyelesaikan persoalan persoalan pembangunan di daerah pedesaan. Menurut Pouw dan Gupta (2017) menyampaikan bahwa program pembangunan multi disiplin ini sebagai pembangunan inklusif.

Pembangunan inklusif tidak hanya ditinjau pada satu aspek ekonomi saja, tapi juga melihat aspek sosial seperti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu ada aspek politik dalam pembangunan inklusif. Ini terkait dengan prioritas politik dalam melaksanakan program pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan pedesaan diharapkan dapat berdasar pada aspek potensial yang dimiliki oleh desa (Amanda, 2015).

Aspek potensial desa telah ditetapkan sesuai Permendagri No.12 Tahun 2007. Data profil desa dan kelurahan, yang biasa disingkat prodeskel, berkaitan erat dengan potensi-potensi yang ada di suatu desa. Hal ini karena data profil desa memuat segala informasi terkini mengenai sumber daya desa yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Potensi desa tersebut perlu diketahui sebelum dilakukannya pemetaan potensi dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan dan publikasi data potensi sehingga kebijakan pemerintah dapat secara jelas memberikan dukungan untuk lebih memberdayakan masyarakat berdasarkan data yang dikumpoulkan.

Pemberdayaan potensi desa didefinisikan sebagai pemberdayaan Keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Dasar Perwujudan Jenis Potensi desa

Pertanian di desa memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia dan memanfaatkan teknologi yang tepat, hasil pertanian dapat ditingkatkan dan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat. Selain itu, hasil pertanian yang melimpah tersebut dapat menjadi potensi pakan yang baik di sektor peternakan sehingga produktivitas petani maupun peternak dapat dioptimalkan menjadi adi sumber penghasilan utama bagi masyarakat desa.

5.3 Perlunya Pengenalan Potensi Desa Di Setiap Kabupaten Kota

Disetiap kabupaten kota perlu adanya pengenalan terhadap potensi desa karena dengan kegiatan tersebut kita mampu mengenali potensi apa yang terdapat didaerah tersebut yang pada akhirnya dapat dikembangkan dan dijadikan salah satu sumber pendapatan utama bagi petani maupun peternak, untuk itulah maka diupayakan pengumpulan, mengolah, dan mempublikasikan segala potensi yang ada di desa. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Mengenali dan mengoptimalkan potensi desa yang ada tentu bukan menjadi tugas pemerintah saja tapi semua komponen masyarakat, baik lembaga maupun perorangan turut berpartisipasi aktif demi kemajuan desa.

Adapun manfaat lainnya antara lain sebagai berikut.

- Menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan kelurahan sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat.
- Menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat desa.

Begitu besarnya potensi desa dan perbedaan penduduk yang sangat tinggi didaerah perkotaan akibat laju urbanisasi yang tinggi dimana lebih dari 69 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sementara itu, dengan prediksi laju urbanisasi rendah sekitar 61 persen penduduk akan tinggal di perkotaan. Keadaan seperti ini perlu dilakukan perencanaan yang baik dalam upaya memacu pembangunan perdesaan yang berbasis pertanian, perlu adanya upaya dominan dalam menata perpindahan penduduk desa ke perkotaan dengan memberi perhatian besar pada upaya pengembangan agroindustri.

Potensi ketersediaan lahan di Indonesia masih cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia memiliki total luas daratan sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,4 persen) kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 persen) merupakan kawasan lindung. Total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi digunakan sebagai areal pertanian seluas 101 juta ha, yang meliputi lahan basah 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha, dan lahan

kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Hingga saat ini, sebesar 47 juta ha sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian dan masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Secara biofisik, dapat dilihat untuk pengembangan lahan masih berpotensi cukup luas sekitar 30 juta ha, dimana 10 juta ha merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan 20 juta ha kawasan kehutanan (Dewan ketahanan Pangan, 2015).

Tabel 5.1 Proyeksi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan menurut 3 skenario

Tahun	Tinggi		Sedang		Rendah	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
2015	136,19	119,52	134,77	120,97	133,33	122,49
2020	154,13	119,04	151,34	122,18	148,46	125,76
2025	172,27	118,18	168,17	123,16	163,88	129,23
2030	190,47	116,97	185,14	123,97	179,48	133,00
2035	208,62	115,49	202,15	124,67	195,17	137,13
2040	226,60	113,77	219,09	125,31	210,87	141,71
2045	244,31	111,88	235,87	125,94	226,49	146,83

Sumber: Kementrian Pertanian (2014) dalam SIPP 2015-2045.

5.4 Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Penghasilan Nasional

Indonesia, sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, memiliki sektor peternakan sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomiannya. Peternakan di Indonesia mencakup berbagai jenis ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, kelinci dan ikan. Peran sektor peternakan dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan, tidak hanya dari segi penyediaan pangan, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap penghasilan nasional, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.1 yang menunjukkan tren pertumbuhan industri peternakan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

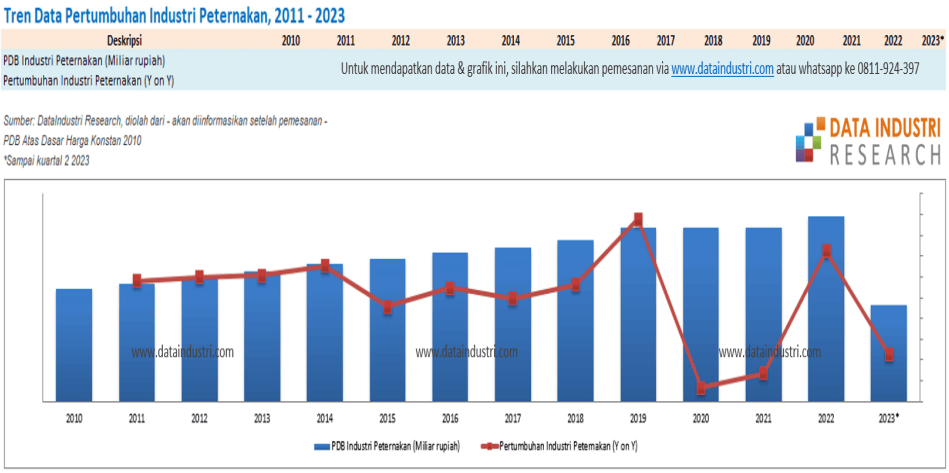

Gambar 5.1 Tren Data Pertumbuhan Industri Peternakan, 2011 – 2023 (Sumber : Data Pertumbuhan Industri Peternakan. 2023)

Sektor peternakan di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap penghasilan nasional. Hal ini terlihat dari produksi berbagai produk peternakan seperti daging, susu, telur, dan produk olahan lainnya. Produk-produk ini menjadi bagian penting dari konsumsi masyarakat Indonesia dan juga menjadi komoditas ekspor yang berkontribusi pada penerimaan devisa negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan investasi dalam pengembangan peternakan modern untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar internasional. Dukungan pemerintah yang sangat besar dalam pengembangan sector peternakan dibuktikan dengan adanya investasi sub sektor peternak yang diharapkan bisa mendorong swasembada protein yang pemerintah lakukan, dengan memberikan dukungan dalam bentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), memfasilitasi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga sebesar 7%, fasilitas peningkatan akses pembiayaan program kemitraan dan binaan lingkungan (BUMN), fasilitas pengurangan pajak penghasilan bagi usaha pembibitan sapi potong dan budidaya

penggemukan sapi lokal berdasarkan PP no. 18 tahun 2015 (Maulida, 2023).

Bila dilihat dari tingginya permintaan produk peternakan khususnya karkas ternak pada beberapa negara menunjukkan bahwa potensi peternakan sanagt potemsial dikembangkan bahkan dapat mensuplai atau mengekspor daging ternak ke beberapa Negara sehingga mampu meningkatkan ekonomi perkapita masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil hasil proyeksi OECD/FAO (2018) menunjukkan tingkat pertumbuhan yang hampir sama yaitu 2,6 persen per tahun dalam periode 2006/2008 - 2018. Konsumsi daging per kapita hanya meningkat dari 29 kg per kapita tahun 2006/2008 menjadi 33 kg per kapita tahun 2018.

Tabel 5.2 Proyeksi konsumsi dan produksi daging, 1999/2001-2050

Konsumsi/ Produksi	Karkas (juta ton)				Pertumbuhan (%/th)		
	2005/ 2007	2015	2030	2050	2005/2007 -2015	2005/2007 -2030	2005/2007 -2050
Konsumsi							
Dunia	256	305	350	399	2,0	1,6	1,3
Negara Berkembang	147	191	221	260	2,8	2,2	1,8
Negara Maju	109	113	124	128	0,8	0,6	0,4
Produksi							
Dunia	258	306	347	403	1,9	1,9	1,3
Negara Berkembang	149	190	221	258	2,8	2,8	1,7
Negara Maju	109	116	127	133	0,7	0,7	0,5

Sumber : Kementrian Pertanian (2014) dalam SIPP 2015-2045;

5.5 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Dalam Perluasan Lapangan Kerja

Peningkatan aktivitas di sektor peternakan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan, pertumbuhan ekonomi dapat didorong. Selain itu, sektor peternakan juga berperan dalam diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Peternak dapat mengembangkan usaha mereka

dengan memanfaatkan produk sampingan seperti pupuk organik, kulit hewan, dan lainnya. Dengan demikian, peternakan dapat menjadi sumber pendapatan yang beragam bagi masyarakat, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis aktivitas ekonomi.

Sektor peternakan juga memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Peternakan, baik skala besar maupun kecil, memberikan pekerjaan kepada sejumlah besar orang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Selain itu, peternakan juga memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bidang peternakan. Peningkatan kegiatan peternakan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada peternak kecil, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.

5.6 Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Sektor Peternakan

Meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian, sektor peternakan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi penyakit hewan, akses terhadap sumber pakan, perubahan iklim, dan masalah manajemen usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu terus mendorong inovasi, penelitian, dan investasi dalam pengembangan sektor peternakan. Pengembangan peternakan berkelanjutan, penerapan teknologi modern, dan peningkatan kualitas manajemen usaha peternakan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja sektor ini. Peningkatan akses terhadap pasar dan bantuan finansial kepada peternak kecil juga perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian nasional.

5.7 Keberlanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial

Penting untuk menekankan aspek keberlanjutan dalam pengembangan sektor peternakan. Pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan kesehatan hewan, dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan harus menjadi fokus utama. Dengan memperhatikan

keberlanjutan, sektor peternakan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang tanpa merugikan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Selain itu, tanggung jawab sosial perlu ditingkatkan dalam sektor peternakan. Pemberdayaan peternak kecil, hak-hak pekerja, dan dukungan terhadap komunitas lokal harus diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari. Hal ini tidak hanya menciptakan dampak positif secara sosial, tetapi juga memperkuat basis masyarakat di sekitar wilayah peternakan.

5.8 Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pengembangan Peternakan

Pemanfaatan teknologi dan inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor peternakan. Mulai dari penerapan sistem manajemen yang terotomatisasi hingga pemanfaatan big data untuk pemantauan kesehatan hewan, teknologi dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam sektor ini. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mendukung riset dan pengembangan teknologi terbaru agar sektor peternakan Indonesia tetap bersaing di pasar global, Perlu Melibatkan generasi muda dalam pengembangan sektor peternakan menjadi kunci untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Program pelatihan, pendidikan, dan dukungan finansial perlu digalakkan untuk menarik minat pemuda untuk terlibat dalam bidang peternakan. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya terus berkembang tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan inovasi.

5.9 Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Diversifikasi Produk

Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif, mengatasi tantangan bersama, dan memastikan bahwa manfaat dari pengembangan sektor peternakan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Forum diskusi, dialog, dan kemitraan publik-swasta dapat menjadi wadah untuk menciptakan sinergi yang diperlukan. Selain

meningkatkan volume produksi, peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk juga harus menjadi fokus utama. Pengolahan produk peternakan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi dapat membuka peluang baru di pasar domestik dan internasional. Ini melibatkan peningkatan keterampilan dalam pengolahan dan pemrosesan produk serta promosi produk yang inovatif dan berkualitas tinggi.

5.10 Penutup

Sektor peternakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari aspek produksi pangan, tetapi juga dari segi penghasilan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kinerja sektor peternakan perlu menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan upaya bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, sektor peternakan dapat menjadi salah satu tulang punggung utama dalam membangun perekonomian Indonesia yang tangguh.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, sektor peternakan Indonesia memegang peran penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperkuat fondasi keberlanjutan, mendorong inovasi, dan membangun sinergi antara berbagai pihak, sektor peternakan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Oendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika.

Data Pertumbuhan Industri Peternakan. 2023 Tren Data Pertumbuhan Industri Peternakan Tahun 2011-2023 DataIndustri.com (online). https://www.dataindustri.com/produk/tren-data-pertumbuhan-industri-peternakan/

Dewan ketahanan Pangan, 2015 Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019 Badan Litbang Pertanian Republik Indonesia.

Kementrian Pertanian. 2014. Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045 pertanian-bioindustri berkelanjutan solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementrian Pertanian. ISBN : 978-979-15689-1-3

Maulida A. 2023. Kemtan: Investasi di sektor peternakan setiap tahun terus meningkat.online https://nasional.kontan.co.id/news/kemtan-investasi-di-sektor-peternakan-setiap-tahun-terus-meningkat.

Pouw, N., & Gupta, J. (2017). Inclusive Development: A Multi-disiplinary Approach. Sustainability Science, 104–108.

Bab 6

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Osu Oheoputra Husen

Perubahan iklim (*climate change*) merupakan perubahan atau penyimpangan kondisi unsur iklim dari kondisi rata-rata dalam kurun waktu yang cukup lama. Penyebab perubahan iklim disebabkan dua faktor yaitu kejadian alam dan aktifitas manusia yang menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Akumulasi kegiatan manusia memproduksi emisi GRK seperti kegiatan industri, transportasi, dan lain-lain. Perubahan iklim adalah salah satu isu dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia pada abad ke-21.

Saat ini perubahan iklim menjadi perhatian utama dunia dengan menjadikannya sebagai bagian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke 13 dari 17 tujuan SDGs. Perubahan iklim tidak dapat diselesaikan secara mandiri tetapi secara bersama-sama karena dampak perubahan iklim tidak dapat dibatasi oleh fungsi administrasi wilayah tetapi meluas secara fungsi ekosistem lingkungan. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan salah satu negara agraris yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Perekonomian Indonesia, berdasarkan Pendapat Domestik Bruto (PDB) yang sangat tergantung pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Dalam tulisan ini, akan dibahas dampak perubahan iklim dalam beberapa sektor yang akan mempengaruhi baik secara langsung dan tidak langsung terhadap erekonomian di Indonesia, seperti sektor pertanian, perikanan, bencana alam, pariwisata, kesehatan, dan infrastruktur serta energi.

6.1 Sektor Pertanian

Pertanian tidak hanya menyediakan tanaman dan makanan tetapi juga penyedia lapangan kerja bagi negara dengan populasi penduduk terbesar (Gaur & Verma, 2023). Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 15% PDB dan menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tenaga kerja informal sektor pertanian di Indonesia diatas 85% (Harini & Susilo, 2017).

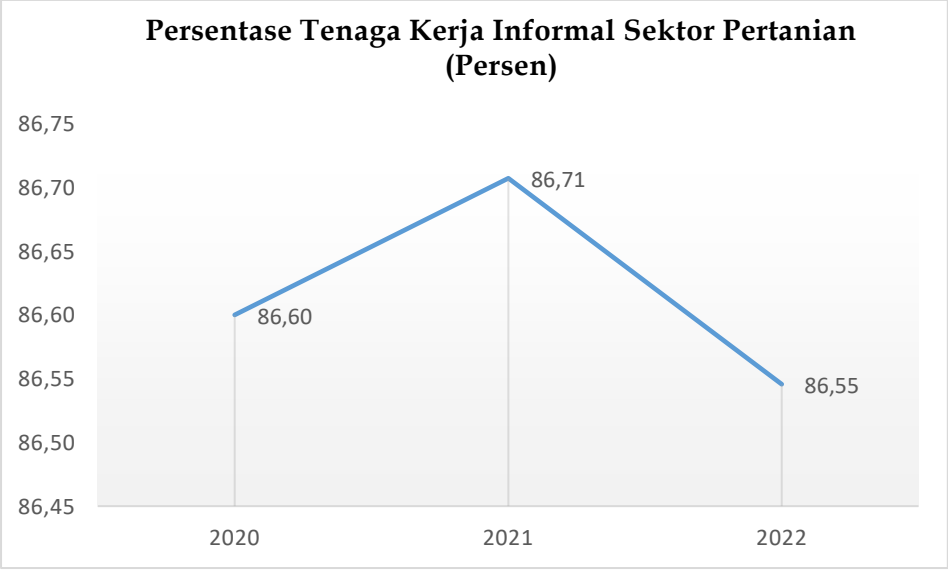

Grafik 6.1 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertaninan

Sumber: (BPS, 2023)

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukan peningkatan tiap tahun (**Gambar 6.1**). Sektor tersebut pada tahun 2020 memberikan nilai positif walaupun saat itu seluruh negara di dunia

termasuk Indonesia, perekonomian tertekan oleh pandemic covid-19. Setelah masa pandemik berakhir sektor pertanian mengalami peningkatan seiring kebijakan pembatasan sosial dicabut oleh pemerintah, tetapi dengan isu global perubahan iklim menjadi hal berbeda karena sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat tergantung dengan kondisi cuaca.

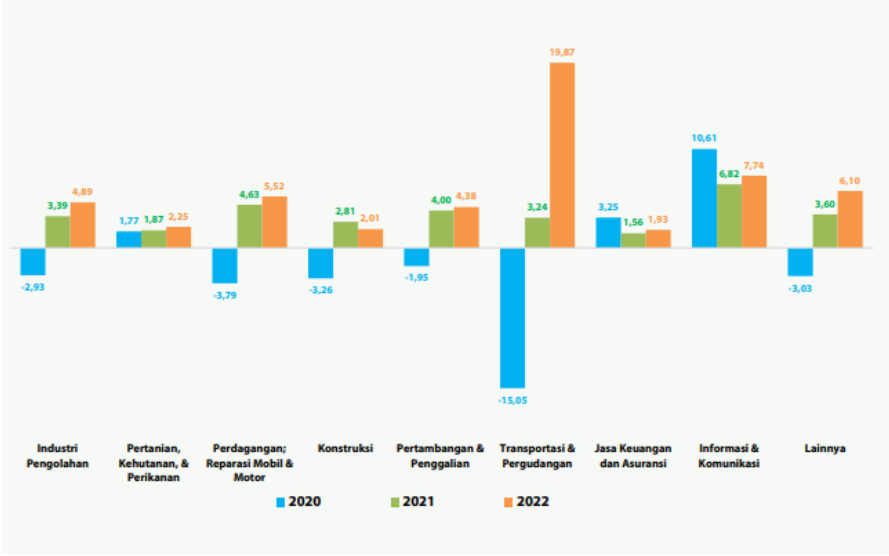

Grafik 6.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) (BPS, 2023)

Sektor pertanian mengalami dampak secara langsung akibat perubahan iklim, yang menyebabkan variasi curah hujan di berbagai wilayah, termasuk kekeringan dan peningkatan hujan. Hal ini mengganggu petani dalam merencanakan musim tanam secara terukur. Tanaman hortikultura, yang sangat tergantung terhadap perubahan air, terpengaruh oleh faktor seperti penggunaan lahan, jenis tanah, teknik pertanian, air, dan varietas tanaman. Dampak dari perubahan pola curah hujan pada tanaman hortikultura meliputi perubahan luas tanam, produktivitas, dan kualitas hasil. Kejadian iklim ekstrim seperti El-Nino dan La-Nina dapat menyebabkan gagal panen, penurunan produktivitas, kerusakan lahan pertanian, meningkatnya kekeringan, peningkatan kelembaban, dan intensifikasi gangguan oleh organisme pengganggu tanaman (Sudarma & As-syakur, 2018).

Tabel 6.1. Produktifitas Tanaman terhadap Iklim ekstrim
Ket: nilai (-) penurunan produksi.

No.	Jenis Tanaman	Produktifitas Tanaman	
		El Nino	La Nina
1	Kedelai	-10.7%	11.4%
2	Padi Sawah	-2.9%	2.4%
3	Jagung	-7.4%	3.9%
4	Ubi Jalar	2.5%	

(Sumber: Sudarma & As-syakur, 2018)

Tabel 6.1 menunjukan dampak produksi tanaman dari pengaruh perubahan iklim ekstrim di Indonesia, peningkatan suhu global dan perubahan pola curah hujan dapat mengurangi produktivitas tanaman. Beberapa jenis tanaman berpotensi tidak tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suhu atau kondisi kelembaban yang berubah, sehingga dapat mengurangi produktifitas/hasil panen.

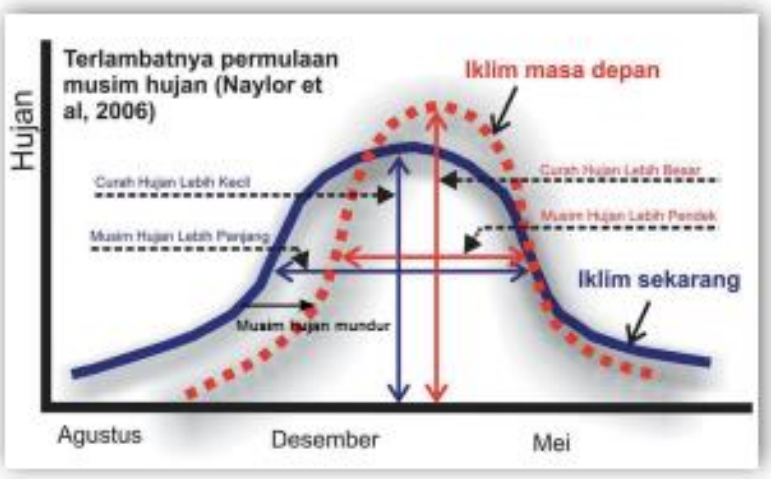

Grafik 6.3. Perubahan pola hujan sebagai indikator perubahan iklim (Naylor *dalam* Diposaptono et al., 2013).

Petani harus beradaptasi dengan perubahan cuaca (misalnya, dengan membeli lebih banyak pestisida atau sistem irigasi baru), akan terjadi peningkatan biaya input pertanian, sehingga meningkatkan harga

jual produk pertanian di pasar. Perubahan dalam produksi pertanian karena perubahan iklim bisa menciptakan fluktuasi harga pasar pada produk pertanian, sehingga menciptakan ketidakstabilan di pasar pangan, yang bisa mempengaruhi perekonomian lokal - terutama di daerah-daerah dimana sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian.

6.2 Sektor Perikanan

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan garis pantai terpanjang maka Indonesia memiliki potensi sebagai salah satu negara dengan produksi ikan terbesar di dunia sehingga selain sektor pertanian, sektor perikanan juga berperan dalam perekonomian bangsa baik dalam membuka peluang kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan luar negeri. Namun, perubahan iklim dunia saat ini seperti peningkatan suhu permukaan laut dan asam laut telah merusak ekosistem laut dan mengganggu populasi ikan. Ini berdampak pada pendapatan nelayan dan menyebabkan penurunan produksi perikanan.

Berikut adalah beberapa faktor perubahan iklim dapat mempengaruhi sektor ini:

1. Perubahan Suhu: Kenaikan suhu global berdampak pada suhu air laut, yang dapat mengubah pola migrasi ikan dan merusak habitat laut seperti terumbu karang. Beberapa spesies mungkin tidak bisa bertahan dalam kondisi baru ini dan bisa mengalami penurunan populasi.
2. Kenaikan Muka Air Laut: Kenaikan muka air laut dapat merusak ekosistem pesisir seperti hutan bakau, yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi banyak spesies ikan.
3. Perubahan Pola Cuaca: Perubahan dalam pola cuaca, seperti peningkatan badai dan siklon, dapat merusak ekosistem pesisir dan infrastruktur perikanan.
4. Asidifikasi Osean: Penyerapan karbon dioksida oleh lautan menyebabkan asidifikasi osean (peningkatan keasaman air laut), yang berbahaya bagi kehidupan laut, termasuk ikan dan organisme lainnya yang membentuk dasar rantai makanan.

5. Perubahan Arus Laut: Perubahan arus laut akibat pemanasan global dapat mempengaruhi distribusi dan kelimpahan plankton - sumber makanan utama bagi banyak spesies ikan - serta jalur migrasi ikan.

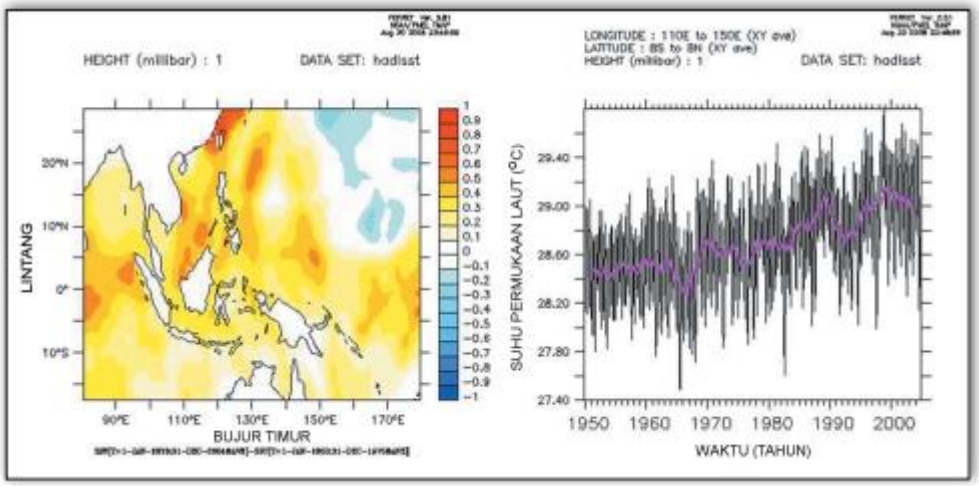

Grafik 6.4. Kenaikan suhu muka laut antara tahun 1950 sampai 2005 di Indonesia (Sumber: NOAA *dalam* Diposaptono et al., 2013).

Semua faktor ini berpotensi mengganggu produktivitas sektor perikanan dan menimbulkan tantangan serius bagi komunitas nelayan serta industri yang bergantung pada hasil tangkapan atau budidaya ikan (Diposaptono et al., 2013).

6.3 Peningkatan Risiko Bencana Alam

Perubahan iklim dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana tersebut berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian suatu wilayah, terutama wilayah yang didalamnya terdapat kawasan pemukiman, kawasan industri, dan kawasan penyedia pelayanan jasa baik pemerintahan dan kesehatan. Peningkatan resiko bencana alam akan semakin besar jika berdampak pada aktifitas manusia. Dampak atau pengaruhnya berkaitan dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan seperti rusaknya infrastruktur, mengganggu produksi, dan mengakibatkan kerugian dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Isa,

2016). Berikut gambaran tentang dampak bencana alam terhadap ekonomi makro wilayah.

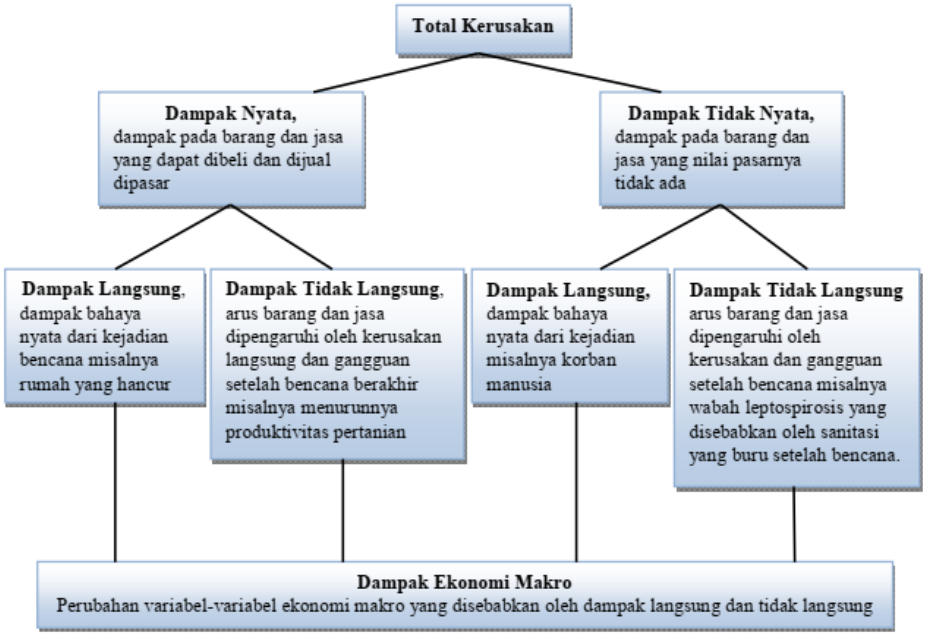

Gambar 6.5. Dampak Ekonomi Makro Bencana Alam (Sumber AusAID *dalam* Artiani, 2011).

Dampak makro ekonomi merupakan hasil dari dampak tidak langsung bencana alam yang diakibatkan dari perubahan iklim suatu wilayah. Membahas ekonomi makro, bencana alam selalu memberikan dampak *negative* yang terlihat dari penurunan produksi yang signifikan, penurunan tersebut lebih besar dibandingkan wilayah dengan tingkat ekonomi maju yang lebih mampu menahan laju dampak bencana karena kondisi ekonomi makro seperti cadangan devisa dan tingkat kredit domestic yang tinggi (Artiani, 2011).

Tabel 6.2 Indikator Ekonomi Makro yang dipengaruhi Bencana

Indikator	Penjelasan
Produk Domestik Bruto (PDB	Penurunan produksi dan pendapatan di sektor-sektor yang terdampak bencana dapat menyebabkan penurunan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Namun, terjadi peningkatan kegiatan ekonomi dalam upaya rekonstruksi pasca bencana sehingga memiliki potensi dampak positif pada PDB. Untuk mengestimasi dampak bencana, proyeksi harus mempertimbangkan bagaimana sektor-sektor dalam PDB akan beroperasi tanpa adanya bencana. Jika data PDB sektoral tersedia, dapat digunakan untuk menilai dampak bencana pada pertumbuhan sektor-sektor yang berbeda. Pengukuran yang dilakukan pada tingkat riil dengan menggunakan harga konstan memaksa pemerintah untuk mengurangi alokasi anggaran untuk program pembangunan.
Investasi Bruto	Bencana memiliki efek merugikan pada investasi bruto, seperti penurunan nilai pada pasar saham dan pembatalan proyek pembangunan yang sedang berjalan. Namun, bencana juga dapat mendorong peningkatan investasi bruto melalui pemulihan aset dan upaya rekonstruksi. Oleh karena itu, diperlukan estimasi yang komprehensif untuk mengukur dampak negatif dan positif bencana terhadap investasi bruto.
Neraca Pembayaran	Bencana memiliki potensi untuk memengaruhi berbagai variabel yang terkandung dalam neraca pembayaran. Misalnya, bencana dapat menyebabkan penurunan dalam ekspor atau pariwisata. Selain itu, impor dapat meningkat karena kebutuhan akan bahan bakar, makanan, bahan bangunan, atau peralatan yang diperlukan untuk rekonstruksi. Dalam beberapa kasus, bencana juga dapat menyebabkan aliran dana asing melalui bantuan, pengurangan utang luar negeri, dan pembayaran reasuransi. Dampak

	bencana ini pasti akan mengubah struktur neraca pembayaran, dan seberapa besar perubahannya tidak dapat diprediksi sebelum bencana terjadi.
Keuangan Publik	Setelah terjadi bencana, keseimbangan pengeluaran sektor publik dapat mengalami perubahan, cenderung memperbesar defisit fiskal. Hal ini biasanya disebabkan oleh peningkatan pengeluaran sektor publik yang terjadi setelah bencana, termasuk pengeluaran untuk keperluan darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sementara itu, pendapatan fiskal cenderung menurun karena penurunan penerimaan pajak. Sebagian dari gangguan dalam anggaran pemerintah terjadi karena alokasi dana untuk memenuhi biaya rehabilitasi yang sering ditunda hingga proyek-proyek penting selesai.
Inflasi	Kenaikan harga umumnya terjadi akibat kerusakan pada tanaman, barang produksi, dan infrastruktur transportasi. Selain itu, harga juga dapat naik karena adanya permintaan baru untuk barang dan jasa yang diperlukan dalam proses rekonstruksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dampak bencana terhadap perubahan harga, baik secara keseluruhan maupun dalam konteks harga-harga relatif.
Pekerjaan	Bencana bisa mengubah struktur lapangan pekerjaan karena merusak kapasitas produksi, infrastruktur sosial, dan mengubah kondisi selama proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada jenis pekerjaan yang tersedia, tetapi juga pada pendapatan masyarakat secara keseluruhan, jika hal ini memungkinkan.

(Sumber: AusAID *dalam* Artiani, 2011)

6.4 Pariwisata

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 pulau dan garis Pantai terbesar ke dua dunia setelah Kanada dengan Panjang 81.000 km^2 sehingga memiliki

potensi pariwisata yang sangat besar, khususnya pariwisata bahari yang menjadi primadona wisatawan mancanegara dan domestic (Taofik, 2013). Manfaat pariwisata sangat luas dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya (Febriandhika & Kurniawan *dalam* (Taufik et al., 2023). Wisatawan datang ke tempat wisata tentunya untuk menikmati keindahan alam yang tersedia dan menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga memiliki potensi peningkatan nilai ekonomi kawasan pariwisata tersebut, sehingga kontribusi pariwisata terhadap GDP Indonesia menunjukan nilai positif bagi Indonesia (Mudrikah et al., 2004).

Perputaran roda ekonomi di kawasan pariwisata seperti tempat penginapan/hotel, restoran/cafe, transportasi, pedagang dan pelaku jasa ekonomi kreatif akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Perubahan iklim yang terjadi saat ini akan menjadi kabar buruk bagi sektor pariwisata, sebagaian besar pariwisata tergantung pada faktor cuaca dengan sajian keindahan alam dan seperti pantai, terumbu karang dan air terjun yang sangat rentang terhadap perubahan iklim (Hein et al., 2009). Kenaikan suhu air laut dapat merusak ekosistem alam, seperti terhambat pertumbuhan terumbu karang, migrasinya ikan ke daerah lain. Kenaikan air laut akibat pemanasan global juga dapat merusak ekosistem pantai sehingga dampak yang akan terjadi yaitu penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung di tempat wisata dan akhirnya akan mengurangi pendapatan dari berbagai sektor pariwisata serta sektor pendukung pariwisata.

6.5 Kesehatan Masyarakat

Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada kesehatan manusia melalui pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung mencakup paparan langsung akibat perubahan pola cuaca seperti kenaikan suhu, perubahan curah hujan, peningkatan permukaan air laut, dan intensifikasi cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem dapat membahayakan nyawa manusia dan mengancam kesehatannya. Sementara itu, pengaruh tidak langsungnya terjadi melalui mekanisme perubahan iklim yang mempengaruhi faktor lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan makanan, penipisan lapisan ozon, serta kehilangan sumber daya air dan degradasi ekosistem (Susilawati,

2021). Terganggunya lingkungan dapat menyebabkan kesehatan manusia terganggu, bahkan berujung pada kematian, karena adanya perubahan suhu, pencemaran udara, serta penyebaran penyakit bawaan air, makanan, dan vektor. Penyakit vektor yang berhubungan perubahan iklim dan cuaca antara lain penyakit dan penyebaran deman berdarah dengue (DBD) yang berpotensi menjadi bencana biologi yang dapat menimbulkan korban jiwa jika mitigasi tidak dilaksanakan dengan baik (Husen & Tamburaka, 2022).

Selain itu, terganggunya sumber makanan dan gagal panen dari perubahan iklim juga dapat mengganggu produksi hasil pertanian yang menjebabkan pasokan makanan di masyarakat akan berkurang sehingga harga pangan yang meningkat dan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Ketidakjangkauan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan akan menyebabkan masalah malnutrisi dan menjadikan pertumbuhan perkembangan masyrakat khususnya anak akan menurun atau stunting. Akumulasi dari dampak tersebut dapat mengakibatkan biaya kesehatan yang lebih tinggi dan mengurangi produktivitas tenaga kerja.

6.6 Infrastruktur dan Energi

Perubahan iklim yang menimbulkan cuaca ekstrem akan membuat bencana alam dapat merusak infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi. Bencana alam seperti banjir yang menggenangi suatu wilayah akan menyebabkan kerusakan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Kawasan pesisir memiliki potensi bencana banjir rob yang sangat besar, kota-kota besar di sebagian wilayah berada di kawasan pesisir, misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar merupakan ibu kota provinsi di Indonesia yang juga berperan sebagai penopang perekonomian wilayah penyangga kota-kota besar tersebut.

Kerusakan infrastruktur tersebut tentunya akan menyebabkan terganggungnya pergerakan orang, barang dan jasa. Infrastruktur komunikasi akan terganggu karena banjir sehingga dampak ekonomi akan terhambat. Kemudian dari pada itu pasca bencana alam akibat perubahan iklim, perbaikan dan pemulihan infrastruktur memerlukan

investasi besar-besaran, yang dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pengembangan ekonomi lainnya.

Sektor energi saat ini telah memasuki peralihan ke energi terbaruhkan. Penggunaan energi fosil dalam kebutuhan dalam negeri perlahan akan dikurangi dan suatu saat akan dihilangkan, sesuai dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan net zero emission pada tahun 2060. Sebagai pengganti energi fosil maka penggunaan energi terbarukan menggunakan energi yang berasal dari lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi potensial air menjadi energi kinetic sehingga akan menggerakan turbin dan menghasilkan listrik. Infrastruktur bendungan yang menggunakan debit air menjadi sumber utama dalam PLTA, akan tetapi perubahan iklim yang terjadi dengan musim El Nino dan La Nina yang tidak dapat diprediksi, dikhawatirkan akan terjadi penurunan debit air sungai yang menjadi sumber utama penghasil listrik.

Mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang saat ini sudah diprediksi akan menjadi ancaman nyata yang akan dihadapi bersama di kemudian hari. Mitigasi yang terukur seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian ekosistem alam, diversifikasi ekonomi, dan penguatan infrastruktur tahan bencana dapat dilakukan sebagai bagian dari ketahanan bangsa. Mengingat bahwa perubahan iklim tidak terbatas wilayah administrasi pemerintahan maka kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi masalah ini agar tujuan pembangunan dapat diraih secara efektif.

Perekonomian Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi perubahan iklim merupakan ancaman serius yang harus segera diatasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat melindungi sumber daya alamnya, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Daftar Pustaka

Artiani, L. E. (2011). Dampak Ekonomi Makro Bencana : Interaksi Bencana Dan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Seminar Nasional Informatika*, 67–74. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1279

BPS. (2023). *BRS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022*.

Diposaptono, S., Budiman, & Agung, F. (2013). *Menyiasati Perubahan IKLIM DI Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* (3rd ed.). Sains Press. www.penerbitsku.ucoz.com

Gaur, A., & Verma, S. (2023). Impact of Climate Change on Agriculture. In *The Impact of Climate Change and Sustainability Standards on the Insurance Market* (pp. 193–209). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781394167944.ch12

Harini, R., & Susilo, B. (2017). Spatial Study Of Climate Change Impact On Agricultural Production. *Jurnal Agripita*, *1*(1), 14–20.

Hein, L., Metzger, M. J., & Moreno, A. (2009). Potential impacts of climate change on tourism; a case study for Spain. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *1*(2), 170–178. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2009.10.011

Husen, O. O., & Tamburaka, E. (2022). Tingkat Kerawanan Bencana Biologis Demam Berdarah Dengue (DBD) Dengan Pendekatan Spasial Di Kabupaten Bombana. *Jurnal Envirotek*, *14*(1), 1–11.

Isa, M. (2016). Bencana Alam: Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi? *The 3rd University Research Colloquium 2016*, 147–156.

Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., Ismanto, & Satia, A. B. (2004). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Gdp Indonesia Tahun 2004 - 2009. *Economics Development Analysis Journal*, *3*(2), 362–371. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edajSudarma, I. M., & As-syakur, Abd. R. (2018). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Di Provinsi Bali. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *12*(1), 87–98. https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p07

Sudarma, I.M., Rahman As-syakur, R. (2018) Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian di Provinsi Bali. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis SOCA, 12 (1):87-98.

Susilawati, S. (2021). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan. *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease*, *2*(1), 25–31. https://doi.org/10.22437/esehad.v2i1.13749

Taofik, A. (2013). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Kegiatan Wisata Bahari Di Gili Trawangan. *Jurnal Nasional Pariwisata*, *5*(2), 137–145.

Taufik, Husen, O. O., Mukaddas, J., & Arfah, J. (2023). Spatial Analysis of the Development of Andawe Waterfall Tourist Area in Matahori Village, Padanguni District, Konawe Regency. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, *17*(1), 49–63.

Bab 7

PERAN SEKTOR KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Milla Naeruz

7.1 Sektor Keuangan

Sektor keuangan mencakup perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan keuangan kepada konsumen komersial dan ritel. Sektor keuangan mencakup berbagai entitas dan industri yang memberikan layanan keuangan kepada konsumen, baik dalam lingkup komersial maupun ritel. Ini mencakup perusahaan-perusahaan seperti bank, perusahaan dana investasi, dan perusahaan asuransi. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan finansial kepada individu dan bisnis dari risiko tertentu dengan membayar premi. Perusahaan dana investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan properti. Mereka menawarkan berbagai jenis reksa dana dan portofolio investasi yang dirancang untuk mencapai tujuan keuangan investor.

Pentingnya sektor keuangan dalam perekonomian tidak dapat diabaikan, mengingat aliran uang berputar di dalamnya. Jika perekonomian suatu negara, seperti Indonesia sebagai contoh, mengalami pertumbuhan negatif hingga resesi, sektor keuangan pun akan mengalami kerugian. Sebaliknya, pada pertumbuhan ekonomi positif, sektor ini akan meraih keuntungan yang menarik. Untuk menjaga

ketahanan sektor keuangan dalam berbagai kondisi ekonomi, baik di tingkat negara maupun global yang tidak dapat diprediksi, diperlukan inovasi dan mitigasi yang tepat.

Perhatian khusus diperlukan terhadap sektor perbankan, yang dianggap sangat rentan terhadap krisis, resesi, atau bahkan depresi ekonomi. Hal ini diungkapkan dalam buku berjudul "Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia" yang disusun oleh P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI. Buku tersebut menyoroti bahwa pertumbuhan kredit perbankan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor keuangan syariah juga berperan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor riil. Sebagai pendorong utama, sektor keuangan memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sektor keuangan bukan hanya sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi, tetapi juga mampu mengumpulkan tabungan dan mengalokasikannya melalui kredit kepada pihak yang membutuhkan. Mereka menyediakan berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan risiko rendah kepada para peminjam, yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, sektor keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan memainkan peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Fungsi-fungsi dalam sistem keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu akumulasi modal (fisik dan manusia) serta inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut dianggap sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sesuai dengan literatur teori pertumbuhan ekonomi.

Berbagai faktor mempengaruhi peningkatan sektor keuangan, seperti kenaikan suku bunga, pengurangan regulasi, tingkat utang konsumen yang lebih rendah, dan peran sektor moneter. Sektor keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan memobilisasi tabungan, menyediakan instrumen keuangan, dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi kapital. Sektor keuangan memiliki peran signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi dengan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan

inovasi teknologi. Dalam konteks pembangunan, sektor keuangan mampu memobilisasi modal untuk diinvestasikan ke sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Kendati demikian, tantangan inklusivitas masih ada, dan sektor jasa keuangan perlu terus diperdalam untuk mendukung perekonomian secara menyeluruh.

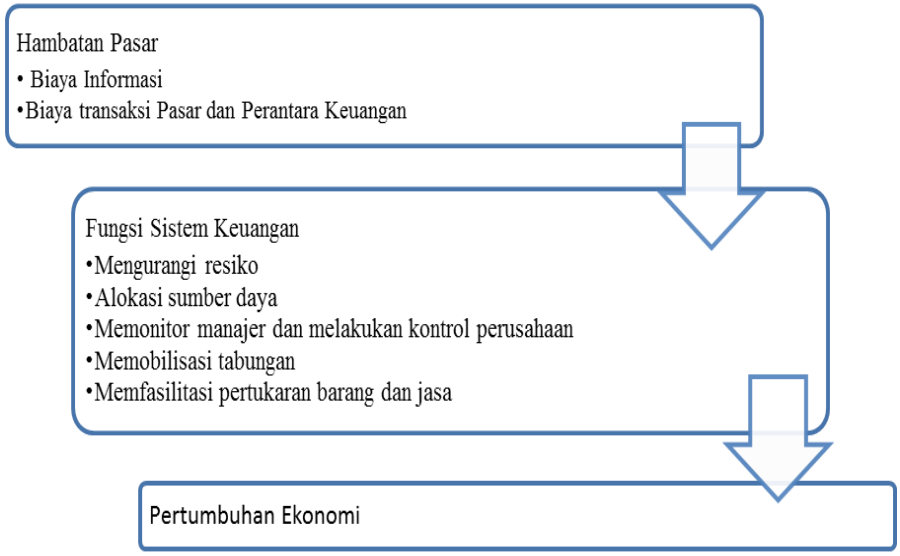

Gambar 7.1 Siklus Perkembangan Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Levine, 1997).

7.2 Industri Sektor Keuangan Di Indonesia

7.2.1 Perbankan

Bank Umum (konvensional)	Bank Syariah	Bank Perkreditan Rakyat	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
•Bank Garansi •Safe Deposit Box •Kredit •Giro •Deposito •Tabungan	•Bank Garansi •Safe Deposit Box •Pembiayaan •Giro •Deposito •Tabungan	•Kredit •Deposito •Tabungan	•Pembiayaan •Deposito •Tabungan

Gambar 7.2 Jenis Bank dan Produknya (Sumber: OJK, 2020)

Pada dasarnya, kredit, pinjaman, dan pembiayaan merupakan bentuk-bentuk pemberian dana yang digunakan untuk keperluan tertentu. Meskipun sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki perbedaan dalam konteks penggunaan dan struktur.

1. Kredit

Kredit adalah jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang atau perusahaan dari lembaga keuangan atau kreditur. Biasanya, kredit diberikan dengan suku bunga yang disepakati dan jangka waktu tertentu. Kredit dapat berbentuk kredit konsumen, seperti kartu kredit, atau kredit bisnis, seperti kredit modal kerja atau kredit investasi. Peminjam membayar kembali kredit bersama dengan bunga yang telah disepakati sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang setara, sesuai kesepakatan antara bank dan peminjam, yang mengharuskan peminjam melunasi utangnya setelah periode tertentu dengan pembayaran bunga. Bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian adalah penyedia kredit (OJK, 2020).

2. Pembiayaan

Pembiayaan, adalah dukungan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan barang/aset/jasa tertentu. Mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tersebut. Bank umum syariah/unit usaha syariah/BPRS, dan perusahaan pembiayaan adalah penyedia produk pembiayaan. Ada juga mekanisme yang melibatkan dua pihak, seperti pembiayaan emas di bank/BPR Syariah dan pembiayaan jual dan sewa balik (OJK, 2020).

3. Safe deposit box

Safe Deposit Box (SDB) adalah layanan penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang didesain khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan serta memberikan rasa aman kepada pengguna. Barang berharga yang sering disimpan di SDB

termasuk barang yang pemiliknya merasa tidak aman menyimpannya di rumah, dan biaya asuransi barang yang disimpan di SDB cenderung lebih terjangkau.

Keuntungan dari Safe Deposit Box adalah keamanan relatif tinggi, dengan ruang penyimpanan yang kokoh dan dilengkapi dengan sistem keamanan 24 jam. Untuk membukanya, diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank. SDB juga fleksibel, tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan penyewa perorangan atau badan usaha. Prosedur penyewaan relatif mudah, sering kali hanya memerlukan pembukaan tabungan atau giro (meskipun beberapa bank mungkin memiliki persyaratan yang berbeda).

Namun, ada biaya yang dibebankan kepada penyewa, termasuk biaya sewa, biaya agunan kunci, dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Barang-barang yang dilarang disimpan di SDB termasuk senjata api, bahan peledak, dan barang-barang lain yang dapat membahayakan atau merusak. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga kunci dan memperlihatkan barang yang disimpan jika diminta oleh bank. Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan kuantitas dan kualitas barang yang bukan kesalahan bank, serta kerusakan akibat force majeur seperti gempa bumi, banjir, perang, dan sebagainya.

4. Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank memberikan buku tabungan yang mencatat seluruh transaksi nasabah, dan kartu ATM dengan nomor pribadi (PIN). Jenis tabungan telah berkembang, dan saat ini beberapa tabungan tidak lagi menggunakan buku tabungan, melainkan layanan internet/mobile banking.

Tabungan memiliki setoran awal minimal saat pembukaan rekening, yang besarannya ditentukan oleh masing-masing bank. Pada produk tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), setoran awal minimal khususnya adalah Rp. 5.000,00 untuk SimPel konvensional dan Rp. 1.000,00 untuk SimPel iB syariah. Nasabah juga menerima bunga atau bagi hasil sesuai dengan kebijakan bank. Meskipun bunga tabungan umumnya lebih kecil dibandingkan dengan investasi seperti deposito, menabung di bank memberikan beberapa keuntungan, seperti keamanan,

jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan saldo, kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam, dan kebiasaan hemat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti setoran awal minimal, mengisi formulir pembukaan tabungan, serta membayar biaya administrasi. Nasabah juga disarankan untuk memilih bank yang sesuai dengan kebutuhan, memastikan tabungan memenuhi syarat penjaminan oleh LPS, membaca dan memahami ketentuan produk tabungan, dan menggunakan layanan transaksi perbankan elektronik untuk menghemat biaya dan waktu.

5. Giro

Rekening Giro merupakan salah satu produk perbankan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk menyimpan dana dalam bentuk rupiah atau mata uang asing. Nasabah bisa merupakan individu, badan usaha, dan atau merupakan institusi sah menurut hukum. Dalam rekening giro, penarikan dana dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan instrumen seperti cek atau bilyet giro (Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Penyelenggaraan Lembaga Jasa Keuangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Cek adalah surat berharga atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Bilyet Giro, di sisi lain, adalah surat berharga atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan.

6. Garansi bank

Dalam pelaksanaan rencana bisnis, seringkali terdapat beberapa proyek yang pelaksanaannya dipercayakan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, Bank Garansi menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengatasi ketidakpastian dan risiko bagi nasabah. Bank Garansi adalah pernyataan tertulis dari bank yang menjamin pembayaran kepada pihak ketiga (biasanya penerima garansi) atas nama nasabah (biasanya pemberi garansi) jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan

kontrak atau perjanjian yang telah disepakati (Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007).

Bank Garansi dapat diartikan sebagai bentuk jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, ketika nasabah berencana membangun sebuah hotel dan mengundang kontraktor atau pemasok untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Untuk mencegah hilangnya uang muka, nasabah memerlukan Advance Payment Bond. Setelah proyek selesai, nasabah juga memerlukan Performance Bond untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, termasuk dalam hal kualitas, waktu, dan spesifikasi. Sebelum serah terima, nasabah memerlukan Retention/Maintenance Bond untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan proyek akan memenuhi kewajiban layanan purna jual, seperti perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu.

Pihak yang menerima Bank Garansi perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan menghubungi bank penerbit, memeriksa masa berlaku sesuai dengan jangka waktu proyek, dan memahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan klaim apabila diperlukan. Sementara itu, bagi pihak yang dijamin Bank Garansi, perlu memperhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam proses penerbitan Bank Garansi, melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan kepada pihak penerima jaminan, dan memahami bahwa proses penerbitan Bank Garansi melibatkan penjelasan terbuka mengenai usaha pihak yang dijamin kepada bank. Dalam konteks ini, beberapa catatan penting termasuk Bid Bond yang juga dikenal sebagai *Tender Bond*, yang merupakan jaminan untuk penawaran, *Advance Payment Bond* sebagai jaminan uang muka, *Performance Bond* sebagai jaminan pelaksanaan, dan *Retention/Maintenance Bond* sebagai jaminan pemeliharaan.

7.2.2 Non perbankan

1. **Lembaga non keuangan perbankan**

Gambar 7.3 Lembaga Keuangan Non Bank (Sumber : OJK, 2020)

2. **Produk dan jasa keuangan nonbank**

Gambar 7.4 Produk Lembaga Keuangan non bank (Sumber : OJK, 2020)

a. Asuransi

Asuransi, berdasarkan UU No 40 Tahun 2014, adalah perjanjian antara dua belah pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan atas: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi Syariah, pada dasarnya, adalah serangkaian perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta antara pemegang polis, bertujuan untuk mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah dengan saling menolong dan melindungi. Prinsip ini melibatkan penggantian akibat kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Pembayaran juga dapat didasarkan pada meninggalnya pemegang polis atau hidupnya pemegang polis dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Modal Ventura (Lembaga Pembiayaan)

Perusahaan Modal Ventura, atau Venture Capital Company, adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan atau menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company). Pembiayaan tersebut dapat berupa penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura melibatkan penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha (profit/revenue sharing).

c. Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat tiga jenis Dana Pensiun:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja: Dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan: Dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan: Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

d. Lembaga Keuangan Lainnya

Lembaga Keuangan Khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya terkait dengan dukungan terhadap program Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khusus mencakup Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero).

1. **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang juga dikenal sebagai Indonesia Eximbank, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 sebagai bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor ekspor. Peran LPEI sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional melalui

penyediaan skema pembiayaan ekspor yang memadai. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mendukung ekspor nasional, LPEI menyediakan berbagai layanan finansial yang meliputi pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009)

2. Perusahaan Pergadaian

Pengawasan terhadap kegiatan usaha pergadaian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri pergadaian. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian merupakan instrumen regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait operasional dan pengawasan usaha pergadaian di Indonesia. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan usaha pergadaian yang sehat, yang pada gilirannya akan memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor pergadaian. Fokus pengawasan mencakup penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai dan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga, serta jasa taksiran. Selain kegiatan utama, perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan pergadaian, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau dengan persetujuan OJK. Pergadaian dibagi menjadi dua kategori: perusahaan pergadaian pemerintah, yang diwakili oleh PT Pegadaian (Persero), dan perusahaan pergadaian swasta, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Modal disetor perusahaan pergadaian ditetapkan berdasarkan wilayah usaha, dan pelaku usaha pergadaian harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lembaga Penjamin

Lembaga Penjamin diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dengan tujuan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakses pendanaan, meningkatkan akses

dunia usaha, mendorong pembiayaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi nasional, dan meningkatkan inklusivitas keuangan. Dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank, yang mungkin sebelumnya sulit bagi mereka untuk memperolehnya karena keterbatasan jaminan atau riwayat kredit yang kurang. Lembaga Penjamin membantu dalam meningkatkan partisipasi dan kontribusi UMKM dalam perekonomian, sehingga mendukung pertumbuhan dan dinamika dunia usaha secara keseluruhan. Lembaga Penjamin turut mendorong aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Widyastuti et al., 2019).

4. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Dalam rangka mendukung pembangunan di bidang perumahan, Pemerintah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi aset keuangan, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). PT SMF (Persero) memiliki peran sebagai koordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan pendukung kredit. Dalam transaksi sekuritisasi, diharapkan dapat mengatasi ketidaksesuaian jangka waktu antara sumber pendanaan perbankan yang bersifat jangka pendek dengan kredit perumahan yang umumnya jangka panjang.

5. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT PNM (Persero) didirikan untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM). Dengan lima bidang usaha, termasuk Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), Pembinan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), Jasa Manajemen, dan Program Kemitraan, PT PNM (Persero) bertujuan meningkatkan posisi sebagai penyedia jasa pembiayaan dan manajemen. Fokusnya adalah pada pertumbuhan aset dan laba, optimalisasi struktur permodalan, peningkatan berkelanjutan infrastruktur dan organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

6. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) memiliki empat entitas anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor bisnis jasa keuangan, termasuk PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance, dan PT Danareksa Capital. Didirikan untuk mendorong masyarakat berinvestasi di pasar modal, membantu sektor usaha, meningkatkan nilai tambah perusahaan, dan turut memajukan perekonomian Indonesia melalui peran aktif di industri pasar modal.

Daftar Pustaka

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). (www.indonesiaeximbank.go.id).

Levine, Ross. *1997*. Financial Development and Economic Growth: Views and. Agenda. Journal of Economic Literature. 35, 688-726

OJK, 2020. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Jasa-Keuangan-khusus.aspx.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Penyelenggaraan Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Penyelenggaraan Lembaga Jasa Keuangan.

Perundang-Undangan. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014* tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang merupakan dasar hukum untuk pendirian dan operasional LPEI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Widyastuti, U., Sumiti, A., Susanti, S., Suherman, S. (2019). Financial Inclusion at the Bottom of the Pyramid: Accessibility, Usage and Barriers from Fishermen's Perspective in Urban Areas. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 9(9): 262-279.

Bab 8

TANTANGAN DAN PELUANG SEKTOR *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Oleh: Rini Nur

8.1 Pendahuluan

Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce di Indonesia. Dulu, orang-orang bertransaksi dengan cara bertatap muka. Penjual bertemu dengan pembeli lalu bernegosiasi harga, dan terjadilah transaksi. Dewasa ini cara yang demikian mulai teralihkan. Dunia digital mulai bergerak menggantikan itu semua. Prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis. Awalnya pengunaan internet hanya sebatas untuk menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pula toko *online*. Inilah titik mula munculnya *e-commerce* di Indonesia.

Pada tahun 2021, pasar e-commerce di Indonesia menghasilkan pendapatan sekitar 56 miliar dolar AS. Dibandingkan tahun 2020, angka ini meningkat signifikan hampir 20 miliar dolar AS. Hal ini kemungkinan besar merupakan hasil dari perubahan perilaku konsumsi selama pandemi Covid-19. Meningkatnya tingkat penetrasi internet - suatu metrik yang membandingkan jumlah pengguna internet dengan jumlah penduduk - bersama dengan meningkatnya jumlah orang dewasa muda dan konsumen baru di seluruh wilayah, dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan yang tepat bagi e-commerce untuk berkembang.

Dalam satu dekade terakhir, beberapa perusahaan e-commerce raksasa didirikan di kawasan Asia Tenggara, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan masih banyk yang lain. Pada kuartal pertama tahun 2022, e-commerce Indonesia Tokopedia menduduki peringkat pertama di antara situs e-commerce yang paling banyak diklik di Indonesia, dengan lebih dari 158 juta klik. Peringkat kemudian diikuti oleh Shopee dan Lazada. Sejatinya, *E-commerce* adalah bagian dari *E-bussiness* yang ruang lingkupnya lebih kompleks (Ganbold, 2023). Electronic commerce atau *e-commerce* adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, baik untuk penyaluran barang atau jasa, pembelian, maupun penjualan atau pemasarannya. Meskipun sarananya awalnya meliputi televisi dan telepon, kini *e-commerce* lebih sering terjadi melalui internet, mencakup berbagai jenis platform dan model bisnis yang memfasilitasi jual-beli barang dan layanan secara online. Adapula istilah marketplace yang sudah umum di masyarakat, namun untuk beberapa hal marketplace berbeda dengan *e-commerce*.

8.2 Perbedaan *E-commerce* dengan *Marketplace*

Terkadang ada kesalahpahaman tentang *e-commerce* dan *marketplace*. *Marketplace* merupakan bagian atau subset dari e-commerce. E-commerce lebih luas mencakup semua bentuk perdagangan elektronik, termasuk toko online, lelang online, dan model bisnis lainnya. Marketplace memiliki karakteristik uniknya sendiri, di mana berbagai penjual atau pedagang dapat mendaftar pada platform e-commerce yang selanjutnya dapat menawarkan produk atau layanan mereka kepada pembeli. Ini menciptakan lingkungan dimana pembeli dapat menemukan berbagai produk dari berbagai penjual dalam satu tempat. Dapat dikatakan pula bahwa marketplace adalah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi & Saputra, 2017). E-commerce berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli, menyediakan fasilitas untuk transaksi, pembayaran, dan seringkali, logistik. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah

diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace.

Marketplace dan media sosial adalah cara e-commerce yang lebih gampang dan kian nyaman. Untuk memulai, pedagang hanya perlu membuat akun dan mengatur lapak. Bahkan tidak ada biaya operasional yang perlu dikeluarkan di awal. Konsumen tak lagi datang ke toko untuk melihat produk dan menawar harga. Mereka cukup melihat e-commerce yang dituju. Kemudian, melihat katalog produk yang disediakan. Selanjutnya, memilih produk dan memasukkan metode pembayaran, kemudian adalah memilih jasa pengiriman.

8.3 Kelebihan Berdagang Melalui E-commerce

Bagi pengusaha, e-commerce menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan dengan toko konvensional, yakni:

1. Jangkauan pasar lebih luas. Pemilik bisnis dengan toko konvensional hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya bila melalui website *e-commerce*, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko tersebut.
2. Tidak terbatas waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk mendukungnya pun akan sangat besar. Sedangkan *e-commerce* tidak dibatasi oleh waktu. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun pengusaha sedang tertidur lelap.
3. Biaya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online lebih rendah dibandingkan toko yang membutuhkan bangunan, gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik.
4. Tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri *e-commerce*, terkadang penjual bisa menjadi seorang *dropshipper*. Teknik pemasaran ini memungkinkan penjual berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, penjual tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan.
5. Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, penjual tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran

elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online.

6. Mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi. Saat ini sudah banyak *tool analytic* yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online, seperti Google Analytics.
7. Pekerjaan dapat dilakukan dimanapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, satu dari manfaat *e-commerce* adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, pengusaha pun dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.

8.4 Tipe-tipe *E-commerce*

Setiap model e-commerce memiliki karakteristik dan tantangan sendiri. Pemilihan model e-commerce yang tepat tergantung pada pelaku, jenis produk atau layanan yang dijual, target pasar, dan tujuan bisnis. Berdasarkan pelakunya, secara umum ada empat jenis bisnis e-commerce:

1. **Business to business (B2B)**. Jenis e-commerce dimana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen.
2. **Business to consumer (B2C)**. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Contoh:
    - Lazada — menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi
    - Shopee, Blibli — seperti Lazada, namun juga menjual perabotan, perlengkapan anak, peralatan olahraga
3. **Consumer to consumer (C2C)**. Jenis C2C adalah transaksi online antara dua individu, salah satu contohnya adalah jual beli barang bekas.

Contoh: OLX — menjual berbagai produk bekas, mulai dari keperluan pribadi hingga kendaraan dan perlatan rumah tangga

4. **Consumer to business (C2B)** . Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Sebagai contoh seorang desain grafis dapat menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Freelancer — website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan, Upwork — juga merupakan situs freelance, iStock — situs untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersial

Beberapa bisnis mungkin memilih untuk menggabungkan beberapa model untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Pemanfaatan sosial media untuk bisnis juga menjadi salah satu model yang saat ini dilirik. Hal ini mungkin diinspirasi adanya paradigma masyarakat kolektif seperti India dan Indonesia yang lebih bergantung pada interaksi sosial (Pradana, 2015). Sebagai contoh, Tiktok menggabungkan online shop dengan media sosial sehingga pemasaran dan penjualan menjadi lebih luas. Walaupun TikTok bukan platform e-commerce utama, namun dengan adanya integrasi fitur-fitur seperti itu, TikTok berusaha untuk lebih terlibat dalam ekosistem e-commerce dan memfasilitasi transaksi jual-beli melalui platform mereka. Perubahan dan peningkatan fitur-fitur ini mungkin dapat membawa TikTok lebih dekat dengan model e-commerce dalam beberapa aspek tertentu.

8.5 Peluang E-commerce di Indonesia

Industri e-commerce tengah digandrungi dan berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini. Tercatat Indonesia saat ini berada pada 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Dari sebuah data diketahui bahwa pada tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat ke-4 dengan pertumbuhan e-commerce 20%. Sementara itu, Filipina dan India menduduki peringkat teratas dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, dengan penjualan online yang meningkat masing-masing sebesar 24,1 persen dan 22,3 persen (**Gambar 8.1**).

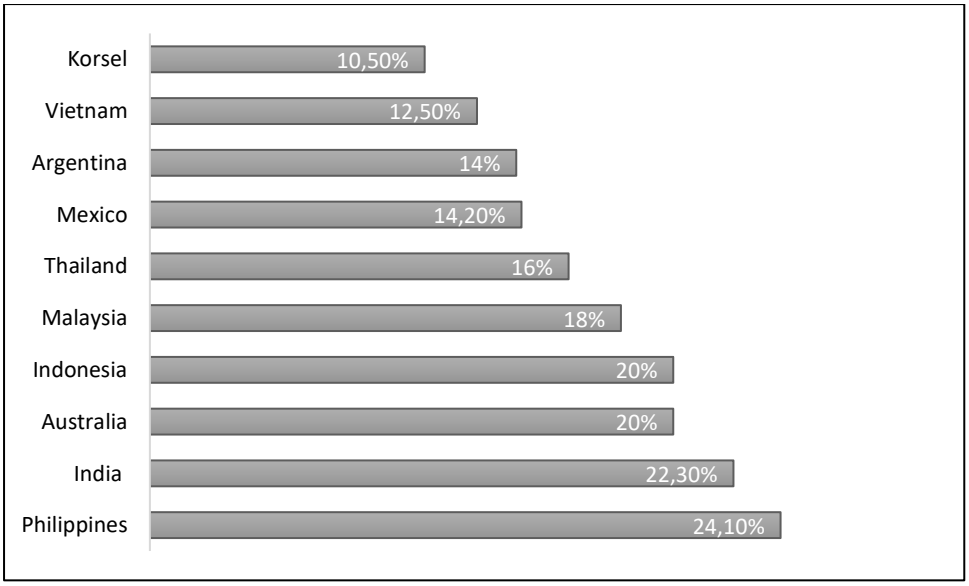

Gambar 8.1 Negara-negara terkemuka berdasarkan pertumbuhan penjualan e-commerce ritel pada Tahun 2023 (Coppola, 2023)

Keberadaan *e-commerce* sesungguhnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemanfaatan e-commerce dalam pengembangan UMKM menjadi peluang bisnis besar untuk mengembangkan bisnis secara online, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik (Zaelani, 2019). Dengan menerapkan e-commerce, dapat mempermudah promosi dan memudahkan akses produk-produk dari produsen lokal UMKM, olehnya dapat meningkatkan daya saing mereka, mengoptimalkan operasional, dan meraih peluang pertumbuhan yang lebih besar dalam lingkup pasar digital. Secara detail, sejumlah manfaat penting bagi UMKM karena pesatnya perkembangan e-commerce, yakni:

1. Akses pasar yang lebih luas: melalui e-commerce, UMKM dapat mencapai pelanggan di berbagai wilayah dan bahkan internasional tanpa harus memiliki toko fisik di lokasi tersebut. Ini membuka peluang pasar yang lebih luas.
2. Biaya operasional yang lebih rendah: berjualan secara online dapat mengurangi biaya operasional, termasuk biaya sewa tempat, utilitas, dan inventaris. UMKM dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien.

3. Promosi dan pemasaran efektif: e-commerce menyediakan platform untuk mempromosikan produk dan jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada iklan tradisional. Kampanye pemasaran online jika ditambahkan dengan berbagai kreatifitas, sebagai contoh pemilik UMKM mengintegrasikan lapak e-commerce dengan sosial media-nya, maka pasarnya semakin luas dan berpeluang besar menghasilkan transaksi yang semakin meningkat. Hasil promosi dapat lebih terukur dan disesuaikan dengan target pasar.
4. Kemudahan pengelolaan inventaris: dengan bantuan sistem manajemen inventaris online, UMKM dapat memantau stok produk secara real-time, mengurangi risiko kehabisan stok atau penumpukan persediaan yang tidak terkendali.
5. Interaksi lebih langsung dengan pelanggan: e-commerce memungkinkan UMKM berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui ulasan, umpan balik, dan layanan pelanggan online sehingga UMKM dapat mengetahui positioning produk dan layanannya di masyarakat. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang.
6. Analisis data untuk pengambilan keputusan: platform e-commerce sering kali menyediakan alat analisis data yang membantu UMKM memahami perilaku pelanggan, tren penjualan, dan preferensi pasar. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi bisnis.
7. Fleksibilitas waktu: UMKM dapat saja menjalankan bisnis online mereka selama 24 jam tanpa batasan waktu. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menanggapi permintaan pelanggan dan meningkatkan keterjangkauan bisnis.
8. Perluasan jaringan bisnis: Melalui kehadiran online, UMKM dapat terlibat dalam kolaborasi dan kemitraan dengan pelaku bisnis lainnya, memperluas jaringan mereka dan menciptakan peluang sinergi.

Indonesia adalah pasar yang demikian besar dan menarik perhatian produsen dunia untuk berlomba-lomba memasarkan produknya. Dalam kondisi di mana pasar sudah sedemikian terbuka, terutama dengan berkembangnya platform crossborder maka dibutuhkan kemauan yang kuat terutama peranan pemerintah untuk

melakukan proteksi terhadap pasar domestik dengan berbagai regulasi dan program yang efektif.

Kebijakan pemerintah yang dibutuhkan diantaranya:

- Pembatasan penjualan produk asing atau impor dari e-commerce cross border (lintas batas) sehingga karya buatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri lebih mendominasi pasar Indonesia. Dengan demikian dapat dibatasi produk dari luar negeri yang sudah bisa dibuat di Indonesia.
- Pemerintah mendorong UMKM dapat bersaing dengan produk-produk impor yang membanjiri pasar domestik.

8.6 Tantangan E-commerce di Indonesia

Walaupun e-commerce menawarkan berbagai keuntungan baik bagi pengusaha maupun pembeli seperti yang diuraikan di atas, namun terdapat tantangan tersendiri bagi usaha tersebut. Berangkat dari hasil survey per Januari 2023, beberapa tantangan e-commerce yang dialami dan perlu untuk diperhatikan oleh pengusaha maupun pembeli dirangkum dalam data pada **Gambar 8.2**.

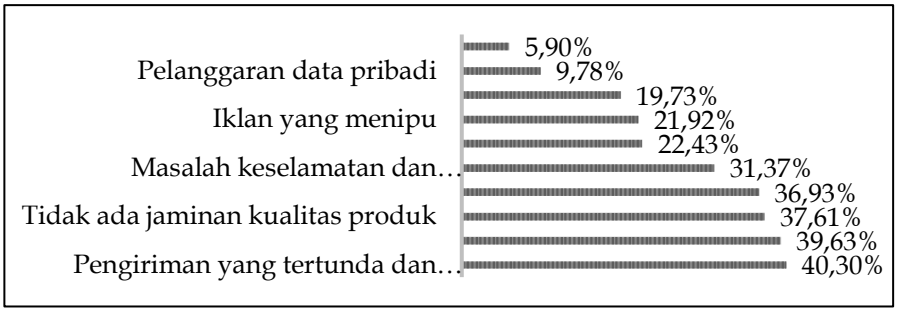

Gambar 8.2 Tantangan utama belanja online di Indonesia per Januari 2023 (Nurhayati-Wolff, 2023).

8.7 Pengiriman Yang Tertunda Dan Lambat

Pengiriman yang tertunda dan lambat telah menjadi salah satu masalah utama dalam industri e-commerce, dari survey di atas hingga mencapai 40,30%. Meskipun e-commerce menawarkan kenyamanan

berbelanja tanpa meninggalkan rumah, masalah ini seringkali merugikan pengalaman pelanggan dan dapat mengurangi kepuasan konsumen. Keterlambatan pengiriman dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala logistik, permasalahan dengan pihak kurir, dan bahkan situasi seperti bencana alam atau kondisi lalu lintas yang tidak terduga.
Melalui pemahaman mendalam tentang masalah pengiriman yang tertunda dan lambat dalam e-commerce, diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif untuk pengembangan strategi yang efektif dalam manajemen rantai pasok dan layanan logistik e-commerce. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan industri e-commerce (Chopra & Meindl, 2016).

8.8 Biaya Pengiriman Yang Tinggi

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, e-commerce telah menjadi salah satu bentuk perdagangan yang sangat populer. Bisnis online memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus pergi ke toko fisik. Namun, di balik perkembangan ini, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku e-commerce, salah satunya adalah masalah biaya pengiriman yang tinggi.

Biaya pengiriman yang tinggi menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan e-commerce. Kenaikan biaya ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kenaikan tarif pengiriman oleh jasa pengiriman, biaya logistik yang meningkat, dan tantangan lainnya dalam rantai pasok. Semakin tinggi biaya pengiriman, semakin besar kemungkinan konsumen akan enggan berbelanja online, dan ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik penjual maupun konsumen.

Peningkatan biaya pengiriman pada e-commerce menciptakan dilema antara keuntungan bisnis dan kenyamanan konsumen. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan pengiriman yang cepat dan andal, perusahaan e-commerce dihadapkan pada tekanan untuk menjaga biaya pengiriman tetap bersaing. Sementara itu, konsumen mengharapkan biaya pengiriman yang rendah atau bahkan gratis sebagai insentif untuk berbelanja online. Biaya pengiriman sangat berpengaruh

dalam peningkatan pelanggan dan tingkat transaksi pada e-commerce (Lewis, 2006). Terkadang e-commerce memberikan promosi bebas biaya pengiriman sehingga mendorong terjadinya transaksi yang cukup besar. Pengiriman bebas biaya secara signifikan dan positif berpengaruh pada keputusan pelanggan untuk bertransaksi (Istiqomah & Marlena, 2020)

8.9 Tidak Ada Jaminan Kualitas Produk

Dalam ranah perdagangan elektronik (e-commerce), pembelian produk melalui platform online telah menjadi tren yang berkembang pesat. Meskipun memberikan kenyamanan dalam berbelanja, e-commerce dihadapkan pada tantangan yang serius terkait dengan ketidakpastian mengenai jaminan kualitas produk. Konsumen sering menghadapi risiko menerima produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau bahkan cacat. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan konsumen terhadap e-commerce, merugikan reputasi penjual, dan menghambat pertumbuhan industri.

Pengetahuan tentang kualitas produk yang dijual pada e-commerce sangat penting untuk menghasilkan kepausan pelanggan. Tidak adanya jaminan kualitas produk pada e-commerce menciptakan tantangan signifikan dalam membangun kepercayaan konsumen. Pembeli online cenderung mengandalkan deskripsi produk dan ulasan dari pelanggan sebelumnya. Reputasi toko dapat dilihat dari peringkat toko serta riwayat produk dan layanan toko serta detail transaksi. Hal ini akan memberikan bantuan referensi untuk membuat keputusan pembelian. Namun, terkadang informasi ini tidak memadai atau bisa saja tidak akurat, meninggalkan konsumen dalam ketidakpastian terkait kualitas produk yang akan mereka terima. Solusi yang inovatif diperlukan untuk meningkatkan transparansi, dan meminimalkan risiko terkait kualitas produk. Ulasan pengalaman konsumen dalam berbelanja (online review) dapat ditampilkan pada halaman penilaian produk untuk membantu konsumen mengetahui kualitas produk yang diperjualbelikan (Agustina, dkk., 2018), seperti yang tampak pada gambar berikut.

Gambar 8.3 Tampilan Penilaian Produk
pada Platform E-commerce Shopee (shopee.co.id)

Melalui pemahaman mendalam tentang tantangan ketidakpastian kualitas produk dalam konteks e-commerce, diharapkan dapat merangsang penelitian lebih lanjut dan pengembangan solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan industri e-commerce secara keseluruhan.

8.10 Layanan Purna Jual

Layanan purna jual dalam konteks e-commerce mencakup berbagai aspek untuk memastikan kepuasan pelanggan setelah mereka melakukan pembelian. Beberapa layanan purna jual yang umum dijumpai dalam e-commerce melibatkan dukungan pelanggan, pengembalian barang, garansi, dan pemeliharaan. Berikut adalah beberapa aspek layanan purna jual yang penting:

Beberapa aspek layanan purna jual e-commerce

1. Dukungan Pelanggan: Memberikan bantuan dan jawaban atas pertanyaan pelanggan terkait produk, pesanan, atau masalah lainnya.

2. Garansi produk: Menyediakan jaminan terhadap kerusakan atau cacat produk, seringkali dengan opsi pengembalian atau penggantian.
3. Proses return: Menyediakan prosedur yang jelas dan mudah untuk pelanggan yang ingin mengembalikan produk yang dibeli.
4. Perbaikan dan pemeliharaan: Menyediakan layanan perbaikan atau pemeliharaan jika diperlukan setelah pembelian.
5. Pengembalian dana: Menanggapi permintaan pengembalian dana jika produk tidak sesuai dengan ekspektasi atau terdapat masalah kualitas.
6. Pembaruan informasi: Memberikan pembaruan terkait status pesanan, pengiriman, dan informasi lainnya kepada pelanggan.
7. Pengalaman pelanggan: Memastikan keseluruhan pengalaman pelanggan setelah pembelian tetap positif, termasuk penanganan keluhan dan umpan balik.
8. Edukasi pelanggan: Menyediakan panduan atau informasi terkait produk, cara perawatan, atau tips penggunaan.
9. Sistem pelacakan pengiriman: Memfasilitasi pelacakan pengiriman untuk memberikan visibilitas kepada pelanggan terkait status pengiriman produk.
10. Program loyalti: Menawarkan insentif atau program keanggotaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.
11. Penting untuk memahami dan mengevaluasi aspek-aspek ini sebelum melakukan pembelian agar dapat merasakan manfaat penuh dari layanan purna jual yang disediakan oleh platform e-commerce.

8.11 Masalah Keamanan

Beberapa tantangan keamanan e-commerce melibatkan:

1. Pelanggaran Data: Potensi pencurian atau penyalahgunaan data pelanggan seperti informasi kartu kredit atau data pribadi.
2. Penipuan Online: Upaya penipuan dengan mencuri informasi kartu kredit, menggunakan data palsu, atau melakukan tindakan penipuan lainnya.
3. Berbagai serangan keamanan dan akses tidak sah seperti :

a. Serangan Malware: Ancaman dari perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data atau merusak sistem e-commerce.
b. Serangan DDoS: Upaya membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri situs web dengan lalu lintas internet palsu.
c. Phishing: Upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas tepercaya melalui email, pesan, atau situs web palsu.

4. Kelemahan Keamanan Sistem: Rentan terhadap kelemahan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah. Salah satunya adalah kerentanan perangkat lunak e-commerce, terutama jika tidak diperbarui secara teratur, dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses sistem atau data.
5. Keamanan Pembayaran Online: Risiko keamanan terkait transaksi online dan informasi pembayaran.
6. Manajemen Kata Sandi: Pengelolaan kata sandi yang lemah atau kurang aman dapat meningkatkan risiko akses yang tidak sah. Pengguna seringkali menggunakan kata sandi yang lemah atau sama di berbagai situs web, dan jika informasi ini bocor, dapat membahayakan keamanan akun e-commerce mereka.
7. Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi: Tantangan untuk mematuhi peraturan dan standar keamanan yang berlaku.
8. Perubahan Teknologi: Kemajuan teknologi yang cepat dapat menciptakan tantangan baru dalam menjaga keamanan e-commerce.

Keamanan data pada e-commerce sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pengguna. Perusahaan e-commerce perlu secara terus-menerus meningkatkan sistem keamanan mereka dan melibatkan praktik terbaik untuk mengurangi risiko dan melindungi informasi pelanggan. Beberapa langkah kunci yang diambil untuk memastikan keamanan data di platform e-commerce melibatkan:

1. Proteksi Data Pengguna: e-commerce harus menjaga informasi pengguna seperti nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Tindakan keamanan termasuk enkripsi data, pengaturan akses yang tepat.
2. Manajemen Akses: pengelolaan akses yang ketat memastikan hanya orang-orang yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif. Ini

termasuk pengelolaan hak akses internal di dalam organisasi e-commerce.

3. Keamanan Jaringan : proteksi terhadap serangan peretasan dan serangan siber melalui langkah-langkah seperti perlindungan terhadap serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting, firewall dan deteksi intrusi penting untuk menjaga integritas sistem dan data.
4. Pemantauan Keamanan : Pemantauan keamanan berkelanjutan dan respons cepat terhadap insiden adalah langkah penting untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan dengan cepat.
5. Kesadaran Pengguna: Memberikan edukasi kepada pengguna tentang praktik keamanan online, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, juga merupakan aspek penting dari keamanan data pada e-commerce.
6. SSL/TLS Encryption: Penggunaan protokol enkripsi seperti SSL (Secure Socket Layer) atau TLS (Transport Layer Security) memastikan bahwa data yang ditransmisikan antara pengguna dan situs e-commerce dienkripsi, sehingga sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
7. Sertifikat Keamanan : situs e-commerce yang aman harus memiliki sertifikat keamanan SSL yang valid. Pengguna dapat mengidentifikasi situs yang aman melalui ikon gembok atau "https://" pada alamat web.
8. Keamanan Kartu Kredit: penyedia layanan pembayaran online harus mematuhi standar keamanan PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) untuk melindungi informasi kartu kredit pengguna.

Keamanan data yang efektif di e-commerce akan melibatkan kombinasi teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan tepercaya.

8.12 Kepercayaan dalam pembayaran

Kepercayaan dalam pembayaran e-commerce sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan merasa aman dan nyaman

melakukan transaksi online. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kepercayaan dalam pembayaran e-commerce melibatkan:

1. Metode pembayaran terpercaya: Menyediakan pilihan metode pembayaran yang dikenal dan dipercayai oleh pelanggan, seperti kartu kredit, transfer bank, atau penyedia pembayaran digital terkemuka.
2. Edukasi pelanggan: Memberikan informasi tentang langkah-langkah keamanan yang diambil oleh platform e-commerce dan cara melindungi diri selama transaksi online.
3. Deskripsi transparan: Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang biaya, kebijakan pengembalian, dan persyaratan lainnya selama proses pembayaran.
4. Ulasan pelanggan: Ulasan positif dari pelanggan sebelumnya dapat meningkatkan kepercayaan, menunjukkan bahwa bisnis memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani transaksi pembayaran.
5. Verifikasi identitas: Penerapan langkah-langkah verifikasi identitas tambahan, seperti kode OTP (One-Time Password) atau autentikasi dua faktor, dapat meningkatkan keamanan.
6. Penanganan konflik dengan pelanggan: Menyediakan prosedur yang jelas untuk menangani keluhan atau konflik terkait pembayaran, memberikan kepercayaan bahwa masalah akan ditangani dengan baik.
7. Kebijakan privasi: Memastikan kepatuhan dengan kebijakan privasi dan memberikan jaminan bahwa data pelanggan akan dijaga dengan baik.
8. Indikator keamanan browser: Menampilkan ikon gembok atau indikator keamanan lainnya di bilah alamat browser selama proses pembayaran untuk menunjukkan bahwa situs aman.
9. SSL Encryption: Penggunaan protokol keamanan seperti SSL (Secure Sockets Layer) untuk mengenkripsi data selama proses pembayaran, sehingga informasi sensitif tetap terlindungi.
10. Sertifikasi Keamanan: Memiliki sertifikasi keamanan, seperti PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan untuk informasi pembayaran.

Dengan memperhatikan aspek-aspek kepercayaan dalam pembayaran di e-commerce, aspek-aspek terkait keamanan paling berperan dalam membangun kepercayaan pelanggan dalam melakukan pembayaran online. Konsumen sangat memperhatikan keamanan dalam bertransaksi, termasuk ketika melakukan pembayaran secara non tunai (Rabiah, dkk., 2020)

8.13 Iklan yang menipu

Tingginya pengguna e-commerce yang semakin meningkat membuat para pelaku usaha harus mulai mempertimbangkan pentingnya iklan online. Apalagi efek iklan online jauh lebih terukur dibandingkan iklan pada media-media konvensional seperti TV, radio dan media cetak. Ada banyak sekali *tool* yang dapat digunakan untuk melakukan analisa sehingga lebih mudah memantau keefektifan iklan tersebut, mulai jangkauan promosi, target iklan yang dapat diukur dari data yang diperoleh secara akurat dan aktual.

Iklan yang muncul di platform e-commerce bervariasi tergantung pada prereferensi pengguna, riwayat penelusuran dan algoritma rekomendasi. Umumnya iklan produk, penawaran diskon dan rekomendasi produk berdasarkan prilaku belanja online. Bagaimana pelanggan memilih produk, jenis produk, spesifikasi-spesifikasi produk yeng sering dibeli akan menjadi dasar algoritma aplikasi untuk memberikan rekomendasi kepada pelanggan tersebut ketika akan berbelanja lagi di e-commerce tersebut.

Platform e-commerce sudah mulai membuat terobosan baru dengan program-program untuk meningkatkan iklan, sasarannya adalah meningkatkan ketertarikan yang dilanjutkan dengan lahirnya transaksi. Sebagai contoh adalah adanya program khusus bagi penjual agar dapat berkolaborasi dengan mitra afiliasi. Penjual hanya akan membayarkan komisi sesuai jumlah persentase yang telah ditentukan saat produk berhasil dijual.

Namun iklan yang bertebaran di e-commerce harus disertai kehati-hatian dalam menangkap peluang yang dipromosikan oleh iklan. Berbagai kasus penipuan belanja online di platform e-commerce masih sering terjadi. Kasus-kasus yang terjadi adalah: pelanggan tidak kunjung

menerima barang yang dibeli sedangkan pembayaran telah berlangsung, pelanggan menerima barang yang tidak sesuai, pembobolan dompet digital pelanggan serta adanya order fiktif pada e-commerce. Olehnya sangat diperlukan kode etik periklanan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen (Firman, dkk., 2023).

8.14 Kurangnya Kebijakan Bagi Pelanggan

Kebijakan dari e-commerce bagi pelanggan sangat penting karena dapat memberikan perlindungan, kejelasan, dan kepercayaan (Wariati, 2014). Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan yang baik diperlukan:

1. Perlindungan Konsumen: Kebijakan yang baik dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek bisnis yang tidak etis, penipuan, atau pelayanan yang buruk.
2. Ketertarikan Pelanggan: Kebijakan yang jelas dan adil dapat meningkatkan daya tarik pelanggan. Pelanggan cenderung lebih nyaman berbelanja di e-commerce yang menyediakan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.
3. Kejelasan dan Transparansi: Kebijakan yang terinci dan mudah dipahami memberikan kejelasan kepada pelanggan tentang apa yang dapat diharapkan selama proses pembelian, pengiriman, dan pengembalian.
4. Keamanan Informasi Pribadi: Kebijakan privasi yang baik memberikan jaminan bahwa informasi pribadi pelanggan akan dijaga dengan baik dan tidak akan disalahgunakan.
5. Penanganan Masalah dengan Efisien: Kebijakan yang merinci prosedur penyelesaian sengketa atau keluhan dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien.
6. Kepuasan Pelanggan: Kebijakan yang mendukung kepuasan pelanggan dapat menciptakan hubungan jangka panjang. Ini mencakup kebijakan pengembalian yang ramah pelanggan dan pelayanan pelanggan yang responsif.
7. Kepatuhan Hukum: Dengan memiliki kebijakan yang mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, e-commerce dapat menghindari masalah hukum dan membangun reputasi yang baik.

8. Peningkatan Kepercayaan: Pelanggan akan merasa lebih percaya untuk berbelanja di e-commerce yang memiliki kebijakan yang baik. Kepercayaan ini merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian.

Penting untuk e-commerce untuk tidak hanya memiliki kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mudah diakses, dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belanja online yang positif dan berkelanjutan. Kurangnya kebijakan bagi pelanggan di e-commerce dapat menjadi masalah serius. Beberapa kebijakan yang umumnya diperlukan melibatkan aspek keamanan, privasi, dan pengembalian barang. Berikut adalah beberapa kebijakan teknis yang sebaiknya dimiliki oleh e-commerce:

1. Kebijakan Pengembalian dan Penggantian: Memberikan informasi jelas tentang batas waktu pengembalian, prosedur pengembalian, dan persyaratan untuk mendapatkan penggantian atau pengembalian dana.
2. Kebijakan Pengiriman dan Estimasi Waktu: Menyediakan informasi terkait biaya pengiriman, metode pengiriman yang tersedia, dan perkiraan waktu pengiriman.
3. Kebijakan Garansi Produk: Jika berlaku, memberikan rincian tentang garansi produk dan bagaimana pelanggan dapat mengklaimnya.
4. Kebijakan Pengaduan Pelanggan: Menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi pelanggan untuk mengajukan keluhan, serta prosedur penanganan keluhan dengan cepat dan efektif.
5. Kebijakan Pemberian Diskon atau Promosi: Jika ada, menyediakan syarat dan ketentuan terkait dengan pemberian diskon atau promosi.
6. Kebijakan Pembatalan Pesanan: Jelaskan bagaimana pelanggan dapat membatalkan pesanan, serta apakah ada biaya pembatalan yang berlaku.
7. Kebijakan Privasi: Menjelaskan bagaimana data pelanggan akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa informasi pribadi mereka aman. Menjelaskan langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi informasi pelanggan selama sesi belanja online.

8. Kebijakan Keamanan Transaksi: Memastikan adanya lapisan keamanan yang memadai untuk melindungi informasi keuangan pelanggan selama proses pembayaran.

E-commerce yang transparan dan berkomitmen pada kepuasan pelanggan cenderung lebih dipercaya. Kebijakan yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu menciptakan hubungan yang positif antara e-commerce dan pelanggan.

8.15 Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran data pribadi adalah situasi di mana informasi pribadi seseorang diakses, diambil, atau digunakan tanpa izin, atau ketika data tersebut jatuh ke tangan yang tidak sah. Pelanggaran data pribadi di e-commerce dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh pelanggaran yang pernah terjadi melibatkan e-commerce termasuk:

1. Kebocoran Informasi Pelanggan: Situasi di mana data pribadi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, atau informasi pembayaran dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Permasalahan ini pernah terjadi pada e-commerce platform Tokopedia dimana sekitar 15 juta data pelanggan diretas (Raihan, 2023)
2. Pencurian Kredensial Pengguna: Jika informasi login atau kata sandi pengguna e-commerce bocor dan diakses oleh pihak yang tidak sah, dapat mengakibatkan akses tanpa izin ke akun pelanggan.
3. Kehilangan atau Pencurian Perangkat: Jika perangkat yang mengandung data pelanggan, seperti laptop atau server, hilang atau dicuri, dapat menyebabkan akses tidak sah ke data tersebut.
4. Serangan Siber: Upaya peretasan atau serangan siber yang bertujuan untuk mencuri data pribadi, seperti serangan phishing, malware, atau ransomware.
5. Ketidakamanan Situs Web: Jika e-commerce tidak memadai melindungi situs web mereka dari serangan siber, hal ini dapat memungkinkan peretas untuk mengakses atau mencuri data pelanggan.

6. Penyalahgunaan Data oleh Pihak Internal: Kasus dimana karyawan e-commerce menggunakan data pelanggan untuk kepentingan pribadi atau melelang data tersebut kepada pihak ketiga.
7. Pihak Ketiga yang Tidak Aman: Jika e-commerce berbagi data pelanggan dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, data bisa terpapar risiko.

Pelanggaran semacam ini dapat merugikan pelanggan dan merusak reputasi e-commerce. Oleh karena itu, e-commerce harus melibatkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, enkripsi data, dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku di wilayah operasional mereka. Tanggapan yang cepat, transparansi, dan tindakan pemulihan juga penting jika terjadi pelanggaran data pribadi.

Dampak dari pelanggaran data pribadi dapat sangat serius, termasuk kerugian kepercayaan pelanggan, sanksi hukum, dan kerugian finansial. Untuk mencegah pelanggaran data, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, melibatkan pelanggan dalam pemahaman kebijakan privasi, dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, tanggapan cepat, transparansi, dan tindakan pemulihan adalah kunci untuk mengurangi dampak negatifnya.

8.16 Produk Terbatas Pada *e-commerce*

Ada beberapa penyebab adanya fenomena terbatasnya produk pada e-commerce.

1. Fokus pada kategori produk tertentu. Beberapa e-commerce sengaja membatasi pilihan produk spesifik atau pasar target/segmentasi yang spesifik. Sebagai contoh, toko online khusus untuk pakaian dan peralatan olahraga.
2. Skala usaha: e-commerce yang masih dalam tahap awal atau skala usaha kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan berbagai produk karena kendala logistik, persediaan, atau anggaran.
3. Strategi penjualan tertentu: Beberapa e-commerce memilih untuk menawarkan produk-produk eksklusif atau unik dengan penekanan

pada kualitas produk dan ini bisa berarti pilihan produk yang lebih terbatas.

4. Keterbatasan persediaan: Jika e-commerce menghadapi keterbatasan dalam persediaan atau kerumitan logistik, mereka mungkin memilih untuk mempertahankan pilihan produk yang lebih terbatas.
5. Strategi pemasaran: Strategi pemasaran tertentu, seperti penjualan produk terpilih atau fokus pada produk-produk tertentu,

Meskipun ada keuntungan dalam menawarkan produk yang terbatas, ada beberapa masalah potensial yang dapat muncul ketika e-commerce membatasi pilihan produk:

1. Pilihan yang terbatas untuk pelanggan: Pelanggan mungkin merasa terbatas dalam pilihan produk, yang dapat mempengaruhi pengalaman belanja mereka. Ini dapat menjadi kendala terutama bagi mereka yang mencari variasi produk atau opsi yang lebih luas.
2. Ketidakpuasan pelanggan: Jika pelanggan tidak dapat menemukan produk yang mereka inginkan atau butuhkan di e-commerce, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensial kehilangan pelanggan.
3. Kesulitan mencapai pertumbuhan bisnis: E-commerce yang memiliki pilihan produk yang terbatas mungkin menghadapi kesulitan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan. Ini terutama berlaku jika target pasar e-commerce berkembang dan memiliki kebutuhan yang beragam.
4. Rentan terhadap perubahan permintaan pasar: Jika e-commerce sangat mengandalkan produk-produk tertentu, mereka bisa rentan terhadap perubahan dalam tren pasar atau pergeseran permintaan konsumen.
5. Tidak fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar: Dengan memiliki pilihan produk yang terbatas, e-commerce mungkin kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan yang berkembang.
6. Ketidakmampuan menjangkau audiens yang lebih luas: E-commerce yang membatasi pilihan produk mungkin kesulitan menjangkau audiens yang lebih luas atau menciptakan peluang untuk penetrasi pasar baru.

Oleh karena itu, e-commerce perlu mempertimbangkan secara cermat strategi diferensiasi produk mereka untuk memastikan bahwa terbatasnya pilihan produk tidak menghambat pertumbuhan atau kepuasan pelanggan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan keunikan produk dan memenuhi kebutuhan yang beragam dari pelanggan.

Kompetisi bisnis digital di internet sangatlah berat, terutama jika barang atau layanan yang Anda jual juga ditawarkan oleh banyak pihak lain. Calon pembeli kini menggunakan mesin pencarian untuk menemukan brand terpercaya. Meninjau ulasan dari pembeli lain sebagai referensi sebelum menetapkan pilihan produk dan toko tempat berbelanja. Kualitas sebuah toko yang berada di e-commerce juga dapat dilihat dari kualitas produk atau jasa serta kualitas layanan yang diberikan dalam transaksi.

Persaingan e-commerce untuk menarik calon konsumen semakin ketat. Setiap e-commerce punya keunggulan masing-masing. Kiat untuk menarik calon konsumen :

- Foto produk yang baik. Gambar/foto produk yang ditampilkan di etalase e-commerce-mu sebaiknya merupakan foto yang jelas, tidak buram, dan bagus. Jelas atau tidaknya foto produk bisa mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian, dengan bantuan jasa fotografer profesional akan menghasilkan kualitas foto yang baik sehingga meningkatkan ketertarikan pelanggan.
- Deskripsi produk yang jelas dan lengkap. Deskripsi produk yang dijual menjadi faktor yang sangat menentukan pembelian. Deskripsi produk yang jelas, lengkap, dan meyakinkan disertai penggunaan kata yang bagus dan menarik serta adanya detail dan alasan yang membuat produk itu menjadi spesial sehingga akan menarik konsumen untuk membeli produk.
- Berikan pelayanan konsumen yang baik. Layanan pelanggan yang baik dan cepat serta bersifat solutif dan helpfull akan meninggalkan kesan yang baik bagi pelanggan sehingga memungkinkan kesan itu akan mengantar pembeli untuk kembali bertransaksi di toko tersebut di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Agustina L, Fayardi AO, Irwansyah. 2018. *Online Review*: Indikator Penilaian Kredibilitas Online dalam Platform E-commerce. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(2): 141-154.

Apriadi D & Saputra A. 2017. E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. Jurnal Resti, 1(2):131-136.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson.

Coppola D. 2023 Fastest-Growing Retail E-commerce Countries 2023. https://www.statista.com/statistics/266064/revenue-growth-in-e-commerce-for-selected-countries/

Firman, Sunarno A, & Ikbal A. 2023. Perlindungan Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan dari Perspektif Hukum Perdata dan Kode Etik Periklanan Indonesia. Jurnal Paris Langkis, 3(2), 161–175.

Ganbold S. 2023. E-commerce in Southeast Asia. https://www.statista.com/topics/10021/e-commerce-in-southeast-asia/#topicOverview

Istiqomah M. & Marlena N. 2020. Pengaruh Promo Gratis Ongkos Kirim dan Online Customer Rating terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion, Jurnal Manajemen 12(2): 288-298

Lewis M. 2006. The Effect of Shipping Fees on Customer Acquisition, Customer Retention and Purchase Quantities. Journal of Retailing 82(1):13-23

Nurhayati-Wolff H. 2023. Indonesia Challenges to Online Shopping. https://www.statista.com/statistics/1427731/indonesia-challenges-to-online-shopping/#statisticContainer

Pradana, M. 2015. Klasifikasi Jenis-jenis Bisnis E-Commerce. Jurnal Neo-bis Vol. 9(2):32-40

Rabiah A., Fahlevi M., Juhandi N., Winarto P. 2020. Haruskah E-payment Trust Diterapkan E-commerce sebagai Faktor Kepuasan Konsumen? E-Jurnal Manajemen. 9(7):2724-2743

Raihan M, 2023. Perlindungan Data Diri Konsumen dan Tanggungjawab Marketplace terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus:

Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia). Jurnal Inovasi Penelitian, 3(10): 7847-7856.

Wariati. 2014. E-commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1(2):1-19.

Zaelani I. 2019. Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan dan Peluang Pengembangan Iptek, Jurnal Transborder, 3(1): 15-33

Bab 9

PERAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Doddy Ismunandar Bahari

9.1 Konteks dan Tantangan Hubungan Pendidikan dan Ekonomi di Indonesia

Pendidikan memiliki potensi untuk mengubah struktur ekonomi dari agraris dan non agraris tradisional ke dalam bentuk struktur yang berbasis pengetahuan dan teknologi, sehingga meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik (Laba & Saing, 2023). Indonesia sering diidentifikasi sebagai negara agraris karena mayoritas populasi bekerja di sektor pertanian yang menjadi pilar utama perekonomian. Namun, untuk mengikuti arus perkembangan zaman, Indonesia perlu meng-*upgrade* sektor pertanian yang terdigitalisasi dan memperluas keberadaan sektor ekonomi lainnya, yang juga ter-*upgrade* untuk bertahan di era disrupsi teknologi dan informasi (Yuangga, 2023). Melalui pendidikan, perbaikan kualitas tenaga kerja dapat dicapai, dan tenaga kerja yang tersedia di Indonesia dapat dipersiapkan untuk mengambil peran penting di dalam sektor-sektor ini.

Pendidikan berperan utama dalam meningkatkan standar tenaga kerja dan menyiapkan angkatan kerja Indonesia untuk mengambil peran strategis pada beragam sektor. Negara-negara yang berhasil

menyesuaikan diri dengan perubahan pasar kerja seringkali didukung oleh sistem pendidikan yang andal yang dapat memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berkembang (Sakti et al., 2022). Pembahasan *interlinkage* antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dimulai dengan hasil identifikikasi temuan Glewe et al., (2014), dimana mereka membahas dan menyelidiki dampak pendidikan pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang melalui artikel berjudul *The Contribution of Education to Economic Growth: A Review of the Evidence, with Special Attention and an Application to Sub-Saharan Africa* yang dipublikasikan pada. Dalam penelitian mereka ini, mereka memberikan tanggapan terhadap pandangan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa dampak pendidikan pada pertumbuhan ekonomi dan menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki efek positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Mereka menyoroti bahwa peningkatan tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang, khususnya di negara-negara dengan tingkat pendidikan awal yang rendah. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di Sub-Sahara Afrika terjadi karena hubungan antara investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Mereka mengeksplorasi faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan akses terhadap pendidikan memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terdapat keterkaitan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sub-Sahara Afrika.

Berbagai studi telah menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktor pendidikan menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, menggarisbawahi pentingnya kontribusi pendidikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka Panjang. Berbagai temuan telah menunjukkan hubungan positif antara Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi. Falah (2023); Fitri & Aimon (2019); Kusreni (2017); Soleman et al., (2023). Walaupun ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang memuaskan, namun masih menghadapi tantangan dalam menghindari

jebakan pendapatan menengah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perluasan pendidikan di bidang STEM (science, technology, engineering, arts, mathematics) (Suyitno, 2023).

Tantangan berikut yang mampu menentukan peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pada jenis pekerjaan yang diterima oleh tenaga kerja. Tingkat pendidikan formal (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) memainkan peran penting dalam menentukan pilihan tenaga kerja memilih bekerja di sektor formal atau informal di Indonesia. Walaupun sektor informal berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun sektor ini juga memiliki kelemahan, seperti tingkat produktivitas yang rendah, kualitas pekerjaan yang kurang memuaskan, dan minimnya perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meng-*upgrade* mutu dan efisiensi sektor informal melalui jalur pendidikan berupa program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan tertentu (Zuhri (2017); Al Farrell & Atmanti (2023).

Oleh karena itu, situasi terkini dalam konteks hubungan antara pendidikan dan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengatasi tantangan jebakan pendapatan menengah, dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangan yang dihadapi mencakup perlunya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis peningkatan pendidikan untuk menghadapi kompleksitas dinamika ekonomi dan teknologi yang semakin tinggi.

Dalam Bab 10 ini dikemukakan keterkaitan sektor pendidikan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pengetahuan untuk membedah peran sektor pendidikan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Selain itu, juga dikemukakan berbagai masalah penting yang menjadi dasar atas permasalahan kontribusi besar kecilnya dampak sektor pendidikan pada pertumbuhan output nasional, terutama pada tahapan peningkatan level pendidikan.

9.2 Keterkaitan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Percepatan pertumbuhan ekonomi karena Revolusi Industri menyebabkan standar hidup masyarakat meningkatkan tajam dan terjadinya fenomena "*Great Divergence*", yakni divergensi standar hidup yang tinggi antara negara-negara di dunia. Divergensi tingkat standar hidup pada masa tersebut tetap terbawa hingga kini yang menunjukkan tingkat standar hidup tinggi yang hanya didominasi pada beberapa negara. Saat ini, variasi antara standar hidup yang dicapai negara dengan standar hidup tertinggi yakni Luxembourg dan negara dengan standar hidup terendah yaitu Burundi yang mencapai perbandingan hingga 500:1. Sepuluh kali lebih besar dibanding Great Divergence yang terjadi pada abad 19. Dalam perubahan variasi pertumbuhan tingkat standar hidup tersebut tidak ditentukan oleh besarnya perekonomian dan tingkat standar hidup yang telah dicapai suatu negara. Namun, ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi tiap negara, hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi saat ini mempunyai konsekuensi terhadap tingkat standar hidup di masa mendatang.

Publikasi *World Bank* (2016) pada *Global Monitoring Report* mengemukakan bahwa penduduk miskin dunia yang hidup dibawah pendapatan 1,9 USD per hari menurun 24 persen antara tahun 1990-2012. Penurunan penduduk miskin secara drastis di Asia Timur yang menurun 52 persen antara tahun 1980-2012. Namun, negara kawasan Sub-Sahara Africa (SSA) hanya mengalami penurunan masyarakat miskin sebesar 14 persen. Kemampuan negara-negara Asia timur seperti China dan Korea yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi faktor yang mampu mengurangi kemiskinan secara drastis. Pencapaian China dan Korea tersebut disebabkan adanya karakteristik yang sama yaitu mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Capaian pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan antar negara dapat dilihat pada **Gambar 9.1** sebagai berikut.

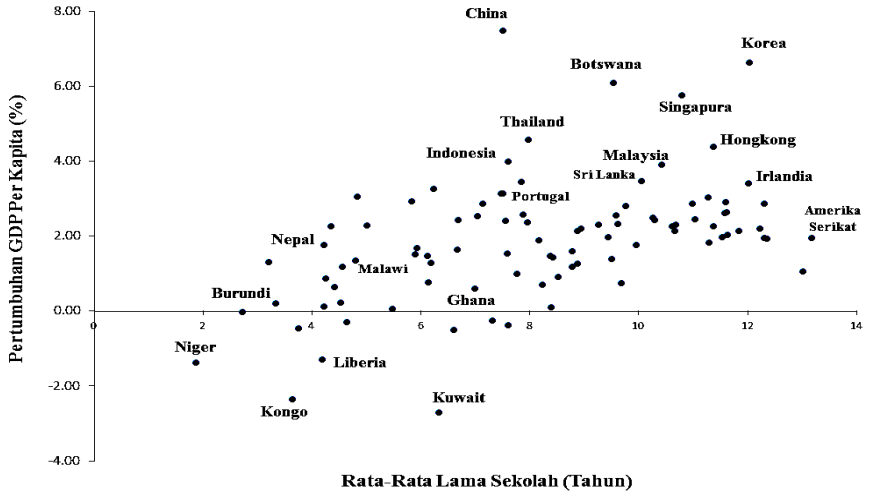

Gambar 9.1 Sebaran Rata-rata Tingkat Pendidikan Antar Negara Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

China, Korea, Botswana, Singapura, dan Hongkong merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta berhasil menurunkan kemiskinan di negaranya. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa secara relatif negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi pula. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat pendidikan yang dicapai suatu negara merupakan salah satu faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka mencapai standar hidup tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara.

Semakin besarnya gap perbedaan pertumbuhan antara negara menunjukkan perbedaan tingkat produktivitas antara negara. Pada masa awal *Great Divergence* adanya perbedaan produktivitas disebabkan karena perbedaan akses teknologi. Namun, dalam Era Globalisasi saat ini jika masih terdapat perbedaan produktivitas, maka merupakan hal yang tidak wajar. Era Globalisasi memungkinkan tiap individu ataupun suatu negara dapat mentransfer teknologi dari berbagai sumber. Negara Indonesia termasuk negara yang mempunyai aktivitas komunikasi dan transportasi yang baik sehingga dapat mendukung transfer teknologi dan didukungan sumberdaya alam melimpah. Bagi negara Indonesia

perbedaan produktivitas bukan lagi disebabkan oleh perbedaan akses teknologi sebab hal yang mendukung secara fisik sudah tak terbatas, yang seharusnya bukan hambatan dalam meningkatkan produktivitas.

Di satu sisi, Clark (2007) menyatakan bahwa perbedaan produktivitas tetap terjadi karena setiap negara tidak dapat membeli *social environment* lingkungan kerja dalam menghasilkan output. Di sisi lain, Aliran Neoklasik menunjukkan bahwa dalam berproduksi tidak hanya melibatkan input modal dan teknologi namun terdapat input penting lainnya yakni tenaga kerja. Ketidakmampuan suatu negara mengaplikasikan suatu teknologi disebabkan karena ketidakmampuan tenaga kerja tersebut untuk menerjemahkan/memahami teknologi untuk dapat digunakan secara baik sehingga menghasilkan tambahan produktivitas. Kurangnya pemahaman dan invensi teknologi merupakan akibat dari rendahnya *Human Capital* yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Salah satu bentuk *Human Capital* adalah pendidikan. Didukung oleh bukti empiris pada latar belakang, menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan terasa sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

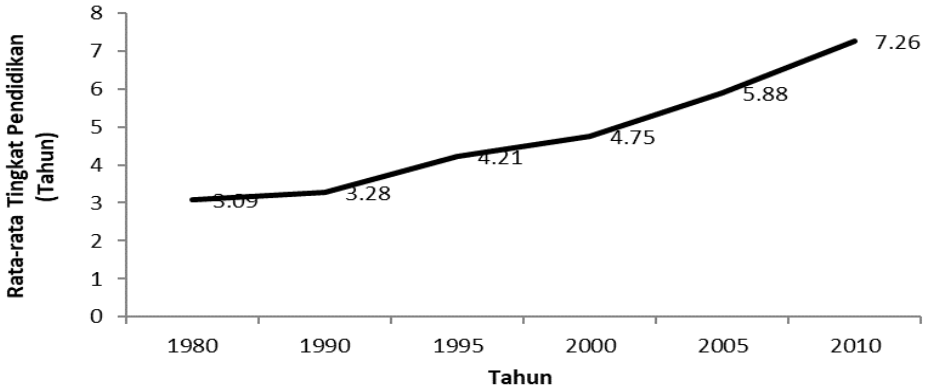

Gambar 9.2 Perkembangan Rata-rata Tingkat Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan Data World Bank (2016) pada **Gambar 9.2** menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Indonesia memang masih rendah secara rata-rata yakni pada tahun 2010 hanya mencapai 7,26 persen. Jika didasarkan pada sebaran karakteristik negara-negara di dunia yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi yakni

mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi pula. Maka, dengan adanya peningkatan tingkat pendidikan Indonesia maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.

9.2.1 Peran Pendidikan dalam mentransformasikan Kualitas Tenaga Kerja

Penjelasan terbaik terhadap determinan pertumbuhan ekonomi ditemukan pada temuan Solow (1957) yang menunjukkan bahwa adanya perubahan teknologi akan menghasilkan perbedaan tingkat output dalam kondisi variabel-variabel modal dan tenga kerja yang sama. Tingkat kemajuan teknologi tetap ada meskipun dalam tingkat investasi yang rendah bahkan mencapai nol. Perubahan teknologi terdorong yang terjadi saat ini, hampir semuanya terdorong oleh inovasi. Namun Solow belum menyimpulkan determinan perubahan teknologi. Mankiw, Romer dan Weil (1992) menghasilkan teori pertumbuhan endogen yang menganggap bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi selain modal kapital adalah bersifat endogen, dimana teori tersebut menjadi dasar dari mekanisme dampak tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Stiglitz (2000) mengemukakan bahwa peranan pendidikan terhadap produktivitas individu. *Pertama*, pendidikan mampu memberikan kinerja yang baik dalam lingkungan kerja melalui perilaku yang lebih taat perintah, mampu mengikuti arahan dengan baik serta berperan secara baik dalam pekerjaan sebagai tim. Dengan begitu maka pendidikan akan memberikan kemampuan secara sosial dan secara ekonomi yang membuat lebih bernilai di tempat kerja. *Kedua*, pendidikan mampu mengenali dan mengasah kemampuan potensial dari setiap individu sehingga dapat menuntun ke arah pekerjaan yang lebih mampu menggunakan tingkat produktivitas terbaik dari individu.

Pendidikan memberikan akses kepada pengetahuan yang mendalam tentang beragam subjek, termasuk ilmu pengetahuan alam, sosial, humaniora, dan seni. Pengetahuan dari pendidikan ini memungkinkan individu untuk memahami konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang mendasari berbagai bidang pekerjaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep, teori, dan prinsip-prinsip dari berbagai

bidang ilmu, termasuk ilmu pengetahuan sosial, humaniora, dan seni, memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan hidup, dan mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat. Dalam contoh kasus lain, pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memahami karakteristik lingkungan sehingga menghasilkan tingkat output yang tinggi.

Pendidikan yang memberikan akses terhadap pengetahuan mendalam memiliki berbagai manfaat bagi individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kewirausahaan dalam bidang perikanan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memahami karakteristik entrepreneur di sektor tersebut (Prarizka, 2017). Alokasi negara untuk sumber daya dalam pendidikan menghasilkan individu yang lebih terampil, kreatif, dan terdidik, yang merupakan aset berharga dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan juga membekali individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, termasuk dalam mengatasi dampak dari situasi seperti transisi pekerjaan dan mempertahankan semangat kerja, seperti yang terjadi selama pandemi.

Pendidikan efektif mendorong terjadinya inovasi dan perkembangan teknologi baru dengan memfasilitasi pengembangan bakat individu, penemuan potensi dan identitas diri, serta persiapan untuk hidup dalam masyarakat. Dengan begitu, pendidikan dapat mengubah proses penciptaan nilai dalam masyarakat modern, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan (Syarief (2021); Lopes et al.,(2005)). Individu yang mampu mengelola potensi dalam dirinya hanya akan terlahir dari tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi. Kemampuan dalam mengelola potensi akan mengakibatkan kecenderungan untuk lebih mampu memahami dan mengembangkan teknologi baru, yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi pada proses produksi dan menciptakan peluang bisnis baru.

Individu yang telah menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka akan lebih lama dalam berinteraksi dan mengakses pengetahuan dan informasi yang lebih banyak. Selain itu lebih banyak menerima pendidikan yang lebih detail yang disertai dengan latihan *high order thinking* yang lebih banyak pula. Kemudian, akses ke sumber daya seperti

buku, jurnal ilmiah, dan sumber daya digital juga lebih banyak sehingga individu memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuannya dalam berbagai bidang. Dalam perjalanannya, pendidikan yang semakin lama diakses oleh individu akan sering kali berdampak positif pada peningkatan keterampilan, kemampuan inovasi dan kreatifitas setiap individu.

Pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan lama sekolah yang lebih banyak pula. Dalam waktu yang lebih lama tersebut berada dalam maka akan mendorong setiap individu untuk mengasah keterampilan, kemampuan inovasi dan kreativitas yang akan digunakan oleh individu tersebut nantinya jika bekerja. Tenaga kerja dengan kemampuan tersebut merupakan individu yang memiliki modal manusia (Human Capital). Adanya modal manusia inilah yang menjadi pendamping dari modal fisik yang berfungsi sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga input modal fisik (Physical Capital) dapat akan menghasilkan relatif lebih banyak output dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

Modal manusia biasanya didefinisikan sebagai *stock* pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Hal ini merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Investasi pada sumber daya manusia dapat berbentuk seperti pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan, diketahui memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan individu. Konsep sumber daya manusia sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan, keterampilan, dan kinerja ekonomi. Ini adalah faktor kunci dalam memahami potensi individu dan masyarakat untuk berhasil dan berkembang.

9.2.2 Dampak Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu, yang memungkinkan mereka berkontribusi terhadap perekonomian melalui faktor tenaga kerja dan

keahlian mereka. Konsep sumber daya manusia banyak digunakan dalam perekonomian untuk memahami peran pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja berupa keterampilan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Hal ini menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi. Investasi pada sumber daya manusia, suatu negara dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendorong keberhasilan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Model Pertumbuhan Endogenous yang dikemukakan oleh Mankiw, et.al. (1992) menunjukkan bahwa *Human Capital* sebagai input yang terpisah dari modal fisik yang didukung oleh Lucas (1988) yang menunjukkan bahwa peranan pendidikan secara umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pendidikan sebagai proxy yang tepat karena mampu mendorong inovasi yang dalam teknologi sehingga dapat dijadikan untuk menggambarkan determinan tingkat teknologi sudah disebutkan oleh Solow (1957) dalam Jurnalnya yang berjudul *Technical Change and the Aggregate Production Function*, dimana teknologi yang merupakan pergerakan/shifting fungsi produksi, dapat memajukan atau memperlambat perekonomian disebabkan oleh peningkatan pendidikan tenaga kerja, inovasi dan berbagai hal lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua hal yang dapat kita simpulkan bahwa *human capital* yang dihasilkan dari pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mampu menjelaskan *Technical Change*.

Temuan Mankiw, et.al. (1992) belum menjelaskan secara detail tentang fungsi produksi yang digunakan dan efek Human Capital terhadap pertumbuhan ekonomi. McMahon (2002) menjelaskan bahwa asumsi diminishing return pada kapital per kapita terhadap output per kapita yang dikemukakan Solow dapat saja tidak terjadi karena adanya *Technical Change* yang disebabkan oleh pertumbuhan tingkat pendidikan per kapita. Lucas (1988) mengemukakan bahwa *Technical Change* adalah konstanta yang menjadi faktor pengali dalam kombinasi input untuk

menghasilkan output. Singkatnya secara matematis, *Technical Change* yang dihasilkan dari pendidikan mampu menjadi penentu jumlah output yang terkonversi pada input yang sama. Berdasarkan hal tersebut McMahon (2000) menyimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan merubah bentuk fungsi *diminishing return* pada kapital per kapita terhadap output menjadi *increasing return to scale*. Alasannya adalah adanya capital deepening pada modal fisik sehingga dampak peningkatan modal manusia mendorong perubahan tingkat produktivitas dalam penggunaan modal fisik, sehingga menghasilkan output yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 9.3** sebagai berikut.

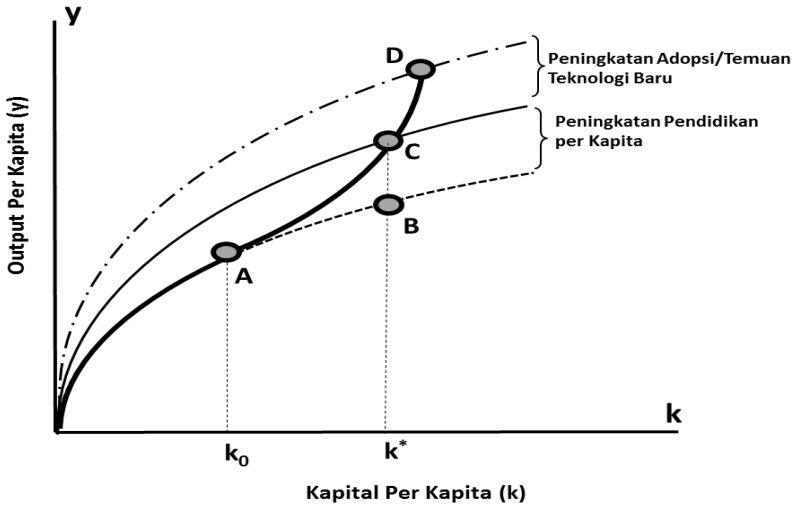

Gambar 9.3 Peningkatan Pendidikan pada Perekonomian

McMahon (2002) menunjukkan bahwa dalam kondisi perekonomian jangka menengah, adanya technical change dalam penggunaan modal fisik yang hanya akan terjadi jika physical capital deepening atau peningkatan modal fisik per kapita didukung oleh adanya peningkatan pendidikan per kapita. Tidak adanya peningkatan investasi sumberdaya manusia akan menyebabkan stok modal manusia tidak bertambah dampaknya tidak ada perubahan produktivitas dalam penggunaan modal fisik meski terjadi capital deepening. Peningkatan modal fisik dari k_0 menjadi k* hanya akan menyebabkan peningkatan

level output semata, pada Gambar 9.2.2. dampak *physical capital deepening* hanya mendorong pergerakan output bergerak dari titik A ke B.

Kemudian, adanya peningkatan pendidikan per kapita akan menyebabkan stok modal manusia per kapita bertambah, dampaknya tingkat produktivitas dalam mengkonversi tambahan modal fisik per kapita menjadi lebih tinggi. Peningkatan produktivitas tersebut terlihat pada peningkatan output yang sangat tinggi yang seiring dengan *physical capital deepening*. Peningkatan modal fisik dari k_0 menjadi k_1 akan meningkatkan output dari A ke C, pada Gambar 10.3., hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan per kapita mengubah dampak *physical capital deepening* yang semula bersifat *diminishing return* berubah menjadi *increasing return*. Lebih jauh peningkatan modal manusia memberikan dampak berupa kemampuan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas namun lebih mampu untuk mengadsopsi dan menginovasi teknologi terbaru. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya *Technical Change* sehingga penggunaan *physical capital* menjadi lebih produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang.

9.3 Masalah penting yang harus diperbaiki dalam capaian pendidikan untuk mendukung perekonomian

Dalam pelaksanaan peran pembangunan, pangsa pengeluaran pemerintah Indonesia yang terbesar digunakan dalam pembangunan di bidang pendidikan. Berdasar atas UUD sejak tahun 2009 yang dimana pendidikan dibiayai APBN minimal 20% maka pemerintah secara drastis telah mengeluarkan pembiayaan yang besar. *Outcome* pengeluaran tersebut telah menghasilkan peningkatan tingkat pendidikan Indonesia sebesar 22,3 persen dalam kurun waktu 1980-1995 dan meningkat sebesar 47,7 persen pada 2000-2010.

Salah satu limitasi dalam pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia yaitu terbatasnya anggaran pembangunan, maka pemerintah akan antara capaian tingkat pendidikan yang tinggi atau pemerataan tingkat pendidikan. Meskipun peningkatan tingkat pendidikan menunjukkan keberhasilan saat ini. Namun, masih terjadi

ketidakmerataan capaian pendidikan yang sangat besar antar angkatan kerja di Indonesia. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang mencapai tingkat pendidikan tinggi hanya sebesar 9,03 persen, mencapai tingkat SMA/SMK hanya 26,23 persen dan sisanya yakni tingkat pendidikan SMP-SD-Tidak Tamat SD sebesar 64,61 persen (Gambar 1). Ketimpangan tersebut merupakan fenomena besaran distribusi pendidikan minimal dan pendidikan tertinggi dalam suatu negara. Fenomena ini seharusnya menjadi indikator terpenting dari keberhasilan pembangunan yang merupakan pangsa pengeluaran terbesar pemerintah Indonesia saat ini.

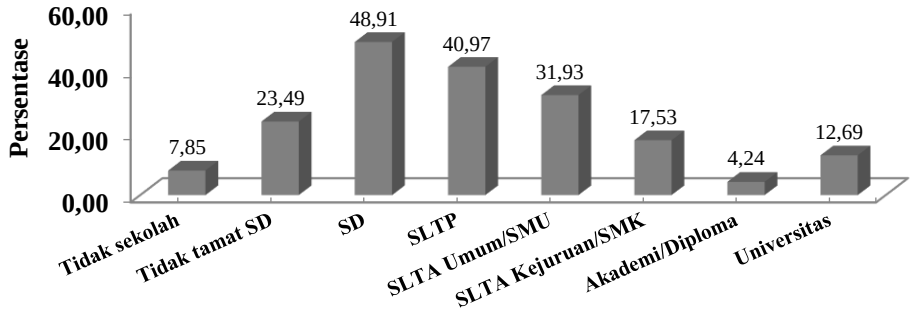

Gambar 9.4 Sebaran Persentase Jumlah Penduduk pada Berbagai Strata Pendidikan Tahun 2016
*(*Sumber: Olahan BPS (2016).

Subroto (2013) menjelaskan penggunaan tenaga kerja yang hanya berpendidikan dasar ternyata memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan output sektor pertanian dan sektor industri, meskipun masih memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan output sektor jasa. Artinya, ketimpangan pendidikan bahwa adanya ketimpangan pendidikan pada penduduk Indonesia yang masih tinggi sebagai akibat kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Keadaan ini mengakibatkan tiap sektor terpaksa menyerap tenaga kerja meski berpendidikan dasar yang justru kurang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negatif

Bahari (2020) menemukan bahwa indeks ketimpangan pendidikan di Indonesia pada tahun sebesar 0,926, dan mengalami penurunan ketimpangan pendidikan sebesar 45,14 persen selama 20

tahun yang ditunjukkan dengan indeks ketimpangan pendidikan pada tahun 2017 sebesar 0,508. Penurunan indeks ketimpangan pendidikan terendah terjadi pada dekade awal periode penelitian yaitu sebesar 9,17 persen yaitu pada periode 1978-1987, sedangkan penurunan Indeks Ketimpangan Pendidikan tertinggi terjadi pada akhir dekade yaitu sebesar 18,79 persen yaitu pada periode 2008-2017. Kemudian, Bahari et al. (2019) juga mengemukaan penurunan ketimpangan pendidikan bersumber dari peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya pada kelompok usia 16-18 tahun, yang dapat didorong melalui peningkatan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang merata, penurunan jumlah penduduk miskin, dan alokasi anggaran pendidikan yang tepat.

Sektor pendidikan dalam perekonomian berfungsi sebagai penghasil tenaga kerja yang berkualitas untuk digunakan dalam sistem perekonomian. Pendidikan mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan kreatif. Kemampuan tenaga kerja tersebut merupakan modal manusia dalam perekonomian yang mengelola berbagai modal fisik untuk ditransformasi menjadi output. Sektor pendidikan juga menghasilkan berbagai inovasi untuk mendukung capaian tingkat teknologi yang tinggi pada suatu negara yang akan digunakan dalam perekonomian. Pada kesimpulannya sektor pendidikan merupakan penghasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu negara. Namun, semua itu akan menjadi tidak berdampak positif terhadap perekonomian jika terjadi ketimpangan pendidikan.

Daftar Pustaka

Al Farrell, I. M., & Atmanti, H. D. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, *6*(2), 128–138.

Bahari, D. I., Siregar, H., Sahara, S., & Rachman, H. (2020). Measurement and Descriptive Analysis of the Education Inequality Levels in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, *22*(7–I), 01–14.

Bahari, D. I., Siregar, H., Sahara, S., & Rachman, H. P. S. (2019). Impact of Agricultural Sectors and Income Inequality in Rural Toward Role of Public Education in Decreasing Educational Inequality in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *9*(1), 151.

Clark, G. (2007). *A farewell to alms: a brief economic history of the world*. Princeton University Press.

Falah, H. W. (2023). DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(2), 2309–2318.

Fitri, L. M., & Aimon, H. (2019). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(3), 769–780.

Glewwe, P., Maiga, E., & Zheng, H. (2014). The contribution of education to economic growth: A review of the evidence, with special attention and an application to Sub-Saharan Africa. *World Development*, *59*, 379–393.

Gregory, M. N., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, *107*(2), 407–437.

Kusreni, S. (2017). Determinan pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, *2*(1), 10–20.

Laba, M. S., & Saing, M. M. (2023). Transformasi Digital di Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal E-Bussiness Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, *3*(2), 49–53.

Lopes, I., do RosÃ, M., & Nunes, M. (2005). Towards the knowledge economy: the technological innovation and education impact on the value creation process. *Electronic Journal of Knowledge Management*, *3*(2), pp129-138.

Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, *22*(1), 3–42.

McMahon, W. W. (2000). *Education and development: Measuring the social benefits*. Clarendon Press.

Prarizka, D. A. (2017). *Kajian Perilaku Entrepreneur Dan Usaha Di Bidang Perikanan*. Doctoral dissertation. Universitas Brawijaya.

Sakti, R. H., Jalinus, N., Abdullah, R., Ridwan, R., & Refdinal, R. (2022). Filsafat pada Pendidikan Kejuruan yang Mengacu Pada Perkembangan Zaman dan Pengalaman Pada Negara-Negara Berkembang: Perspektif Teori. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(6), 7497–7502.

Soleman, R., Wau, T., & Lestari, A. (2023). Kontribusi Variabel Makro Ekonomi (Studi Tentang Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2010-2020). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *6*(2), 79–91.

Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The Review of Economics and Statistics*, *39*(3), 312–320.

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector. 3rd Edition*.

Suyitno, S. L. P. (2023). Transformasi Ekonomi Indonesia: Keluar Dari Middle Income Trap (MIT) Menuju Indonesia Emas 2045. *Bappenas Working Papers*, *6*(3), 392–419.

Syarief, Y. I. (2021). Memperkuat Karakter Melalui Pengintegrasian Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Bidang Studi. *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*, *50*.

World Bank. (2016). *Global monitoring report 2015/2016: Development goals in an era of demographic change*. The World Bank.

Yuangga, K. D. (2023). Transformasi Digital dalam Pendidikan Ekonomi: Menyiapkan Generasi Muda untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(6), 4507–4517.

Zuhri, M. S. (2017). *Analisis Tenaga Kerja Sektor Formal Dan Informal Di Indonesia*. Dissertation. Universitas Airlangga.

Bab 10

PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Ranno Marlany Rachman

10.1 Pengantar

10.1.1 Definisi sektor kesehatan

Sektor kesehatan merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat (Murray & Frenk, 2000). Ini mencakup berbagai entitas seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, serta penyedia layanan kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya. Sektor kesehatan bagian dari struktur ekonomi yang bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang dirancang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan individu dan komunitas. Ini mencakup berbagai layanan yang berkaitan dengan pencegahan, pengobatan, dan manajemen penyakit serta promosi kesehatan. Bukan hanya itu, sektor ini juga mencakup aspek penelitian dan pengembangan untuk peningkatan teknologi dan metode pengobatan yang lebih baik.

Lebih lanjut, sektor kesehatan mencakup berbagai entitas seperti rumah sakit, klinik, dokter, perawat, apoteker, dan lainnya yang memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Selain itu,

sektor ini juga mencakup perusahaan farmasi dan bioteknologi, organisasi penelitian, dan lembaga pendidikan yang berfokus pada kesehatan. Dalam konteks ini, asuransi kesehatan juga termasuk dalam sektor kesehatan, memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarga terhadap biaya kesehatan yang tak terduga (Cutler & Zeckhauser, 2000).

Menurut Dr. David E. Barmes dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sektor kesehatan melibatkan "semua aktivitas yang utamanya ditujukan untuk mempromosikan, memulihkan, atau mempertahankan kesehatan". Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Indonesia mendefinisikan sektor kesehatan sebagai "upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menanggulangi penyakit dan/atau gangguan kesehatan dan memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat".

Contoh:

1. Rumah sakit umum dan spesialis, klinik kesehatan, laboratorium medis, dan apotek merupakan bagian dari sektor kesehatan.
2. Profesi seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, dan terapis fisik juga termasuk dalam sektor kesehatan.

Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa sektor kesehatan juga melibatkan industri terkait seperti industri farmasi, alat kesehatan, dan asuransi kesehatan.

10.1.2 Gambaran umum sektor kesehatan di Indonesia

Sektor kesehatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pelayanan publik yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Ng *et al.*, 2010).Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia memiliki sektor kesehatan yang sangat kompleks dengan tantangan dan peluang yang unik. Sektor ini mencakup berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan swasta, termasuk rumah sakit, klinik, praktek dokter, layanan farmasi, dan

asuransi kesehatan, serta berbagai lembaga penelitian dan pendidikan kesehatan.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai inisiatif, termasuk implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk perbedaan dalam akses dan kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan, pembiayaan kesehatan, dan peningkatan penyakit tidak menular. Sementara itu, peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan, teknologi kesehatan, dan sumber daya manusia di sektor kesehatan dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi sektor kesehatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia (Kusumawati & Purmiyati, 2020).

Sektor kesehatan di Indonesia terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut ini adalah gambaran umum sektor kesehatan di Indonesia (Nugraha & Aknuranda, 2017; Suryanto *et al.*, 2017).:

1. Fasilitas Kesehatan: Indonesia memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang mencakup rumah sakit umum dan spesialis, puskesmas, klinik kesehatan, laboratorium medis, dan apotek. Fasilitas-fasilitas ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
2. Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan di Indonesia mencakup dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan berbagai profesi kesehatan lainnya. Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan yang ada di Indonesia.
3. Industri Kesehatan: Industri kesehatan di Indonesia mencakup industri farmasi, alat kesehatan, dan asuransi kesehatan. Industri farmasi dan alat kesehatan memproduksi berbagai produk yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan, sedangkan industri asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan.
4. Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan dan regulasi kesehatan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga terkait. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti

standar pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, dan regulasi terkait industri kesehatan.

5. Program Kesehatan: Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Dengan berbagai komponen ini, sektor kesehatan di Indonesia berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

10.2 Peran Sektor Kesehatan Dalam Meningkatkan Produktivitas

10.2.1 Hubungan kesehatan dan produktivitas kerja

Hubungan antara kesehatan dan produktivitas kerja adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan sangat penting (Ford *et al*., 2011). Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja dengan kapasitas penuh, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi absensi karena sakit. Oleh karena itu, kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kondisi kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas kerja (Boles *et al*., 2004). Penyakit kronis, kelelahan, stres, dan masalah kesehatan lainnya dapat mengurangi kemampuan individu untuk bekerja secara efektif dan efisien. Ini dapat mengarah ke penurunan produktivitas dan, pada akhirnya, penurunan output ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam kesehatan karyawan, baik melalui program kesehatan dan keselamatan kerja atau inisiatif kesehatan dan kesejahteraan, dapat berdampak positif pada produktivitas kerja (Chen *et al*., 2021).

Selain itu, kesehatan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada motivasi dan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Pekerja yang sehat dan bahagia lebih mungkin untuk merasa puas dengan pekerjaan mereka, yang dapat meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi

biaya perekrutan dan pelatihan. Jadi, hubungan antara kesehatan dan produktivitas kerja adalah hubungan yang kompleks dan penting yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan ekonomi secara keseluruhan (Dorman, 2000).

Kesehatan memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas kerja. Kesehatan yang baik dapat mendukung peningkatan produktivitas, sementara kondisi kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas.

1. Kesehatan Fisik: Kesehatan fisik yang baik memungkinkan individu untuk bekerja dengan efisien dan efektif. (Mistry *et al*., 2015). Misalnya, tenaga kerja yang sehat memiliki stamina yang baik, dapat menangani tugas fisik dengan lebih baik, dan cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Sebaliknya, kondisi kesehatan fisik yang buruk, seperti penyakit kronis, dapat menurunkan produktivitas kerja.
2. Kesehatan Mental: Kesehatan mental juga memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas (Kitagawa *et al*., 2021). Stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya dapat mengurangi konsentrasi, kinerja kerja, dan kehadiran di tempat kerja.

Misalnya, dalam sebuah studi oleh Global Corporate Challenge (GCC) pada 2015, ditemukan bahwa karyawan dengan kesehatan fisik yang baik 30% lebih produktif dan 45% lebih mungkin memiliki tingkat kehadiran yang baik dibandingkan dengan karyawan yang kurang sehat. Sementara itu, sebuah studi oleh World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa depresi dan kecemasan memiliki dampak ekonomi signifikan dan dapat menurunkan produktivitas kerja (McTernan *et al*., 2013).

Oleh karena itu, investasi dalam kesehatan tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, program kesehatan di tempat kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental karyawan dapat membantu meningkatkan produktivitas.

10.2.2 Investasi kesehatan dan pertumbuhan ekonomi

Investasi dalam sektor kesehatan berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Salah satu cara investasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan untuk barang dan jasa. Misalnya, pembangunan atau peningkatan rumah sakit dan klinik dapat menciptakan pekerjaan dalam konstruksi dan perawatan kesehatan, sementara peningkatan permintaan untuk peralatan medis dan obat-obatan dapat mendukung industri farmasi dan peralatan medis.

Selain itu, investasi dalam kesehatan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Kesehatan yang baik memungkinkan tenaga kerja untuk bekerja dengan kapasitas penuh, meningkatkan konsentrasi dan energi, dan mengurangi absensi karena sakit. Dengan demikian, investasi dalam kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, pada gilirannya, meningkatkan output ekonomi (Bloom & Canning, 2000).

Akhirnya, investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor kesehatan juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan inovasi dan penemuan baru dalam bidang medis dan farmasi, yang dapat diekspor dan membantu dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, melalui berbagai saluran ini, investasi dalam sektor kesehatan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam sektor kesehatan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi melalui beberapa mekanisme:

1. Meningkatkan Produktivitas: Investasi dalam kesehatan dapat meningkatkan produktivitas individu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kesehatan yang baik memungkinkan tenaga kerja untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output ekonomi.
2. Menciptakan Lapangan Kerja: Sektor kesehatan adalah sektor yang padat karya. Investasi dalam infrastruktur kesehatan seperti rumah

sakit, klinik, dan laboratorium dapat menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

3. Mendorong Inovasi: Sektor kesehatan juga mendorong inovasi dan penelitian dan pengembangan, terutama dalam bidang farmasi dan teknologi medis. Inovasi ini dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang dapat diekspor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, sebuah studi oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa peningkatan investasi dalam kesehatan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan harapan hidup sebesar satu tahun dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 4% (WHO, 2021).

Di Indonesia, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan juga merupakan contoh bagaimana investasi dalam kesehatan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan dalam sektor terkait seperti industri farmasi dan asuransi (Trisnantoro, 2018).

10.3 Sektor Kesehatan Sebagai Penyerap Tenaga Kerja

10.3.1 Penyerapan tenaga kerja di sektor kesehatan

Sektor kesehatan memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan berbagai jenis pekerjaan yang tersedia, mulai dari dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, hingga administrator kesehatan, sektor ini menawarkan berbagai peluang kerja untuk berbagai tingkat pendidikan dan keterampilan. Selain itu, sektor kesehatan juga mencakup berbagai bidang spesialisasi, termasuk pediatri, geriatri, kardiologi, neurologi, dan banyak lagi, yang semuanya memerlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan (Mauno *et al*., 2007).

Pertumbuhan sektor kesehatan, yang didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, peningkatan harapan hidup, dan peningkatan penyakit kronis, telah menciptakan permintaan yang terus

meningkat untuk tenaga kerja kesehatan. Ini berarti bahwa sektor kesehatan dapat berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Selain itu, pekerjaan di sektor kesehatan seringkali menawarkan stabilitas kerja dan pendapatan yang relatif tinggi, yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi pekerja dan keluarga mereka (Baah, 2013).

Namun, untuk memaksimalkan potensi sektor kesehatan dalam penyerapan tenaga kerja, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan di sektor ini. Ini dapat dicapai melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta melalui pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk penyediaan layanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Sektor kesehatan adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Beragam profesi kesehatan dan berbagai tingkat keahlian diperlukan dalam sektor ini, menciptakan berbagai peluang kerja.

1. Profesi Kesehatan: Profesi kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi merupakan bagian penting dari tenaga kerja di sektor kesehatan. Mereka bekerja di berbagai fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium (Asamani *et al*., 2021).
2. Tenaga Pendukung: Selain tenaga medis, sektor kesehatan juga mempekerjakan tenaga pendukung seperti petugas administrasi, teknisi laboratorium, dan pekerja sosial. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa layanan kesehatan disampaikan dengan efisien dan efektif (Agyepong, 1999).
3. Industri Terkait: Industri terkait seperti industri farmasi, alat kesehatan, dan asuransi kesehatan juga mempekerjakan banyak tenaga kerja. Misalnya, tenaga penjualan dan pemasaran, peneliti, dan teknisi di industri ini (Herzlinger, 2006).

Sebagai contoh, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan di Indonesia telah mendorong peningkatan demand untuk layanan kesehatan, yang pada gilirannya telah menciptakan lebih banyak peluang kerja di sektor kesehatan. Selain itu, pengembangan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan peningkatan rumah

sakit dan puskesmas juga telah menciptakan banyak lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, sektor kesehatan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia (Erlangga *et al*., 2019).

10.3.2 Peluang kerja di sektor kesehatan

Sektor kesehatan menawarkan berbagai peluang kerja yang luas dan beragam. Dari dokter dan perawat, ke apoteker, ahli gizi, teknisi laboratorium, dan banyak lagi, sektor ini menawarkan berbagai jalur karir untuk berbagai tingkat pendidikan dan keterampilan. Selain itu, sektor kesehatan juga menawarkan peluang di bidang administrasi, manajemen, dan penelitian kesehatan, memberikan berbagai cara bagi individu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat (Jani *et al*., 2014)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, permintaan untuk tenaga kerja di bidang ini terus meningkat. Hal ini menciptakan peluang baru bagi pekerjaan dan karir dalam sektor kesehatan. Misalnya, dengan munculnya teknologi kesehatan digital, ada permintaan yang semakin besar untuk profesional IT di sektor kesehatan (Pagoto & Bennett, 2013).

Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk memiliki pendidikan dan pelatihan yang tepat. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaan di sektor kesehatan. Dengan demikian, sektor kesehatan dapat terus tumbuh dan berkembang, menyediakan peluang kerja dan karir yang berarti bagi banyak individu (Frenk *et al*., 2010)

Sektor kesehatan menawarkan berbagai peluang kerja bagi individu dengan berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Berikut adalah beberapa peluang kerja yang ada dalam sektor kesehatan:

1. Profesi Medis: Ada banyak peluang bagi individu yang memiliki pendidikan dan pelatihan medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Mereka dapat bekerja di berbagai fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas.

2. Profesi Non-Medis: Selain profesi medis, ada juga banyak peluang kerja untuk profesi non-medis di sektor kesehatan. Misalnya, administrator kesehatan, manajer fasilitas kesehatan, teknisi laboratorium medis, dan pekerja sosial kesehatan.
3. Industri Terkait: Industri terkait kesehatan seperti industri farmasi, alat kesehatan, dan asuransi kesehatan juga menawarkan berbagai peluang kerja. Misalnya, peneliti, teknisi, tenaga penjualan dan pemasaran, dan profesional asuransi kesehatan.

Misalnya, dengan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan digital dan telemedicine di tengah pandemi COVID-19, ada peningkatan peluang kerja dalam bidang teknologi kesehatan. Profesi seperti pengembang aplikasi kesehatan, analis data kesehatan, dan spesialis teknologi informasi kesehatan menjadi semakin penting (Anthony, 2021).

Selain itu, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, peluang kerja di bidang psikologi klinis dan konseling juga semakin meningkat. Dengan demikian, sektor kesehatan menawarkan berbagai peluang kerja yang dapat memenuhi berbagai minat dan keahlian, dan berpotensi untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan.

10.4 Kontribusi Sektor Kesehatan Terhadap Ekonomi

10.4.1 Pembangunan infrastruktur kesehatan dan dampak ekonominya

Pembangunan infrastruktur kesehatan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dalam jangka pendek, pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan atas barang dan jasa. Proses pembangunan ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga pemasok peralatan medis, yang semuanya dapat memanfaatkan peningkatan kegiatan ekonomi (Calderon & Servén, 2004).

Selain itu, infrastruktur kesehatan yang memadai juga dapat meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investor dan pekerja berkualitas tinggi. Fasilitas kesehatan yang baik dan akses mudah ke

layanan kesehatan berkualitas tinggi dapat menjadi faktor penting dalam keputusan perusahaan untuk berinvestasi atau individu untuk pindah ke suatu daerah. Ini, pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Fox & Porca, 2001).

Di sisi lain, infrastruktur kesehatan yang baik juga penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan populasi. Kesehatan yang baik adalah prasyarat penting untuk produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Populasi yang sehat dan produktif dapat berkontribusi lebih banyak terhadap ekonomi dan memiliki potensi untuk menciptakan lingkaran virtuous di mana peningkatan kesehatan menyebabkan peningkatan produktivitas, yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus diiringi dengan investasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan, serta penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan. Tanpa tenaga kerja yang terampil dan inovasi yang berkelanjutan, infrastruktur kesehatan mungkin tidak dapat digunakan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup semua aspek sektor kesehatan diperlukan untuk memaksimalkan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur kesehatan (Frieden, 2010).

Pembangunan infrastruktur kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi. Berikut adalah beberapa cara pembangunan infrastruktur kesehatan dapat berkontribusi terhadap ekonomi:

1. Menciptakan Lapangan Kerja: Pembangunan infrastruktur kesehatan, seperti pembangunan dan perbaikan rumah sakit, klinik, dan puskesmas, menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup pekerjaan dalam konstruksi, manajemen proyek, serta operasi dan pemeliharaan fasilitas tersebut.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Pembangunan infrastruktur kesehatan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, pembangunan rumah sakit atau klinik baru dapat meningkatkan permintaan lokal untuk layanan dan produk, seperti makanan, transportasi, dan akomodasi.

3. Meningkatkan Kesehatan dan Produktivitas: Infrastruktur kesehatan yang baik memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas tenaga kerja.

Sebagai contoh, program pembangunan puskesmas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menciptakan banyak lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dan juga telah membantu meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan. Selain itu, pembangunan rumah sakit baru atau perluasan rumah sakit yang ada juga dapat memberikan stimulus ekonomi lokal melalui peningkatan belanja konstruksi dan peningkatan permintaan untuk layanan dan produk lokal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi, baik pada tingkat lokal maupun nasional (Grey & Sadoff, 2007).

10.4.2 Layanan kesehatan sebagai industri ekonomi

Sektor layanan kesehatan merupakan bagian integral dari ekonomi suatu negara dan berfungsi sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi. Berbagai entitas beroperasi dalam sektor ini, termasuk rumah sakit, klinik, perusahaan farmasi, dan penyedia asuransi kesehatan. Selain memberikan layanan yang sangat penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, sektor kesehatan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap output ekonomi, dan menarik investasi (Meara *et al*., 2015).

Pada tingkat mikro, sektor kesehatan memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi jutaan orang. Ini mencakup berbagai peran, mulai dari dokter dan perawat hingga teknisi laboratorium dan administrator. Pekerjaan ini seringkali menawarkan stabilitas kerja dan pendapatan yang relatif tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi pekerja dan keluarga mereka (Diener & Seligman, 2004).

Pada tingkat makro, sektor kesehatan dapat berkontribusi signifikan terhadap output ekonomi suatu negara. Hal ini mencakup tidak hanya layanan kesehatan yang disediakan langsung, tetapi juga

efek knock-on pada sektor lain, seperti produksi dan distribusi obat-obatan dan peralatan medis, dan konstruksi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan (Tandon *et al*., 2000).

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak ekonomi sektor kesehatan tergantung pada kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan infrastruktur kesehatan adalah penting untuk memastikan bahwa sektor kesehatan dapat berfungsi dengan efektif dan memberikan manfaat ekonomi maksimal. Dengan demikian, sektor layanan kesehatan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara (Drummond *et al*., 2015).

Sektor kesehatan berfungsi sebagai industri ekonomi yang penting dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa cara layanan kesehatan berfungsi sebagai industri ekonomi:

1. Penyediaan Lapangan Kerja: Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sektor kesehatan merupakan penyedia lapangan kerja yang signifikan. Ini mencakup berbagai profesi dan peran, dari dokter dan perawat hingga administrator dan teknisi laboratorium.
2. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB): Layanan kesehatan, termasuk layanan medis dan non-medis, kontribusi langsung terhadap PDB negara. Misalnya, pembayaran untuk layanan kesehatan, penjualan obat-obatan, dan pembelian peralatan medis semuanya berkontribusi terhadap PDB.
3. Pendorong Inovasi: Sektor kesehatan juga merupakan pendorong utama inovasi, terutama dalam bidang teknologi kesehatan dan farmasi. Penelitian dan pengembangan dalam sektor ini dapat menghasilkan penemuan baru dan teknologi yang dapat diekspor dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, industri farmasi Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi kontributor penting terhadap ekonomi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, industri farmasi Indonesia berkontribusi sekitar 1,4% terhadap PDB nasional pada tahun 2021. Layanan kesehatan berperan penting sebagai industri

ekonomi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara.

10.5 Kebijakan Dan Strategi Meningkatkan Peran Sektor Kesehatan

10.5.1 Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor kesehatan

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan sektor kesehatan, baik melalui peraturan, kebijakan, maupun. Salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor kesehatan adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh penduduk. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, dapat menerima perawatan kesehatan yang mereka perlukan.

Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur kesehatan. Ini meliputi pembangunan rumah sakit dan klinik baru, peningkatan fasilitas kesehatan yang ada, dan investasi dalam teknologi dan peralatan medis terbaru. Infrastruktur kesehatan yang baik dan memadai adalah kunci untuk menyediakan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, dan dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan populasi.

Akhirnya, pemerintah juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Ini dapat mencakup pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan, peningkatan standar dan kualifikasi profesional, dan program untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, melalui berbagai kebijakan dan program ini, pemerintah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan sektor kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Notoatmodjo, 2008).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengembangkan sektor kesehatan dan meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa kebijakan penting:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia meluncurkan JKN, program asuransi kesehatan universal

yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

2. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan: Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh negeri. Ini mencakup pembangunan dan peningkatan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, termasuk pendidikan dan pelatihan untuk dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya (Kurniati & Efendi, 2012).

Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program "1000 Desa Sehat" yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer dan meningkatkan kesehatan masyarakat di tingkat desa (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023).

Selain itu, Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan melalui program seperti "Nusantara Sehat" yang mengirimkan tim tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan kurang melayani. Melalui kebijakan dan program ini, Pemerintah Indonesia berusaha untuk terus mengembangkan sektor kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat (Lubis *et al*., 2023).

10.5.2 Strategi Meningkatkan Kontribusi Sektor Kesehatan terhadap Ekonomi

Untuk meningkatkan kontribusi sektor kesehatan terhadap ekonomi, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah meningkatkan investasi dalam infrastruktur kesehatan. Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, infrastruktur kesehatan yang baik dan memadai dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi kedua adalah pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam sektor kesehatan. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan, peningkatan standar dan kualifikasi profesional, dan program untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja kesehatan yang berkualitas. Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dalam sektor kesehatan adalah kunci untuk menyediakan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Balas & Boren, 2000).

Strategi ketiga adalah mendorong penelitian dan pengembangan dalam sektor kesehatan. Penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan inovasi dan penemuan baru dalam bidang medis dan farmasi, yang tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga dapat diekspor dan membantu dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Greenfield & Braithwaite, 2008).

Terakhir, strategi yang efektif juga perlu untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan membuatnya lebih terjangkau, seperti Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan implementasi strategi-strategi ini, sektor kesehatan dapat berkontribusi lebih banyak terhadap ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Gulliford *et al*., 2002).

Untuk meningkatkan kontribusi sektor kesehatan terhadap ekonomi, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Investasi dalam Infrastruktur Kesehatan: Meningkatkan investasi dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan layanan kesehatan.
3. Mendorong Inovasi dan Penelitian dan Pengembangan: Mendorong inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam sektor kesehatan, terutama dalam bidang farmasi dan teknologi medis, dapat

menghasilkan produk dan layanan baru yang dapat diekspor dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan "Indonesia Health Fund", sebuah dana yang bertujuan untuk mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang kesehatan. Dana ini berfokus pada pengembangan solusi kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, strategi seperti pembentukan kawasan industri kesehatan yang berfokus pada produksi obat-obatan dan alat kesehatan dapat membantu mengembangkan industri terkait dan menciptakan lapangan kerja. Dengan implementasi strategi-strategi ini, kontribusi sektor kesehatan terhadap ekonomi dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Oztemel & Gursev, 2020).

Daftar Pustaka

Agyepong, I. A. (1999). Reforming health service delivery at district level in Ghana: the perspective of a district medical officer. *Health policy and planning*, *14*(1), 59-69.

Anthony Jnr, B. (2021). Integrating telemedicine to support digital health care for the management of COVID-19 pandemic. *International Journal of Healthcare Management*, *14*(1), 280-289.

Asamani, J. A., Christmals, C. D., & Reitsma, G. M. (2021). Modelling the supply and need for health professionals for primary health care in Ghana: implications for health professions education and employment planning. *PLoS One*, *16*(9), e0257957.

Baah-Boateng, W. (2013). Determinants of unemployment in Ghana. *African Development Review*, *25*(4), 385-399.

Balas, E. A., & Boren, S. A. (2000). Managing clinical knowledge for health care improvement. *Yearbook of medical informatics*, *9*(01), 65-70.

Bloom, D. E., & Canning, D. (2000). The health and wealth of nations. *Science*, *287*(5456), 1207-1209.

Boles, M., Pelletier, B., & Lynch, W. (2004). The relationship between health risks and work productivity. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 737-745.

Calderon, C. A., & Servén, L. (2004). The effects of infrastructure development on growth and income distribution. *Available at SSRN 625277*.

Chen, M., Ran, B., Gao, X., Yu, G., Wang, J., & Jagannathan, J. (2021). Evaluation of occupational stress management for improving performance and productivity at workplaces by monitoring the health, well-being of workers. *Aggression and Violent Behavior*, 101713.

Cutler, D. M., & Zeckhauser, R. J. (2000). The anatomy of health insurance. In *Handbook of health economics* (Vol. 1, pp. 563-643). Elsevier.

Diener, E., & Seligman, M. E. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. *Psychological science in the public interest*, *5*(1), 1-31.

Dorman, P. (2000). *The economics of safety, health, and well-being at work: an overview*. Geneva: ILO.

Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). *Methods for the economic evaluation of health care programmes*. Oxford university press.

Erlangga, D., Ali, S., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on healthcare utilisation in Indonesia: evidence from panel data. *International journal of public health*, *64*, 603-613.

Ford, M. T., Cerasoli, C. P., Higgins, J. A., & Decesare, A. L. (2011). Relationships between psychological, physical, and behavioural health and work performance: A review and meta-analysis. *Work & Stress*, *25*(3), 185-204.

Fox, W. F., & Porca, S. (2001). Investing in rural infrastructure. *International Regional Science Review*, *24*(1), 103-133.

Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., ... & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *The lancet*, *376*(9756), 1923-1958.

Frieden, T. R. (2010). A framework for public health action: the health impact pyramid. *American journal of public health*, *100*(4), 590-595.

Greenfield, D., & Braithwaite, J. (2008). Health sector accreditation research: a systematic review. *International journal for quality in health care*, *20*(3), 172-183.

Grey, D., & Sadoff, C. W. (2007). Sink or swim? Water security for growth and development. *Water policy*, *9*(6), 545-571.

Gulliford, M., Figueroa-Munoz, J., Morgan, M., Hughes, D., Gibson, B., Beech, R., & Hudson, M. (2002). What does' access to health care'mean?. *Journal of health services research & policy*, *7*(3), 186-188.

Herzlinger, R. E. (2006). Why innovation in health care is so hard. *Harvard business review*, *84*(5), 58.

Jani, J. M., Leary, M., Subic, A., & Gibson, M. A. (2014). A review of shape memory alloy research, applications and opportunities. *Materials & Design (1980-2015)*, *56*, 1078-1113.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Indonesia Health Fund: Upaya Inovatif Pemerintah dalam Pembiayaan Kesehatan. https://www.kemkes.go.id/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Program 1000 Desa Sehat: Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. https://www.kemkes.go.id/

Kitagawa, R., Kuroda, S., Okudaira, H., & Owan, H. (2021). Working from home: Its effects on productivity and mental health. *Covid Economics*, *74*, 142-171.

Kurniati, A., & Efendi, F. (2012). *Kajian sumber daya manusia kesehatan di Indonesia*. Ferry Efendi.

Kusumawati, N. T. I., & Purmiyati, A. (2020). The influences of economic and social infrastructure on the economic growth in Eastern Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, *11*(6), 1957-1962.

Lubis, A. S., Zuhrah, A., Harahap, M., Ginting, N. G. B., Hutajulu, S. A., & Agustina, D. (2023). Literature Review: Peningkatan Jumlah dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), 2167-2174.

Mauno, S., Kinnunen, U., & Ruokolainen, M. (2007). Job demands and resources as antecedents of work engagement: A longitudinal study. *Journal of vocational behavior*, *70*(1), 149-171.

McTernan, W. P., Dollard, M. F., & LaMontagne, A. D. (2013). Depression in the workplace: An economic cost analysis of depression-related productivity loss attributable to job strain and bullying. *Work & Stress*, *27*(4), 321-338.

Meara, J. G., Leather, A. J., Hagander, L., Alkire, B. C., Alonso, N., Ameh, E. A., ... & Yip, W. (2015). Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development. *The lancet*, *386*(9993), 569-624.

Mistry, H., Levack, W. M., & Johnson, S. (2015). Enabling people, not completing tasks: patient perspectives on relationships and staff morale in mental health wards in England. *BMC psychiatry*, *15*(1), 1-10.

Murray, C. J., & Frenk, J. (2000). A framework for assessing the performance of health systems. *Bulletin of the world Health Organization*, *78*, 717-731.

Ng, N., Hakimi, M., Byass, P., Wilopo, S., & Wall, S. (2010). Health and quality of life among older rural people in Purworejo District, Indonesia. *Global health action*, *3*(1), 2125.

Notoatmodjo, S. (2008). Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, *2*(5), 195-199.

Nugraha, D. C. A., & Aknuranda, I. (2017). An Overview of e-Health in Indonesia: Past and Present Applications. *International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708)*, *7*(5).

Oztemel, E., & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. *Journal of intelligent manufacturing*, *31*, 127-182.

Pagoto, S., & Bennett, G. G. (2013). How behavioral science can advance digital health. *Translational behavioral medicine*, *3*(3), 271-276.

Trisnantoro, L. (2018). Kebijakan Pembiayaan dan Fragmentasi Sistem Kesehatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1.

WHO. (2021). Progressive Realization: Three Dimensions (Policy Choices) of Universal Health Coverage. Retrieved from https://www.who.int/health_financing/topics/benefitpackage/UHC-choices-facing-purchasers/en/

Bab 11

TANTANGAN DAN PELUANG SEKTOR TRANSPORTASI DI INDONESIA

Oleh: Nafia Ilhama Qurratu'aini

11.1 Transportasi Dan Perekonomian

Transportasi merupakan salah satu tumpuan pembangunan ekonomi, pengembangan masyarakat dan tumbuhnya industrialisasi, sehingga transportasi menjadi bagian penting dalam pembangunan suatu negara.

11.2 Peran Transportasi

Kemakmuran adalah suatu keadaan bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya, baik terhadap barang maupun jasa, dan ilmu ekonomi hadir sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan (Manulang, 2012). Sementara itu, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan jalan dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain guna merangsang perekonomian masyarakat nasional dan internasional, meningkatkan kepentingan bersama, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, serta menjaga harkat dan martabat luhur bangsa (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan demikian, transportasi memiliki andil yang cukup signifikan

dalam melancarkan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menuju masyarakat adil dan makmur.

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan merupakan faktor vital dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sektor perekonomian harus didukung oleh pengembangan sistem transportasi yang efisien, nyaman, tertib, dan terhubung, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Diantara manfaat transportasi dalam perekonomian yaitu:

1. Membantu perpindahan orang dan barang ke berbagai daerah. Dukungan transportasi yang baik menjadikan kehidupan perekonomian suatu negara lebih optimal karena kebutuhan setiap orang terpenuhi. Bantuan transportasi dapat memudahkan masyarakat berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Berbagai permasalahan mendasar dapat diselesaikan dengan cepat, antara lain peredaran barang yang cepat terdistribusi ke seluruh daerah dan terjaganya stabilitas harga komoditas sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah secara memadai.
2. Transportasi menunjang pembangunan. Ketika transportasi dapat membawa orang dan barang ke berbagai daerah, maka keduanya (orang dan barang) dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang dijangkaunya. Barang yang dikirim juga mencakup peralatan pembangunan infrastruktur. Semakin maju dan mudahnya akses transportasi, maka semakin mudah pula mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

11.3 Tantangan Transportasi Di Indonesia

Kebutuhan akan transportasi harus terus menjadi perhatian karena keberadaannya menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat saat ini. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi banyak tergantung pada penyedian jasa transportasi. Utamanya ketersediaan pelayanan transportasi untuk daerah tertinggal sangat diperlukan karena fungsi strategis transportasi berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan kesinambungan kegiatan

masyarakat yang berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting sebagai penghubung dalam mengembangkan jalur transportasi baik melalui laut dan udara, sehingga mempunyai dampak yang cukup besar dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri.

Dalam perkembangan transportasi yang pesat di Indonesia ternyata tidak selalu memberikan dampak positif, namun juga banyak menimbulkan permasalahan. Seperti halnya sebuah sistem, ketika ada satu titik dalam sistem yang tidak berjalan, titik atau unit lain dalam sistem tersebut juga akan ikut berpengaruh. Misalnya saja dalam sebuah jaringan transportasi ditemukan adanya jalan yang sedang rusak parah di suatu titik, maka hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa daerah dan akan mengganggu kenyamanan saat berkendara oleh pengguna lalu lintas.

Transportasi di Indonesia saat ini didominasi oleh angkutan darat, hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas dan kegiatan manusia yang berlangsung di darat sehingga kegiatan pengangkutan lebih banyak dilakukan di darat dibandingkan melalui laut atau udara. Kemudahan akses dan harganya yang terjangkau juga membuat transportasi darat lebih dipilih oleh masyarakat, terutama untuk mayoritas masyarakat Indonesia yang masuk dalam kalangan menengah ke bawah.

Sungguh disayangkan, permasalahan di Indonesia cukup pelik sehingga tidak hanya satu unit di sistem transportasi yang bermasalah namun hampir semua unit di sistem mempunyai permasalahannya masing-masing, baik internal maupun eksternal atau terkena dampak dari luar unit.

11.4 Peluang Transportasi di Indonesia

Transportasi di Indonesia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dari yang menggunakan Zidosha Sokyoku sebagai alat transportasi hingga menggunakan mobil yang dapat menghasilkan model terbaru beserta kelebihannya setiap saat. Perkembangan transportasi didukung oleh berkembangnya teknologi informasi dan teknologi elektronik atau mekanik, serta berkurangnya penggunaan energi manual seperti tenaga manusia dan hewan, proses produksi dan semua sistem diatur oleh energi mekanik.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, peluang transportasi menjadi lebih luas dan terus berkembang. Beberapa peluang transportasi yang dapat diidentifikasi termasuk:

1. Transportasi Berbasis Aplikasi:
    a. *Ride-sharing* dan Taksi Online: Penggunaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Uber telah merubah cara orang bergerak di kota-kota besar.
    b. *Delivery Service*: Meningkatnya permintaan pengiriman makanan, barang, dan layanan lainnya melalui aplikasi.
2. Transportasi Massal dan Infrastruktur:
    a. Kereta Cepat: Pembangunan proyek kereta cepat untuk meningkatkan konektivitas antar kota.
    b. Pengembangan Bandara: Peningkatan kapasitas dan pengembangan bandara untuk mendukung pertumbuhan lalu lintas udara.
3. Logistik dan Kargo:
    a. Pengembangan Pelabuhan: Pengembangan pelabuhan dan fasilitas kargo untuk mendukung perdagangan internasional.
    b. Teknologi Logistik: Penggunaan teknologi seperti IoT dan AI untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan manajemen logistik.
4. Transportasi Ramah Lingkungan:
    a. Kendaraan Listrik: Peningkatan adopsi kendaraan listrik untuk mengurangi dampak lingkungan.
    b. Transportasi Publik Berbasis Listrik: Peningkatan kendaraan listrik dalam sistem transportasi publik.
5. Inovasi dalam Transportasi:
    a. Mobil Otonom: Pengembangan dan uji coba kendaraan otonom untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi.
    b. Transportasi Berbasis Drones: Penggunaan dron untuk pengiriman dan pemantauan lalu lintas udara.

Perkembangan transportasi dapat membawa kegairahan perkembangan informasi dan perkembangan yang pesat. Dalam hal ini transportasi berperan dalam menghemat biaya produksi dalam hal memperpendek jarak dan waktu. Transportasi juga memudahkan

masyarakat untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya tanpa tidak dibatasi oleh jarak dan waktu (Irianto, 2019).

11.5 Kemajuan teknologi transportasi

Transportasi erat kaitannya dengan produktivitas yang dapat meningkatkan mobilitas manusia tidak hanya dalam hal produksi, namun juga dalam hal pemasaran. Semakin tinggi mobilitas maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas. Peningkatan teknologi transportasi merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mendukung kemajuan perekonomian.

Kemajuan teknologi dan transportasi mampu menjadi motor penggerak globalisasi. Pesatnya perkembangan transportasi juga berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial, serta menghilangkan batas-batas yang memisahkan perekonomian negara-negara di dunia. Cakupan kegiatan transportasi telah melintasi batas-batas negara.

Kemajuan dalam sektor transportasi dapat memberikan banyak manfaat signifikan, baik untuk perekonomian suatu negara maupun untuk kehidupan sehari-hari individu. Sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien. Adanya kemudahan aksesibilitas juga dapat merangsang pertumbuhan bisnis dengan memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Ekonomi yang sudah berkembang selalu menunjukkan tingkat mobilitas yang tinggi, yang ditunjang oleh transportasi yang lancar. (Nur et al, 2021). Kemajuan transportasi dapat meningkatan mobilitas karena memungkinkan individu untuk bepergian dengan mudah ke tempat kerja, sekolah, dan pusat-pusat aktivitas lainnya. Sistem transportasi yang efisien juga dapat mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan lebih banyak waktu untuk aktivitas lain.

Tidak cukup disitu, dengan adanya kemajuan teknologi dalam sektor transportasi dan telekomunikasi akan mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kepadatan lalu lintas yang menyebabkan peningkatan kualitas udara dan lingkungan, penurunan tingkat stres dan berujung pada peningkatan kualitas hidup manusia. Kemajuan dalam teknologi

transportasi juga dapat meningkatkan keselamatan, termasuk pengembangan sistem pencegahan kecelakaan dan teknologi kendaraan otonom.

11.6 Sistem Integrasi Transportasi

Sistem integrasi transportasi adalah pendekatan yang menyatukan berbagai mode transportasi dan layanan dalam satu sistem terpadu. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan konektivitas dalam pergerakan orang dan barang. Dengan adanya transportasi yang efisien dapat menjamin keselamatan pengguna, aksesibilitas tinggi, integrasi, kapasitas, ketertiban, kecepatan, kemudahan akses, ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan dan biaya rendah (Setiawan *et al*, 2019).

Dalam perencanaan dan implementasi sistem integrasi transportasi, sistem integrasi transportasi ini perlu melibatkan masyarakat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka dan menyediakan aksesibilitas yang baik. Dengan adandanya hal tersebut dapat menjadi jaminan kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan (Topurtawy *et al*, 2023).

Implementasi sistem transportasi yang terintegrasi membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, operator transportasi, sektor swasta, dan masyarakat. Langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam melaksanakan sistem transportasi yang terintegrasi diantaranya:

1. Analisis dan Perencanaan:
    a. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam sistem transportasi yang ada.
    b. Melakukan analisis mobilitas dan peta jalur perjalanan untuk memahami pola pergerakan masyarakat.
    c. Mengidentifikasi mode transportasi yang ada dan identifikasi peluang untuk integrasi.
2. Kerjasama Antarinstansi:

a. Membangun kerjasama erat antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam transportasi, seperti kementerian transportasi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.
b. Memfasilitasi kerjasama dengan sektor swasta, termasuk operator transportasi dan penyedia layanan teknologi.

3. Pengembangan Infrastruktur Terpadu:
   a. Merencanakan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung integrasi, seperti pusat transfer intermodal, stasiun yang terhubung, dan jalur sepeda.
   b. Memastikan bahwa desain infrastruktur mendukung aksesibilitas dan mobilitas yang mudah.

Implementasi sistem transportasi yang terintegrasi memerlukan dukungan dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan serta perencanaan yang matang untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, integrasi transportasi tidak hanya harus dibangun secara terkoordinasi sejak masyarakat meninggalkan rumah hingga tujuan, tetapi juga harus selaras dengan sistem transportasi regional, nasional, dan internasional (Jufridar & Saifuddin, 2023).

11.7 Sistem Transportasi Berkelanjutan

Menurut Bank Dunia (1996), transportasi berkelanjutan adalah transportasi yang tujuan utamanya adalah untuk merangsang pembangunan ekonomi dan sosial perkotaan. Sedangkan *Canadian Center for Sustainable Transportation* (Gilbert, 2005) menyatakan bahwa transportasi berkelanjutan adalah menyediakan akses utama atau dasar yang diperlukan bagi individu dan masyarakat agar keselamatan tetap terjaga dengan cara terbaik dan dengan cara yang konsisten sehingga menjamin keselamatan manusia dan kesehatan ekosistem yang ada. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transportasi berkelanjutan adalah kegiatan transportasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna dan kendaraan yang digunakan.

Sistem transportasi berkelanjutan dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan utama dari sistem ini adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil. beberapa karakteristik dan elemen utama dari sistem transportasi berkelanjutan diantaranya:

1. Transportasi Publik yang Efisien; Kereta Api, Bus, dan Layanan Publik Lainnya. Meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan transportasi publik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
2. Infrastruktur Ramah Lingkungan; Jalur Sepeda dan Pejalan Kaki. Membangun infrastruktur yang mendukung bersepeda dan berjalan kaki untuk mempromosikan transportasi berkelanjutan dan gaya hidup aktif.
3. Sistem Pembayaran Terpadu; Unified Ticketing dan Pembayaran. Menyediakan sistem pembayaran yang terpadu untuk berbagai mode transportasi agar penggunaan transportasi menjadi lebih mudah dan efisien.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi; Aplikasi Pintar. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi real-time tentang jadwal, rute, dan kondisi lalu lintas.
5. Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi Cerdas; Pemantauan dan Pengelolaan Lalu Lintas. Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola lalu lintas secara efisien

Tiga pilar untuk menciptakan sinergi dalam sistem berkelanjutan adalah keberlanjutan ekonomi, pengembangan langkah-langkah efektif untuk memenuhi permintaan; kelestarian ekologi/lingkungan, menciptakan lingkungan yang dinamis dan menghilangkan dampak eksternal yang merugikan; dan keberlanjutan sosial, pengentasan kemiskinan, pencapaian kesejahteraan dan kesetaraan, mewujudkan keberlanjutan sektor perekonomian secara menyeluruh, mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan sistem yang ramah lingkungan.

Tamin (2007) juga menjelaskan 10 prinsip dasar untuk mencapai transportasi berkelanjutan diantaranya:

1. Aksesibilitas untuk semua. Tujuan utama penggunaan sistem transportasi adalah memberikan kemudahan akses bagi semua pihak yang membutuhkan dengan. Perencanaan aksesibilitas bertujuan untuk menjamin seluruh moda transportasi yang tersedia, terutama kendaraan tidak bermotor, sistem angkutan umum, dan angkutan penumpang, dapat dengan mudah mencapai setiap tujuan.
2. Partisipasi dan transparansi masyarakat. Perencanaan transportasi yang baik memerlukan pengguna transportasi, regulator dan operator untuk menyediakan tim transportasi umum dalam mengembangkan kebijakan di sektor transportasi lapangan secara terbuka dan berkelanjutan.
3. Keadilan sosial bagi semua orang. Tidak semua alat transportasi digunakan oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas berpenghasilan rendah. Kebijakan keadilan sosial harus memprioritaskan penyediaan transportasi umum, pejalan kaki, dan kendaraan tidak bermotor yang dapat diakses oleh semua orang dengan dampak minimal.
4. Kesehatan dan keselamatan. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan. Kemacetan lalu lintas yang terjadi mendorong pengemudi mobil "mengambil alih" peserta lalu lintas lainnya. Misalnya pengendara sepeda menggunakan trotoar untuk menghindari kemacetan lalu lintas sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki. Contoh lainnya adalah pengendara yang menggunakan jalur bus untuk menghindari kemacetan.
5. Ramah lingkungan. Jalan lingkungan atau pemukiman sering dijadikan jalur alternatif bagi pengendara kendaraan bermotor. Penggunaan ini hanya dimaksudkan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan kolektor atau arteri. Dampak industri transportasi di tingkat lokal adalah polusi udara dan suara yang umum terjadi di kota-kota besar.
6. Ekonomis dan murah. Mendorong penggunaan angkutan umum, berjalan kaki dan bersepeda. Selain itu, menciptakan transportasi yang dapat digunakan semua orang, termasuk biaya perjalanan yang lebih hemat.

7. Informasi dan Analisa. Perlunya mengkomunikasikan kebijakan transportasi kepada pengguna transportasi agar kebijakan transportasi tidak menjadi informasi yang membingungkan bagi pengguna transportasi.
8. Networking. Networking antar komunitas diharapkan secara aktif agar proses pertukaran informasi dan kerjasama antar komunitas dapat terlaksana dengan cepat dan akurat.
9. Advokasi. Advokasi penting dilakukan karena pemerintah hanya akan mendengarkan harapan investor besar dengan kepentingan tertentu. Mobilisasi masyarakat berpendapatan rendah melalui lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan.
10. Lingkungan yang terjaga dan tergenerasi akan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Tercapainya sistem yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh sistem transportasi. Sistem transportasi yang ramah lingkungan akan meningkatkan perekonomian dan kualitas lingkungan warga di kawasan tersebut (Nur *et al.*, 2021).

Daftar Pustaka

Gilbert, R. (2005) Defining Sustainable Transportation, Prepared for Canada. (https://www.wellingtonpark.org.au/assets/wellingtonpark_CSTdefiningsustainabletransportation2005.pdf)

Irianto, B. 2019. Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. Depok: Melvana Publishing.

Jufridar & Saifuddin (2023) - Integrasi Sistem Transportasi Sebagai Daya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial - Volume 9 Nomor 1. Maret 2023. Hal. 83-91. DOI. 10.29103/jsds.v9i1.10377

Manullang, M. (2012). Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan. Jakarta. Gajah Mada Press.

Nur, K. N. (2021). Sistem Transportasi. Makassar: Yayasan Kita Menulis

Setiawan, M. I., Nasihien, R. D., Razi, M., Sudapet, I. N., Sukoco, A., Suyono, J., & Mudjanarko, S. W. (2019). Integrasi Transportasi Publik, Bandar Udara dan Pelabuhan, Mendukung Peningkatan Industri Jasa Transportasi dan Pergudangan Indonesia.

Tamin, O. Z (2007) "Menuju Terciptanya Sistem Transportasi Berkelanjutan Di Kota-Kota Besar Di Indonesia", Jurnal Transportasi Vol. 7 No. 2 hal: 87-104

The World Bank (1996) "Development in practice: Sustainable transportation, priorities for policy reform," Washington: A World Bank Publication.

Topurtawy, F.Y., Berhitu, P. T., Mandaku, H. 2023. Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Dalam Meningkatkan Ekonomi Wilayah Di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. JURNAL ISOMETRI, Vol. 2 No. 1 ISSN 2963-2501

Bab 12

PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Muhammad Assagaf

Ekonomi syariah Indonesia mengalami fase krusial di tengah gejolak ekonomi global dan persaingan regional yang semakin ketat. Meskipun belum mencapai tingkat kepentingan yang diharapkan dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi strategis yang besar untuk membantu Indonesia mengatasi tantangan ekonomi global yang kompleks dan tidak stabil. Kendati minimnya kontribusi tersebut, hal ini tidak mencerminkan sepenuhnya potensi ekonomi syariah dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini dan masa depan.

Keterbatasan peran ekonomi dan keuangan syariah dapat diatributkan pada kurang optimalnya perkembangan berbagai sektor dalam ekosistem ekonomi syariah. Perkembangan yang cenderung berfokus pada sektor keuangan menjadi salah satu kendala utama. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan keuangan syariah dapat dijelaskan oleh faktor-faktor seperti permintaan masyarakat akan sistem keuangan bebas riba, regulasi yang mendukung, dan model pengembangan keuangan syariah yang berhasil diterapkan.

Di sisi lain, pertumbuhan sektor riil terhambat oleh persepsi bahwa mayoritas industri di Indonesia sudah memenuhi persyaratan halal. Namun, pemahaman ini perlu direvaluasi, mengingat sertifikasi halal menjadi kriteria penting untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, perlu adanya kajian ulang terhadap peran ekonomi syariah, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan. Ekonomi syariah tidak hanya mencakup sektor keuangan, tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi lainnya seperti filantropi dan sektor praktis. Ciri utamanya adalah kebebasan dari unsur keusangan, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir). Dengan definisi yang komprehensif ini, pembahasan mengenai rencana pengembangan ekonomi syariah melibatkan seluruh sektor ekonomi yang tergolong halal dan sesuai dengan tujuan (maqashid) syariah. Oleh karena itu, perlu adanya peta jalan yang mendalam untuk menggambarkan perkembangan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah pada sektor riil, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Terutama, perhatian difokuskan pada sektor produksi dan jasa yang telah menerapkan label halal sebagai wujud diferensiasi produk. Kategori halal memiliki cakupan yang sangat luas dan tak terpisahkan dari ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.33/2014. Menurut undang-undang tersebut, produk halal mencakup barang dan/atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Kehadiran mayoritas muslim menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia selama beberapa dekade terakhir menjadi sorotan utama, menandai langkah signifikan dalam mencapai visi perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pentingnya memahami konteks sosial dan keagamaan Indonesia menjadi kunci untuk merinci potensi besar ekonomi syariah di negara ini. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah bukan hanya kebutuhan ekonomi,

melainkan juga mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat. Ini menciptakan dasar yang kokoh untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Langkah awal dalam menciptakan momentum bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terlihat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pemerintah, menyadari potensi ini, terus berupaya membangun landasan hukum dan regulasi yang memadai, seperti dibuktikan dengan pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang signifikan mencerminkan respons positif dari masyarakat. Kesadaran akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah membuka pintu bagi adopsi layanan keuangan syariah. Berkembangnya bank-bank syariah, produk-produk keuangan syariah inovatif, dan pertumbuhan pasar modal syariah menjadi bukti bahwa ekonomi syariah mendapatkan tempat yang semakin penting dalam lanskap keuangan Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya mencakup sektor perbankan dan pasar modal, tetapi juga membawa dampak signifikan pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Keberadaan ekonomi syariah memberikan peluang untuk mengubah paradigma ekonomi yang sebelumnya terfokus pada pertumbuhan kuantitatif semata. Prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusi yang menjadi landasan ekonomi syariah menciptakan kesempatan untuk menciptakan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Ini melibatkan pemikiran lebih lanjut tentang distribusi pendapatan yang adil, pengentasan kemiskinan melalui program pembiayaan mikro, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Analisis lebih lanjut mencakup peran perbankan syariah dalam meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan produktif, kontribusi pasar modal syariah dalam pembiayaan proyek infrastruktur, dan dampak sosial-ekonomi dari pengembangan ekonomi syariah. Dengan mendetailkan setiap elemen ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga pendorong utama dalam pembangunan ekonomi nasional. (Iqbal, Z., & Mirakhor, A., 2018; Nienhaus, V., 2016; Abdullah,

N. I., & Valaei, N.,2018; Vogel, F., & Hayes, S., 2019; Saiti, B., & Bacha, O. I., 2014; El-Gamal, M. A. 2014).

12.1 Peran Bank Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Perbankan syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992, dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sebagai langkah awal. Namun, setelah menghadapi krisis pada tahun 1998, sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga tahun 2022, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan jumlah lembaga, tetapi juga menciptakan keyakinan publik bahwa perbankan dan keuangan syariah merupakan alternatif yang handal untuk mengatasi krisis keuangan.
Pertumbuhan positif perbankan syariah terbukti dari data pertumbuhan aset yang mencapai puncak tertinggi pada tahun 2022, dengan pertumbuhan mencapai 33.77%. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbankan syariah terus berkembang dan mampu mengukuhkan posisinya dalam sistem keuangan Indonesia, memberikan solusi yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan ekonomi (**Gambar 12.1 dan 12.2**).

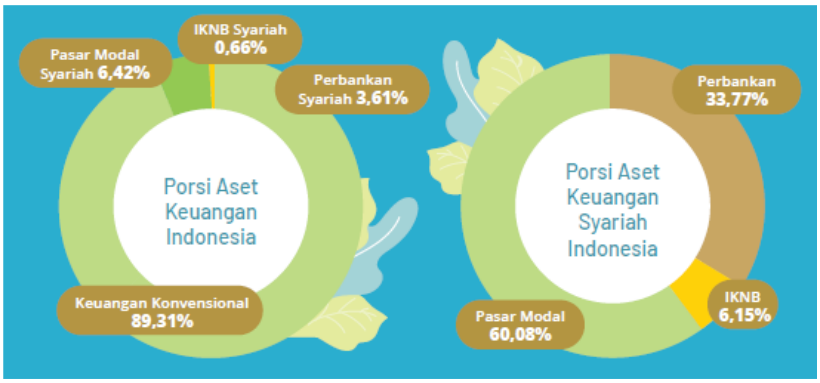

Gambar 12.1 Porsi Aset Perbankan Syariah Tahun 2022
(Sumber OJK, 2022)

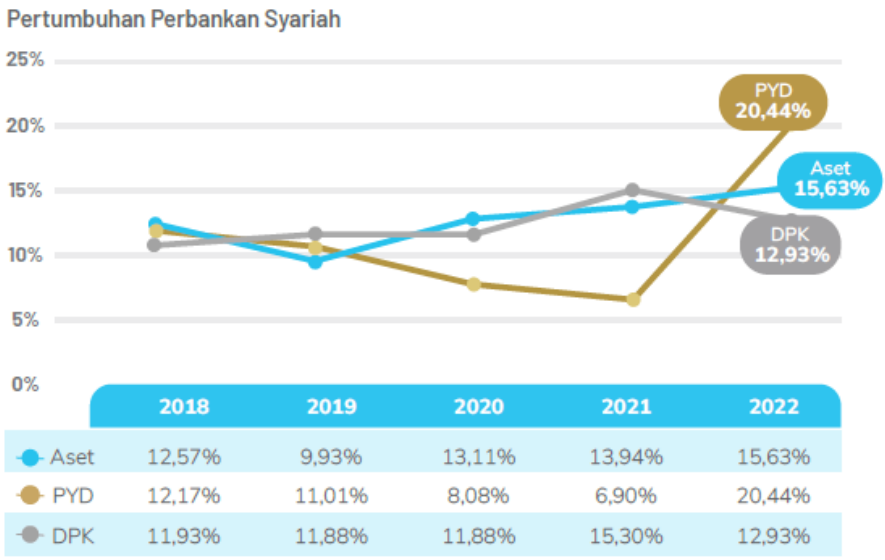

	2018	2019	2020	2021	2022
Aset	12,57%	9,93%	13,11%	13,94%	15,63%
PYD	12,17%	11,01%	8,08%	6,90%	20,44%
DPK	11,93%	11,88%	11,88%	15,30%	12,93%

Gambar 12.2 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Tahun 2018-2022 (Sumber OJK, 2022)

Perbankan syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1992, seiring dengan populasi Muslim yang mencapai 87%, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Potensi besar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Imam & Kpodar (2016) serta Mensi *et al*., (2020), menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rizvi *et al.* (2020) lebih rinci mengungkapkan bahwa perbankan syariah menjadi alternatif yang efektif dalam menyediakan layanan keuangan untuk pembiayaan proyek investasi, khususnya bagi pengusaha yang mengandalkan layanan keuangan berbasis syariah. Pembiayaan perbankan syariah diharapkan dapat mempercepat perputaran roda perekonomian di Indonesia melalui ekspansi dan pembukaan usaha baru.

Meskipun perbankan syariah telah hadir di Indonesia lebih dari seperempat abad, penting untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan perbankan syariah memerlukan penelitian yang dapat

memberikan pandangan lebih dalam terkait kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembiayaan perbankan syariah dianggap memberikan kontribusi signifikan dalam jangka panjang, mendorong perputaran siklus bisnis dan meningkatkan konsumsi serta produksi bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan layanan berbasis syariah. Laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 menunjukkan peningkatan persentase pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah, menandakan fokus pada pembiayaan yang berdampak langsung pada sektor riil ekonomi.

Namun, dalam jangka pendek, perbankan syariah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, hanya mencapai 5%, menjadi salah satu faktor penyebab. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa tantangan utama perbankan syariah adalah meningkatkan pangsa pasar dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Meskipun berhasil menarik 3 juta dari 10 juta penduduk yang berpotensi menggunakan layanan keuangan syariah, perbankan syariah masih memiliki potensi untuk mendapatkan 7 juta pengguna layanan perbankan syariah.

Rendahnya kontribusi perbankan syariah dan pangsa pasar yang minim menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk BI, Lembaga Bank Syariah, dan umat Islam, untuk meningkatkan kontribusi dan pangsa pasar perbankan syariah. Upaya peningkatan industri halal, seperti Muslim fashion, pariwisata halal, dan kosmetik halal, harus sejalan dengan tujuan meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia mencakup Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dan Pasar Modal Syariah, dengan total aset keuangan syariah pada Desember 2022 mencapai Rp2.375,84 triliun atau US$151,03 miliar. (OJK, 2022; Bank Indonesia, 2022; Safri & Lukman, 2022).

12.2 Peran Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Indonesia

Tren ekonomi syariah saat ini menarik perhatian global, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi

syariah dikenal dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pada intinya, ekonomi syariah memandang pembiayaan dengan prinsip keadilan, menghindari praktik riba, dan menekankan perencanaan investasi jangka panjang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi global, dampak dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi signifikan. Prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memberikan alternatif yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi di tingkat global.

12.2.1 Diversifikasi sumber pendapatan

Pengembangan ekonomi syariah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi global melalui diversifikasi sumber pendapatan. Dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari ekonomi konvensional, ekonomi syariah memberikan peluang bagi negara-negara yang tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama. Sebagai contoh, negara-negara Timur Tengah yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor minyak dan gas dapat menciptakan alternatif pendapatan yang berkelanjutan dengan mengembangkan ekonomi syariah.

Dalam konteks diversifikasi ekonomi syariah, pengembangan industri halal menjadi faktor penting. Hal ini membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan sektor industri halal, negara-negara dapat menciptakan sumber pendapatan yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, melainkan juga pada industri yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan tidak tergantung pada satu sektor saja.

12.2.2 Peningkatan daya saing global

Industri halal mencakup berbagai sektor, termasuk makanan, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Dengan mengembangkan industri halal, ekonomi syariah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Disamping itu produk halal memiliki daya tarik bagi konsumen

muslim dan non-muslim yang semakin sadar akan kualitas dan keberlanjutan, membuka peluang ekspor yang lebih besar.

Seperti yang disampaikan di atas bahwa saat ini industri halal memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di pasar global. Ini mencakup berbagai sektor, seperti makanan, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Dengan mengembangkan industri halal, ekonomi syariah dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui beberapa faktor kunci:

12.2.3 Daya tarik konsumen muslim dan non-muslim

1. Daya tarik produk halal bagi konsumen muslim

Produk halal memiliki daya tarik khusus bagi konsumen Muslim karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, semakin banyak konsumen non-Muslim yang juga mencari produk berkualitas dan keberlanjutan, membuat produk halal menjadi pilihan yang menarik bagi beragam pasar. Produk halal memiliki daya tarik khusus bagi konsumen Muslim karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Produk halal memancarkan daya tarik istimewa yang khusus untuk konsumen Muslim karena kepatuhan mereka pada prinsip-prinsip syariah. Dimana produk halal harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan terhadap riba, bahan-bahan haram, dan proses produksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini menciptakan kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam (Othman et al., 2013). Di samping itu produk halal, selain memenuhi aspek keagamaan, juga dikenal memiliki standar kualitas yang tinggi. Dalam pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian produk, kualitas dan keberlanjutan menjadi fokus utama. Hal ini menciptakan rasa percaya diri dan kepuasan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi (Mahfudz, I. 2016).

Konsumen Muslim seringkali mencari produk yang mencerminkan nilai-nilai etis dan moral Islam. Produk halal yang diproduksi dengan memperhatikan aspek-aspek etika dan moral dalam bisnis menarik bagi konsumen Muslim yang ingin mendukung praktik-produksi yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Ali, H., dan Asad, M.

(2017). Produk halal diatur oleh ketentuan dan standar yang jelas sesuai dengan hukum Islam. Ini memberikan kejelasan kepada konsumen Muslim terkait bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan kelayakan produk. Kejelasan ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen Muslim. Saat ini pasar produk halal semakin berkembang dengan adanya diversifikasi produk dan inovasi. Ini mencakup sektor makanan, kecantikan, finansial, dan lainnya. Diversifikasi ini memberikan variasi pilihan kepada konsumen Muslim, menambah daya tarik produk halal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Riaz, A., & Chaudry, M. M. (2004); Asutay, M. (2007)).

2. Daya tarik produk halal bagi konsumen non-muslim

Selain konsumen Muslim, produk halal juga memiliki daya tarik bagi konsumen non-Muslim. Hal ini karena semakin banyak konsumen non-Muslim yang juga mencari produk berkualitas dan keberlanjutan. Produk halal umumnya memiliki standar kualitas yang tinggi. Hal ini karena produk halal harus memenuhi persyaratan halal yang ketat, termasuk persyaratan bahan baku, proses produksi, kemasan, dan label. Selain itu, produk halal juga memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi. Hal ini karena produk halal umumnya berasal dari sumber daya yang berkelanjutan, seperti produk pertanian organik dan produk perikanan berkelanjutan.

Produk halal, selain menjadi pilihan utama bagi konsumen Muslim, juga menarik perhatian konsumen non-Muslim. Daya tarik ini muncul dari beberapa aspek, yang meliputi standar kualitas tinggi dan nilai keberlanjutan yang melekat pada produk halal. Produk halal diatur oleh persyaratan halal yang ketat, yang mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, kemasan, dan label. Dalam mencapai sertifikasi halal, produk harus memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, konsumen non-Muslim yang mencari produk berkualitas tinggi seringkali tertarik pada produk halal (Hashim, M., & Ismail, S. M. 2015);. Hassan, M. K., & Mahlknecht, J. 2014); Ajit, S. S., & Iqbal, M. Z. 2021).

Produk halal sering kali berasal dari sumber daya yang berkelanjutan. Contohnya, produk pertanian organik dan produk perikanan berkelanjutan sering diintegrasikan dalam produk halal. Hal

ini menciptakan nilai tambah bagi konsumen non-Muslim yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan memilih produk yang berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam (Zulkifli, N. A., & Mahdzan, N. S. 2018; Alsulami, Y., & Weaven, S., 2018). Sumber daya yang berkelanjutan dalam produk halal membuatnya menjadi pilihan yang ramah lingkungan. Konsumen non-Muslim yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan sering memilih produk halal sebagai alternatif yang mendukung praktik produksi yang bertanggung jawab terhadap ekosistem (Ali, F., & Yunus, N. S. M. 2018; Hashim, H., & Czinkota, M. R. 2019; Sulaiman, S. Z., et al., 2019).

Dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya memilih produk yang sehat, produk halal yang dijamin kandungan dan proses produksinya sering dianggap sebagai opsi yang lebih baik. Konsumen non-Muslim yang mencari produk sehat dan bermutu tinggi sering tertarik pada produk halal (Fadhilah, F., & Novarianto, H. 2017; Ali, M. A., & Abdullah, N. I. 2020; Bocken, N. M., & Short, S. W., 2016). Dengan adanya peningkatan minat terhadap gaya hidup sehat dan berkelanjutan, produk halal semakin mendapatkan perhatian di pasar global. Ini menciptakan peluang bagi konsumen non-Muslim untuk merasakan manfaat produk halal dan ikut serta dalam mendukung praktik produksi yang etis (Abdullah, N. A., & Dusuki, A. W. 2010; Noor, R. M., & Shamsudin, M. N. 2018; Khoiri, A., & Setiawan, A. 2021; Samori, Z., & Ismail, N. 2017).

12.2.4 Kehalalan bahan baku

Kehalalan Bahan Baku dalam konteks keuangan syariah dan ekonomi Islam merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan atau kehalalan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan kegiatan ekonomi. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep halal dan haram dalam Islam. Dalam konteks keuangan syariah, halal merujuk pada aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan haram mengacu pada segala sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh ajaran Islam. Berikut adalah beberapa poin penjelasan lebih lanjut mengenai Kehalalan Bahan Baku:

1. Prinsip kehalalan dalam ekonomi islam

Dalam ekonomi Islam, prinsip kehalalan bahan baku memegang peranan sentral sebagai bagian integral dari kerangka kerja ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait dengan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya.

2. Sumber Bahan Baku Halal

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi harus berasal dari sumber yang dianggap halal menurut hukum Islam. Misalnya, dalam sektor makanan, bahan baku yang berasal dari hewan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti hewan tersebut disembelih secara Islami. Prinsip kehalalan bahan baku merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Prinsip ini berakar dari ajaran Islam yang mengharamkan umat Islam untuk mengonsumsi, menggunakan, dan bertransaksi dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

Dalam sektor makanan, penerapan sumber bahan baku halal memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Bahan baku yang berasal dari hewan yang disembelih secara Islami dipastikan tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Selain itu, penerapan sumber bahan baku halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan yang halal. Konsumen yang beragama Islam akan lebih percaya terhadap produk makanan yang halal dan aman dikonsumsi. Hal ini dapat meningkatkan penjualan produk makanan halal di pasar global.

Penerapan sumber bahan baku halal merupakan hal yang penting dalam ekonomi Islam. Hal ini dapat melindungi konsumen dari mengonsumsi makanan yang haram dan berbahaya, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan yang halal, dan meningkatkan daya saing produk makanan halal di pasar global.

3. Transparansi dan Sertifikasi Halal

Transparansi dalam rantai pasok dan sertifikasi halal menjadi penting. Perusahaan atau produsen diharapkan untuk menyediakan

informasi yang jelas terkait asal-usul bahan baku serta memastikan bahwa produk mereka telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang.

Transparansi dan sertifikasi halal merupakan dua hal yang penting dalam ekonomi Islam. Transparansi dalam rantai pasok halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen adalah halal dan aman. Sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Islam.

a. Transparansi dalam rantai pasok halal

Transparansi dalam rantai pasok halal berarti bahwa perusahaan atau produsen harus menyediakan informasi yang jelas terkait asal-usul bahan baku yang digunakan dalam produksi. Informasi tersebut mencakup jenis bahan baku, cara pengolahan, dan sumbernya.

Transparansi dalam rantai pasok halal penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen adalah halal. Hal ini karena produk halal memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam proses produksinya. Misalnya, hewan yang digunakan sebagai bahan baku harus disembelih secara Islami.

Sertifikasi halal merupakan proses penerbitan dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), melakukan sertifikasi halal untuk memastikan kesesuaian dengan norma keagamaan Islam.

b. Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh agama Islam. Ini tidak hanya menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk halal tetapi juga mendukung daya saingnya di pasar global. Transparansi dan sertifikasi halal membawa beberapa manfaat esensial, termasuk:

- Melindungi konsumen dari risiko mengonsumsi produk yang haram dan berbahaya.
- Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
- Meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang mendalam dan kritis dalam menilai dan mengesahkan kehalalan suatu produk atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Proses ini melibatkan lembaga-lembaga otoritatif, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga bersesuaian dengan ajaran Islam. Sertifikasi halal menjadi sangat penting dalam memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga diproduksi dengan mematuhi prinsip-prinsip kehalalan yang diakui oleh agama Islam. Keberadaan sertifikasi halal juga mencerminkan komitmen produsen untuk mentaati ketentuan agama dalam setiap tahapan produksi.

Dalam konteks ekonomi Islam, transparansi dan sertifikasi halal bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan pijakan moral dan etika dalam bisnis. Hal ini melibatkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat kesadaran akan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Sertifikasi halal, dengan demikian, bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan yang kuat dan menjaga integritas dalam dunia bisnis yang semakin kompleks. Keberadaan transparansi dan sertifikasi halal menjadi krusial dalam konteks ekonomi Islam. Selain melindungi konsumen dari produk yang mungkin melanggar prinsip kehalalan, hal ini juga memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen dan daya saing produk halal di pasar global.

12.2.5 Pentingnya Kehalalan dalam Keuangan Syariah

Kehalalan merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Prinsip ini berakar dari ajaran Islam yang mengharamkan umat Islam untuk mengonsumsi, menggunakan, dan bertransaksi dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam keuangan syariah, prinsip kehalalan juga diterapkan. Hal ini karena keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Demikian halnya dengan dalam sektor produksi,

prinsip kehalalan diterapkan dalam hal penggunaan bahan baku, proses produksi, dan produk yang dihasilkan. Bahan baku yang digunakan dalam produksi harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Proses produksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Produk yang dihasilkan harus halal dan aman untuk dikonsumsi.

1. Kehalalan dalam Instrumen Keuangan dan Investasi

Prinsip kehalalan juga diterapkan dalam instrumen keuangan dan investasi. Instrumen keuangan dan investasi yang halal adalah instrumen yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil tanpa adanya imbalan yang wajar. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Maysir adalah judi atau permainan yang mengandung unsur spekulasi. Prinsip kehalalan juga diterapkan dalam instrumen keuangan dan investasi. Instrumen keuangan dan investasi yang halal adalah instrumen yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

2. Riba

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil tanpa adanya imbalan yang wajar. Riba dapat berupa riba nasi'ah (riba dalam jual beli), riba fadhl (riba dalam pertukaran), dan riba jahiliyyah (riba yang berkembang pada masa jahiliyyah). Dalam instrumen keuangan dan investasi, riba dapat ditemukan dalam bentuk bunga, margin, atau diskon. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur atas pinjaman yang diberikan. Margin adalah tambahan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian barang secara kredit. Diskon adalah pengurangan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian barang secara tunai (Khan, M. F. 1986; Iqbal, Z., & Molyneux, P. 2005; Chapra, U. M. 1985; El-Gamal, M. A. 2000).

Riba, secara sederhana, adalah pengambilan tambahan yang tidak adil dan melebihi nilai pokok atas harta atau modal yang dipinjamkan. Dalam Islam, riba diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Ada beberapa jenis riba:

- Riba Nasi'ah: Terjadi dalam transaksi jual beli barang tangguh (kredit). Penjual menetapkan harga yang lebih tinggi untuk pembeli yang membayar tangguh dibandingkan tunai.
- Riba Fadhl: Terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Misalnya, menukar 100 gram emas dengan 90 gram emas.
- Riba Jahiliyyah: Riba yang umum dipraktikkan sebelum masa Islam, biasanya melibatkan bunga berlipat ganda secara eksponensial.

Bentuk Riba dalam Instrumen Keuangan dan Investasi:

Konsep riba tidak hanya terbatas pada transaksi sederhana, tapi juga relevan dalam dunia keuangan dan investasi modern. Beberapa bentuk riba yang mungkin ditemui yaitu pada bunga bank konvensional dimana sistem perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, di mana peminjam harus membayar tambahan atas pinjaman yang diambil. Ini dianggap riba nasi'ah. Meskipun bertujuan menghindari riba, beberapa skema pembiayaan syariah seperti murabahah dapat memicu kontroversi tentang adanya "margin" yang dianggap mirip bunga. Instrumen investasi saham yang membagikan dividen (pembagian keuntungan) umumnya dianggap halal. Namun, instrumen berbasis bunga seperti obligasi konvensional diharamkan karena mengandung riba. Penentangan riba dalam Islam didasari oleh beberapa alasan yaitu riba dianggap tidak adil karena peminjam harus membayar imbalan yang melebihi nilai pokok pinjaman tanpa kontribusi nyata dari kreditur dimana praktik riba berpotensi mengeksploitasi pihak yang membutuhkan pinjaman, terutama mereka yang berada dalam situasi sulit sehingga sistem riba dianggap dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial (Kahf, M. 2002; Ahmad, A. U. F. 2002; Warde, I. 2000).

Alternatif Islami terhadap Riba dapat dilihat pada sistem keuangan syariah yang menawarkan alternatif terhadap riba, seperti Mudharabahy aitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kemudian Musyarakah yaitu kerjasama dua atau lebih pihak untuk menjalankan usaha bersama, dengan pembagian keuntungan proporsional terhadap modal yang diinvestasikan. Selanjutnya Sukuk yaitu Instrumen investasi berbasis aset riil, seperti proyek infrastruktur atau properti, di mana

investor menerima hak atas pendapatan proyek, bukan bunga. Dapat dikatakan bahwa riba merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam dan memiliki implikasi signifikan pada instrumen keuangan dan investasi. Memahami jenis-jenis riba dan argumen penentangannya dapat membantu pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, keberadaan alternatif Islami terhadap riba menunjukkan bahwa praktik keuangan yang adil dan etis dapat diterapkan dalam kehidupan modern (Siddiqi, M. N. 2006; Iqbal, Z., & Tsubota, K. 2006).

3. Gharara

Gharara adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. gharar dapat berupa ketidakpastian tentang objek transaksi, harga transaksi, atau waktu transaksi. Dalam instrumen keuangan dan invest asi, gharar dapat ditemukan dalam bentuk transaksi yang tidak memiliki underlying asset, transaksi yang tidak memiliki jangka waktu yang pasti, atau transaksi yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas. Secara sederhana gharar dalam Islam, diharamkan karena dianggap dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bertransaksi.

Gharara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam hal ketidakpastian tentang objek transaksi misalnya, membeli barang yang tidak diketahui wujudnya, seperti barang yang dijual dengan skema "blind box" atau ketidakpastian tentang harga transaksi misalnya, membeli barang dengan harga yang ditentukan berdasarkan hasil lelang. Selanjutnya Ketidakpastian tentang waktu transaksi misalnya, membeli barang dengan harga yang akan ditentukan di masa mendatang. Lebih lanjut bentuk Gharar dalam Instrumen Keuangan dan Investasi dapat dijelaskan bahwa konsep gharar tidak hanya terbatas pada transaksi sederhana, tapi juga relevan dalam dunia keuangan dan investasi modern.

Argumen penentangan Gharar dalam Islam didasari oleh beberapa alasan yaitu ketidakadilan Gharar dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Disamping itu Gharar dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Di mana Gharar dapat menimbulkan ketidakjelasan

dan kebingungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharara merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam dan memiliki implikasi signifikan pada instrumen keuangan dan investasi. Memahami bentuk-bentuk gharar dan argumen penentangannya dapat membantu pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, keberadaan alternatif Islami terhadap gharar menunjukkan bahwa praktik keuangan yang adil dan etis dapat diterapkan dalam kehidupan modern (Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2007; Siddiqi, M. N. 2006; El-Gamal, M. A., 2006; Rosly, S. A. 2005; Ayub, M. 2007; Usmani, M. T. 2002).

4. Maysir

Maysir adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada aktivitas perjudian atau permainan yang mengandung unsur spekulasi. Dalam konteks Islam, maysir dianggap sebagai praktik yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, ketidakpastian, dan risiko yang tidak seimbang. Maysir dapat berupa permainan yang melibatkan taruhan atau pertaruhan. Dalam instrumen keuangan dan investasi, maysir dapat ditemukan dalam bentuk transaksi yang melibatkan spekulasi harga, transaksi yang melibatkan perjudian, atau transaksi yang melibatkan taruhan. Penjelasan lebih rinci mengenai Maysir melibatkan beberapa aspek: Maysir mencakup segala bentuk permainan atau transaksi yang didasarkan pada unsur spekulasi atau ketidakpastian, di mana pihak-pihak yang terlibat bertaruh atau berspekulasi pada hasil suatu kejadian yang belum pasti. Larangan terhadap maysir dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menyebutkan maysir dan alkohol sebagai perbuatan dosa yang besar (Al-Baqarah 2:219 dan Al-Ma'idah 5:90-91), dan Hadis Nabi Muhammad memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep maysir dan bahayanya yang dapat ditemui dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari (Hadis tentang Maysir). Maysir dilarang karena melibatkan unsur spekulasi yang tinggi dan risiko yang tidak seimbang. Dalam transaksi maysir, satu pihak bisa mendapatkan keuntungan besar sementara pihak lain mengalami kerugian besar tanpa adanya dasar yang jelas.

Dalam instrumen keuangan, maysir dapat muncul dalam beberapa bentuk, termasuk transaksi yang didasarkan pada spekulasi harga (misalnya, perjudian dalam perdagangan saham), permainan derivatif yang bersifat perjudian, atau transaksi yang melibatkan unsur taruhan. Melibatkan diri dalam transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur maysir dapat memiliki konsekuensi hukum dan etika dalam Islam. Umat Islam dihimbau untuk menghindari segala bentuk perjudian atau spekulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan (El-Gamal, 2006; Iqbal, Z., dan Molyneux, P. 2005; Usmani, M. T. 2002).

Dalam keuangan syariah, terdapat alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Instrumen keuangan syariah menekankan adanya keadilan, tanggung jawab, dan kehalalan dalam setiap transaksi, menghindarkan risiko maysir (Usmani, 2002). Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai larangan maysir membantu umat Islam untuk mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa contoh instrumen keuangan dan investasi yang halal:

12.3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan ekonomi Syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global. Prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan dan non-diskriminasi, dapat mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata, memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, dan menjaga kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Syariah berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

12.4 Peran aktif dalam perdagangan internasional

Ekonomi Syariah juga dapat berperan aktif dalam perdagangan internasional, menjadi alternatif bagi negara-negara yang ingin memperluas pasar internasional. Misalnya, negara-negara dengan

mayoritas penduduk Muslim dapat memanfaatkan keunggulan ekonomi Syariah untuk bekerja sama dengan negara-negara Muslim di seluruh dunia, memberikan peluang ekonomi Syariah untuk tumbuh di skala global.

1. Mendorong Inovasi.

Pengembangan ekonomi Syariah dapat mendorong inovasi di sektor keuangan, dengan lembaga-lembaga keuangan Syariah mengembangkan produk-produk keuangan inovatif sesuai prinsip Syariah. Produk keuangan ini dapat mencakup investasi berbasis teknologi, crowdfunding Syariah, dan produk asuransi yang lebih adil dan transparan. Dalam jangka panjang, inovasi ini dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

2. Meningkatkan daya saing dan kualitas ekonomi

Pengembangan ekonomi Syariah dapat meningkatkan daya saing dan kualitas ekonomi global. Sebagai alternatif yang lebih aman dan terpercaya bagi investor dibandingkan ekonomi konvensional, ekonomi Syariah dapat memperkuat sistem keuangan global. Dengan menjaga keseimbangan investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta mendorong investasi berkelanjutan, ekonomi Syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan daya saing negara dalam menghadapi tantangan global. (Ariff, M. A., & Ahmed, M. F. 2012; Usmani, M. T., 2011; Ali, M. H., & Ilyas, A. L. 2012).

12.5 Peran Ekonomi Syariah Indonesia Dalam Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perubahan signifikan dalam dinamika ekonomi negara ini. Bahasan ini akan merinci kontribusi ekonomi syariah dalam konteks perekonomian global dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Institusi keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan, dan pasar modal syariah, telah tumbuh pesat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas pasar, dan menyediakan alternatif keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Iqbal, Z., & Mirakhor, A., 2018; Nienhaus, V., 2016).

Dengan pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan syariah, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat keuangan syariah regional. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak positif pada hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat, khususnya dalam konteks keuangan dan investasi (Vogel, F., & Hayes, S., 2019; Siddiqui, A., 2016). Dengan merinci aspek-aspek tersebut, bahasan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya mencerminkan sorotan utama, tetapi juga mewujudkan perubahan substansial dalam dinamika ekonomi global dan regional.

Investasi asing memegang peran krusial dalam perekonomian global, dan Indonesia, dengan ekonomi syariah yang berkembang, berhasil menarik perhatian global. Dengan semakin dikenal dan diminatinya instrumen investasi syariah, Indonesia berhasil mengundang lebih banyak investasi asing, memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Lebih dari sekadar aspek keuangan, ekonomi syariah juga memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan, dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Saiti, B., & Bacha, O. I., 2014; Abdullah, N. I., & Valaei, N., 2018). Fokus pada prinsip-prinsip ini membuat ekonomi syariah menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan holistik yang berkelanjutan.

Peran pemerintah sangat penting dalam mengembangkan ekonomi syariah. Melalui implementasi kebijakan yang mendukung, seperti regulasi yang kondusif dan pemberian insentif fiskal, pemerintah memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi syariah, memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dari aspek pendidikan dan inovasi juga menjadi faktor utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan mendorong pendidikan berkualitas tinggi dan inovasi di ranah keuangan syariah, Indonesia dapat menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, memberikan dukungan signifikan terhadap pertumbuhan sektor ini dalam perekonomian global (Wibowo, M. A., 2023; Arifin, M., & Syafi'i, M., 2022; Nurdin, M., 2021). Bahasan ini diharapkan dapat

mengungkapkan aspek-aspek ekspansi institusi keuangan syariah, peran Indonesia sebagai pusat keuangan syariah regional, investasi asing, kontribusi pada pembangunan berkelanjutan, sinergi dengan kebijakan pemerintah, dan dorongan terhadap pendidikan serta inovasi, memberikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana ekonomi syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

12.6 Peran Keuangan Syariah Indonesia Dalam Keuangan Syariah Global

Krisis keuangan global telah mendorong upaya mencari media transaksi keuangan alternatif yang melengkapi yang tradisional. Keuangan Islam, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dianggap sebagai media yang berpotensi mengurangi risiko endemik terkait transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini mencakup penghapusan bunga, perjudian, spekulasi, dan derivatif kompleks, dianggap sebagai faktor utama eksploitasi dalam masyarakat (Abbasi *et al*., 1989; Ahmad & Hassan, 2007; El-sheikh, 2008; Khan, 2010; Zaman, 2009). Keuangan syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada 2020 dari $2,52 triliun menjadi $2,88 triliun. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, menduduki peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global (Kemenkeu, 2021).

Peningkatan peran bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah juga menjadi faktor penting dalam perkembangan keuangan syariah Indonesia. Bank Indonesia mencatat bahwa pada 2021, terdapat 17 bank umum syariah dan 29 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia (Bank Indonesia, 2023). Partisipasi Indonesia dalam keuangan syariah global juga semakin ditingkatkan melalui keterlibatan aktif Bank Indonesia dalam organisasi internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (OJK, 2023). Keuangan syariah juga dianggap sebagai instrumen yang berperan penting dalam

mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Instrumen khusus pada keuangan syariah seperti zakat, wakaf, infaq, dan sadaqah serta takaful (asuransi syariah) dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal, 2021ab).

Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. KNEKS bertujuan meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penggunaan teknologi digital, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, dan pengembangan wakaf. Dalam rangka memperkuat keuangan syariah di Indonesia, penguatan pada pilar landasan hukum, regulasi, dan pengawasan perlu didorong. Selain itu, integrasi antar sektor, peningkatan insentif pada perbankan syariah, pendirian Keuangan Halal Nasional (National Halal Fund), dan pengembangan ekonomi digital juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (Kemenkeu, 2021).

Dalam akhir bahasan ini dapat dikatakan bahwa, keuangan syariah Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam keuangan syariah global. Peningkatan peran bank syariah, partisipasi aktif dalam organisasi internasional, dan pengembangan instrumen khusus pada keuangan syariah menjadi faktor penting dalam perkembangan keuangan syariah Indonesia. Selain itu, penguatan pada pilar landasan hukum, regulasi, dan pengawasan, serta pengembangan ekonomi digital juga perlu didorong untuk memperkuat keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2023; Bank Indonesia, 2023; Badan Kebijakan Fiskal, 2021; Kemenkeu, 2021).

Daftar Pustaka

Abbasi, S. M., Hollman, K. W., dan Murrey, J. H. (1989). Islamic economics: foundations and practices. International Journal of Social Economics, 16(5), 5–17. http://dx.doi.org/10.1108/03068298910367215

Abdullah, N. A., dan Dusuki, A. W. (2010). Halal risk management in the supply chain. International Journal of Economics, Management, and Accounting, 18(1), 39-55.

Abdullah, N. I., dan Valaei, N. (2018). Sustainable Development in Islamic Economics and Finance. Springer.

Ahmad, A. U. F. (2002). Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues. Islamic Research and Training Institute.

Ahmad, A. U. F., dan Hassan, M. K. (2007). Riba and Islamic banking. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 3, 1–33.

Ajit, S. S., dan Iqbal, M. Z. (2021). Sustainability and Halal in Food Supply Chain: A Review of Current Literature. Sustainability, 13(13), 7088.

Ali, F., dan Yunus, N. S. M. (2018). Determinants of customer loyalty and the role of the Halal logo towards customer loyalty in the Malaysian hotel industry. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 1058-1074.

Ali, H., dan Asad, M. (2017). The Impact of Religious Beliefs on Muslim Consumer Behaviour: A Systematic Literature Review. Journal of Islamic Marketing, 8(1), 131-161.

Ali, M. A., dan Abdullah, N. I. (2020). Sustainability of Halal Food: A Conceptual Analysis. International Journal of Supply Chain Management, 9(3), 762-768.

Ali, M. H., dan Ilyas, A. L. (2012). Islamic finance and economic growth: Evidence from Malaysia. Journal of Economic Studies, 39(2), 163-184.

Alsulami, Y., dan Weaven, S. (2018). An Investigation into Consumer Attitudes towards Sustainable and Ethical Attributes in Islamic Fashion Products. Journal of Islamic Marketing, 9(1), 20-42.

Ariff, M. A., dan Ahmed, M. F. (2012). The impact of Islamic finance on global economic competitiveness. International Monetary Fund.

Arifin, M., dan Syafi'i, M. (2022). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 11-24.

Asutay, M. (2007). Conceptualising and Locating the Social and Economic Dimensions of Halal Food Consumption. Journal of Islamic Marketing, 3(3), 217-240.

Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. John Wiley dan Sons.

Badan Kebijakan Fiskal. (2021a). Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. https://fiskal.kemenkeu.go.id /baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional. Diakses 9 Desember 2023.

Badan Kebijakan Fiskal. (2021b). Siaran Pers Detil. https://fiskal. kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/320. Diakses 9 Desember 2023.

Bank Indonesia. (2023). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Sinergi dan Inovasi: Meningkatkan Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022.

Bocken, N. M., dan Short, S. W. (2016). Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities. Environmental Innovation and Societal Transitions, 18, 41-61.

Chapra, M. U. (1985). Towards a Just Monetary System. Islamic Foundation, Leicester.

El-Gamal, M. A. (2000). A Simple Fiqh-and-Economics Rationale for Mutualization in Islamic Finance. American Journal of Islamic Social Sciences, 17(3), 31-58.

El-Gamal, M. A. (2006). "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice." Cambridge University Press.

El-Gamal, M. A. (2014). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.

El-sheikh, S. (2008). The Moral Economy of Classical Islam: A FiqhiConomic Model. Muslim World, 116–144. http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-1913.2008.00213.x.

Fadhilah, F., dan Novarianto, H. (2017). Halal certification issues in the Indonesian food industry. Procedia Manufacturing, 13, 978-983.

Hashim, H., dan Czinkota, M. R. (2019). Understanding Muslim Consumers' Preferences for Sustainability Attributes in Food Products. Journal of Islamic Marketing, 10(3), 746-763.

Hashim, M., dan Ismail, S. M. (2015). Halal certification: An international marketing issue and challenge. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 408-415.

Hassan, M. K., dan Mahlknecht, J. (2014). Halal standardization: Challenges and opportunities. Food Control, 44, 172-179.

Imam, P., dan Kpodar, K. (2016). "Islamic Banking: Good for Growth?" IMF Working Paper, W

Iqbal, Z., dan Mirakhor, A. (2007). "An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice." John Wiley dan Sons.

Iqbal, Z., dan Mirakhor, A. (2018). Islamic Finance for Sustainable and Inclusive Development. The World Bank.

Iqbal, Z., dan Molyneux, P. (2005). Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects. Palgrave Macmillan.

Iqbal, Z., dan Tsubota, K. (2006). Financial Engineering and Islamic Contracts. Islamic Economic Studies, 13(1), 35-66.

Kahf, M. (2002). The Theory of Islamic Money and Capital. The Islamic Foundation.

Kemenkeu. (2021). Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/ 4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional. Diakses 9 Desember 2023.

Khan, F. (2010). How Islamic is Islamic Banking? Journal of Economic Behavior and Organization, 76, 805–820. http://dx.doi.org/10.1016/ j. jebo.2010.09.015.

Khan, M. F. (1995). Islamic Banking in Theory and Practice.

Khoiri, A., dan Setiawan, A. (2021). The Role of Halal Certification in Enhancing Sustainable Business Practices: Empirical Evidence from Indonesia. Journal of Cleaner Production, 309, 127253.

Mahfudz, I. (2016). Halal Lifestyle: Understanding Muslim Consumer Behavior. Journal of Business Research, 69(2), 631-641.

Mensi, W., Hammoudeh, S., Yoon, S. M., dan Kang, S. H. (2020). "Islamic and conventional banks' soundness during the COVID-19 pandemic." The Quarterly Review of Economics and Finance, 78, 153-175.

Nienhaus, V. (2016). "Islamic Finance in the Global Economy". RoutledgeNienhaus, V. (2016). "Islamic Finance in the Global Economy". Routledge.

Noor, R. M., dan Shamsudin, M. N. (2018). "Sustainable Halal Food Supply Chain: A Case Study of Malaysia." Procedia CIRP, 73, 251-256.

Nurdin, M. (2021). Pendidikan dan inovasi sebagai kunci pengembangan ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 155-169.

OJK, (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

OJK. (2022). "Statistik Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Syariah Desember 2022." Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Othman, Z., Ghazali, P. L., dan Harun, M. F. (2013). "The Halal Industry: A Conceptualization and Preliminary Findings." International Journal of Economics, Management and Accounting, 21(2), 79-103.

Riaz, A., dan Chaudry, M. M. (2004). "Halal Food Production." CRC Press.

Rizvi, S. A. R., Arshad, S., dan Ahmed, S. (2020). "Economic determinants of Islamic banking performance during the global financial crisis: An empirical investigation." International Journal of Finance dan Economics, 25(3), 345-362.

Rosly, S. A. (2005). "Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning." Dinamas Publishing.

Safri, M. A., dan Lukman, H. (2022). "The Development of Islamic Banking in Indonesia: An Overview." International Journal of Economics, Commerce and Management, 10(2), 1-10.

Saiti, B., dan Bacha, O. I. (2014). "The Effects of Discretionary Fiscal Policies on Macroeconomic Aggregates: The Case of the OIC Member Countries". Journal of Economic Cooperation and Development, 35(1), 83-114.

Samori, Z., dan Ismail, N. (2017). "Halal Practices: A Conceptual Model." Procedia Engineering, 181, 1175-1180.

Siddiqi, M. N. (2006). "Islamic Banking

Siddiqui, A. (2016). "Islamic Finance in the Global Economy". Edinburgh University Press.

Sulaiman, S. Z., Muhammad, A. A. G., dan Ghazali, N. A. M. (2019). Halal Product Certification: Perspectives of Malaysian Halal Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Journal of Islamic Marketing, 10(1), 170-186.

Usmani, M. T. (2002). "Introduction to Islamic Finance." Idaratul Ma'arif, Karachi.

Usmani, M. T. (2011). President of the AAOIFI Shariah Council, Sukuk and Their Contemporary Applications. Retrieved February 6, 2011, from http://www.failaka.com/downloads/ Usmani_ SukukApplications.pdf

Vogel, F., dan Hayes, S. (2019). "Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return". The Hague: Springer.

Warde, I. (2000). "Islamic Finance in the Global Economy." Edinburgh University Press.

Wibowo, M. A. (2023). Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Indonesia.

Zaman, A., 2009. Islamic economics. Surv. Lit. 48, 525–566.

Zulkifli, N. A., dan Mahdzan, N. S. (2018). "Consumers' attitude towards Halal food products: A review." British Food Journal.

Bab 13

SOSIOLOGI EKONOMI INDONESIA

Oleh: La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa

13.1 Pengenalan tentang Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari interaksi antara faktor sosial dan faktor ekonomi dalam membentuk pola-pola perilaku, struktur sosial, serta dinamika ekonomi dalam suatu masyarakat (Cate et al., 1993; Economists, 1990; In & Science, 2016; Penn, 1998; Sociology, 1987; Taylor, 2018; Weber, 2020). Dalam sosiologi ekonomi, perhatian utama diberikan pada bagaimana faktor-faktor sosial seperti norma, nilai, budaya, struktur sosial, dan institusi sosial memengaruhi pembentukan, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi.

Sosiologi ekonomi memandang ekonomi tidak hanya sebagai sekumpulan aktivitas pasar dan transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terintegrasi dalam konteks masyarakat (Weber, 2020). Hal ini melibatkan analisis terhadap bagaimana faktor-faktor seperti status sosial, kekuasaan, dan relasi sosial memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dari sosiologi ekonomi adalah pemerhatian terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ini mencakup analisis terhadap penyebab dan konsekuensi dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di dalam masyarakat. Sosiologi ekonomi juga memperhatikan bagaimana faktor-faktor sosial seperti gender, ras,

kelas sosial, dan wilayah geografis memengaruhi pola-pola kesenjangan ekonomi (Jamaludin, 2017).

Selain itu, sosiologi ekonomi memperhatikan peran institusi dan organisasi ekonomi dalam membentuk perilaku ekonomi. Ini termasuk analisis terhadap peran lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pasar, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Dengan pendekatan multidisipliner, sosiologi ekonomi juga memperkaya pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ekonomi seperti permintaan, penawaran, harga, dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Secara umum, sosiologi ekonomi merupakan bidang studi yang penting untuk memahami hubungan kompleks antara faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam membentuk pola-pola perilaku dan dinamika ekonomi dalam suatu masyarakat (Rizani et al., 2023).

13.2Konteks Sosiologi Ekonomi Indonesia

Sosiologi ekonomi Indonesia merujuk pada studi tentang interaksi kompleks antara faktor sosial dan ekonomi dalam dinamika masyarakat Indonesia yang heterogen, menawarkan landasan unik untuk analisis sosiologi ekonomi (Ulya et al., 2023).

Konteks sosiologi ekonomi Indonesia melibatkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku ekonomi, struktur sosial, dan distribusi sumber daya. Ini mencakup analisis terhadap nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi yang membentuk tatanan ekonomi, serta peran lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, masyarakat adat, dan organisasi keagamaan dalam mengatur sistem ekonomi (Jamaludin, 2015).

Dalam kerangka sosiologi ekonomi, penting untuk memperhatikan dampak sejarah kolonialisme dan imperialisme terhadap struktur ekonomi Indonesia serta peran agen-agen sosial dalam proses pembangunan ekonomi. Misalnya, penjajahan kolonial telah membentuk pola ekonomi yang terpusat pada eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi monokultur yang masih terasa hingga saat ini.

Selain itu, sosiologi ekonomi Indonesia juga mempertimbangkan kompleksitas politik dan perkembangan ekonomi, termasuk peran penting negara dalam mengatur kebijakan ekonomi dan pembangunan serta interaksi antara sektor publik dan swasta dalam pembentukan struktur ekonomi.

Perubahan sosial ekonomi yang cepat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ketidaksetaraan yang masih ada menjadi fokus utama dalam analisis sosiologi ekonomi Indonesia. Pembahasan dalam konteks ini seringkali mengintegrasikan pendekatan multidisipliner untuk memahami dinamika kompleks yang ada dalam masyarakat Indonesia. Konteks sosiologi ekonomi Indonesia mencakup pemahaman mendalam tentang interaksi antara faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam konteks sejarah, budaya, politik, dan ekonomi yang unik di dalam masyarakat Indonesia (Meka et al., n.d.).

13.3 Konsep Dasar Sosiologi Ekonomi

Konsep dasar sosiologi ekonomi Indonesia melibatkan pemahaman mendalam terhadap interaksi kompleks antara faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam konteks masyarakat Indonesia. Salah satu konsep utama adalah analisis terhadap struktur sosial ekonomi, yang mencakup distribusi kekayaan, status sosial, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ini melibatkan studi tentang pola-pola ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi di Indonesia, baik dari segi pendapatan maupun akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi (Puspitasari, 2015).

Selain itu, konsep dasar sosiologi ekonomi Indonesia juga mencakup peran lembaga-lembaga sosial dalam membentuk perilaku ekonomi, seperti keluarga, masyarakat adat, dan organisasi keagamaan. Analisis terhadap dinamika kelompok sosial-ekonomi juga menjadi fokus penting, dengan memperhatikan bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, etnisitas, dan gender memengaruhi pola-pola ekonomi di dalam masyarakat (Ramdhan, 2023). Konsep-konsep seperti budaya konsumsi, adaptasi sosial-ekonomi, dan perubahan struktural juga menjadi bagian integral dari sosiologi ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, konsep dasar sosiologi ekonomi Indonesia menawarkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi saling

berinteraksi dan membentuk pola-pola perilaku serta struktur ekonomi di dalam masyarakat Indonesia yang kompleks dan heterogen (Jamaludin, 2017).

13.4 Tokoh dan Pendekatan Utama dalam Sosiologi Ekonomi

Dalam sosiologi ekonomi, terdapat sejumlah tokoh dan pendekatan utama yang memberikan sumbangan besar terhadap pemahaman tentang hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu tokoh sentral adalah Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Weber menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya, terutama agama, dalam membentuk pola perilaku ekonomi. Karyanya yang terkenal, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism", mengaitkan etika Protestan, khususnya kalvinisme, dengan perkembangan kapitalisme (Swedberg, 2009; Weber, 2020). Weber menekankan bahwa nilai-nilai religius seperti kesederhanaan, kerja keras, dan akumulasi kekayaan, menjadi faktor penting dalam membentuk mentalitas ekonomi.

Selanjutnya, Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, mengembangkan pendekatan struktural-fungsional. Durkheim memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai institusi sosial yang saling terkait, termasuk sistem ekonomi (Swedberg, 2009). Menurutnya, integrasi sosial adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kontribusinya terhadap pemahaman tentang bagaimana struktur sosial membentuk perilaku ekonomi sangat signifikan dalam sosiologi ekonomi (Faidah et al., 2018).

Selain itu, teori konflik Karl Marx juga sangat berpengaruh dalam sosiologi ekonomi. Marx menekankan pentingnya konflik kelas sebagai motor utama perubahan sosial dan ekonomi (Kinseng, 2021). Pemikirannya tentang alienasi, eksploitasi, dan ketidaksetaraan ekonomi memberikan landasan bagi pemahaman tentang dinamika kapitalisme dan pertentangan antar-kelas dalam masyarakat.

Pendekatan lain yang penting adalah teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh George Homans dan Peter Blau. Mereka meneliti hubungan antarindividu dalam konteks pertukaran sumber daya ekonomi dan sosial (Faidah et al., 2018). Pendekatan ini menyoroti

pentingnya perhitungan rasional individu dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi mereka.

Tokoh-tokoh dan pendekatan utama dalam sosiologi ekonomi memberikan kerangka konseptual yang penting untuk memahami kompleksitas interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pemikiran-pemikiran ini tetap relevan dalam analisis kontemporer mengenai distribusi kekayaan, ketidaksetaraan, dan perubahan struktural dalam masyarakat modern, termasuk dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman dan dinamika sosial-ekonomi (Rochmah et al., 2023).

13.5 Relevansi Teori Sosiologi Ekonomi dengan Konteks Indonesia

Teori sosiologi ekonomi memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami kompleksitas sosial-ekonomi Indonesia. Indonesia, menawarkan landasan yang unik bagi aplikasi teori-teori tersebut. Pertama-tama, teori Weber tentang hubungan antara agama dan perkembangan kapitalisme sangat relevan dengan konteks Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, terdapat keragaman agama dan keyakinan di seluruh negeri. Analisis terhadap bagaimana nilai-nilai agama dan budaya memengaruhi pola-pola perilaku ekonomi di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika ekonomi di berbagai daerah (Arifin, 2020).

Selanjutnya, konsep Durkheim tentang integrasi sosial juga relevan dalam konteks Indonesia yang beragam. Indonesia memiliki berbagai kelompok etnis, suku, dan agama yang hidup berdampingan. Studi tentang bagaimana integrasi sosial mempengaruhi stabilitas ekonomi di tengah keragaman ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika masyarakat Indonesia. Teori konflik Marx juga memiliki relevansi yang besar dengan realitas sosial-ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia telah menjadi negara demokratis, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Teori konflik dapat membantu dalam menganalisis konflik antara kelas sosial, eksploitasi ekonomi, dan ketidaksetaraan yang masih ada di Indonesia (Tualeka, 2017).

Selain itu, pendekatan pertukaran sosial juga dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Dalam masyarakat yang heterogen seperti

Indonesia, interaksi sosial dan ekonomi seringkali didasarkan pada pertukaran sumber daya dan jasa antarindividu atau kelompok. Studi tentang dinamika pertukaran sosial ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks ekonomi yang kompleks (Dimas Arsy Yanto et al., 2023).

Sosiologi ekonomi memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dinamika sosial-ekonomi Indonesia. Dengan menerapkan kerangka konseptual ini, para pengkaji dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pola perilaku ekonomi, struktur sosial, dan distribusi sumber daya di Indonesia. Hal ini penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan pemberdayaan masyarakat di berbagai tingkatan (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014).

13.6 Struktur Sosial Durkheim dan Ekonomi Indonesia

Struktur sosial, seperti yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat. Durkheim memandang struktur sosial sebagai kerangka yang memungkinkan interaksi antara individu dan kelompok, serta mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pemahaman tentang struktur sosial ini menjadi penting untuk menganalisis distribusi sumber daya, pola perilaku ekonomi, dan dinamika sosial-ekonomi secara lebih luas (Sholihah & Kinseng, 2014).

Salah satu aspek penting dari struktur sosial Durkheim adalah pembagian kerja (division of labor). Durkheim menyatakan bahwa pembagian kerja memainkan peran kunci dalam membentuk integrasi sosial dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembagian kerja yang kompleks dan bervariasi dapat diamati dari berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor pertanian yang masih didominasi oleh pertanian subsisten hingga sektor industri dan jasa yang semakin berkembang pesat. Pembagian kerja ini mencerminkan dinamika ekonomi Indonesia yang beragam dan kompleks (Mikraj & Wathoni, 2023).

Selanjutnya, Durkheim juga menyoroti pentingnya solidaritas sosial dalam mempertahankan stabilitas masyarakat. Solidaritas sosial

merujuk pada ikatan sosial yang menghubungkan individu-individu dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi Indonesia, solidaritas sosial dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerjasama ekonomi tradisional, seperti gotong royong dalam pertanian atau koperasi di sektor informal. Namun, dengan modernisasi ekonomi dan urbanisasi yang cepat, solidaritas sosial sering kali dihadapkan pada tantangan, terutama di kota-kota besar di mana individualisme dan kompetisi ekonomi lebih dominan (Rahma et al., 2022).

Selain itu, Durkheim menyoroti peran lembaga sosial dalam mempertahankan dan mengatur struktur sosial. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat (Gunawan, 2020). Di Indonesia, lembaga-lembaga ini memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, penting untuk diingat bahwa struktur sosial tidak bersifat statis dan dapat berubah seiring waktu. Dalam konteks Indonesia yang dinamis, perubahan sosial-ekonomi seperti urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi telah mempengaruhi struktur sosial secara signifikan. Perubahan ini menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan solidaritas sosial dan mengelola pembagian kerja yang semakin kompleks (Munir & Zakiyah, 2017).

Melalui pemahaman tentang struktur sosial Durkheim dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis dinamika sosial-ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan pembagian kerja, solidaritas sosial, dan peran lembaga sosial, kita dapat lebih baik memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pola perilaku ekonomi, distribusi sumber daya, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini penting dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

13.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Sosial-Ekonomi

Dinamika sosial-ekonomi suatu masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Pertama, faktor historis seperti sejarah kolonialisme, politik, dan perubahan budaya memainkan

peran penting dalam membentuk struktur sosial-ekonomi. Selanjutnya, faktor eksternal seperti globalisasi, teknologi informasi, dan perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika ekonomi suatu negara (Muhammad AmmarNurHandyka, 2023).

Selain itu, faktor politik dan kebijakan pemerintah juga memengaruhi dinamika sosial-ekonomi. Kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan ketahanan sosial. Di samping itu, faktor demografi seperti pertumbuhan populasi, struktur usia, dan migrasi juga berperan dalam membentuk pola-pola sosial-ekonomi (Area, n.d.).

Selanjutnya, faktor budaya dan nilai-nilai sosial juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika ekonomi. Nilai-nilai seperti kerja keras, penghargaan terhadap pendidikan, dan norma-norma sosial memengaruhi perilaku ekonomi individu dan kelompok dalam masyarakat. Selain itu, faktor lingkungan seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, dan polusi juga memiliki dampak penting terhadap dinamika sosial-ekonomi suatu negara. Dapat dipahami bila dinamika sosial-ekonomi suatu masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, termasuk faktor historis, eksternal, politik, demografi, budaya, dan lingkungan. Memahami interaksi antara faktor-faktor ini adalah kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial yang merata (Widyasari, 2023).

13.8 Peran Institusi dalam Sosiologi Ekonomi

Dalam sosiologi ekonomi, institusi merujuk pada struktur sosial yang mengatur perilaku ekonomi dalam masyarakat. Institusi ini meliputi berbagai lembaga, organisasi, dan aturan yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi. Peran institusi dalam sosiologi ekonomi sangatlah penting, karena mereka memainkan peran kunci dalam membentuk pola-pola perilaku ekonomi, distribusi kekayaan, dan dinamika sosial-ekonomi secara keseluruhan (Ridwan, 2011).

Salah satu peran utama institusi adalah menyediakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diandalkan bagi pelaku ekonomi. Ini mencakup hukum, aturan, dan regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dan konsumen. Institusi juga memainkan peran dalam mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam sistem ekonomi, seperti antara pemerintah, perusahaan, serikat buruh, dan masyarakat sipil (Kader, 2018).

Selain itu, institusi juga mempengaruhi distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Institusi seperti sistem perpajakan, kebijakan redistribusi, dan program kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam menentukan seberapa merata distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Institusi-institusi ini juga dapat membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014).

Peran institusi juga terlihat dalam membentuk norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku ekonomi. Institusi seperti agama, pendidikan, dan media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang nilai-nilai ekonomi seperti kerja keras, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Norma-norma ini dapat memengaruhi keputusan ekonomi individu dan kelompok, serta membentuk pola-pola konsumsi dan investasi dalam masyarakat. Institusi memiliki peran yang sangat penting dalam sosiologi ekonomi dengan mempengaruhi perilaku ekonomi, distribusi kekayaan, dan dinamika sosial-ekonomi secara keseluruhan. Memahami peran institusi dalam masyarakat adalah kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial yang merata (Sosial et al., 2024).

13.9 Dampak Institusi dan Organisasi terhadap Masyarakat

Institusi dan organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika dan struktur masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks sosiologi ekonomi. Institusi, yang dapat berupa aturan, norma, dan lembaga sosial, serta organisasi yang meliputi

perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, memiliki peran krusial dalam membentuk pola perilaku ekonomi, distribusi kekayaan, dan integrasi sosial (Tampubolon et al., 2016).

Pertama, institusi memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat melalui pembentukan aturan dan regulasi. Aturan-aturan ini menciptakan kerangka kerja yang mengatur aktivitas ekonomi, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu serta kelompok dalam bertransaksi dan berinvestasi. Dalam konteks ekonomi, regulasi seperti kebijakan pajak, peraturan perdagangan, dan perlindungan konsumen memiliki dampak langsung terhadap pola perilaku ekonomi dan distribusi sumber daya (Arifin, 2020).

Selain itu, institusi juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial masyarakat. Lembaga-lembaga seperti keluarga, agama, dan sekolah membentuk nilai-nilai, norma, dan etika yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Alzuhdi Ali, 2022). Norma-norma ini mempengaruhi keputusan ekonomi individu, seperti pilihan pendidikan, pekerjaan, dan konsumsi, serta membentuk solidaritas sosial dan integrasi masyarakat secara keseluruhan.

Organisasi, di sisi lain, memainkan peran dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Perusahaan sebagai organisasi ekonomi utama memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur dalam masyarakat (Halim, 2020). Di sisi lain, organisasi pemerintah dan non-pemerintah memainkan peran dalam penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam keseluruhan, institusi dan organisasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap dinamika dan struktur masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi institusi dan organisasi dalam masyarakat merupakan kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial yang merata (Suryadharma et al., 2023).

13.10 Analisis Organisasi Ekonomi di Indonesia

Analisis organisasi ekonomi di Indonesia menggambarkan kerangka kerja yang kompleks yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam negeri. Di Indonesia, organisasi ekonomi melibatkan peran berbagai entitas, mulai dari sektor swasta hingga pemerintah, serta berbagai organisasi non-pemerintah yang berkontribusi pada pembentukan struktur ekonomi. Sektor swasta Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, telah berkembang pesat dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor seperti perbankan, pertambangan, manufaktur, dan ritel memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global (Esfandiary et al., 2024).

Di samping sektor swasta, peran pemerintah dalam organisasi ekonomi juga sangat signifikan. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi, serta memberikan insentif dan bantuan kepada sektor-sektor tertentu. Kementerian dan lembaga pemerintah terlibat dalam pengembangan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan promosi investasi, yang semuanya berdampak langsung pada struktur ekonomi nasional (Nuryanti & Dewa, 2011).

Selain itu, organisasi non-pemerintah juga memainkan peran penting dalam organisasi ekonomi Indonesia. Lembaga-lembaga ini, termasuk LSM, lembaga penelitian, dan yayasan, sering kali mengisi celah dalam penyediaan layanan sosial, pelatihan, pendidikan, dan pembangunan komunitas yang tidak tercakup oleh sektor swasta atau pemerintah. Kontribusi mereka dalam memperkuat kapasitas masyarakat sipil, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal sangat berarti dalam konteks Indonesia yang beragam (Triono, 2011).

Dalam analisis lebih lanjut, dinamika organisasi ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan global, teknologi, dan tren pasar internasional. Adaptasi terhadap perubahan eksternal ini menjadi penting bagi organisasi ekonomi di Indonesia agar dapat tetap relevan dan kompetitif dalam

skala global. Dapat dikatakan bahwa analisis organisasi ekonomi di Indonesia menggambarkan kerangka kerja yang kompleks yang melibatkan berbagai entitas dari sektor swasta, pemerintah, dan non-pemerintah. Memahami peran dan interaksi antara entitas-entitas ini adalah penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia (Permata et al., 2002).

13.11 Analisis Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

Analisis kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia menggambarkan disparitas yang signifikan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini tercermin dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi di Indonesia.

Awalnya kesenjangan pendapatan menjadi salah satu indikator utama kesenjangan sosial-ekonomi. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin terus membesar. Kelompok kaya cenderung mendapatkan akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan, sementara kelompok miskin sering kali terpinggirkan dari manfaat pertumbuhan ekonomi (Suyanto, 2001).

Kesenjangan akses terhadap layanan dasar juga menjadi perhatian utama. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kesenjangan dalam akses terhadap layanan ini masih sangat terasa. Daerah pedesaan dan perkotaan miskin umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi (Sari et al., 2022).

Selain itu, kesenjangan regional juga menjadi isu serius dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara wilayah-wilayah di Indonesia menghasilkan disparitas pembangunan yang signifikan antara pulau-pulau besar dan daerah terpencil. Daerah-daerah seperti Jawa dan Bali umumnya lebih maju secara ekonomi dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa (Mahardiki & Santoso, 2013).

Faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia meliputi ketimpangan gender, akses terhadap lapangan kerja formal, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya alam.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan partisipasi dan inklusi sosial bagi kelompok yang terpinggirkan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia dapat diatasi secara efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Bisnis et al., 2024).

13.12 Dampak Kesenjangan terhadap Masyarakat dan Ekonomi

Kesenjangan sosial-ekonomi memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, dampak-dampak ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Secara sosial, kesenjangan dapat menghasilkan ketegangan dan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Kesenjangan yang ekstrem dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan kelompok yang terpinggirkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko konflik sosial, ketidakamanan, dan perpecahan sosial (Musyafak & Nisa, 2020). Hal ini dapat menghambat pembangunan sosial yang berkelanjutan dan mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat.

Dari segi ekonomi, kesenjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan pendapatan yang besar dapat menghambat konsumsi dan investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga dapat

menghambat pembangunan modal manusia yang menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hayati, 2023).

Dampak kesenjangan juga terasa dalam ketimpangan keadilan dan hak asasi manusia. Kelompok yang terpinggirkan sering kali mengalami ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidakadilan (Islamiyatur Rokhmah, 2021). Hal ini menciptakan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan inklusi, kesetaraan, dan keadilan.

Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi juga memiliki dampak negatif terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Ketidakpuasan yang disebabkan oleh kesenjangan dapat menciptakan ketegangan politik dan meningkatkan risiko konflik sosial dan politik. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan politik ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan mempengaruhi investasi asing serta kepercayaan pasar, yang semuanya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hasan & Muhammad, 2018).

Kesenjangan sosial-ekonomi memiliki dampak yang serius dan meluas terhadap masyarakat dan ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi dampak-dampak ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada inklusi, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan (Fuadi, 2016).

13.13 Potensi dan Peluang untuk Pembangunan Sosial-Ekonomi Indonesia

Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya alam yang melimpah hingga keberagaman budaya dan demografi yang kaya. Sumber daya alam Indonesia termasuk kekayaan mineral, pertanian yang subur, dan keanekaragaman hayati, merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang

signifikan dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukmana, 2018).

Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dengan keindahan alam, warisan budaya, dan keragaman etnis yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil (Aminuddin & Agussalim Burhanuddin, 2023).

Keberagaman budaya dan demografi Indonesia juga merupakan aset yang penting dalam pembangunan sosial-ekonomi. Memanfaatkan potensi ini melalui promosi seni dan budaya lokal, pengembangan industri kreatif, dan pemberdayaan komunitas lokal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, sambil memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial (Wahyuni & Zudetta, 2019).

Peluang lain terletak dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Indonesia memiliki populasi yang semakin terkoneksi secara digital dan memiliki jumlah pengguna internet yang besar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi (Mukhsin, 2020).

Merealisasikan potensi dan peluang ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur yang mendukung, promosi inovasi dan kewirausahaan, serta perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Arida, 2016). Memanfaatkan potensi dan peluang yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan mengangkat kesejahteraan masyarakatnya menuju tingkat yang lebih tinggi.

13.14 Penutup

Kita telah menjelajahi berbagai aspek sosiologi ekonomi Indonesia. Sosiologi ekonomi Indonesia menawarkan wawasan mendalam tentang kompleksitas dinamika sosial-ekonomi di negara ini. Dalam konteks yang penuh dengan keragaman budaya, demografi, dan geografi, faktor-faktor seperti pembagian kerja, solidaritas sosial, dan peran lembaga memainkan peran krusial dalam membentuk pola perilaku ekonomi dan struktur sosial masyarakat.

Namun, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan serius, termasuk kesenjangan sosial-ekonomi yang meluas. Kesenjangan ini mencakup disparitas pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan pembangunan regional yang tidak merata. Dampaknya terasa dalam bentuk ketidakstabilan sosial, ketimpangan keadilan, dan hambatan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Indonesia sendiri memiliki potensi dan peluang besar untuk meraih pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya dan demografi, serta kemajuan teknologi dan inovasi menawarkan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Guna merealisasikan potensi ini sehingga diperlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi dalam pendidikan, infrastruktur, inovasi, dan perlindungan lingkungan sangat penting untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Demikianlah sehingga sosiologi ekonomi Indonesia tidak hanya merupakan bidang studi yang menarik, tetapi juga merupakan landasan penting bagi pembangunan sosial-ekonomi yang lebih baik dan lebih adil di masa depan, di mana melalui memahami dinamika sosial-ekonomi serta perumusan kebijakan yang tepat dapat membuat Indonesia melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Alzuhdi Ali, P. A. (2022). *Pengaruh Islam Terhadap Lahirnya Lembaga Keagamaan Sosial Dan Politik Di Indonesia*. 1–20. https://id.scribd.com/document/582707073/Kelompok-12-Studi-Islam-Pengaruh-Lahirnya-Lemabaga-Islam-Dan-Politik-Di-Indonesia

Aminuddin, M. A., & Agussalim Burhanuddin. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(4), 157–176. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.607

Area, U. M. (n.d.). *Universitas medan area*. 1–12.

Arida, I. N. S. (2016). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*.

Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, *6*(2). https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372

Bisnis, J. H., Latifah, S. L., Maulana, A. F., Bangsa, U. B., Utara, S., & Sungai, B. (2024). *Penggusuran Rumah di Bantaran Sungai : Tantangan Agraria di Tambakrejo , Semarang Utara*. 1–8.

Cate, T., Granovetter, M., & Swedberg, R. (1993). The Sociology of Economic Life. In *Southern Economic Journal* (Vol. 59, Issue 4). https://doi.org/10.2307/1059747

Dimas Arsy Yanto, Halimah Nur Churil Aini, & Meydina Tri Luvianasari. (2023). Pertukaran Sosial dalam Peran Ganda Perempuan: Studi Kasus tentang Pekerjaan Rumah Tangga dan Karier Profesional. *Jurnal Relasi Publik*, *1*(4), 66–77. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1811

Economists, W. (1990). *Economics and Sociology T H E I R Boundaries :*

Esfandiary, J. K., Liu, F., Nabila, S. P., & Kaki, F. (2024). *Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Saat Terjadinya Covid - 19 Terhadap Laju*

Perekonomi di Indonesia Tahun 2020 - 2022. *8*, 5687–5695.

Faidah, N., Harti, H., & Subroto, W. T. (2018). Pengaruh Pengalaman Ekonomi, Kontrol Diri Serta Pendapatan Siswa Terhadap Perilaku Ekonomi Siswa Sma Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, *6*(1), 59. https://doi.org/10.26740/jepk.v6n1.p59-82

Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *5*(1), 13. https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32

Gunawan. (2020). Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, *1*(2), 157–172. https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39

Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *1| Pembangunan Ekonomi*. http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf

Hayati, N. F. & N. S. P. (2023). Analisis Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan dan Pembangunan di Negera Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, *3*(1), 551–563.

In, T., & Science, S. (2016). Theorizing in Social Science: The Context of Discovery. In *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* (Vol. 45, Issue 3). https://doi.org/10.1177/0094306116641409e

Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Jamaludin, A. N. (2017). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. *Sosiologi Perkotaan*, *2*(2), 474.

Kader, M. A. (2018). Peran Ukm Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia. *JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, *8*(1), 15–32. https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995

Kinseng, R. A. (2021). Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Socio-cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *09*(01), 1–17.

Mahardiki, D., & Santoso, R. P. (2013). ANALISIS PERUBAHAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR PROPINSI DI INDONESIA 2006-2011. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, *6*(2), 103–213.

Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, *5*(2), 157–164. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354

Meka, C. E., Kolianan, J. B., & Ataupah, J. M. (n.d.). *Perspektif sosiologi tentang kepulauan*. 140–149.

Mikraj, A. L., & Wathoni, S. (2023). *Transformasi Sosial di Pedesaan : Dampak Industrialisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo , Indonesia*. *3*(2), 174–183.

Muhammad AmmarNurHandyka. (2023). Muhammad+AmmarNH_Globalisasi+Dalam+Dinamika+Kontemporer+Studi+Kasus+Perubahan+Sosial+Dan+Transformasi+Budaya. *Economy, Technology, Social and Humanities* , *1*(1), 1–6.

Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *Teknokom*, *3*(1), 7–15. https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43

Munir, M., & Zakiyah, E. (2017). Manajemen Perubahan Lembaga Pendidikan Islam Di Era Globalisasi. *J-Mpi*, *2*(2), 114–127. https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5475

Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme*.

Nuryanti, S., & Dewa, K. S. S. (2011). Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Forum penelitian agro ekonomi. 70, 115–128.

Penn, R. (1998). Contemporary Economic Sociology. *Sociology*, *32*(2), 397–399. https://doi.org/10.1177/0038038598032002009

Permata, Sumarto, & Soleh, A. (2002). *Book Chapter; Bengkulu Maju Membangun Indonesia*. Yayasan Corolla Education Centre.

Puspitasari, D. C. (2015). Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *1*(2), 69. https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445

Rahma, T., Lemuel, Y., Fitriana, D., Fanani, T. R. A., & Sekarjati, R. D. L. G. (2022). Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution? *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, *1*(1), 33–118. https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878

Ramdhan, R. M. (2023). *Sosiologi Suatu Pengantar dalam Memahami Ilmu Sosiologi*.

Ridwan, A. M. (2011). *Geliat ekonomi Islam : memangkas kemiskinan, mendorong perubahan*.

Rizani, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, *1*(2), 344–358. https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr

Rochmah, F., Machmud, A., Mufid, M. A., & Kuswoyo, N. A. (2023). Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, *01*(3), 23–40.

Rokhmah, I. (2021). *Akses Pendidikan Perempuan Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. 89. http://www.nber.org/papers/w16019

Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program

Pemerintah dalam Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *4*(1), 1–10.

Sholihah, F. V., & Kinseng, R. A. (2014). *296553934 (1)*.

Sociology, C. (1987). *Swedberg Richard - Economic Sociology_ Past and Present*. https://doi.org/10.1177/001139287035001014

Sosial, K., Seketeng, M., & Kusuma, A. B. (2024). *Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Seketeng Sumbawa Nusa Tenggara Barat*. *3*(1), 39–51.

Sukmana, O. (2018). Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *Sosio Informa*, *4*(3), 488–500. https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1570

Suryadharma, M., Asthiti, A. N. Q., Putro, A. N. S., Rukmana, A. Y., & Mesra, R. (2023). Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif pada Perusahaan Desain Grafis. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, *1*(03), 172–181. https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221

Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, *14*(4), 25–42.

Swedberg, R. (2009). Principles of economic sociology. In *Principles of Economic Sociology*. https://doi.org/10.2307/3323076

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2016). *Birokrasi & Good Governance*. 1–23.

Taylor, W. (2018). Education and the economy. In *Universities, Education and the National Economy*. https://doi.org/10.4324/9780429459269-4

Triono. (2011). Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances. *Jurnal Tapis*, *7*(2), 30–45. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1534

Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, *3*(1), 32–48. http://journal.um-

surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409

Ulya, A., Windah Astuti, R., & Sarifa Aqidatul Islamiyyah, S. (2023). Konsep Dasar IPS dan Implementasinya di Sekolah. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, *8*(2), 225–237. https://doi.org/10.22437/gentala.v8i2.29970

Wahyuni, S., & Zudetta, E. (2019). *Peningkatan sosial Ekonomi melalui Keterampilan Merajut bagi Masyarakat*. 171–176.

Weber, M. (2020). Essays in Economic Sociology. In *Essays in Economic Sociology*. https://doi.org/10.2307/j.ctv1416446

Widyasari, R. (2023). Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Berlandaskan Demokrasi Dan HAM (Studi Kasus : Perpindahan Ibu Kota Provinsi Republik Indonesia). January.

Bab **14**

PERAN EKOWISATA DI PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Andy Kurniawan

14.1 Pulau-Pulau Kecil Indonesia

Konservasi pulau-pulau kecil melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem pesisir sekitarnya. Eksistensi, ketersediaan, dan keberlanjutan sumber daya pesisir, serta keberadaan pulau-pulau kecil dapat memelihara dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat. Kumpulan pulau kecil disebut kepulauan atau archipelago karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati, melindungi lingkungan hidup, menjaga cagar alam, dan mengembangkan ekowisata. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 121 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS '82). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pulau adalah kesatuan dataran yang luas yang terdiri dari ekosistem tida. Pulau juga didefinisikan sebagai suatu daratan alami yang dikelilingi air dan biasanya berada di atas permukaan air saat air pasang.

Karena terdiri dari 10.000 pulau kecil yang terpisah dari pulau-pulau besar, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan alam dan tindakan manusia. Kondisi sosial dan budaya penduduk pulau-pulau ini unik dan beragam. Ekonomi lokal bergantung pada pertumbuhan

ekonomi di luar pulau, di pulau induk dan di daratan. Sebagian orang percaya bahwa ekosistem pulau-pulau kecil di Indonesia, yang memiliki luas kurang dari 2.000 km^2, terdiri dari pulau satu dengan pulau lainnya. Beberapa pulau kecil di Indonesia berada di dekat pulau besar, jauh dari daratan utama, atau berbentuk gugusan pulau kecil. Semua jenis pulau ini membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda, dan ada potensi yang tersembunyi di balik pulau-pulau kecil ini (Bengen dan Retraubun 2006).

Sebuah pulau dinilai berdasarkan dua ukuran: luasnya dan populasinya. Pulau kecil terdiri dari pulau kontinental, pulau karang, dan pulau vulkanik. Kondisi lingkungan biofisik setiap pulau harus dipertimbangkan saat mempelajari dan mendefinisikan pengelolaan berkelanjutan. Evolusi model area tinggal pulau kecil berdasarkan aktivitas dan kondisi biofisik Ketika industri perikanan berkembang, tipologi pulau kecil membentuk pola kawasan tinggal yang mungkin untuk masyarakat nelayan. Upaya untuk membuat konsep untuk pengelolaan dan pembangunan pulau kecil dengan melibatkan kelompok orang dikenal sebagai perancangan ekowisata pesisir.

Pengembangan kelembagaan masyarakat dan tata kelola sumber daya adalah satu sama lain. Kelembagaan adalah kumpulan peluang yang memungkinkan individu dan kelompok individu untuk melakukan kegiatan dan membuat keputusan. Masyarakat harus memahami apa artinya mengembangkan dan mengelola ekowisata di pulau-pulau kecil dan apa hasilnya. Faktor internal dan eksternal berkontribusi pada strategi pembangunan kegiatan pariwisata nasional. Faktor internal berkaitan dengan manajemen dan strategi daya tarik objek wisata dari segi layanan, teknis, dan promosi; sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan dukungan kebijakan pemerintah Indonesia dan kondisi keamanan yang mendukung kegiatan pariwisata. Karena perbedaan situasi dan karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya pesisir, pengelolaan sumber daya di setiap lokasi berbeda. Konsep sistem pengelolaan dan pengembangan ekowisata dibangun secara bertahap, dimulai dengan mengidentifikasi keadaan fisik wilayah, potensi sumber daya pesisir dan jasa lingkungan, dan konflik tenurial dan sosial.

14.2 Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar mengubah jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar, seperti yang dijelaskan dalam peraturan ini:

1. Aceh terdapat Pulau Bateeleblah, Pulau Rusa, Pulau Raya, Pulau Rondo, Pulau Simeulue Cut, Pulau Salaut Besar dan Pulau Weh.
2. Sumatera Barat terdapat Pulau Pagai Utara, Pulau Niau dan Pulau Sibaru-baru.
3. Sumatera Utara terdapat Pulau Simuk, Pulau Wunga dan Pulau Berhala.
4. Bengkulu terdapat Pulau Enggano dan Pulau Mega.
5. Riau terdapat Pulau Batumandi, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan Pulau Rangsang
6. Pulau-pulau di Kepulauan Riau terdiri dari Pulau Batuberantai, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Damar, Pulau Karimun Anak, Pulau Kepala, Pulau Malang Berdaun, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Putri, Pulau Sentut, Pulau Tokong Malang Biri, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senu.
7. Lampung terdapat Pulau Bertuah (Pulau Batu kecil).
8. Kalimantan Utara terdapat Pulau Sebatik dan Karang Unarang.
9. Kalimantan Timur terdapat Pulau Sambit dan Pulau Maratua.
10. Banten terdapat Pulau Deli, Pulau Guhakolak dan Pulau Karangpabayang
11. Jawa Timur terdapat Pulau Panikan, Pulau Nusabarong (Pulau Barong) dan Pulau Ngekel (Pulau Sekel)
12. Jawa Tengah terdapat Pulau Nusakambangan.
13. Jawa Barat terdapat Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok
14. Bali terdapat Pulau Nusa Penida.
15. Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, Pulau Mangudu.

16. Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa).
17. Sulawesi Tengah terdapat Pulau Lingian, Pulau Dolangan, Pulau Solando.
18. Sulawesi Utara terdapat Pulau Batuwaikang, Pulau Bongkil (Pulau Bangkit), Pulau Makalehi, Pulau Mantehage (Pulau Manterawu), Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kawaluso, Pulau Kakorotan, Pulau Kawio dan Pulau Kabaruan.
19. Maluku Utara terdapat dari Pulau Yiew Besar.
20. Ada sejumlah pulau di Maluku, yaitu Pulau Ararkula, Pulau Batugoyang, Pulau Batarkusu, Pulau Enu, Pulau Karerei (Pulau Karaweira Besar), Pulau Kisar, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Larat, Pulau Lirang, Pulau Letti, Pulau Marsela, Pulau Metimarang, Pulau Nuhuyut (Pulau Kei Besar), Pulau Penambulai, Pulau Sutubun, Pulau Selaru, dan Pula.
21. Pulau Bras, Pulau Befondi, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Habe, Pulau Komolom, Pulau Kolepom, Pulau Moff (Pulau Budd), Pulau Miossu, Pulau Puriri, Pulau Liki, dan Pulau Laag terletak di Papua Barat.

14.3 Potensi Kawasan Pulau-Pulau Kecil

Pulau kecil terletak pada kawasan yang strategis dari pandangan keamanan, pertahanan dan ekonomi. Pulau kecil memiliki ekosistem tropis yang unik dengan produktivitas hayati dan sumberdaya hayati yang tinggi. Sehingga, dapat menjadi daya dukung bagi pulau-pulau kecil. Sumberdaya hayati pulau kecil meliputi terumbu karang, padang lamun dan hutan Mangrove dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terumbu karang. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung termasuk tempat tinggal bagi sumber daya peternak, pariwisata, batu karang, fasilitas penelitian, serta adanya pemanfaatan biota yang berada di perairan tersebut. Manfaat tidak langsung termasuk mencegah abrasi dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Wisata bahari dan diving, serta berbagai biota berkhasiat sebagai obat karena senyawa bioaktifnya, makanan, dan kosmetik, terumbu karang dapat menjadi

sumber devisa negara. Selain itu, terumbu karang menarik untuk objek penelitian para ahli, mahasiswa dan perusahaan farmasi.

2. Lamun (*Seagrass*). *Seagrass* secara ekologis merupakan tempat mencari makan, berfungsi sebagai tempat berlindung, berkembang biak dan memijah, mengendapkan sedimen, dan dapat menstabilkan substrat yang lunak melalui metode perakaran yang kuat. Biota laut saat tumbuh dewasa berperan sebagai pelindung hamparan padang lamun dari cahaya matahari, dimana padang lamun bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata, budidaya tiram, kerang, ikan hias dan sumber nutrisi seperti pupuk hijau.
3. Hutan Mangrove. Secara ekologis, bahwa hutan mangrove berfungsi sebagai perlindungan terhadap abrasi, tsunami, dan angin taufan, penyerap cairan limbah berbahaya, mencegah air laut masuk, dan memberikan nutrisi kepada biota perairan. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi sebagai tempat pemijahan dan asuhan berbagai biota mangrove. Secara tidak langsung, mangrove bermanfaat sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis binatang melata dan hewan lain, termasuk ikan, kepiting, dan udang. Selain itu, hutan mangrove menguntungkan industri obat-obatan dan kayu. Potensi alam berupa sumberdaya non hayati yang berada di pulau - pulau kecil cukup besar diantaranya:
    a) Pertambangan. Hasil perkiraan berdasarkan komposisi geologi dan batuan di pulau kecil di Indonesia itu banyak terkandung material tambang berupa jenis mineral berharga berupa emas, nikel, dan mangan. Beberapa pulau kecil mempraktikan penambangan di provinsi-provinsi tertentu di dunia maupun di Indonesia. Berbagai kegiatan penambangan berada pada tahap identifikasi, eksplorasi maupun eksploitasi. Eksploitasi timah yang berada di Pulau Kundur serta Pulau Karimun, Provinsi Riau. Eksploitasi Nikel di Pulau Gag Provinsi Papua, Nikel juga terdapat di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, serta biji besi di Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, ada juga nikel di Pulau Pakal Provinsi Maluku; di Pulau Laut dan Pulau Sebuku, Provinsi Kalimantan Selatan penghasil batubara; di Pulau Wetar, Pulau Haruku Provinsi Maluku terdapat tambang emas dan di Pulau Natuna, Provinsi Riau penghasil migas.

b) Energi Kelautan. Energi kelautan mempunyai kans menghasilkan energi alternatif sebagai upaya mengantisipasi terbatasnya batubara, LNG, batubara, serta minyak bumi, luas daratan lebih kecil dari luasnya lautan. Selama negara mampu mengarahkan dan memanfaatkannya maka sumberdaya kelautan (seperti ombak, pasang surut, panas bumi (*geothermal*). Demikian juga Konversi Energi Panas Samudera atau disebut juga Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) secara pemanfaatannya untuk mengelola wilayah yang jauh dari perkotaan terutama yang sulit akses transportasi seperti pulau-pulau kecil dan terluar.

14.4 Jasa Lingkungan Ekonomi Tinggi

Pulau-pulau kecil memiliki peran penting terutama disektor jasa lingkungan dengan memberikan nilai tambah seperti menjadi tempat untuk pariwisataan, area rekreasi, konservasi, sarana komunikasi dan pemanfaatan lain. Terdapat beragam tawaran dalam meningkatkan sektor pariwisata yang bisa dikembangkan di daerah kepulauan terutama wisata bahari, pariwisata budaya dan pariwisata teresterial.

1. Pariwisata Bahari. Kawasan yang berada di pulau-pulau kecil merupakan modal bagi pengembangan pariwisata berbasis wisata laut. Karakterisitk dan potensi geologis berhubungan dengan kawasan terumbu karang (*coral reef*), khususnya jenis *hard corals*. Keaslian dan keindahan dari *biodiversity* menyajikan suasana tersendiri di kawasan pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk sedikit bahkan tidak berpenghuni. Rating kawasan wisata bahari pulau kecil dengan daya tarik yang potensial di Indonesia berdasarkan survei Lembaga kepariwisataan internasional mempunyai *rating* tertinggi dibandingan kawasan lainnya yang ada di dunia.
2. Pariwisata Terestrial. Wisata terestial merupakan satu kesatuan wisata bahari. Wisata terestrial sebagai *world herritage site* (situs warisan dunia) dengan daya dukung sebagai habitat kehidupan hewan komodo yang merupakan wilayah yang telah masuk dalam keajaiban dunia dan potensi perairan lautnya di Pulau Rinca dan

Pulau Komodo pada wilayah TN Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Contoh lain adalah Pulau Moyo sebagai Taman Buru (TB) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat). TB Pulau Moyo memiliki kawasan hutan dengan pemandangan yang menarik serta keberadaan kawasan wisata bahari (*diving*) dan kawasan wisata berburu. Pengusaha pariwisata memanfaatkan kondisi Pulau Moyo sebagai Ekowisata Terestrial, terdapat resort dengan tarif yang relatif mahal fasilitas beserta failitas tenda-tenda untuk wisata *Glam camping*. Saat ini kawasan Pulau Moyo merupakan kawasan wisata alam yang sudah dikenal luas oleh turis asing sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan/devisa bagi negara.

3. Pariwisata Budaya. Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam dinamika ekosistem pulau kecil, karena interaksi jangka panjang mereka telah membentuk identitas pulau tersebut. Kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah mengakar dan kekayaan budaya sangat disukai dan dihargai oleh wisatawan sehingga memiliki nilai komoditas wisata, salah satu contoh objek wisata kultural yaitu Pulau Lembata yang menawarkan pengalaman wisata budaya menawan. Ada juga tradisi heroik yaitu sebagai perburuan ikan paus yang dilakukan secara tradisional (*traditional whales hunter*) yang biasa dilakukan oleh warga suku Lamalera yang berada di Pulau Lembata. Praktik luar biasa ini disertai dengan ritual-ritual budaya yang sangat unik. Suku Lamalera menjadi sebagai satu-satunya penjaga warisan budaya, tradisi dan kearifan lokalnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis baik domestik maupun mancanegara untuk melihat keunikan budaya dan kearifan tradisional suku Lamalera.

14.5 Permasalahan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil

Tantangan praktik pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil dari segi ekologi menghadapi yaitu penurunan mutu lingkungan seperti kerusakan ekosistem, pencemaran dan *overfishing* (penangkapan ikan yang berlebihan) serta kurangnya aksessibilitas dan konflik masyarakat lokal. Pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil seharusnya dikerjakan secara terpadu dan menyeluruh, harapan bahwa asas dan konsep dasar dalam mengelola kawasan pulau kecil sebagai arahan nasional dalam

memajukan dan kemaslahatan pulau-pulau kecil, semua merupakan faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis daerah pulau-pulau kecil. Permasalahannya antara lain:

1. Dampak UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perairan karena tidak lagi ada perbedaan antara pemerintah kabupaten/kota dan propinsi. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil karena ada dua rancangan untuk ekosistem pulau-pulau kecil: provinsi menangani perairan, sedangkan kabupaten menangani daratan.
2. Pulau-pulau kecil memerlukan perhatian khusus bagi masyarakat. Beberapa persoalan pelik dan dinamis yang membatasi masyarakat kepulauan yaitu :
   a) Sebagai prioritas utama pembangunan, tidak ada data dan informasi yang komprehensif dan akurat tentang pulau kecil. Pada dasarnya, pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia bergantung pada informasi yang lengkap dan akurat. Proses perencanaan akan sangat terhambat jika hal ini terus dibiarkan.

   b) Belum adanya ketentuan operasional yang dapat mengakomodasi eksistensi pulau-pulau kecil secara komprhensif. Sehingga sering terjadi multitafsir, asimetris dan perdebatan informasi tentang pulau-pulau kecil serta perbedaan pandangan yang berpengaruh terhadap intrusi pemerintah dan lembaga dalam hal sumberdaya manusia, ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta kolaborasi dalam mendorong pembangunan pulau-pulau kecil.

   c) Sebagai bagian dari ekosistem global, warga juga menghadapi risiko ekologis seperti *climate change*, kenaikan permukaan laut, degradasi/deforestasi dan perubahan suhu ekstrim juga ikut mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi penduduk pulau yang memiliki ruang gerak terbatas.

   d) Intimidasi geopolitik dan perlunya perlindungan keamanan terhadap penduduk pulau karena wilayahnya jauh dan berada pada pulau terluar di wilayah Indonesia yang tidak memadai untuk pembangunan dan layanan. Penduduk pulau terpaksa hidup dalam batasan, seringkali mendapatkan bantuan sosial dari

negara lain yang berdekatan. sehingga ada keprihatinan bahwa rasa nasionalisme penduduk pulau yang selama ini kurang mendapatkan perhatian akan semakin terkikis jika keadaan ini terus berlanjut.

e) Ketimpangan distribusi ekspansi yang menitikberatkan pada pendekatan *mindland* sehingga berdampak pada nasib penduduk kepulauan. Jika distribusi pembangunan masih mengutamakan luas daratan dan lebih sedikit luas perairan maka akan terjadinya perbedaan pertumbuhan wilayah kepulauan.

f) Pengelolaan pulau-pulau kecil, alasan estimasi regional, cakupan pengaruh ekologi, sosial dan ekonomi serta kemampuan ekosistem untuk mendukung praktik pembangunan harus menjadi dasar rancangan yang harus diikuti. Namun, dalam kenyataannya, pertimbangan ini tidak diperhatikan dalam pembangunan pulau-pulau kecil. Alasan lain untuk melanggar peraturan pemerintah yang bersifat restriktif adalah pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, sistem sosial penduduk pulau kecil akan terganggu selain menimbulkan kerusakan ekologis.

Untuk memastikan bahwa negara tetap utuh dan berdaulat, pulau-pulau kecil harus memiliki kapasitas dan potensi yang strategis untuk memastikan bahwa pembangunan terus berlanjut. Ini terjadi dalam berbagai bidang seperti pariwisata, transportasi laut, pertambangan, energi, jasa lingkungan, dan pertahanan. Penduduk pulau harus menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat kekayaan alam perikanan, wisata bahari, transportasi laut, dan minyak. Dimulainya pengelolaan pulau-pulau kecil akan menyebabkan banyak perubahan dan risiko di bidang ekologi, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan politik internasional dan nasional. Tata kelola pulau-pulau kecil harus terkoordinasi dan seimbang. Prinsip integrasi, dimana semua pihak bekerja sama untuk memastikan fungsi manajemen, tanggung jawab dan hak, tata kelola wilayah pulau-pulau kecil secara adil, harus menjadi dasar kebijakan dan strategi nasional untuk menangani isu-isu penting.

14.6 Strategi Pegelolaan Pulau-Pulau Kecil

Strategi yang digunakan dalam mengelola pulau-pulau kecil berdasarkan kajian Bappenas antara lain :

1. Mengintegrasikan kepentingan untuk memanifestasikan keterpaduan aspek politik, hankam, kelembangan, sosial, ekonomi dan budaya. Misalnya: pariwisata, aspek perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian, pemukiman, perhubungan dan lain-lain. Sehingga, tata kelola sumberdaya pesisir pulau-pulau kecil komprehensif/menyeluruh dari segi pembangunan hingga terwujudnya suatu mekanisme pengelolaan berkelanjutan yang optimal.
2. Keberhasilan pengelolaan pulau-pulau kecil bergantung pada peningkatan kemampuan stakeholder dengan memiliki kualitas SDM berupa SDM dengan strata formal dan non-formal. Membangun dan memperkuat kelembagaan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan dunia usaha diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan dari peningkatan kelembagaan pemerintah daerah adalah untuk mendorong kerjasama yang lebih baik lagi.
3. Untuk menyediakan data dasar pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai lembaga daerah dan pusat, basis data (database) harus dikategorikan dan disusun berdasarkan ruang (pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil). Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian adalah semua bagian dari penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Maka, perlunya kerjasama dalam mengumpulkan dan menginventarisasi data serta informasi dalam bentuk data dasar. Data yang akurat tentang pengendalian dan pengelolaan pulau-pulau kecil dapat membantu pemanfaatan sumberdaya di pulau-pulau kecil secara efektif. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan konsep alokasi dan pemanfaatan sumberdaya dengan menggabungkan semua kepentingan yang saling berpengaruh pada ekosistem di darat, pesisir, dan laut.
4. Rencana tata kelola pulau-pulau kecil disusun berdasarkan sumberdaya lokal sesuai hukum adat atau kearifan lokal masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat adalah tujuan utama tata kelola pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya lokal yang mungkin. Ini akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia.

5. Sarana dan prasarana ditata dan dikembangkan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
6. Masyarakat pulau-pulau kecil harus lebih terlibat dan memiliki akses yang lebih besar ke modal, informasi, manajemen pemasaran, dan teknologi. Keikutsertaan masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan sangat penting. agar pemerintahan pulau kecil dapat diterima dan demokratis. Akses informasi dan teknologi yang terisolasi akibat kekurangan sarana komunikasi dan transportasi merupakan masalah besar bagi pengelolaan pulau kecil. Karena itu, pembangunan sarpras yang memadai diperlukan untuk kemajuan teknologi dan informasi yang dapat diakses masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong investasi modal dan pemasaran di pulau-pulau kecil.
7. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM secara terpadu dan berkelanjutan untuk kepentingan pertahanan negara. Untuk mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan yang dinamis, pembangunan wilayah dan kualitas SDM harus disesuaikan. Sumber daya manusia (SDM) seperti polisi, pemerintah, guru sekolah, dan tokon agama dan adat menerima pelatihan melalui pendidikan formal dan non-formal, termasuk pelatihan dan pendampingan masyarakat.
8. Menginventarisasi, menyelidiki, mengelola, dan mengembangkan wilayah konservasi. Pulau-pulau kecil memiliki speies endemik, ekosistem yang berbeda, dan potensi daya tarik sumber daya alam. Namun, memiliki risiko lingkungan yang besar dan daya dukung pulau yang rendah. sebagai akibatnya sangat mudah terpengaruh oleh perubahan yang dilakukan oleh manusia atau alam. Oleh karena itu, untuk menjaga ekosistem yang unik, inventaris dan penelitian penting untuk menentukan lokasi konservasi baru. Kajian nasional

tentang pentingnya pembangunan kawasan konservasi harus mempertimbangkan perbedaan alamiah biofisik dan peran biologis dari berbagai kondisi perairan yang merupakan bagian dari kawasan ekologis (ekoregion).

9. Menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan untuk investasi dan usaha. Investasi di pulau-pulau kecil adalah salah satu cara untuk meningkatkan peran sektor kelautan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan yang menentukan investasi, tingkat pengembalian sosial, dan penyerapan tenaga kerja memengaruhi investasi dari perspektif ekonomi makro. Untuk mendorong ekonomi lokal, pembangunan pulau-pulau kecil membutuhkan produk yang dapat diterima di pasar regional, nasional, dan lokal. Selain itu, diperlukan juga dukungan investasi, termasuk infrastruktur, kemudahan administrasi, kejelasan hukum, dan jaminan kelayakan investasi.

Strategi Khusus yang ditemukan dalam kajian Bappenas secara geografis, Karena keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas, pulau-pulau kecil rata-rata dianggap sebagai kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Tengah). Tipologi menentukan strategi khusus. Sektor Perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan, kepariwisataan, industri dan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, energi, dan sumber daya mineral adalah beberapa industri yang dapat berkembang di wilayah ini. Strategi untuk mengatasi pengembangan ekonomi termasuk:

1. Pengelolaan Potensi Pariwisata: Pulau-pulau kecil dengan sumber daya laut yang indah memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata seperti yachting, diving, surfing, fishing, dan cruise, serta pariwisata alam laut. Pulau-pulau kecil juga memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata darat atau wisata daratan. Ini menarik bagi wisatawan karena pulau-pulau kecil ini sangat sunyi dan udaranya bersih bahkan tanpa penduduk. Tempat itu juga memiliki banyak spesies flora dan fauna lokal. Pariwisata menggunakan pendekatan ekosistem untuk mendorong masyarakat lokal, mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara ramah lingkungan, dan

mempertimbangkan peran ekonomi, fungsi ekologi, dan potensi sumber daya pulau kecil.

2. Industri dan perdagangan di pulau-pulau kecil dipengaruhi oleh jenis usaha, skala ekonomi, daya dukung kawasan, ketersediaan sumber daya lokal, kualitas dan jumlah sumber daya manusia, dampak lingkungan, sistem pemasaran regional dan lokal, dan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung. Ini diharapkan dapat meningkatkan basis ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi disparitas antar pelaku dan wilayah. untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, integritas wilayah NKRI, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Perhubungan dan Telekomunikasi: Sektor perhubungan dan telekomunikasi membantu menyatukan negara kepulauan dan berkontribusi pada kebijakan riil yang berkaitan dengan transportasi dan telekomunikasi karena merupakan bagian penting dari kehidupan nasional dan internasional.
4. Manajemen energi dan sumber daya mineral (ESDM) Sektor sumber daya alam (ESDM) yang beroperasi di wilayah terpencil, termasuk pulau-pulau kecil, berfungsi sebagai katalisator utama untuk pembangunan, karena membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan peluang usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep pembangunan berkelanjutan berarti mengubah sumber daya tidak terbarukan menjadi sumber daya terbarukan yang lestari, dengan mengubah sumber daya tidak terbarukan menjadi sumber daya terbarukan yang lestari.
5. Mengembangkan potensi di bidang peternakan dan pertanian. Berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor pertanian dan sektor peternakan yang lestari di pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan mempertimbangkan sarana pendukung. Untuk mencapai tujuan ini, tanah diolah dan ternak dipelihara sehingga tidak memengaruhi kualitas air di sekitarnya. Proses penangkapan dan budidaya ikan laut yang beragam harus dikembangkan.

Pulau-pulau kecil memiliki sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar jika dikelola dengan benar. Namun, jika tidak ada pengawasan, kerusakan lingkungan

akan terjadi baik di daratan maupun di laut. Kerusakan di daratan dapat mengancam habitat fauna dan flora, terutama yang endemik dan terancam punah. Kerusakan di laut dapat menyebabkan kemiskinan di desa nelayan karena pencemaran, penangkapan ikan yang merusak, dan faktor lainnya.

14.7 Ekowisata Penopang Ekonomi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, alam, flora, dan fauna adalah sumber daya dan modal bangsa Indonesia, bersama dengan warisan sejarah, seni, dan budaya. Menurut Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, Salah satu pariwisata alternatif yaitu Ekowisata. Ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan lokal ("*responsible travel to natural greathat conserves the environtment and improves the well-being of local people*". Definisi ini menunjukkan bahwa ekowisata dapat dipandang dari 3 (tiga) perspektif, yaitu ekowisata sebagai produk, ekowisata sebagai pasar dan ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Ekowisata sebagai produk artinya semua atraksi yang didasarkan pada sumberdaya alam yang ada secara alami (bukan buatan).

Ekowisata merupakan salah satu cara menggabungkan kebijakan dan ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan wilayah yang terdapat masyarakat lokal. Pengaruh kegiatan ekowisata terhadap lingkungan cukup besar dari faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan sebagai satu kesatuan ekosistem wisata. Manfaat ekowisata yaitu keanekaragaman hayati terjaga, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, menghasilkan dana konservasi lingkungan, angka kemiskinan berkurang dan menyerap tenaga kerja lokal.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beraneka ragam sumberdaya alam dan budaya yang dapat menjadi unggul dalam industri pariwisata. Pariwisata sebagai sektor unggulan perekonomian Indonesia mampu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa suatu negara, memberikan kesempatan usaha, serta mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

14.8 Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah fokus pada lingkup Penyertaan Modal Negara (PMN). Salah satu program pemerintah secara khusus yang mendukung BUMN yang terkena dampak COVID-19 dengan memberikan PMN untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Sektor pariwisata, perumahan, dan padat karya adalah beberapa yang mendapatkan anggaran tambahan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan satuan dalam pendapatan pariwisata. Dengan demikian, pendapatan di seluruh sektor perekonomian nasional meningkat.

Sejak penyebaran COVID-19 di seluruh negara, sektor pariwisata sangat terdampak karena adanya pembatasan ruang gerak wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata, pengurangan akomodasi dan penerapan kebijakan penahanan di beberapa negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), kunjungan wisatawan asing di Maret 2020 turun hingga 45,50% dibandingkan Februari 2020 dan 64,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, setelah ditemukan vaksin, sektor ini mungkin berkembang pesat. Pendapatan negara dari turis antara tahun 1995 dan 2018 ditunjukkan pada Gambar 14.8 Walaupun angka-angkanya berubah-ubah dari tahun 1995 hingga 2008, industri pariwisata Indonesia meningkat dari tahun 2009 hingga 2018. Pada tahun 2017, World Bank mencatat kunjungan wisatawan sebesar 14,69 miliar dolar, dan pada tahun 2018, mereka meningkat menjadi 15,6 miliar dolar. Setelah minyak sawit mentah, pariwisata adalah penghasil devisa terbesar kedua.

Indonesia, negara kepulauan dengan berbagai suku, memiliki sejarah, makanan, dan tempat wisata yang menarik. Setiap tempat memiliki atraksi alam, makanan, dan budaya yang unik. Budaya di setiap pulau Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua sangat berbeda. Pulau Bali sekarang dikenal di seluruh dunia. Meskipun begitu, tempat wisata lain mulai berkembang, dan sepuluh tempat wisata utama telah ditetapkan oleh pemerintah. Paket wisata seperti wisata alam, budaya, dan kuliner dapat digabungkan dengan kearifan budaya Indonesia. Indonesia menarik wisatawan karena keragamannya.

Berikut disajikan **Gambar 14.1** Pendapatan (dalam US$) sektor pariwisata nasional pada tahun 1995-2018, yaitu :

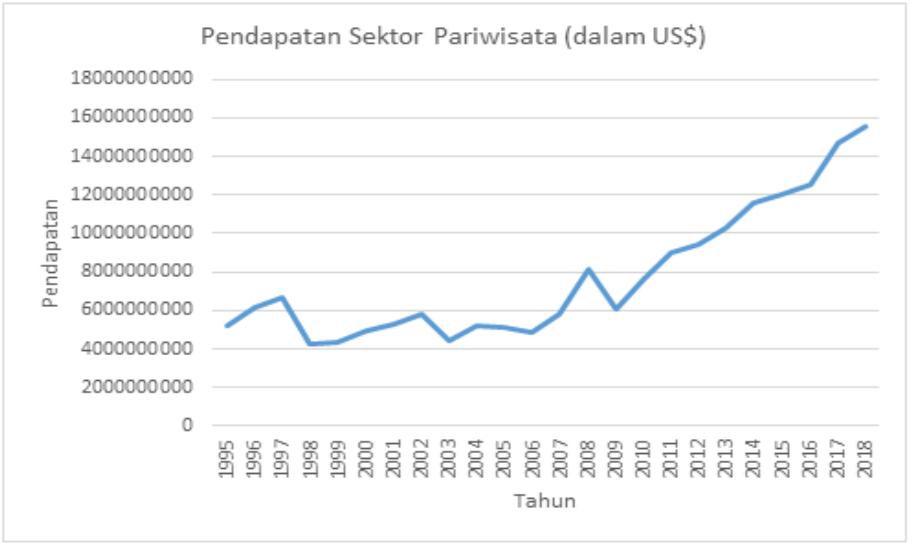

Gambar 14.1. Pendapatan Sektor Pariwisata Nasional
(Sumber: World Bank, 2019 *dalam* Tanaya, 2020)

Industri pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di Pantai Bara, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mencakup atraksi wisata, transportasi, pelayanan perjalanan, fasilitas rekreasi, restoran, penginapan, dan pengembangan destinasi wisata. Mayoritas pemilik penginapan adalah WNA. Walau bagaimanapun, penduduk lokal berkontribusi pada pembangunan kawasan wisata dengan menawarkan paket wisata dan menyewakan alat selam. Data menunjukkan bahwa investasi asing mendominasi sektor pariwisata Indonesia sebesar 77%, dengan pertumbuhan rata-rata 35,5% dari tahun 2015 hingga 2017. Investasi terbesar sebesar 55% terjadi di Jakarta, Bali, dan Jawa Barat selama periode ini, dengan pendapatan sektor pariwisata terus meningkat sejak tahun 2009 (LPEM FEB UI, 2018 *dalam* Tanaya, 2020). Pemerintah ingin mendiversifikasi pendapatan negara dengan mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Namun, pendapatan pajak penghasilan migas selalu berubah. Ini karena jumlah lifiting dan harga minyak di seluruh dunia

sangat memengaruhi pendapatan migas. Minyak juga merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Selama jumlah cadangan minyak bumi yang tersedia masih ada dan ada penemuan cadangan baru, pendapatan pajak minyak tetap aman. Ini berlaku selama harga minyak dunia stabil atau naik.

Daftar Pustaka

Bengen DG, Retraubun ASW. 2006. Menguak Realitas Eko-Sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P42L). Bogor.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 mencapai 470,90 ribu kunjungan. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/05/04/1714/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-maret-2020-mencapai-470-90-ribu-kunjungan-.html.

Tanaya, S.A. (2020). Peran DJKN dalam Pengembangan Sektor Pariwisata. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/13335/Peran-DJKN-dalam-Pengembangan-Sektor-Pariwisata.html.

UU [Undang-undang]. 1990. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

UU [Undang-Undang]No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU [Undang-Undang] No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU [Undang-Undang] Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

UU [Undang-Undang] No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sumber Bahan Bacaan

Adrianto L. 2004. Pembangunan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan. PKSPL IPB. Bogor

Andiny, P., dan S. Safuridar. 2019. Peran Ekowisata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Hutan Mangrove Kuala Langsa). Niagawan.Vol. 8(2), pp: 113-120.

Baksir A. 2010. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil untuk Pemanfaatan Ekowisata Berkelanjutan di Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku

Utara. [DISERTASI]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor

Bengen DG. 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB. Bogor.

Bengen DG. 2004. Sinopsis Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB. Bogor.

Damanik J, Weber HF. 2006. Perencanaan Ekowisata. Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM dan ANDI. Yogyakarta

Dewi RK. 2012. Pengelolaan Ekosistem Lamun Kawasan Wisata Pantai Sanur Kota Denpasar Provinsi Bali. [TESIS]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hanan, A. dan F. Rahmawati. 2020. Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 2(1), pp:98-120.

Kepmen LH [Keputusan Menteri Lingkungan Hidup] Nomor 201 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta [KepPres] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Nikijuluw VPH. 2001. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. [Prosiding], Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Parmawati, R., Hardyansah, R., E. Pangestuti, Hakim, L. 2022. Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat. UB Press, Malang. Pattiwael, M.2018. Konsep Pengembangan Ekowisata Berbasis KOnservasi Di Kampung Malagufuk Kabupaten Sorong. J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community).Vol. 1(1), pp:42-54

Pramono, R., D. M. Lemy, L. Soemarni., A. Pramezwary, dan Y. Kristiana. 2019. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat.Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR).2., pp:1471-1477.

Permen [Peraturan Menteri] Kehutanan. 2004. Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. No. P-03/MENHUT-V/2004. Jakarta PerMen [Peraturan Menteri] Kehutanan No.3 Tahun 2008 tentang Hutan Desa

Sammeng AM. 1995. Kebijakan dan Langkah-Langkah Strategis Pengembangan Ekoturisme. [PROSIDING]. Seminar Pengembangan Ekoturisme Indonesia, Bogor

Susilo SB. 2003. Kerberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Studi Kasus Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. [DISERTASI]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Bab 15

HILIRISASI HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Aqshan Shadikin Nurdin

15.1 Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemanfaatan sumber daya hutan tidak terbatas pada produksi kayu namun juga hasil hutan bukan kayu. Selain itu, pemanfaatan lainnya diperlukan seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga hutan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam hutan lindung merupakan bentuk kegiatan mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan telah diatur dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 (1999). Kemudian dari itu, negara juga mengatur pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam Permen LHK Nomor 77 tahun 2019 (2019).

Pengelompokan hasil hutan terbagi atas dua kategori yaitu hasil hutan kayu dan hasil non hutan kayu. Pengelompokan tersebut penting untuk tujuan manajemen sumber daya alam, perencanaan kehutanan, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Hal ini membantu dalam pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan terhadap kompenen sumberdaya alam yang tersedia di hutan. Permenhut No. 35 / MenhutII/2007 (2007), menjelaskan pengertian dari hasil hutan non kayu adalah hasil hutan hayati, dan turunannya yang berasal dari hutan.

HHBK adalah istilah yang merujuk kepada berbagai produk dan bahan yang dihasilkan dari hutan atau lingkungan yang terkait dengan hutan, selain dari kayu. Definisi ini meliputi bahan-bahan yang berasal dari flora dan fauna hutan yang tidak termasuk dalam kategori kayu, namun memiliki nilai ekonomi, sosial, atau lingkungan. (Hazari, *et al*, 2023). Kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka pengembangan dan peningkatan produksi HHBK di tuangkan dalam Permenhut No. 35/Menhut-II/2007 (2007). Mengenai HHBK, kemudian Permen No. 19/Menhut-II/2009 (2009) mengenai Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional, dan Permen No. 21/Menhut II/2009 (2009) Tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Jenis Unggul Hasil Hutan Bukan Kayu, dan selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 (2020) tentang cipta kerja dan terakhir PP No. 23 Tahun 2021 (2021) mengenai Praktik Kehutanan yang menjelaskan tentang multiusaha kehutanan termasuk pemanfaatan dan pemungutan HHBK (Kurniati, *et al*, 2023).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah bagian penting dari ekosistem hutan yang memiliki peran yang signifikan terhadap lingkungan dan manusia. Nilai ekonomi HHBK juga sangat besar, dan produk-produk ini sering menjadi sumber pendapatan utama bagi komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan atau bergantung pada sumber daya hutan karena hampir semua bagian dari produk dapat memberikan manfaat keuangan yang dapat digunakan (Suhendi, *et al*, 2023). HHBK juga dapat mencakup hasil-hasil dari kegiatan hutan yang berkelanjutan, seperti agroforestri, pengelolaan hutan tradisional, dan praktek-praktek pertanian yang terintegrasi dengan hutan termasuk produk-produk yang ditanam atau dikumpulkan dari kawasan hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Definisi HHBK menyoroti keberagaman sumber daya hayati yang berada di hutan sehingga penting memanfaatkannya secara bijaksana. Hal ini juga menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan ekologi dan melindungi keanekaragaman hayati hutan ketika memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

Beberapa komponen yang digunakan dalam mendefinisikan nomenklatur dari HHBK di antaranya *Non Wood Forest Products (NWFP)*, *Non Timber Forest Products* (NTFPs), Multi Use Forest Produce (MUFP).

FAO dalam menerjemahkan HHBK sebagai produk hayati yang tidak termasuk kayu diperoleh dari dalam dan luar kawasan hutan. HHBK juga dapat berupa produk yang diperoleh dari alam atau yang dihasilkan hutan tanaman, berikut beberapa produk dari hasil hutan bukan kayu:

1. Buah-buahan Hutan seperti buah beri, buah nangka, buah rambutan, dan buah-buahan liar lainnya yang tumbuh di hutan.
2. Sayuran dan Umbi-umbian termasuk sayuran liar seperti rebung, daun singkong, dan umbi-umbian seperti ubi kayu.
3. Tanaman Obat-obatan seperti akar ginseng, tanaman herbal, dan tanaman obat tradisional lainnya yang diambil dari hutan.
4. Jamur yang tumbuh di hutan dan memiliki nilai ekonomi, seperti jamur matsutake.
5. Rotan dan Bambu merupakan baku penting untuk kerajinan dan konstruksi yang diperoleh dari hutan.
6. Madu dan produk madu liar yang diproduksi oleh lebah liar, propolis, lilin lebah, dan produk-produk lebah lainnya.
7. Serat alami seperti kapas hutan atau serat tumbuhan lainnya yang digunakan dalam kerajinan atau industri tekstil.
8. Kayu Aromatik yang memiliki aroma khas dan digunakan dalam produksi minyak atsiri atau parfum.
9. Tumbuhan Hias yang diambil dari hutan untuk tujuan dekoratif atau hortikultura.
10. Hasil Ternak seperti daging burung hutan, telur burung hutan, dan produk ternak lainnya yang dihasilkan dari hewan yang tinggal di hutan.

Informasi HHBK sangat penting untuk untuk mendapatkan data yang akurat melalui interview dari masyarakat. Keberagaman informasi menjadikan komoditas HHBK memberikan nilai yang positif untuk basis data sehingga inventarisasi yang masif perlu dilakukan. Kondisi seperti ini memberikan peluang kepada wilayah tertentu untuk menjaga kestabilan produk hasil hutan bukan kayu agar tetap berproduksi. Komoditas yang di hasilkan sebagian besar dihasilkan dari hutan alam, dan beberapa dihasilkan dari penangkaran atau budi daya. Lokasi sangat mempengaruhi usaha budidaya, masalah aksesibilitas menjadi faktor

penting dari aktivitas kelompok tani sehingga berpotensi menurunkan hasil produksi. Kawasan hutan sangat mempengaruhi status kepemilikan dan faktor pemicu adanya konflik dari pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti masyarakat adat karena kepemilikan hutan bersifat komunal.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) didorong oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan, seperti kebijakan multi-bisnis kehutanan dan perhutanan sosial. Selain memberikan manfaat ekonomi langsung melalui penghasilan dan pekerjaan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) juga dapat memberikan layanan perlindungan sosial informal bagi masyarakat yang bergantung padanya (Latifah et al., 2020). Dengan demikian, HHBK tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga berperan dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, melindungi mereka dari kerugian ekonomi dan memberikan perlindungan sosial informal. Adapun peran HHBK memberikan kontribusi terhadap Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) meningkat secara ekonomi. Dilaporkan bahwa kontribusi HHBK terhadap PSDH meningkat signifikan dari tahun 2018 hingga 2022, dengan kontribusi sebesar Rp10.904.813.462 pada tahun 2018 dan Rp46.085.291.575 pada tahun 2022 (PHL. 2023) (**Gambar 15.1**).

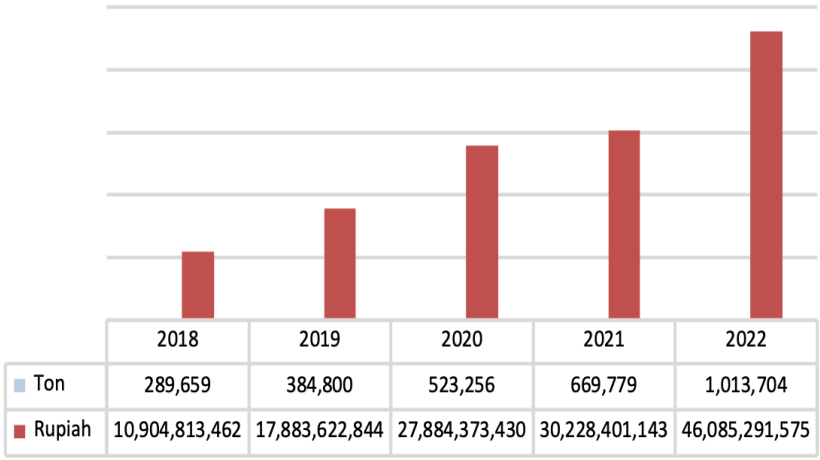

	2018	2019	2020	2021	2022
Ton	289,659	384,800	523,256	669,779	1,013,704
Rupiah	10,904,813,462	17,883,622,844	27,884,373,430	30,228,401,143	46,085,291,575

Gambar 15.1. Produksi HHBK dan Provisi Sumber Daya Hutan 2018-2022
(Sumber: Ditjen PHL, KLHK. 2023 *dalam* Nurprabowo & Rahayu, 2023)

Permen LHK No 77/2019 (2019 dan UU Cipta Kerja (2020) beserta peraturan turunannya, seperti PP No. 23 tahun 2021 (2021), memainkan peran penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan dan pemanfaatan HHBK. Dengan adanya regulasi yang jelas dan kuat seperti ini, pengelolaan HHBK dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan memungkinkan kegiatan multi usaha kehutanan, pemanfaatan potensi HHBK dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor kehutanan Indonesia secara keseluruhan. Pengembangan HHBK juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan, dengan menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, fokus pada pemanfaatan HHBK juga dapat membantu dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta mempromosikan praktik kehutanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan dan pemanfaatan HHBK di Indonesia tidak hanya memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan secara luas. Menurut produksi dan kontribusi terhadap Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama lima tahun terakhir 2018–2022, terdapat empat kelompok HHBK dengan produksi tertinggi. Produksi tertinggi berasal dari getah kayu hutan, buah dan umbi, biji-bijan, daun-daunan, dan akar-akaran (**Gambar 15.2**).

Terdapat beberapa jenis HHBK yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Indonesia selama periode lima tahun mulai 2018 sampai 2022 yaitu empat kelompok HHBK diantaranya adalah:

1. Getah Kayu Hutan merupakan salah satu HHBK yang penting karena digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri karet, damar dan produk-produk karet lainnya. Produksi getah kayu hutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PSDH melalui ekspor dan penggunaan domestik.
2. Buah dan Umbi merupakan sumber pangan dan bahan baku penting bagi masyarakat. Produksi buah-buahan dan umbi-umbian yang tinggi akan memberikan kontribusi besar terhadap PSDH serta memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

3. Biji-bijian seperti kacang-kacangan dan biji-bijian lainnya, juga merupakan sumber pangan penting. Produksi biji-bijian yang tinggi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PSDH dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
4. Daun-daunan dan Akar-akaran dari berbagai tumbuhan hutan sering digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan obat tradisional. Produksi daun-daunan dan akar-akaran yang tinggi akan memberikan kontribusi terhadap PSDH serta memfasilitasi industri-industri yang mengandalkan bahan baku alami.

Dengan memperhatikan kontribusi berbagai kelompok HHBK ini, penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan HHBK yang optimal tanpa merusak ekosistem hutan dan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan industri-industri yang mengandalkan HHBK juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produksi dan penggunaan bahan baku alami ini.

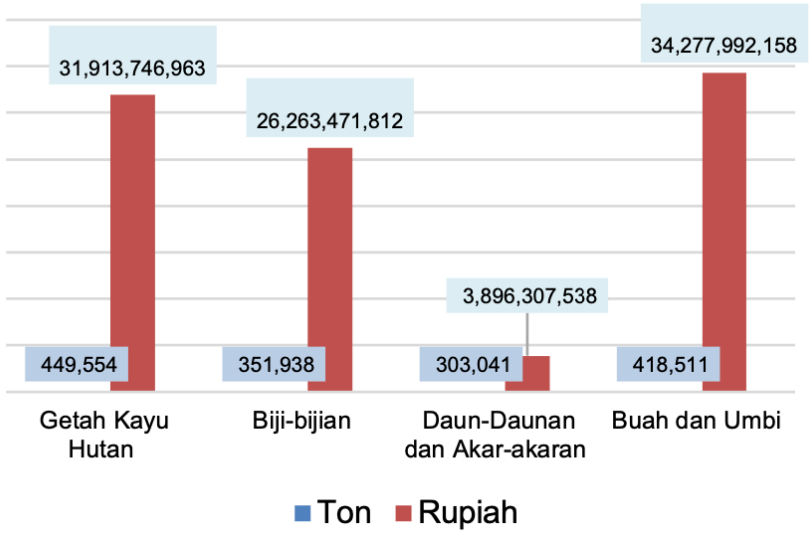

Gambar 15.2 Produksi HHBK berdasarkan pengelompokan jenis (2018-2022)
(Sumber: Ditjen PHL, KLHK. 2023 *dalam* Nurprabowo & Rahayu, 2023)

Data menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran penting dalam sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Indonesia, terutama dalam menghasilkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tinggi. BUMN memiliki keunggulan dalam hal kapasitas finansial, akses ke pasar, infrastruktur, dan sumber daya alam, yang semuanya mendukung investasi dan pengembangan produk HHBK. (**Gambar 15.3**). Beberapa poin penting terkait peran BUMN dalam industri HHBK di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. BUMN memiliki pangsa pasar yang besar dalam industri HHBK di Indonesia. Mereka memiliki kapasitas untuk memproduksi, memproses, dan memasarkan berbagai produk HHBK, termasuk getah kayu hutan, biji-bijian, rempah-rempah, dan produk herbal lainnya.
2. BUMN memiliki sumber daya finansial yang kuat untuk melakukan investasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas produk HHBK. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan fasilitas pengolahan modern, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang memadai.
3. BUMN memiliki akses yang luas ke sumber daya alam, termasuk hutan di Indonesia, yang merupakan bahan baku utama untuk produk HHBK. Ini memberikan keunggulan kompetitif dalam memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas untuk produk-produk mereka.

Dengan demikian, BUMN memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam pengembangan industri HHBK di Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan yang dimiliki, BUMN dapat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan nilai tambah sektor HHBK, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

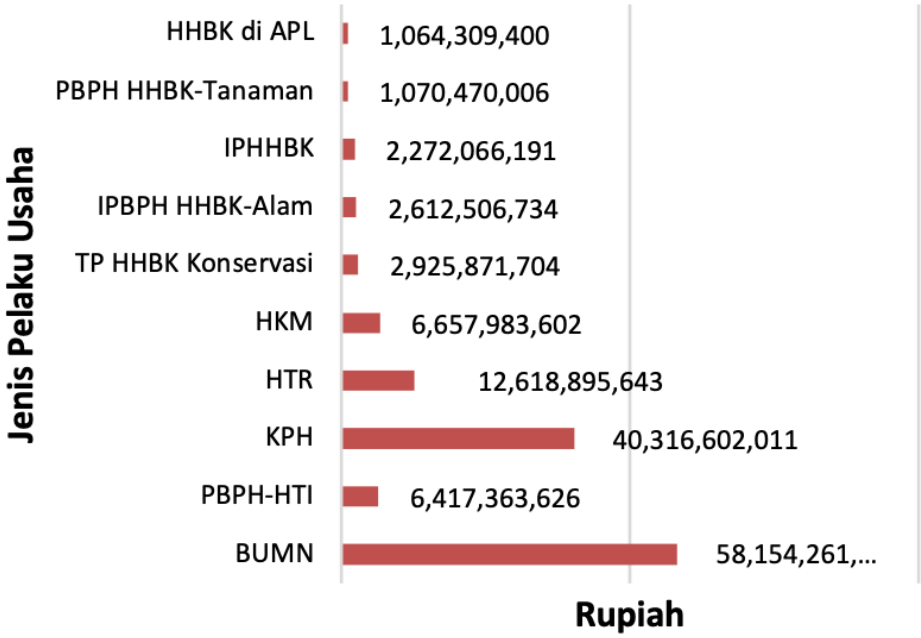

Gambar 15.3 Pelaku usaha HHBK berdasarkan PSDH tertinggi (Sumber: Ditjen PHL, KLHK. 2023 *dalam* Nurprabowo & Rahayu, 2023)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di tingkat kawasan hutan. KPH seringkali menjadi pelaku utama dalam pengelolaan HHBK, mengingat peran mereka dalam mengelola kawasan hutan yang kaya akan sumber daya non-kayu. Namun, seperti yang dikatakan oleh Michon (2005) dalam Nurprabowo *et, al*. (2023) pengembangan HHBK sering kali merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memecahkan masalah keberlanjutan dan ekonomi pengelolaan sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan HHBK harus diperhatikan secara holistik dan tidak terpisah dari upaya lebih besar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting bagi KPH dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pengelolaan HHBK dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan

demikian, pengembangan HHBK dapat memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, menurut Rostiwati (2006) *dalam* Nurprabowo *et, al.* (2023), ketika produk-produk HHBK menjadi komoditi perdagangan, masalah HHBK mulai muncul. Beberapa tantangan yang masih ditemukan dengan HHBK yaitu rendahnya pengunaan teknologi di bidang silvikultur dan budidaya, satu sisi produk dari hasil hutan mengalami menurun, dan hampir mendekati punah,ditambah luas hutan yang mengalami penurunan karena penebangan liar, kebakaran, dan perubahan fungsi hutan. Tantangan sosial ekonomi dan kebijakan termasuk kewenangan khusus untuk mengolah produk HHBK yang belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara *stakeholders* harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengembangan HHBK.

15.2 Pemanfaatan HHBK

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sangat strategis dan komparatif sebagai salah satu sumber daya hutan karena secara langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar hutan (Kartila dkk, 2018). HHBK juga dapat dianggap sebagai komponen ekosistem yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan alam. Sekarang telah diketahui bahwa HHBK mampu meningkatkan penghasilan masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tanaman yang sering digunakan dan di pasarkan adalah banmbu, gaharu, cendana, sagu, rotan, bambu, aren, tumbuhan tanaman obat, dan beberapa tanaman buah-buahan.

Agar berbagai jenis HHBK tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya, komunitas yang mengelolanya tentu memiliki pengetahuan, keterampilan modal, dan tenaga kerja (Epanda, *et.al.* 2020). Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan tentunya tidak terlepas dari HHBK. Banyak hasil yang diperoleh dan pemanfaatan HHBK, antara lain digunakan sebagai sandang, pangan, papan, obat-obatan, serat, energi, dan artefak budaya, sehingga masyarakat bergantung pada satu atau lebih HHBK untuk hidup. Tingkat ketergantungan HHBK berbeda-beda di seluruh negara (Puji Nugroho dan Octavia, 2020). Karena HHBK hanya

membutuhkan modal kecil hingga menengah, sebagian besar masyarakat mengelola dan memanfaatkannya. Faktanya, penggunaan HHBK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pendapatan yang diperoleh (Insusanty et al., 2017).

HHBK dapat dimanfaatkan oleh masyarkat untuk memperoleh sumber mata pencaharian tanpa melakukan pengrusakan hutan. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menanam berbagai jenis tanaman perkebunan dan buah-buahan. Berbagai jenis HHBK akan dihasilkan dengan penggunaan HHBK yang lebih baik, yang berarti lebih banyak produk yang dipasarkan (Indrasari et al., 2017). Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan telah lama mengembangkan dan mengkonsumsi beberapa produk HHBK. Bahkan ada komunitas yang menggunakan HHBK sebagai sumber pendapatan utama mereka sebagai mata pencaharian bagi penduduk miskin di pedesaan (Andika, 2021).

Dengan demikian, Hasil Hutan Bukan Kayu menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal sekitar hutan. Pola agroforestry yang digunakan dengan memanfaatkan ladang sebagai lingkungan pendukung untuk proses pertumbuhan pepohonan, adalah cara lain bagi masyarakat untuk memanfaatkan HHBK (Iqbal *et al*, 2018). Karena potensi besar HHBK, pemanfaatan HHBK diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khusunya yang tinggal di sekitar hutan (Tikkanen, *et al*, 2020).

15.3 Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil hutan bukan kayu merupakan kekayaan hutan Indonesia yang cukup melimpah. HHBK dapat diperolah di lahan milik atau hutan rakyat, atau di luar kawasan hutan. Berbagai karakteristik HHBK mulai dari produksi sampai potensi sumber daya, mendorong pengembangan secara ekonomi dan secara morfologis berpotensi menjadi hambatan, namun membuka peluang pengembangan, tetapi terbatas. Selain itu, karakteristik ini menimbulkan ancaman terhadap sumber daya dan usaha komoditas HHBK yang terkait. Yang perlu diperhatikan dalam membangun strategi pengembangan adalah melihat ciri morfologis yang

unik dari sistem tersebut. Beberapa komoditas yang diusahakan dalam skala kecil menengah, seperti walet, rotan, pinus, kayu putih, arwana, dan kayu putih, namun komoditas lainnya masih sangat terbatas.

Permen LHK No. P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 memberikan ruang bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti BUMD, koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, dan BUMSI. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk memaksimalkan SDH dengan basis usaha lokal. KPH juga mengambil peran dalam pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal di wilayah KPH, dengan menerapkan strategi multibisnis, multikomoditas, dan multistakeholder untuk mendorong percepatan kemandirian KPH. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menekankan pentingnya pengembangan HHBK sebagai spririt pembangunan nasional dan modal bagi wilayah provinsi. Beberapa arahan yang disampaikan termasuk pemetaan potensi HHBK, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan sumber bahan baku. Klasterisasi industri bertujuan melakukan pengembangan industri hilir yang mengacu pada potensi bahan baku. Hal ini meliputi pengaturan peredaran atau rantai pasok HHBK yang dapat menjamin stabilitas harga dari masyarakat hingga industri pengolahan, serta pembentukan sentra HHBK unggulan untuk mempermudah investasi.

Diperlukan insentif kebijakan fiskal dan pengemasan berkualitas untuk mendukung daya saing produk HHBK dalam pasar domestik dan internasional sehingga menciptakan HHBK skala industri agar harganya menjadi lebih terjangkau. Regulasi ini menandai komitmen pemerintah Indonesia dalam mengelola HHBK secara berkelanjutan dan memanfaatkannya sebagai sumber daya yang bernilai baik untuk perekonomian maupun lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan regulasi ini akan membawa manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

15.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan HHBK

Prioritas utama dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan HHBK, hal tersebut tertuang dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011–2030 (KLHK, 2019a). Selain itu, KLHK dalam Rencana Strategisnya tahun 2020–2024 menargetkan peningkatan produksi HHBK setiap tahunnya. Kemudian dari itu, untuk mencapai target produksi pada tahun 2024 banyak faktor yang harus dipersiapkan. Tujuan produksi komoditas HHBK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha HHBK.Target yg akan dicapai pada akhir tahun 2024 sebesar 150.000 ton dari semua komoditas HHBK, dan total jumlah usaha pada akhir tahun 2024 akan mencapai 30 unit usaha (KLHK, 2019b). Beberapa faktor harus dipertimbangkan saat mengembangkan komoditas HHBK; ini termasuk pasar, kestabilan harga, teknologi pengolahan, teknik pemanenan, dan kestabilan pasokan bahan baku.

Potensi tegakan beberapa produk HHBK tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar merupakan tegakan alami seperti tumbuhan obat akar kuning, kemenyan, keruing, kapur, dan sebagainya. Pemanenan atau pemungutan dari alam menghasilkan tingkat produksi yang lebih rendah dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan produksi. Pemungutan langsung dari hutan juga biasanya mengabaikan kelestarian lingkungan. Tidak banyak komoditas HHBK yang telah dipraktikkan oleh masyarakat petani dan berasal dari hasil budidaya. Jenis hasil budidaya yang sudah dikembangkan biasanya mudah dijual dan bernilai ekonomi (Tata et al., 2019). HHBK menjadi prioritas dalam pengembangan dan pengelolaan tanaman diharapkan bahwa aktivitas budidaya akan membantu dalam peningkatan stabilitas dan ketersediaan bahan baku untuk pengolahan selanjutnya di industri, baik dalam skala industry maupun. Produksi HHBK akan meningkat jika kualitas dan kuantitas bahan baku dijaga. Selain itu untuk memperhatikan prinsip kelestarian hasil dalam pemanenan harus diperhatikan ketersediaan bahan baku sepanjang daur sehingga pengolahan hasil menjadi yang ramah lingkungan. Penyediaan bahan baku menjadi tantangan untuk mendapatkan benih dan bibit unggul yang dihasilkan dari riset pemuliaan yang memilki produk berkualitas tinggi. Teknik rekayasa

genetik melalui kultur jaringan dan stek pucuk yang dilakukan secara vegetative diperlukan dalam jumlah yang besar. Penggunaan teknik silvikultur yang tepat akan meningkatkan Produktivitas lahan dan produksi HHBK. Misalnya, pemupukan yang tepat akan meningkatkan produktivitas.

Teknologi proses pengolahan masyarakat petani masih menjadi masalah bagi sektor hilir. Bahan baku tidak memiliki nilai tambah dan bernilai sangat rendah di rantai pasar. Produk akhir, atau barang setengah jadi, masih memiliki nilai jual yang lebih rendah, sehingga diperlukan kolaborasi antara masyarakat dengan sektor industri, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan secara langsung bahan baku yang diproduksi oleh petani dengan memenuhi kriteria tertentu dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dengan memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan maka bahan baku industry harus diperhatikan. Beberapa contoh HHBK yang dihasilkan dari perkebunan karet rakyat yaitu getah karet yang dikelola dengan baik dan bekerja sama dengan perusahaan ban multinasional di Sumatera Utara memiliki nilai jual yang tinggi setelah perusahaan memberikan umpan balik tentang kualitas karet lembaran (slab) (Kennedy et al., 2017; Leimona et al., 2018).

Pembangunan pasar, harga yang transparan, dan tata niaga yang jelas mendukung pengembangan HHBK. Pemerintah seharusnya menyediakan dan meperhatikan proses usaha dan pemungutan HHBK dan HBK yang dihasilkan dari luar kawasan hutan sehingga ketersedian produk dipasar dapat dikontrol. Selain tata niaga yang baik sulit untuk menyediakan regulasi tata usaha yang mudah untuk mekanisme perijinan yang cepat dan mudah. Regulasi dan tat usaha dari HHBK yang dipungut dari kawasan hutan harus di bedakan dengan produk HBK yang diproduksi dari lahan hak (Tata et al., 2015; Tata & Susmianto, 2016), sehingga kompetisi dapat bersaing dengan produk perkebunan. Prinsip dari undang-undang dasar (UUD) adalah keadilan yang mengharuskan penggunaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tetapi penggunaan tersebut harus dilakukan dengan prinsip keadilan agar dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan HHBK melalui skema perhutanan sosial.

Teknologi yang ramah lingkungan digunakan dalam pengelolaan HHBK yang berkelanjutan untuk mengimbangi produksi dan konsumsi. Karena memiliki banyak manfaat, komoditas HHBK dianggap multifungsi. Ekonomi sirkular adalah alternatif ekonomi tradisional yang bertindak secara linear. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan sumber daya HBK dan HHBK selama mungkin dan memungkinkan material produk diolah kembali dengan prinsip reuse dan recycle untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi limbah2. Teknologi pengolahan limbah atau hasil buangan telah tersedia. Pengendalian dari hulu ke hilir HBK dan HHBK sejalan dengan ekonomi sirkular. Untuk mengurangi limbah, produk HBK dan HHBK seperti kayu putih, kapur, kemenyan Toba, bambu, sutera, murbei, dan kayu putih dapat diolah kembali. Teknologi arang terpadu (TAT) diciptakan oleh peneliti dari Badan Litbang dan Inovasi KLHK dan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan produksi tanaman. Pemanfaatan limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Teknologi ini telah digunakan oleh masyarakat dan kelompok tani di banyak tempat di Indonesia.

Diversifikasi produk HHBK diperoleh dari berbagai teknologi yang diterapkan oleh peneliti, yang didokumentasikan dalam buku ini. Masyarakat harus meyesuaikan kondisi global dalam hal diversifikasi produk HBK dan HHBK. Dalam pengembangan HHBK para petani atau pelaku usaha harus menyesuaikan dengan program pembangunan ekonomi hijau yang rendah emisi untuk mencari modal usaha dalam pengembangan HHBK. Untuk pelaku usaha HHBK dari budidaya hingga proses pengolahan produk, penyediaan skema insentif, seperti harga premium untuk produk berkualias tinggi, organik, dan ramah lingkungan, atau skema insentif "pembayaran jasa ekosistem" akan menjadi daya tarik sehingga memberikan informasi tentang bagaimana pengembangan HHBK dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG.

15.5 Prioritas pada Pengembangan HHBK

Dengan mempertimbangkan berbagai HHBK yang sudah ada, sebagaimana dijelaskan dalam P.35/Menhut-II/2007 (2007),

pengembangan HHBK harus diprioritaskan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, Permenhut No. P.21/Menhut-II/2009 (2009) tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan sebagai prioritas yang cukup potensial dalam pengelolaan yang berbasis kemasyarakatan dan menawarkan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai ekonomi yang tinggi dari HHBK tidak serta merta membuatnya dapat dikembangkan dengan baik tanpa didukung oleh empat aspek lainnya.

Seringkali, pengembangan HHBK terhambat oleh penguasaan teknologi yang masih rendah, yang menyebabkan persaingan. Identifikasi HHBK unggulan dimulai dengan penyelarasan kelima komponen yang ada. Pengembangan HHBK dapat berjalan dengan baik, terarah, dan berkelanjutan jika jenis komoditas HHBK yang unggul tersedia. Sebagaimana dinyatakan dalam Permenhut No. P.21/Menhut-II/2009 (2009), jenis tanaman penghasil HHBK unggulan dipilih berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan. Setiap kabupaten atau kota menetapkan jenis HHBK unggulan. Jenis tanaman ini diprioritaskan untuk dikembangkan dari segi budidaya, pemanfaatan, pengolahan, dan pemasaran, sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan untuk daerah tersebut. Unggulan nasional, provinsi, dan lokal adalah tiga kategori unggulan HHBK. Pengembangan HHBK unggulan nasional menjadi prioritas untuk dikembangkan secara nasional dengan memperhatikan kriteria, indikator, standar pembobotan penilaian pada sentra wilayah pengembangan dengan sebaran yang potensial.

15.6 Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu

Ketersediaan komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memiliki dampak yang signifikan dalam menunjang perekonomian, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya hutan. Manfaat dan nilai ekonomi dari HHBK sangat beragam, dan pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya

hutan tersebut. Keseluruhan, ketersediaan komoditas HHBK berperan penting dalam menggerakkan perekonomian lokal, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola HHBK secara bijaksana dan berkelanjutan guna memaksimalkan manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat. HHBK memberikan peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran produk HHBK. Pendapatan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. HHBK memungkinkan diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko ekonomi karena tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha atau sumber pendapatan.

Ketersediaan HHBK memungkinkan pengembangan industri lokal di sekitar hutan. Industri-industri seperti pengolahan makanan, kosmetik, obat-obatan herbal, dan kerajinan tangan dapat berkembang karena adanya bahan baku. HHBK yang berkualitas dapat meningkatkan akses pasar bagi komunitas lokal. Dengan memperluas pasar, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan volume penjualan dan pendapatan mereka. Komoditas HHBK, seperti tanaman hias, madu hutan, dan berbagai produk alami, juga dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata berbasis alam. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja tambahan dan mendatangkan pendapatan dari sektor pariwisata. Pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan dapat mendorong praktik-praktik konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya mendukung perekonomian jangka panjang.

Jenis komoditas HHBK kelompok hasil tumbuhan dan tanaman meliputi: 1. Kelompok resin, seperti: kopal manila, damar batu, seedlak kesambi, gondorukem, kapur barus; 2. Kelompok minyak atsiri, seperti: minyak cendana, minyak gaharu, minyak akar wangi, minyak kayu putih, minyak masohi; 3. Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan, seperti: minyak kemiri, minyak balam, minyak tengkawang, gula aren, tepung sagu, jamur, buah asam jawa, buah matoa; 4. Kelompok tanin, bahan pewarna dan getah, seperti: tannin akasia, tannin pilang,

tannin gambir, pewarna angsana, pewarna merah dari secang; 5. Kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias, seperti: ekstrak buah adhas, ekstrak akar awar-awar, ekstrak buah merah, tanaman kantong semar, tanaman anggrek hutan, tanaman cemara irian; 6. Kelompok palma dan bambu, seperti: rotan, bambu apus, lontar; 7. Kelompok alkaloid seperti: ekstrak pepagan kina; 8. Kelompok lainnya seperti: biji genitri, daun nipah, bahan anyaman purun dan pandan. Jenis komoditas HHBK kelompok hasil hewan meliputi 1. Hewan buru (misalnya, babi hutan dan rusa); 2. Hewan penangkaran (misalnya, arwana Irian, kulit buaya, kupu-kupu, dan kulit rusa; dan 3. Hasil hewan (misalnya, madu, ulat sutra, sarang burung wallet, dll.) adalah kelompok komoditas hewan yang diklasifikasikan oleh HHBK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2009 (2009) tentang kriteria dan indikator penetapan hasil hutan bukan kayu unggulan, komoditas HHBK unggulan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: unggulan nasional, provinsi, dan lokal. Ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial, dan teknologi adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan komoditas HHBK unggulan. Masing-masing kriteria memiliki indikator dan standar yang akan dinilai dengan skoring. Semakin tinggi nilai skor, semakin besar kemungkinan komoditas tersebut akan menjadi komoditas HHBK unggulan. Buah Nyamplung, Rotan, Bambu, Sutera Alam, Lebah Madu, Gaharu, dan Rotan adalah enam jenis HHBK unggulan nasional yang ditetapkan oleh peraturan menteri. Namun, berdasarkan hasil skoring, masing-masing provinsi dan daerah diberi kebebasan untuk menetapkan komoditas HHBK unggulan mereka sendiri. Masing-masing komoditas HHBK, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kotamadya, unik atau hanya ada di daerah tersebut. Contohnya adalah pala hanya ada di Maluku dan Maluku Utara.

15.7 Multi Usaha Kehutanan

Pemasaran adalah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen dan usaha tani yang dapat mempengaruhi pendapatan produsen. Pemasaran adalah komponen produksi, dan pemasaran yang efektif akan mempengaruhi produksi. Hal ini harus diperhatikan selama

proses transaksi agar produsen puas, yang mengarah pada peningkatan sistem pemasaran (Nurdin, *et al,* 2021). Mitra sangat memperhatikan distribusi dan pemasaran. Permaslahan yang dijumpai mitra adalah tidak memiliki jaringan distribusi yang baik sehingga seringkali menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk dengan baik, sehingga berpotensi mengalami keterlambatan dalam pengelolaan hasil produk. Sehingga diperlukan variasi dan ketersediaan pasar dalam melakukan tata niaga sehingga memperkecil persaingan dalam proses pemasaran. Persaingan yang tinggi dalam proses pemasaran dapat mempengaruhi keuntungan bisnis bagi mitra. Untuk mengatasi masalah ini, mitra harus bekerja sama dengan baik, transformasi pengalaman dan pengetahuan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan produk dan proses produksi. Selain itu, Mitra harus menyesuaikan diri dengan dinamikas pasar dan melihat kesempatan untuk menambah ekspansi pemasaran (Nurdin et al., 2023).

Undang-undang Cipta Kerja ini mengubah cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara signifikan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memudahkan pelaku usaha, terutama masyarakat, untuk mendapatkan perizinan berusaha dan persetujuan perhutanan sosial, sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan investasi disektor kehutanan yang mempertahankan daya dukung lingkungan hidup yang diberikan. Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang harus menyertai multi usaha kehutanan yang diberikan.

Dengan bertambahnya jumlah usaha kehutanan yang terlibat dalam pengelolaan hutan, pentingnya bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, termasuk konektivitas hulu, hilir, dan pasar, semakin diperkuat. Perubahan dalam pengelolaan sektor hulu meliputi pengelolaan hutan oleh kesatuan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu Perizinan berusaha UU Nomor 11 Tahun 2020 (2020) (diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 (2022) tanggal 30 Desember 2022) diharapkan dapat meningkatkan usaha kehutanan selama pemulihan ekonomi negara dari Pandemi Covid-19 dan persiapan untuk resesi ekonomi global yang diantisipasi pada tahun 2023.

Paradigma pengelolaan hutan telah berubah dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multi usaha kehutanan. UU Cipta Kerja, dalam upaya untuk menyederhanakan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, harus didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur. Sebagai Unit Kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH) menggunakan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renja Ditjen PHL Tahun 2023 untuk menyusun rencana kerja. Renja Direktorat BUPH Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat BUPH dan UPT Ditjen PHL (BPHL).

15.8 Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pokok-pokok kebijakan PNBP Tahun 2023 menunjukkan beberapa upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan negara dari sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Berikut adalah ringkasan dari pokok-pokok kebijakan tersebut:

1. Perbaikan Regulasi**,** melalui penyesuaian dan penyederhanaan regulasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektifitas dana efisiensi pengelolaan sumber daya alam serta memperbaiki tata kelola sektor tersebut.

2. Optimalisasi Produksi dan Perbaikan Harga, langkah-langkah untuk meningkatkan produksi dan harga PNBP melalui diversifikasi jenis dan intensifikasi tarif PNBP untuk menyesuaikan patokan harga dan perkembangan pasar, serta peningkatan produktivitas hutan alam dan hasil hutan bukan kayu.

3. Perbaikan Administrasi dan Penguatan Kerjasama, langkah-langkah ini mencakup pembebasan layanan dokumen untuk perhutanan sosial (PS), penyederhanaan tata kelola sistem layanan, peningkatan penagihan dan pengawasan terhadap wajib bayar, peningkatan

kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara online terintegrasi dengan SIMPONI, kapasitas sumber daya manusia harus ditingkatkan, dan peningkatan penatausahaan PNBP berbasis online.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pendapatan dari sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi kebijakan ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor LHK.

15.9 Kelembagaan HHBK

Dukungan kelembagaan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu sangat perlu diperhatikan. Pemikiran bahwa pembangunan kelembagaan yang tidak efektif memerlukan sumber daya manusia yang kuat untuk mendukung proses seperti perbaikan infrastruktur, manajemen dan sebagainya. Fokus pembangunan kelembagaan lebih ditekankan pada manajemen sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit produksi. Untuk mencapai kondisi optimal, kegiatan kelembagaan mencakup tiga fase, yaitu menyediakan input, mengubah input menjadi produk melalui upaya tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga. Kegiatan pertanian atau kehutanan membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal, yang meliputi unit usaha dan kelembagaan (Umaternate, *et al*, 2023).

Kelompok Tani Hutan menjadi pelaku utama pembangunan kehutanan di tingkat tapak, selain menjadi bagian dari masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, KTH adalah kelompok petani atau individu warga negara Indonesia dan keluarganya yang mengelola usaha kehutanan di dalam dan di luar kawaasan hutan, yang mencakup hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta lingkungan di hulu dan hilir (Rimbawati et al., 2018).

Bagi setiap petani hutan, terbentuknya kelembagaan Kelompok Tani Hutan sangat penting. Manfaat kelompok termasuk pengolahan lahan yang terencana, kerja sama antar sesama petani, dan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, manfaat berusaha tani memungkinkan pertukaran pengalaman berusaha tani, keterampilan kerja dalam pertanian, dan peningkatan modal usahatani (Nikoyan et al., 2020).

Daftar Pustaka

Andika, S. (2021). Analisis pendapatan petani hasil hutan bukan kayu (hhbk) mitra kphp limau unit vii hulu kabupaten sarolangun (Doctoral dissertation, Universitas Jambi)

Epanda, M. A., Donkeng, R. T., Nonga, F. N., Frynta, D., Adi, N. N., Willie, J., dan Speelman, S. (2020) „Contribution of non-timber forest product valorisation to the livelihood assets of local people in the northern periphery of the Dja Faunal Reserve, East Cameroon", Forests, 11(9).

FAO & EFI (2018). Making forest concessions in the tropics work to achieve the 2030 agenda: Voluntary guidelines. Rome: FAO Forestry Paper No. 180. 128p.

Hazari, S., Kalita, M., & Lahiri, B. (2023). The Value of Non-Timber Forest Products (NTFPs) in Promoting India's Rural Livelihoods. *Indonesian Journal of Forestry Research*, *10*(2), 221-237.

Indrasari, D., Wulandari, C. dan Bintoro, A. (2017) „Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Kelompok Sadar Hutan Lestari Wana Agung Di Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah", Jurnal Sylva Lestari, 5(1), pp. 81–91.

Insusanty, E., Ratnaningsih, A. T. dan Prastyaningsih, S. R. (2017) „Analisis Finansial Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Karet Dan Durian Di Kabupaten Siak", Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan, 12(2).

Iqbal M, Septina AD. 2018. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa 4(1):19-34.

Kartila, N., Ichsan, A. C. dan Markum (2018) „Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Kemiri (Aleurites Moluccana) Terhadap Pendapatan Petani Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangga Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara", Jurnal Belantara, 1(2), pp. 89–100

Kurniati, D., Hardjanto, H., & Trison, S. (2023). Marketing of non-timber forest products as products from the Protected Forest Management Unit Batutegi, Lampung, Indonesia. *Jurnal*

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management), *13*(4).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/ Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019b. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Jakarta.

Kennedy SF, Leimona B, Yi AF. 2016. Making a green rubber stamp:emerging dynamics of natural rubber eco-certification. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. 13(1):100-115. DOI:10.1080/21513732.2016.1267664

Leimona B, van Noordwijk M, Mithofer D, Cerutti P. 2018. Environmentallly and socially responsible global production and trade of timber and tree crop commodities: certification as a transient issue-attention cycle response to ecological and social issues. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*. 13(1): 497-502. DOI: 10.1080/21513732.2018.1469596

Michon, G., & Angelsen, A. (2005). *Domesticating forests: how farmers manage forest resources*. Center for International Forestry Research

Nikoyan A, Kasim S, Uslinawaty Z, Yani R. 2020. Peran dan Manfaat Kelembagaan Kelompok Tani Pelestari Hutan dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa. Perennial. 16(1): 34-39.

Nurdin, A. S., Nurhikmah, N., Irmayanti, L., Nurdin, I. N., & Nurdin, W. R. (2021, December). Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Dusun Bangko Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AGRIBISNIS* (Vol. 1, No. 1).

Nurdin, A. S., Hadun, R., Kamaluddin, A. K., Salatalohy, A., Kurniawan, A., Tamrin, M., Nurhikmah, N., Rosita, R., Ashari, R., Tamnge, F., Baguna, F.L & Irmayanti, L. (2023). Penyuluhan dan Pembagian Alat Produksi Kasbi Lempeng pada Kelompok Masyarakat di Desa Dodinga. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, *2*(1), 62-74.

Nurprabowo, A., Rahayu,S. (2023). Investasi Sektor Hilirisasi Hasil Sumber Daya Hutan. Kementerian Investasi/BKPM.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 19/Menhut-II/2009 Tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional. Jakarta: Kementerian Kehutanan Repbulik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Puji Nugroho, N. dan Octavia, D. (2020) „Inventarisasi Jenis Tanaman Penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu Di Hutan Nagari Paru, Sijunjung, Sumatera Barat", Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 17(1), pp. 21–33.

Rimbawati, D. E.M., Fatchiya, A., & Sugihen, B. G. 2018. Dinamika kelompok tani hutan agroforestry di Kabupaten Bandung. Jurnal Penyuluhan, 14(1): 92-103

Rostiwati, Tati. 2006. Silvikultur Tanaman Penghasil HHBK. Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor.

Suhendi, S., Nurdin, A. S., & Nurhikmah, N. (2023, December). Potensi dan Pemanfaatan Poon Aren (Arenga pinnata) di Desa Gulapapo Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERTANIAN* (Vol. 3, No. 2).

Tata HL, Susmianto A. 2016. Prospek Paludikultur Ekosistem Gambut Indonesia. FORDA Press. Bogor.

Tata HL, van Noordwijk M, Jasnari, Widayati A. 2015. Domestication of *Dyera polyphylla* (Miq.) Steenis in peatland agroforestry systems in

Jambi, Indonesia. Agroforestry System. DOI: 10.1007/s10457-015-9837-3.

Tata, HL. et al. (ed). (2019). Bunga Rampai Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Indonesia untuk medukung Sustainable Development Goals. IPB Press. Bogor.Indonesia

Tikkanen, J., Takala, T., Järvelä, M. L., Kurttila, M., & Vanhanen, H. (2020). Challenges and solutions for non-timber forest product businesses in Finland–an application of the SODA Analysis. *Forests*, *11*(7), 753.

Umaternate, R., Nurdin, A. S., & Baguna, F. L. (2023). Strategi Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Minyak Cengkeh Di Kelurahan Afe Taduma Kecamatan Pulau Ternate. *Jurnal Forest Island*, *1*(1).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *tentang* Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020. Tentang cipta kerja

BIODATA PENULIS

Muhammad Sajidin, S.Pd., M.Si lahir di Bogor pada tanggal 22 Januari 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ketahanan Nasional di Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia melalui Program Beasiswa Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015, Penulis bekerja sebagai Dosen PNS di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2022 sampai sekarang. Saat ini Penulis aktif mengikuti seminar dan aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Beberapa jurnal yang telah di publish yaitu tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa di Kabupaten Bogor, Analisis Gerakan Sosial Revolusi Melati Tunisia (2010), Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara, Strategi Budaya Maritim Suku Mandar Dalam Mendorong Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Pengaruh Budaya Populer Di Kalangan Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya Komunitas Etnik (Studi Tentang Korean Wave Di Komunitas Suku Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Nasionalisme Pada Generasi Muda Pedesaan di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Analisis Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Dr. Hamidin Rasulu, STP., MP dilahirkan di Desa Tikong, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Tahun 1979, merupakan lulusan Sarjana Program Stusi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya (UB) pada Tahun 2001, dan pada Tahun 2012 menyelesaikan studi Magister di Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, serta pada Tahun 2020 menyelesaikan program Doktor di Program Studi Ilmu Pertanian dengan minat Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Sebelas Maret (UNS). Memulai karir sebagai staf dosen pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fakultas Pertanian, Universitas Khairun (UNKHAIR). Sejak Tahun 2009-2010 mengemban amanah sebagai Kepala Laboratorium THP UNKHAIR, dan pada Tahun 2013-2015 diangkat sebagai Ketua Program Studi THP UNKHAIR. Selanjutnya pada Tahun 2021 ditunjuk sebagai ketua tim penyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) UNKHAIR. Didalam organisasi profesi terlibat sebagai Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) periode 2018-2022, serta menjadi wakil ketua PATPI Cabang Ternate Periode 2020-204. Beberapa Hibah Penelitian bekerjasama dengan Bank Indonesia Ternate yaitu Tahun 2015, 2018, 2021 dengan tema Survey Komoditas Produk Jenis Usaha Unggulan (KPJU) di Provinsi Maluku Utara. Penulis juga terlibat dalam tim pakar UNKHAIR bekerjasama BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara dengan judul Pemulihan Ekonomi Di Sektor Pertanian Terpadu Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, serta Tahun 2022 penelitian Pemetaan Potensi Pertanian, Perkebunan serta Pangan dan Peluang Investasi di Maluku Utara. Dan setiap Tahun juga memperoleh dana hibah penelitian dan pengabdian yang didanai oleh DIKTI dan UNKHAIR. Kemudian pada Tahun 2022 ini penulis mendapat tugas sebagai ketua unit bisnis Rumah Produksi Universitas Khairun yang memproduksi AMDK dengan merek Khairun Water sebagai salah satu cor bisnis BLU UNKHAIR. Sejak tahun 2022 dan 2023 penulis juga mendapatkan hibah bergensi skema KEDAIREKA Matching Fund Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Noor Fahmi Pramuji, S.IP., M.A, Penulis merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Khairun. Lulusan Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Uludag di Kota Bursa, Republik Turkiye. Selain sebagai tenaga pengajar, penulis juga aktif menulis isu-isu global, pariwisata berkelanjutan dan terlibat aktif dalam aktivitas pendampingan pengembangan prestasi mahasiswa hingga ke tingkat nasional.

Drs. La Parasit, M.Si lahir di Pulau Pendek pada tahun 1962. Saat ini bekerja sebagai Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau. Meluluskan Pendidikan Sarjana S1 Pada Program Studi Sosiologi FISIP UNIDAYAN tahun 1988, sedangkan untuk Pendidikan Magister S2 Pada Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar tahun 2010. Menjadi Dosen yang mengampu mata kuliah (1) Pengantar Ilmu Politik, (2) Sosiologi Politik, (3) Sosiologi Pemerintahan, (4) Pengantar Sosiologi, (5) Azas-Azas Manajemen. Menduduki Pangkat Akademik Lektor Kepala dengan Golongan IV.a. Pernah menduduki jabatan struktural sebagai (1) Kepala Tata Usaha FISIP UNIDAYAN, (2) Kepala Perpustakaan UNIDAYAN, (3) Kepala Bagian Perencanaan Biro Administrasi Akademik UNIDAYAN, (4) Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum UNIDAYAN, (5) Sekretaris Program Studi Sosiologi FISIP UNIDAYAN tahun 2007, (6) Wakil Dekan I FISIP UNIDAYAN Tahun 2015 – 2023, (7) Ketua penjaminan Mutu FISIP UNIDAYAN Tahun 2018- 2019.

Munir, adalah salah satu dosen di Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare. Lahir di Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan tanggal 7 juli 1970 Menyelesaikan pendidikan tinggi S1 Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar (1996), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) (2006) dan terakhir pada program doktor (S3) di Pascasarjana UNHAS pada program studi ilmu pertanian (2020), Penulis bergabung dengan beberapa asosiasi terkait keilmuan diantaranya Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) wilayah Sulawesi Selatan dan Ikatan Asesor Profesional Indonesia (IASPRO).

Aktivitas sehari hari menjadi dosen di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) sejak tahun 2001 dan mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya: adalah Nutrisi Ruminansia dan Non Ruminasia, Parasitologi dan Kesehatan Ternak, Ilmu Tilik Ternak, Ilmu Lingkungan Ternak, Bioteknologi ternak, Aneka Ternak dan Unggas. Selain mengajar dan membimbing mahasiswa Penulis aktif melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sejak sejak diangkat menjadi staf pengajar hingga sekarang. Penelitian yang dilakukan terfokus pada Nutrisi Pakan Ternak, dari kegiatan penelitian penulis berhasil mempublikasikan artikel baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terakreditasi bereputasi scopus serta prosiding internasional terindeks scopus, diantaranya: Prosiding Seminar Nasional 2018 Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Nasional) , The use illumina sequencing technique in studying the diversity of rumen bacteria of Bali Cattle fed on a ration consisted of rice straw and elephant grass (Internasional) dan juga mengikuti konferensi internasional sebagai oral speaker presenter yang diselenggarakan oleh The 2nd International Conference of Animal Science and technology 2019 (ICAST II 2019) Faculty of Animal Science Hasanuddin University “

Sustainable Animal Production and Welfare in the Tropical Environment" Kegiatan pengabdian banyak terkait dengan kerjasama dengan PEMDA Kota Parepare diantaranya dengan pelatihan dan penyuluhan peternak di kota Parepare dan terlibat dalam kerjasama penyusunan dokumen penelitian yang dilaksanakan Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan (PKP) kota Parepare, Pendamping pada program Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Tani Ternak dalam pemanfaatan limbah pertanian yang difermentasi dengan Aspergillus niger untuk ransum sapi Bali Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Beberapa buku juga telah disusun berjudul Obat Tradisional Jamu Ternak dan Buku Antologi berjudul Tantangan dan Strategi Analogi Pemikiran Dosen Aptisi Ajattapareng Mendorong PTS Tangguh (Buku Chapter). Selain kegitan tersebut saat ini diamanahkan sebagai ketua Senat Fakultas periode 2021-2024 dan anggota Tim Task Force pada Lembaga Penjaminan Mutu UMPAR.

Osu Oheoputra Husen, S.Pd, M.Si, lahir di Kendari pada tanggal 12 Oktober 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo (UHO) tahun 2012. Kemudian menyelesaikan Pendidikan magister pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Minat Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Halu Oleo tahun 2014. Penulis bekerja sebagai Dosen Aktif di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Lakidende Unaaha pada tahun 2017 sampai sekarang. Penulis aktif mengikuti seminar, aktif mempublikasi artikel penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional terindeksi scopus. Penulis aktif menulis buku dan memiliki hak paten sederhana. Penulis juga menjadi ahli lingkungan dalam penyusunan dokumen lingkungan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya. Selanjutnya penulis juga aktif menjadi anggota Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Tenggara.

Milla Naeruz, S.E., M.Si. Ketertarikan penulis terhadap ilmu perbankan dimulai pada tahun 2001 silam, dimana ketertarikan dimulai pada saat penulis mulai bekerja di dunia perbankan. Banyak bidang – bidang perbankan yang ingin penulis gali lagi. Hingga penulis menamatkan studi S1 dan S2 di prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Sekarang penulis merupakan dosen juga yang membawa mata kuliah perbankan. untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun melanjutkan studi S3 dengan prodi yang sama hingga sekarang. Selain itu penulis juga aktif meneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis didanai oleh internal perguruan tinggi. Dimana hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Email Penulis: milla.naeruz@gmail.com

Rini Nur, S.T., M.T. lahir di Ujung Pandang pada tanggal 13 Juli 1973. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Unhas) tahun 1998. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Teknik Elektro, Unhas tahun 2009. Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar pada Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) tahun 2009 - sekarang. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, PNUP pada Tahun 2017 - 2020. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Bengkel Komputer dan Jaringan sejak Tahun 2020. Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai Asesor Uji Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Politeknik Negeri Ujung Pandang sejak Tahun 2014 sampai sekarang.

Doddy Ismunandar Bahari dilahirkan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara pada Penulis pertama kali memasuki jenjang Perguruan Tinggi pada Tahun 2005 di Universitas Haluoleo, Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis, Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan kemudian lulus pada Tahun 2009 dengan predikat Pujian. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan studi ke jenjang Magister (S-2) pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Fakultas Peternakan Jurusan Ilmu Ternak Konsentrasi/Minat Agribisnis Peternakan, dengan menggunakan biaya sendiri. Penulis lulus dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya pada tahun 2012 dengan predikat Pujian. Pada tahun 2013, penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi Program Doktor (S-3) dengan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri Calon Dosen (BPPDN-CD) tahun anggaran 2013 dan lulus pada Tahun 2019.

Penulis memulai karier sebagai Dosen Kontrak Harian Lepas pada tahun 2010 pada unit kerja Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo dan berakhir saat penulis melanjutkan studi Magister (S-2). Setelah lulus studi Program Magister (S-2) penulis kembali dipercaya menjadi Dosen Kontrak Harian Lepas pada tahun 2012 pada unit kerja Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada tahun yang sama penulis juga bekerja sebagai Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kendari. Saat ini penulis Bekerja Sebagai Dosen Tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Program Studi Agribisnis Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Penulis merintis keilmuan pada Bidang Ilmu Agribisnis dengan Bidang Keahlian Operasional, Produksi, dan Pembangunan Sistem Agribisnis.

Dr. Ranno Marlany Rachman, ST., M.Kes Lahir di Wua-Wua, Pada Tanggal 9 Desember 1980. Menyelesaikan S1 Jurusan Teknik Lingkungan Di Institut Teknologi Yogyakarta, Tahun 2003, S2 Jurusan Kesehatan Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dan S3 Jurusan Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Tahun 2018. Aktivitas Saat ini adalah sebagai dosen tetap Program Studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari Sulawesi Tenggara. Penulis telah menghasilkan 8 buku chapter yaitu Buku Mitigasi Bencana, Buku Polusi dan Lingkungan, Buku Merayakan kemerdekaan (Refleksi Dosen dalam Membangun Generasi Penerus Bangsa), Buku Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Buku Revolusi Palstik dan Lingkungan, Buku Krisis Iklim Global Di Indonesia (Dampak dan Tantangan), Buku Beton Pracetak (Teknologi, Produksi dan Aplikasi), Buku Sosial Ekonomi Pertanian, Buku Kesuburan Tanah.

Nafia Ilhama Qurratu'aini, S.E., M.M. lahir di Kediri pada tanggal 15 Februari 1994. Penulis memulai pendidikan tingginya dengan mengikuti program Diploma 1 Akuntansi Perkantoran pada Politeknik Mandiri Utama dan melanjutkan pendidikan sarjana pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2016. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Magister Manajemen, Universitas Airlangga tahun 2020. Penulis bekerja di sebuah lembaga konsultan perbankan syariah bernama "Sharia Banking Institute" pada tahun 2012-2013. Kemudian selama 9 tahun bekerja di sebuah Yayasan dan Laznas Yatim Mandiri sebagai admin keuangan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo sejak tahun 2022-sekarang.

Dr. Ir. Muhammad Assagaf, M.Si lahir di Ternate Maluku Utara pada tanggal 30 Oktober 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon tahun 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Teknologi Pasca Panen Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2001 melalui Program Beasiswa Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Pendidikan Program Doktor selesai pada tahun 2013 di Program Studi Ilmu Pangan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogjakarta melalui Program Beasiswa Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Penulis bekerja sebagai ASN Peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT sampai dengan tahun 2005 dan selanjutnya bekerja di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara sampai dengan Tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2021 bekerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kendari dan sejak tahun 2021 sampai saat ini bekerja sebagai Periset di Pusat Riset Agroindustri Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia. Disamping itu penulis sejak tahun 2020 sampai saat ini sebagai Ketua Cabang Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan (PATPI) Ternate dan sebagai anggota pengurus PATPI pusat dan Sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah pada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Maluku Utara sejak Mei 2023 sampai saat ini. Penulis juga sebagai dosen luar biasa di Program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate dan Fakultas Pertanian dan Perikanan Program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate. Penulis aktif mengikuti seminar, webinar dan pertemuan ilmiah lainnya sebagai presenter dan narasumber, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis juga pernah sebagai reviewer pada jurnal nasional Agritech Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan Jurnal Agrikan Prodi Perikanan UMMU Ternate. Penulis aktif juga menulis seperti di koran, bulletin dan bagian buku bunga rampai.

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa lahir di Gelora (Jakarta Pusat) pada tanggal 18 November 1984. Menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2012. Mengenyam pendidikan Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2013 - 2020. Penulis bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau.

Telah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk artikel maupun buku, antara lain: [1] Artike berjudul *Pemikiran Soekarno Tentang Pemuda dan Perubahan Sosial* (2010), dipublikasikan pada Jurnal Akademika UNIDAYAN, Volume 7, Edisi September 2010; [2] Artikel berjudul *Strategi Nafkah Dan Pola Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Pengrajin Gula Kelapa Studi Di Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Jawa Barat* (2015), dipublikasikan pada Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume 3, Edisi 3; [3]. Artikel berjudul *The Order of the City Three Fortresses Adjacent to the Sultanate of Buton in the Local Culture-Based Hilly Landscape of Baubau City of Southeast Sulawesi* (2023), dipublikasikan pada Jurnal GMPI Conference Series, Volume 2, Edisi Januari 2023; [4] Artikel berjudul *Teori Diskursus dan Konseptualisasi Diskursus Lingkungan* (2023), dipublikasikan pada Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 8, Edisi Juni 2023; [5] Artikel berjudul *Analisis Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Indonesia dari Masa ke Masa (Periode 1971 – 2012)* (2023), dipublikasikan pada Jurnal Sosiologi Miabhari, Volume 1, Edisi 1; [6] Buku berjudul *Komunikasi Sosial Pembangunan Terpadu* (2023), dipublikasikan oleh Tohar Media.

Muhammad Jurhadi Kadir, lahir di Sidenreng Rappang, anak Sulung dari lima bersaudara, buah pasangan dari Drs. H. Abdul Kadir R. M.Pd (Almarhum) dengan Hj. Badara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Peternakan (S_1) Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak pada tahun 2002 di Universitas Hasanuddin (Unhas). Pengalaman organisasi penulis yakni: sebagai Sekretaris Cabang Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Cab. Baranti (1994-1995), Pengurus HMPP (Himpunan Mahasiswa Profesi Peternakan UH (1997-1998), Pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Fakultas Peternakan (1998-1999). Pengurus HUMANIKA (Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak) (1998-1999), Wakil Ketua PERBAKIN Unhas (1999-2000), Pengurus IPMI (Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia) Sidrap tahun 2000-2001. Pengurus PalangMerah Kota Parepare (2023-sekarang). Aktif mengikuti Kejuaraan Menembak baik antar Mahasiswa, tingkat umum baik Daerah maupun tingkat Nasional. Penulis menyelesaikan Program Magister Pertanian Konsentrasi Peternakan (S_2) tahun 2009 di Program Pasca Sarjana (PPS) Unhas. Sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian Konsentrasi Peternakan (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2022). Beberapa judul buku telah diterbitkan antara lain: Bahan Pakan dan Penyusunan Formulasi Ransum (Buku Ajar, 2019), Tantangan dan Strategi "Analogi Pemikiran Dosen APTISI Ajattapareng Pendorong PTS Tangguh" (Chapter book, 2020), Humor Dikelas? Siapa Mau (Buku Antologi, 2021), Industri Pakan Ternak (Modul, 2022) dan Nutrisi Nonruminansia (Modul, 2022). Teknologi Briket Asal Kotoran Ternak dan Biomassa Organik Sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas (Buku Referensi, 2023). Penulis juga sebagai anggota IASPRO (Ikatan Asesor Profesional) tahun 2021-sekarang. Aktif sebagai Penulis, Peneliti dan Narasumber beberapa Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengalaman mengajar penulis yakni; sebagai staf pengajar di STKIP Muhammadiyah Bone (2007), sebagai staf pengajar luar biasa UIN Alauddin Makassar (2005-2017) dan sebagai staf pengajar luar biasa di Kementerian Pertanian STPP (Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian)

GOWA (20015-2018). Setelah beralih, saat ini penulis aktif mengajar sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Fapetrik) UM PAREPARE.

Dr. Andy Kurniawan, S.Hut.,M.Sc, Lahir pada tanggal 21 Mei 1984 di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Pendidikan Penulis mulai di Institut Pertanian STIPER Yogyakarta pada Tahun 2002 Fakultas Kehutanan (S.Hut) lulus tahun 2007, pada tahun 2005 penulis juga kuliah D1 di Fakultas Teknik Geodesi UGM jurusan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (A.P) lulus tahun 2006. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada pada Pascasarjana Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan (M.Sc) lulus Tahun 2010. Pada Tahun 2010 penulis mengikuti CPNS dan lulus di angkat sebagai PNS Dosen di Universitas Khairun Ternate Maluku Utara di Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan. Pada tahun 2017 Tugas Belajar Program Doktor (S3) pada Pascasarjana Ilmu Pertanian Minat Manajemen Hutan Berkelanjutan dan Ekowisata Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur Lulus tahun 2021. Sekarang aktif di kegiatan kampus berfokus pada penelitian Ekowisata di Pulau-Pulau Kecil dan aktif pada Yayasan Lingkungan Alam Pulau-Pulau Kecil serta CV Rimbarayaduasatu bergerak untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau-Pulau kecil serta kegiatan lingkungan terkait perubahan iklim, Flora dan Fauna serta Ekowisata.

Ir. Aqshan Shadikin Nurdin, S.P., M.Sc., IPM lahir di Bau bau, pada tanggal 13 Oktober 1982. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tahun 2005 dan Magister pada Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Saat ini Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Khairun Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan. Penulis aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional. Penulis juga aktif menulis di media massa yang bertema pendidikan. Selain itu penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, workshop dan riset, seperti Pelatihan Drone, Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pelatihan AMDAL, Pelatihan Hydrologic Modelling System HEC-HMS, Pelatihan Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Aspek Lingkungan pada Manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia (LSPHI), Pelatihan Paralegal Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Peneliti Riset Khusus Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat Berbasis Komunitas Di Indonesia, Workshop Asosiasi Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) Wilayah Papua dan Maluku Bekerjasama dengan Sekretariat Nasional Jejaring Kerja BP REDD+ dan berbagai kegiatan lainnya. Selain kegiatan pelatihan, penulis bergabung di wadah profesi dan organisasi lainnya lokal dan nasional seperti Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS) Maluku Utara, Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI), Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO), dan Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI).

Perekonomian Indonesia dalam Konteks Multisektor

Buku ini menggali berbagai aspek perekonomian Indonesia dengan menyorot peran dan tantangan dari berbagai sektor kunci, serta dampak dari faktor-faktor eksternal seperti pandemi, perubahan iklim, dan globalisasi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pangan nasional dan pendapatan masyarakat pedesaan. Di sisi lain, sektor pariwisata menghadapi tantangan serius akibat pandemi Covid-19, tetapi juga menawarkan peluang besar dalam memanfaatkan potensi pariwisata Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya.

Buku ini juga menyoroti peran sektor keuangan, e-commerce, pendidikan, dan kesehatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi masing-masing sektor. Selain itu, tantangan sektor transportasi, energi, dan sumber daya alam juga menjadi fokus buku ini, dengan penekanan pada perlunya kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada inovasi. Dengan memperhatikan sosiologi ekonomi dan hilirisasi hasil hutan non-kayu, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perekonomian Indonesia dalam konteks multisektor, serta menawarkan wawasan tentang arah kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Penerbit KAMIYA JAYA AQUATIC
Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
Maluku Utara
Telp. : 0812-2279-3284
Email : kamiyajayaaquatic@gmail.com
Website : https://kjaquatic.com/

ISBN 978-623-09-9327-5 (PDF)